

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
TAHUN 2017-2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih, menurut ketentuan pasal 261 ayat 4, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 merupakan potret dari janji politik Bupati Muna Barat terpilih Periode Pertama, **L.M. Rajiun Tumada**, dan Wakil Bupati Muna Barat, **Achmad Lamani**, pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan bersifat holistik dan terintegrasi yang dilihat dari keterpaduan kewilayahan, keterpaduan antar sektor pembangunan, dan keterpaduan antar *stake holder* melalui proses pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan koordinatif, pendekatan politik dan pendekatan *bottom up-top down*.

Pendekatan teknokratik bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah akademisi dalam mengkaji kondisi daerah, isu-isu strategis daerah, dan merumuskan visi-misi, serta arah pembangunan jangka menengah daerah. Pendekatan partisipatif dimaksudkan agar para pemangku kepentingan turut mengkontribusikan pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi RPJMD baik untuk aspek pemahaman terhadap kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi-misi serta arah jangka menengah pembangunan daerah. Pendekatan koordinatif dilakukan karena penyusunan RPJMD melibatkan SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda sehingga diperlukan koordinasi yang intensif melalui pola komunikasi yang tepat dalam rangka membahas dan menetapkan hal-hal yang bersifat strategis tentang muatan RPJMD berupa isu-isu strategis, sasaran dan tujuan, arah kebijakan dan strategi, serta indikasi program dan anggaran selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, Pendekatan *bottom-up/top-down* dimaksudkan agar

proses penyusunan RPJMD dapat mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pemangku kepentingan, serta memerhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi, dan arah pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Penyusunan RPJMD juga bermuara pada pendekatan politik, dimana secara substansi dari RPJMD yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif, koordinatif, dan kombinasi bottom-up/top-down, mendapatkan kekuatan legitimasi politik melalui oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedudukan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025, yang bertujuan meletakkan dasar-dasar pembangunan Muna barat yang kokoh melalui pembangunan/ pembukaan akses transportasi pada daerah-daerah potensial termasuk akses keluar masuk kawasan-kawasan strategis dalam rangka mendorong percepatan pengembangan pada seluruh bidang pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 juga disusun dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Muna Barat tahun, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RPJM Daerah sekitar (Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah). Substansi materi didalamnya harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Setiap tahunnya RPJMD Kabupaten Muna Barat 2017-2022 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Renstra SKPD Kabupaten Muna Barat 2017- ijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RPJM Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil penyusunan RPJMD adalah Pancasila, sedangkan Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 . Sejumlah peraturan sebagai landasan operasional yang menjadi dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

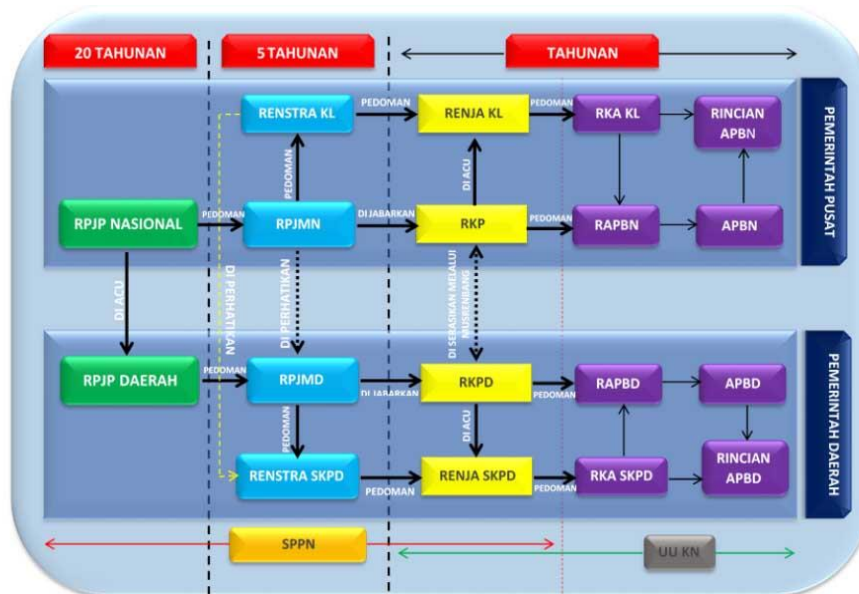
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peneetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013–2018

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari integrasi perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi.. RPJMD Kabupaten harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun harus sinkron dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, substansi materi RPJMD Kabupaten Muna Barat harus mengacu pada RPJM Nasional tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten Muna Barat, serta memperhatikan RPJMD dan RTRW Kabupaten Sekitar. Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang selaras. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut .



Gambar 1. 1.

Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4. Sistematika Penulisan
 - 1.5. Maksud dan Tujuan
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
 - 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.3. Kerangka Pendanaan
- BAB IV. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
 - 4.1. Permasalahan Pembangunan
 - 4.2. Isu Strategis
- BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - 5.1. Visi
 - 5.2. Misi
 - 5.3. Tujuan dan Sasaran
- BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI. PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Muna Barat serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Menciptakan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah.

4. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Muna Barat ini antara lain:

1. Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 - 2022 yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Tercapaiannya efektifitas pembangunan daerah menurut capaian indikator kinerja lima tahunan pemerintah daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 - 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Potensi Pengembangan Wilayah sangat ditentukan oleh Aspek Geografi dan Demografi. Aspek geologi ditentukan oleh faktor-faktor seperti letak, luas, dan batas wilayah; kondisi topografi; kondisi klimatologi; kondisi geologi; kondisi hidrologi; penggunaan lahan; dan kondisi geografi lainnya.

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

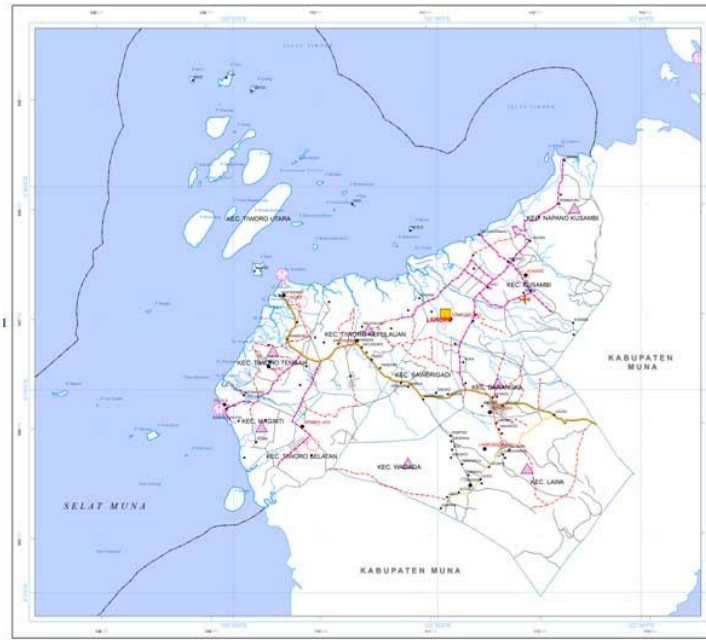
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Muna Barat merupakan daerah otonom baru yang terbentuk pada tanggal 23 Juli tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 hasil dari pemekaran Kabupaten Muna yang terletak di jazirah Sulawesi Tenggara. Kabupaten Muna Barat dengan Ibu Kota Kabupaten berkedudukan di Laworo Kecamatan Sawerigadi merupakan daerah kepulauan yang berada di bawah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Muna Barat terletak di Pulau Muna bagian barat serta memiliki gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar pada 36 Pulau Kecil yang terdiri dari 14 pulau yang berpenghuni tetap, 5 pulau yang berpenghuni tidak tetap dan 17 pulau yang tidak berpenghuni. Kabupaten Muna Barat memiliki luas wilayah daratan sebesar 906,28 Km² atau 90.628 ha. Secara administratif Kabupaten Muna Barat terbagi dalam 11 Kecamatan dan 86 Desa/ Kelurahan. Kecamatan dalam wilayah kabupaten Muna Barat meliputi Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kecamatan Lawa, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Maginti, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Kusambi dan Kecamatan Napanokusambi. Luas wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Muna Barat ditunjukkan pada tabel II.1.

Tabel II.1. Luas Wilayah Administasi Kecamatan Di Kabupaten Muna Barat

Nomor	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Sawerigadi	102,60	11,32
2	Barangka	33,09	3,65
3	Lawa	85,17	9,40
4	Wadaga	175,05	19,32
5	Tiworo Selatan	66,98	7,39
6	Maginti	40,57	4,48
7	Tiworo Tengah	82,35	9,09
8	Tiworo Utara	62,05	6,85
9	TiworoKepulauan	77,90	8,60

Nomor	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
10	Kusambi	103,33	11,40
11	Napanokusambi	77,19	8,52
Total Luas Wilayah		906,28	100



Gambar II. 1. Peta Kabupaten Muna Barat

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Muna Barat adalah Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan, Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana, dan Bagian Timur serta bagian Selatan berbatasan dengan Kab. Muna.

2) Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi geostrategis

Kabupaten Muna Barat memiliki posisi yang sangat strategis di daerah Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara karena memiliki akses keluar dan masuk ke provinsi Sulawesi Selatan atau provinsi lainnya baik melalui jalur penerbangan maupun jalur pelayaran (laut/ ferry). Dengan demikian Kabupaten Muna Barat memiliki potensi sebagai salah satu Simpul Kawasan Strategis yang menghubungkan 3 wilayah kabupaten yang berada di Pulau Muna dengan Pusat Kegiatan Wilayah lainnya dalam regional Sulawesi.

b) Kondisi/kawasan

(1) Pesisir

Umumnya Kabupaten Muna barat merupakan daerah pesisir yang meliputi 7 kecamatan yakni Kecamatan Tiworo Kepulauan, Tiworo

(2) Kepulauan

Gugusan pulau-pulau Kecil di Kabupaten Muna Barat sebanyak 36 Pulau yang terdiri dari 14 Pulau Kecil Berpenghuni Tetap, 5 Pulau Kecil Berpenghuni tidak tetap, dan 17 Pulau Kecil tidak berpenghuni.

(3) Perdesaan

Secara administrasi Jumlah desa di Kabupaten Muna Barat sebanyak 81 Desa. 50 Desa diantaranya atau sebanyak 61.7% merupakan desa yang memiliki tingkat pembangunan dengan status sebagai desa berkembang dan 48.3% masih merupakan desa tertinggal. Kecamatan yang paling tertinggal di Kabupaten Muna Barat adalah Kecamatan Tiworo Utara, dimana jumlah desa tertinggal adalah sebanyak 6 desa dari dari 7 desa. Status pembangunan desa di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2014 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 2. Tingkat Perkembangan Pembangunann Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Tertinggal
1	Sawerigadi	10	-	10	-
2	Barangka	8	-	7	1
3	Lawa	6	-	2	4
4	Wadaga	7	-	3	4
5	Tiworo Selatan	5	-	5	-
6	Maginti	8	-	3	5
7	Tiworo Tengah	8	-	7	1
8	Tiworo Utara	7	-	1	6
9	Tikep	7	-	4	3
10	Kusambi	9	-	4	5
11	Napano Kusambi	6	-	4	2
Total Muna Barat		81	0	50	31

Sumber: Kemendes, 2015

3) Topografi

Secara garis besar, daratan wilayah Kabupaten Muna Barat merupakan daratan rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0 – 500

m dpl (meter di atas permukaan laut). Namun sebagian besar dari luas daratan Kabupaten Muna Barat berada pada ketinggian 25 – 100 m dpl. Luas wilayah Muna Barat berdasarkan kemiringan lereng dan ketinggian topografi ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.3. Luas Wilayah berdasarkan Klasifikasi Kemiringan Lereng Muna Barat

Kemiringan	Luas* (Ha)	Persentase (%)
0 - 12 %	158.295	53,40
12 - 15 %	61.583	20,78
15 - 40 %	51.264	17,30
>40 %	25.255	8,52
Total	296.397	100,00

Sumber : BPS, 2016

*) Luas wilayah termasuk Kab. Muna

Tabel II. 4. Luas Wilayah Berdasarkan Klasifikasi Ketinggian Muna Barat

No	Ketinggian	Luas* (ha)	Persentase (%)
1	0 - 7 mdpl	38.816	13,10
2	7 - 25 mdpl	82.162	27,72
3	25 - 100 mdpl	98.203	33,13
4	100 - 500 mdpl	76.293	25,74
5	500 - 1000 mdpl	864	0,29
6	>1000 mdpl	59	0,02
	Total	296.397	100,00

Sumber : BPS, 2016

*) Luas wilayah termasuk Kab. Muna

4) Geologi.

Secara geologis, Kabupaten Muna Barat tersusun dari beberapa jenis batuan. Batuan yang dominan menyusun formasi geologi wilayah Kabupaten Muna Barat adalah TMC, KTC, dan KAC. Luas wilayah Kabupaten Muna Barat berdasarkan Formasi Jenis Batuan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 5. Luas Wilayah Muna Barat Berdasarkan Formasi Jenis Batuan

No	Jenis Batuan	Luas* (ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	J M	0	0
2	K T C	79.944	26,97
3	T M C	175.331	59,15
4	T M S	4.174	1,41
5	K L	406	0,14
6	U B	413	0,14
7	T S U	494	0,17
8	C M R	0	0
9	K A C	35.635	12,02
	Total	296.397	100,00

Sumber : BPS, 2016

*) Luas wilayah termasuk Kab. Muna

5) Hidrologi

Siklus hidrologi sangat terkait dengan pengembangan sumber daya air. Pengembangan sumber daya air secara terpadu diharapkan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air dan mengendalikan daya rusak akibat air. Di Kabupaten Muna Barat terdapat 3 sungai besar yakni sungai Tiworo (Kambara), Sungai Katangana, dan Sungai Lanoumba yang memiliki potensi sebagai pemenuhan air bersih maupun mengairi lahan pertanian. Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS ataupun Sub DAS di Kabupaten Muna Barat ditunjukkan pada dalam tabel berikut.

Tabel II. 6. Potensi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Muna Barat

No	Nama Daerah Aliran Sungai	Luas (Ha)
1.	DAS Bakuku	15,638
2.	DAS Balu	93,297
3.	DAS Bangko	282,947
4.	DAS Bangkomalampe	1.459,571
5.	DAS Belanbelan Besar	28,403
6.	DAS Belabbelan Kecil	15,18
7.	DAS Bero	19,733
8.	DAS Bonebone	2.853,396
9.	DAS Indo	2,495
10.	DAS Jompi DS	28,861

No	Nama Daerah Aliran Sungai	Luas (Ha)
11.	DAS Kabawo	5.905,269
12.	DAS Kasimpa	5.862,236
13.	DAS Katangana – Bonebone	5.862,236
14.	DAS Katela	11,652
15.	DAS Kumbikuno	1.774,303
16.	DAS Kusambi	1.0255,901
17.	DAS Lagara Selatan	7,073
18.	DAS Lahudu	2.098,017
19.	DAS Lamanu	1.413,399
20.	DAS Lambiku	153,64
21.	DAS Latoa	563,21
22.	DAS Lumuna Besar	0,669
23.	DAS Maloang	81,505
24.	DAS Maloang Kecil	6,108
25.	DAS Mandike	12,467
26.	DAS Marobo	3,676
27.	DAS Masaringan	9,173
28.	DAS Masolakaan	595,697
29.	DAS Pasipi	71,679
30.	DAS Pulo Santigi	26,599
31.	DAS Sanggaleang	471,426
32.	DAS Santigi	26,599
33.	DAS Simuang	316,739
34.	DAS Tanjung Batu	403,204
35.	DAS Tiga	95,161
36.	DAS Tiworo	28.973,693
37.	DAS Tolimbo	2.666,256
38.	DAS Uмба	4.915,67
39.	DAS Wadana	3.522,573
40.	DAS Walesiruwama	1.997,762
Jumlah		86.876,007

Sumber: Rancangan RTRW Muna Barat 2017-2037

Disamping air permukaan yang bersumber dari sungai, potensi sumber daya air di Kabupaten Muna Barat juga didukung oleh adanya beberapa Sumber Air yang berasal dari mata air yang meliputi:

- a. Mata air Wakante dan mata air Lamaeo di Kecamatan Lawa;
- b. Mata air Matakidi, mata air Batakalambe, mata air Ambolo dan mata air Makokau di Kecamatan Barangka;
- c. Mata air Barakati di Kecamatan Sawerigadi;
- d. Mata air Kaaghi, mata air Lambeko, mata air Ghulu dan mata air Tobi-Tobi di Kecamatan Wadaga;
- e. Mata air Kambara di Kecamatan Tiworo Kepulauan ;
- f. Mata air Katangan di Kecamatan Tiworo Selatan ;
- g. Mata air Langku-Langku di Kecamatan Tiworo Tengah ;

Debit air dari sumber-sumber Air bersih di Kabupaten Muna Barat baik yang bersumber dari air permukaan (Sungai) maupun Mata Air belum dilakukan penyelidikan secara mendetail, sehingga potensi/kapasitas sumber daya air yang tersedia belum bisa ditentukan.

6) Klimatologi

Kabupaten Muna Barat memiliki iklim tropis seperti sebagian besar daerah di Indonesia, dengan suhu rata-rata sekitar 25–27°C. Demikian juga dengan musim, Kabupaten Muna Barat mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan Juni dimana angin yang mengandung banyak uap air bertiup dari Benua Asia dan Samudra Pasifik sehingga menyebabkan hujan. Sedangkan musim kemarau terjadi antara Juli sampai November, pada bulan ini angin bertiup dari Benua Australia yang sifatnya kering dan sedikit mengandung uap air.

Tabel II. 7. Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	Januari	194,90	16
2	Februari	350	20
3	Maret	180,60	21
4	April	336,00	22
5	Mei	149,80	11
6	Juni	47,10	13
7	Juli	4,90	8
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	26,60	5
12	Desember	178,80	18
	Jumlah	122,39	11

Sumber: BMKG Betoambari, Kota Bau-Bau (BPS, 2016)

Rata-rata banyaknya hari hujan tiap bulan pada tahun 2015 adalah 11 hari dengan rata-rata curah hujan 122,39 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 350,00 mm dengan jumlah hari hujan sebesar 20 hari hujan.

Tabel II.8. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara. Muna Barat Tahun 2015

No	Bulan	Suhu Udara (°C)			Rata-Rata Kelembaban Udara (oC)
		Max	Min	Rata-rata	
1	Januari	32,50	24,60	28,30	81,00
2	Februari	31,80	23,30	27,50	83,00
3	Maret	32,30	23,90	27,60	83,00
4	April	31,80	24,00	27,40	85,00
5	Mei	31,90	23,50	27,30	81,00
6	Juni	31,50	23,30	26,90	81,00
7	Juli	32,10	22,20	26,60	74,00
8	Agustus	32,00	21,30	26,50	67,00
9	September	33,30	21,40	27,10	66,00
10	Oktober	34,20	22,40	28,20	66,00
11	November	34,50	24,20	29,60	69,00
12	Desember	34,00	24,80	29,40	76,00

Sumber: BMKG Betoambari-Kota Bau-Bau (BPS, 2016)

Tabel II. 9. Rata-Rata Tekanan Udara dan Kecepatan Angin di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015

No	Bulan	Tekanan Udara (MB)	Kecepatan Angin (Knot)
1	Januari	1.012,70	3,00
2	Februari	1.013,60	2,90
3	Maret	1.014,20	2,50
4	April	1.013,20	2,40
5	Mei	1.014,50	2,90
6	Juni	1.014,30	2,80
7	Juli	1.016,00	3,60
8	Agustus	1.016,50	4,20
9	September	1.016,60	3,60
10	Oktober	1.016,70	3,50
11	November	1.013,50	3,50
12	Desember	1.013,40	3,20

Sumber: BMKG Betoambari, Kota Bau-Bau (BPS, 2016)

7) **Penggunaan lahan.**

Berdasarkan pola ruang rancangan RTRW Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022, secara umum penggunaan lahan dibagi dalam 2 (dua) kawasan yakni Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung.

a) **Kawasan budidaya**

Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Peternakan, Kawasan Peruntukan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan pariwisata, Kawasan Peruntukan Permukiman, dan Kawasan Peruntukan Lainnya.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi meliputi Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 16.430,795 hektar yang berada di Kecamatan Wadaga, Kecamatan Barangka, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Lawa, Kecamatan Napano Kusambi, dan Kecamatan Sawerigadi, dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi memiliki luas kurang lebih 4.786,299 Ha yang tersebar pada Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Wadaga seluas, dan Kecamatan Lawa

Kawasan Peruntukan Pertanian yang teridentifikasi tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 43.449,880 Ha, yang meliputi Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah seluas kurang lebih 5.277,67 Ha; Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering seluas kurang lebih 8.367,936 Ha; dan Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura tersebar pada seluruh wilayah kabupaten Muna Barat.

Kawasan Peruntukan Peternakan tersebar pada seluruh Kecamatan, dengan **potensi** penyembangan budidaya ternak yang meliputi ternak Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi, Ayam buras, Ayam ras pedaging, Ayam ras petelur, dan Itik.

Kawasan Peruntukan Perkebunan direncanakan seluas 29.804,278 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditi jambu mete, kelapa, kopi, kakao, lada, dan perkebunan tanaman Lainnya (Pala, Aren, Kemiri, Asam dan Kapuk).

Kawasan peruntukan budidaya perikanan Kabupaten Muna Barat seluas 1.805,95 Ha meliputi Kawasan perikanan tangkap yang tersebar pada seluruh perairan Muna **Barat** dan Budidaya perikanan yang tersebar di Kec. Tiworo Kepulauan, Kec. Tiworo Utara, Kec. Tiworo Tengah, Kec. Tiworo Selatan, Kec. Maginti, Kec. Kusambi, dan Kec. Napano Kusambi.. Produksi Budidaya perikanan laut di Kabupaten Muna Barat tahun 2014 sekitar 3.303,04 ton; Jenis budidaya perikanan yang dikembangkan

adalah Komoditas ikan kerapu, Komoditas Lobster dan Komoditas lainnya (mutiara, abalon, rajungan, dan kima)

Kawasan Budidaya perikanan air payau/tambak meliputi Kawasan budidaya dengan Komoditas unggulan berupa udang vaname, ikan bandeng, dan Komoditas Air Payau lainnya (udang windu, kepiting bakau, rumput laut (*Gratchilaria SP*), ikan baronang, dan ikan kerapu lumpur). Sedangkan Budidaya perikanan air tawar/kolam berada di Kec. Lawa, Kec. Tiworo Kepulauan, Kec. Tiworo Tengah, dan Kec. Tiworo Selatan.

Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Muna Barat memiliki potensi untuk dikembangkan diantaranya adalah Pertambangan Mineral bukan logam terdiri atas batu gamping berada di Kec. Lawa dan dolomit berada di Kec. Lawa dan Sawerigadi; Pasir kuarsa berada di Kec. Maginti, Tiworo Tengah, Tiworo Kepulauan (Desa Wanseriwu dan Santiri); dan Tanah liat berada di Kec. Napano Kusambi dan Kusambi

Kawasan Peruntukan Industri yang direncanakan di Kabupaten Muna Barat meliputi Kawasan Industri besar, Kawasan Industri Menengah, dan kawasan Industri Kecil. Untuk Kawasan Industri besar dan Industri menengah belum ada yang terbangun, sedangkan Industri kecil, tersebar di beberapa kecamatan yaitu industri pengolahan hasil perkebunan yakni pengolahan gula aren di Kec. Tiworo Selatan, Lawa, Sawerigadi dan Tiworo Tengah, industri pengolahan hasil hutan yakni industri pengolahan kayu jati di Kec. Kusambi.

Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Muna Barat di kelompokkan menjadi dua objek wisata yakni Kawasan wisata budaya dan Kawasan wisata alam. Kawasan wisata budaya meliputi kawasan Wisata Benteng Tiworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan dan Kawasan wisata Pogeraha Adara (atraksi Perkelahian Kuda) Desa Lathugo kecamatan Lawa. Sementara Kawasan wisata Alam meliputi Kecamatan Tiworo Utara yaitu Wisata pulau-pulau kecil Terluar di Pulau Indo, Pulau Wansaringan, Pulau Ransaweta, Pulau Lumuna Besar, Pulau Belan-belan Besar, dan Pulau Belan-belan Kecil di Selat Tiworo.

Kawasan Peruntukan Permukiman di Kabupaten Muna Barat dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana. Luas Kawasan permukiman di Kabupaten Muna Barat kurang lebih 5.482,67 Ha yang terdiri atas permukiman perkotaan dan pedesaan,

b) Kawasan lindung

Kawasan Lindung di kabupaten Muna Barat terdiri dari Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 6.741,68 Ha; Kawasan

Perlindungan Setempat yang meliputi Kawasan Sempadan Pantai kurang lebih 262,43 Ha, Kawasan Sempadan Sungai kurang lebih 1.892,85 ha, Kawasan Sekitar Mata Air dengan radiusn 200 m yang berada pada kawasan huta; Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang berada di Benteng Tiworo dan masjid tua Kec. Tikep dan festival perkelahian kuda Kec. Lawa; Kawasan Rawan Bencana Alam yang meliputi Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Banjir ; Kawasan Lindung Geologi

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam dapat berupa bencana geologi (tanah longsor, gempa tektonik, gempa vulkanik/letusan gunung api), bencana yang ditimbulkan oleh air (banjir, tsunami), bencana akibat gerakan angin (angin putting beliung, angin topan), dan bencana yang ditimbulkan oleh ulah atau perilaku manusia dapat berupa bencana kebakaran atau bencana sosial akibat konflik sosial.

Kabupaten Muna Barat tidak mempunyai potensi bencana letusan gunung api, tetapi pada sebagian wilayahnya berpotensi terhadap bencana longsor yang diakibatkan oleh gerakan tanah aktif dan abrasi pantai di sepanjang wilayah pesisirnya, bencana banjir, dan bencana yang ditimbulkan oleh angin putting beliung.

Tabel II.10. Kondisi Dampak Potensi Bencana Alam di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2017

No	Jenis Potensi Bencana Alam	2015	2016	2017
1	Luas Banjir (Ha)	236,332	815, 359	3.020, 933
2	Panjang Abrasi (m')	26	39	43
3	Lokasi Angin Putting Beliung	1. Desa Bangko 2. Desa Tasipi 4. Desa Bero 5. Desa Maginti 6. Desa Katela 7. Desa Latawe 9. Desa Maperaha 10. Desa Lapolea 11. Desa Kombikuno 12. Desa Gala	1. Latawe 2. Maginti 3. Bangko 4. Gala 5. Tangkumaho 6. Wulai 7. Wamelai 8. Madampi 9. Lagadi 10. Katobu 11. Lasosodo 12. Wakontu 13. Lapolea	1. Gala 2. Bangko 3. Mekar Jaya 5. Latugho 6. Katobu
4	Lokasi	1. Kec. Barangka	1. Kec. Barangka	

No	Jenis Potensi Bencana Alam	2015	2016	2017
	Kekeringan	2. Kec. Wadaga 3. Kec. Lawa 4. Kec. Sawerigadi 5. Kec. Maginti 6. Kec. Kusambi 7. Kec. Napano Kusambi 8. Kec. Tiworo Utara	2. Kec. Wadaga 3. Kec. Lawa 4. Kec. Sawerigadi 5. Kec. Maginti 6. Kec. Kusambi 7. Kec. Napano Kusambi 8. Kec. Tiworo Utara	

Sumber: Badan Bencana Daerah, 2017

Bencana Banjir yang terjadi pada tahun 2017 meliputi kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Napanokusamb, Kecamatan Barangka, dan Kecamatan Tikep. Tingginya curah hujan yang terjadi selama musim timur (Bulan April s.d Juli) menyebabkan Air sungai meluap dan kondisi tanah menjadi jenuh air sehingga volume limpasan air yang sangat tinggi yang berakibat terjadinya banjir pada beberapa Kecamatan. Banjir tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Muna Barat. Sementara Angin Putting Beliuang dan gelombang pasang terjadi pada wilayah-wilayah kepulauan selama musim angin barat dan puncaknya terjadi dalam bulan November – Maret.

2.1.3. Demografi

Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Muna Barat berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah sebesar 1,36 persen pertahun. Jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2014 sebesar 76.061 jiwa (17.436 rumah tangga) atau dengan kepadatan penduduk sebesar 84 jiwa/Km² dan kepadatan rumah tangga rata-rata 4.36 jiwa/ rumah tangga. Kecamatan maginti memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yakni 215 jiwa/Km², sedangkan kepadatan terendah berada pada kecamatan Wadaga yakni sebesar 35 jiwa/ Km². Sebaran penduduk, rumah tangga, dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014 ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel II.11. Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Tiworo Kepulauan	1.622	6.806	87
2.	Maginti	1.986	8.734	215
3.	Tiworo Tengah	1.717	6.905	84
4.	Tiworo Selatan	1.239	5.123	76
5.	Tiworo Utara	1.045	5.161	83

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan Penduduk
6.	Lawa	1.867	7.875	92
7.	Sawerigadi	1.541	6.660	65
8.	Barangka	1.486	6.363	192
9.	Wadaga	1.393	6.058	35
10.	Kusambi	2.486	11.396	110
11.	Napano Kusambi	1.054	4.980	65
	Jumlah	17.436	76.061	84

Sumber : Kabupaten Muna Barat Dalam Angka 2015

Tabel II.12. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014 dan tahun 2015

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk
		2014	2015	2014-2015
1	Tiworo Kepulauan	6 806	6 899	1,37
2	Maginti	8 734	8 836	1,17
3	Tiworo Tengah	6 905	6 997	1,33
4	Tiworo Selatan	5 123	5 195	1,41
5	Tiworo Utara	5 161	5 220	1,14
6	Lawa	7 875	7 995	1,52
7	Sawerigadi	6 660	6 755	1,43
8	Barangka	6 363	6 460	1,52
9	Wadaga	6 058	6 146	1,45
10	Kusambi	11 396	11 543	1,29
11	Napano Kusambi	4 980	5 038	1,16
	Muna Barat	76 061	77 084	1,34

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (BPS, 2016)

Tabel II.13. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Muna Barat, 2015

NO	Kecamatan	Jenis Kelamin (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tiworo Kepulauan	3 375	3 524	6 899	95,77
2	Maginti	4 406	4 430	8 836	99,46
3	Tiworo Tengah	3 534	3 463	6 997	102,05

NO	Kecamatan	Jenis Kelamin (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
4	Tiworo Selatan	2 666	2 529	5 195	105,42
5	Tiworo Utara	2 588	2 632	5 220	98,33
6	Lawa	3 693	4 302	7 995	85,84
7	Sawerigadi	3 274	3 481	6 755	94,05
8	Barangka	2 972	3 488	6 460	85,21
9	Wadaga	2 872	3 274	6 146	87,72
10	Kusambi	5 573	5 970	11 543	93,35
11	Napano Kusambi	2 509	2 529	5 038	99,21
	Muna Barat	37 462	39 622	77 084	94,55

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (BPS, 2016)

Tabel II.14. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Muna Barat, 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0–4	4630	4557	9 187
5–9	5072	4820	9892
10–14	4719	4380	9099
15–19	3732	3486	7218
20–24	2542	2653	5195
25–29	2433	2714	5147
30–34	2255	2686	4941
35–39	2475	2837	5312
40–44	2327	2616	4943
45–49	1820	2151	3971
50–54	1585	1882	3467
55–59	1247	1471	2718
60–64	955	1116	2071
65–69	722	828	1550
70–74	462	637	1 099
75+	486	788	1274
Jumlah	37462	39622	77084

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (BPS, 2016)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Salah satu tujuan utama pembangunan suatu daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak hanya dilihat dari sudut pertumbuhan ekonomi daerah tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan ekonomi menjadi aspek yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu ukuran tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sekaligus diperlukan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah adalah PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yang biasa digunakan dalam kebutuhan perencanaan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; dan (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

a) PDRB Harga Berlaku

PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Nilai PDRB Kabupaten Muna Barat berdasarkan harga berlaku pada tahun 2013, 2014, dan 2015 secara berturut turut adalah Rp. 1.38 Trilyun, Rp. 1,54 Trilyun, dan Rp. 1,74 Trilyun. Secara rinci

PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Berlaku Menurut Lapangan Usaha selama Tahun 2013–2015 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 15. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Barat Atas Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2013–2015

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	553,362.3	624,445.4	657,836.0
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	284,158.4	316,564.1	335,638.6
a.	Tanaman Pangan	86,554.9	103,639.8	110,439.3
b.	Tanaman Hortikultura	40,299.2	39,962.3	41,852.4
c.	Tanaman Perkebunan	78,587.2	87,564.0	91,191.9
d.	Peternakan	74,259.6	80,734.1	87,458.6
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	4,457.5	4,663.9	4,696.4
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	19,613.1	20,535.6	21,882.2
3	Perikanan	249,590.8	287,345.7	300,315.1
B	Pertambangan dan Penggalian	135,665.2	155,124.3	197,908.5
1	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	135,665.2	155,124.3	197,908.5
C.	Industri Pengolahan	52,877.0	59,305.3	63,012.6
1	Industri Makanan dan Minuman	30,593.4	35,355.4	37,658.6
2	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	654.5	725.9	749.0
3	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	370.8	394.1	421.4
4	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	70.3	77.0	85.6
5	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3.8	4.5	5.9
16	Industri Barang Galian bukan Logam	2,460.6	2,816.3	3,183.9
7	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	4,533.4	4,978.2	5,095.8
8	Industri Alat Angkutan	6,200.8	6,644.9	6,759.1

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
9	Industri Furnitur	7,753.3	8,014.9	8,743.7
10	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	236.1	294.0	309.7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	388.2	397.0	410.6
1	Ketenagalistrikan	380.8	388.3	400.8
2	Gas dan Produksi Es	7.4	8.6	9.8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	379.4	417.2	403.0
F	Kontruksi	220,506.7	247,113.8	325,753.9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	135,016.4	149,349.3	167,177.1
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1,278.8	1,307.6	1,416.6
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	133,737.6	148,041.7	165,760.5
H	Transportasi dan Pergudangan	20,281.6	21,521.2	23,741.3
1	Angkutan Darat	17,066.8	18,101.3	20,023.5
2	Angkutan Laut	2,493.6	2,689.9	2,924.6
3	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	639.3	642.5	698.3
4	Angkutan Udara	-	-	-
5	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	81.9	87.6	94.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,132.3	2,301.9	2,763.2
1	Penyediaan Akomodasi	29.3	30.8	33.9
2	Penyediaan Makan Minum	2,103.0	2,271.1	2,729.3
J	Informasi dan Komunikasi	17,499.7	17,770.4	18,781.9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,222.4	11,511.7	12,863.5
1	Jasa Perantara Keuangan	7,456.2	8,371.6	9,417.3
2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	-	-
3	Jasa Keuangan Lainnya	2,766.2	3,140.2	3,446.2
4	Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
L	Real Estat	30,193.1	30,895.5	32,776.8
M,N	Jasa Perusahaan	278.8	292.1	332.4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	85,880.7	94,026.4	101,173.4

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
	Sosial Wajib			
P	Jasa Pendidikan	72,452.7	80651.8	89,670.0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,401.1	17881.2	19,984.9
R,S,T,U	Jasa lainnya	22,966.2	25499.7	28,268.1
Produk Domestik Regional Bruto		1,376,503.8	1,538,503.9	1,742,857.0

Sumber : BPS Kab. Muna Tahun 2015 dan Tahun 2016

b) PDRB Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Kabupaten Muna Barat berdasarkan harga konstan pada tahun 2013, 2014, dan 2015 secara berturut turut adalah Rp. 1.38 Trilyun, Rp. 1,54 Trilyun, dan Rp. 1,74 Trilyun. Secara rinci PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Berlaku Menurut Lapangan Usaha selama Tahun 2013–2015 ditunjukkan pada tabel II.20.

Tabel II. 16. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2013–2015

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	473,939.4	520,669.1	523,452.3
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	252,174.3	270,235.8	275,145.9
a.	Tanaman Pangan	70,556.9	80,926.9	81,236.8
b.	Tanaman Hortikultura	40,859.3	40,310.7	40,933.0
c.	Tanaman Perkebunan	70,578.5	74,839.1	76,330.5
d.	Peternakan	65,941.2	69,796.7	72,201.5
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	4,238.4	4,362.3	4,444.1
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	18,051.1	18,367.1	18,577.6
3	Perikanan	203,714.0	232,066.2	229,728.8
B	Pertambangan dan Penggalian	123,534.6	134,587.9	158,546.7
1	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	123,534.6	134,587.9	158,546.7
C.	Industri Pengolahan	49,383.2	52,466.2	53,610.9

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	28,568.2	30,622.8	30,971.7
3	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	601.7	644.5	668.2
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	344.7	351.7	365.0
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	62.3	66.7	70.9
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3.5	4.1	5.1
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	-	-
10	Industri Barang Galian bukan Logam	2,301.1	2,504.5	2,681.0
	Industri Logam Dasar	-	-	-
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	4,256.7	4,496.3	4,562.5
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	
14	Industri Alat Angkutan	5,831.6	6,194.0	6,302.6
15	Industri Furnitur	7,165.9	7,318.2	7,709.9
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	247.5	263.3	273.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	462.0	485.6	502.9
1	Ketenagalistrikan	455.2	478.2	494.1
2	Gas dan Produksi Es	6.8	7.4	8.8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah	350.1	358.9	336.3
F	Konstruksi	195,645.6	208,829.8	260,653.6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	126,172.3	132,279.6	141,705.4

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
	Sepeda Motor			
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1,143.8	1,166.2	1,219.0
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	125,028.5	131,113.4	140,486.5
H	Transportasi dan Pergudangan	19,678.5	20,453.1	22,376.1
1	Angkutan Rel	-	-	-
2	Angkutan Darat	16,607.0	17,255.6	18,974.7
3	Angkutan Laut	2,387.6	2,524.4	2,680.4
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	610.6	596.4	642.0
5	Angkutan Udara	-	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	73.3	76.7	79.0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,889.4	2,004.8	2,291.5
1	Penyediaan Akomodasi	26.3	26.7	27.9
2	Penyediaan Makan Minum	1,863.1	1,978.1	2,263.6
J	Informasi dan Komunikasi	18,374.1	18,557.5	19,798.4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,804.7	9,498.7	10,179.1
1	Jasa Perantara Keuangan	6,176.9	6,580.5	7,124.4
2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	-	-
3	Jasa Keuangan Lainnya	2,627.8	2,918.2	3,054.7
4	Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
L	Real Estat	27,564.2	27,886.7	28,561.5
M,N	Jasa Perusahaan	248.4	259.5	278.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	72,595.7	76,055.9	81,853.9
P	Jasa Pendidikan	67,217.9	72,041.0	76,805.3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,969.6	15,974.3	17,116.1
R,S,T, U	Jasa lainnya	22,044.8	24,133.1	25,595.1
	Produk Domestik Regional Bruto	1,222,874.3	1,316,541.4	1,423,663.2

Sumber : BPS Kab. Muna Tahun 2015 dan Tahun 2016

2) Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dan perkembangan pembangunan suatu daerah.

a) Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Berdasarkan harga berlaku, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat selama tahun 2014 dan tahun 2015 cukup baik yakni mengalami peningkatan 11.77% dan 13.28% secara berturut-turut. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) tahun 2014-2015 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 17. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014-2015

No	Lapangan Usaha	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.85	5.35
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	11.40	6.03
a.	Tanaman Pangan	19.74	6.56
b.	Tanaman Hortikultura	(0.84)	4.73
c.	Tanaman Perkebunan	11.42	4.14
d.	Peternakan	8.72	8.33
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	4.63	0.70
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	4.70	6.56
3	Perikanan	15.13	4.51
B	Pertambangan dan Penggalian	14.34	27.58
1	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	14.34	27.58
C.	Industri Pengolahan	12.16	6.25
1	Industri Makanan dan Minuman	15.57	6.51
2	Industri Tekstil/Pakaian Jadi	10.91	3.18
3	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	6.28	6.93
4	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	9.53	11.17

No	Lapangan Usaha	2014	2015
5	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	18.42	31.11
6	Industri Barang Galian bukan Logam	14.46	13.05
7	Industri Barang Logam; Komputer, Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	9.81	2.36
8	Industri Alat Angkutan	7.16	1.72
9	Industri Furnitur	3.37	9.09
10	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	24.52	5.34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.27	3.43
1	Ketenagalistrikan	1.97	3.22
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	16.22	13.95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.96	(3.40)
F	Konstruksi	12.07	31.82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.62	11.94
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.25	8.34
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	10.70	11.97
H	Transportasi dan Pergudangan	6.11	10.32
1	Angkutan Rel	-	-
2	Angkutan Darat	6.06	10.62
3	Angkutan Laut	7.87	8.73
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.50	8.68
5	Angkutan Udara	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	6.96	8.22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.95	20.04
1	Penyediaan Akomodasi	5.12	10.06
2	Penyediaan Makan Minum	7.99	20.18
J	Informasi dan Komunikasi	1.55	5.69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.61	11.74
1	Jasa Perantara Keuangan	12.28	12.49
2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	-
3	Jasa Keuangan Lainnya	13.52	9.74
4	Jasa Penunjang Keuangan	-	-
L	Real Estat	2.33	6.09
M,N	Jasa Perusahaan	4.77	13.80

No	Lapangan Usaha	2014	2015
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.48	7.60
P	Jasa Pendidikan	11.32	11.18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.02	11.76
R,S,T,U	Jasa lainnya	11.03	10.86
Laju Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku		11.77	13.28

Sumber : BPS Kab. Muna Tahun 2014, 2015 dan 2016.

b) Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Berdasarkan harga konstan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat selama tahun 2014 dan tahun 2015 cukup baik yakni mengalami peningkatan 7.66% dan 8.14% secara berturut-turut. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) tahun 2014-2015 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 18. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2015

NO	Lapangan Usaha	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.86	0.53
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7.16	1.82
a.	Tanaman Pangan	14.70	0.38
b.	Tanaman Hortikultura	(1.34)	1.54
c.	Tanaman Perkebunan	6.04	1.99
d.	Peternakan	5.85	3.45
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	2.92	1.88
1	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.75	1.15
2	Perikanan	13.92	(1.01)
B	Pertambangan dan Penggalian	8.95	17.80
1	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	8.95	17.80
C.	Industri Pengolahan	6.24	2.18
1	Industri Makanan dan Minuman	7.19	1.14

NO	Lapangan Usaha	2014	2015
2	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	7.12	3.67
3	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	2.04	3.77
4	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	7.06	6.34
5	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	17.14	25.12
6	Industri Barang Galian bukan Logam	8.84	7.05
7	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	5.63	1.47
8	Industri Alat Angkutan	6.21	1.75
9	Industri Furnitur	2.13	5.35
10	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin/Peralatan	6.38	4.03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.11	3.56
1	Ketenagalistrikan	5.05	3.32
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	8.82	18.92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.51	(6.30)
F	Konstruksi	6.74	24.82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.84	7.13
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.96	4.52
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	4.87	7.15
H	Transportasi dan Pergudangan	3.94	9.40
1	Angkutan Rel	-	-
2	Angkutan Darat	3.91	9.96
3	Angkutan Laut	5.73	6.18
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	(2.33)	7.65
5	Angkutan Udara	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	4.64	3.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.11	14.30
1	Penyediaan Akomodasi	1.52	4.49

NO	Lapangan Usaha	2014	2015
2	Penyediaan Makan Minum	6.17	14.43
J	Informasi dan Komunikasi	1.00	6.69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.88	7.16
1	Jasa Perantara Keuangan	6.53	8.27
2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	-
3	Jasa Keuangan Lainnya	11.05	4.68
4	Jasa Penunjang Keuangan	-	-
L	Real Estat	1.17	2.42
M,N	Jasa Perusahaan	4.47	7.17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.77	7.62
P	Jasa Pendidikan	7.18	6.61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.71	7.15
R,S,T,U	Jasa lainnya	9.47	6.06
Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan		7.66	8.14

Sumber : BPS Kab. Muna Tahun 2014, 2015 dan 2016.

3) Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha

Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

a) Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Berdasarkan harga Berlaku

Peran lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Muna Barat masih didominasi oleh Sektor Pertanian dan Perikanan yakni sebesar 37.74% pada tahun 2015. Dibanding dengan tahun sebelumnya, peran lapangan usaha pertanian dan perikanan cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 dan tahun 2015 peran sektor pertanian secara berturut-turut adalah 40,2% dan 40.59%. Disamping itu, pada Sub Lapangan Usaha Pertanian dan Sub Lapangan Usaha Perikanan memegang peranan yang paling tinggi disbanding dengan Bidang Lapangan Usaha lainnya. Peran Sub lapangan Usaha Pertanian dan Sub lapangan usaha perikanan dalam PDRB Kabupaten Muna Barat masing-masing adalah 19.26% dan 17.23%. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.19. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2015

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40.20	40.59	37.74
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	20.64	20.58	19.26
a.	Tanaman Pangan	6.29	6.74	6.34
b.	Tanaman Hortikultura	2.93	2.60	2.40
c.	Tanaman Perkebunan	5.71	5.69	5.23
d.	Peternakan	5.39	5.25	5.02
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	0.32	0.30	0.27
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.42	1.33	1.26
3	Perikanan	18.13	18.68	17.23
B	Pertambangan dan Penggalian	9.86	10.08	11.36
1	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	9.86	10.08	11.36
C.	Industri Pengolahan	3.84	3.85	3.62
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	2.22	2.30	2.16
3	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.05	0.05	0.04
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.03	0.03	0.02
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.01	0.01	0.00
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.00	0.00	0.00
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	-	-
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0.18	0.18	0.18
11	Industri Logam Dasar	-	-	-
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.33	0.32	0.29
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan	0.45	0.43	0.39
15	Industri Furnitur	0.56	0.52	0.50

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.02	0.02	0.02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.02
1	Ketenagalistrikan	0.03	0.03	0.02
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.02
F	Konstruksi	16.02	16.06	18.69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.81	9.71	9.59
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0.09	0.08	0.08
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	9.72	9.62	9.51
H	Transportasi dan Pergudangan	1.47	1.40	1.36
1	Angkutan Rel	-	-	-
2	Angkutan Darat	1.24	1.18	1.15
3	Angkutan Laut	0.18	0.17	0.17
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.05	0.04	0.04
5	Angkutan Udara	-	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0.01	0.01	0.01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.15	0.15	0.16
1	Penyediaan Akomodasi	0.00	0.00	0.00
2	Penyediaan Makan Minum	0.15	0.15	0.16
J	Informasi dan Komunikasi	1.27	1.16	1.08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.74	0.75	0.74
1	Jasa Perantara Keuangan	0.54	0.54	0.54
2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	-	-
3	Jasa Keuangan Lainnya	0.20	0.20	0.20
4	Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
L	Real Estat	2.19	2.01	1.88
M,N	Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.24	6.11	5.81
P	Jasa Pendidikan	5.26	5.24	5.15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.19	1.16	1.15
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.67	1.66	1.62
	TOTAL	100.00	100.00	100.00

b) Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan

Seperti pada PDRB harga berlaku, peran lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Muna Barat masih didominasi oleh Sektor Pertanian dan Perikanan yakni sebesar 36.77% pada tahun 2015. Dibanding dengan tahun sebelumnya, peran lapangan usaha pertanian dan perikanan cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 dan tahun 2015 peran sektor pertanian secara berturut-turut adalah 38,76% dan 39.55%. Disamping itu, pada Sub Lapangan Usaha Pertanian dan Sub Lapangan Usaha Perikanan memegang peranan yang paling tinggi dibanding dengan Bidang Lapangan Usaha lainnya. Peran Sub lapangan Usaha Pertanian dan Sub lapangan usaha perikanan dalam PDRB Kabupaten Muna Barat atas harga konstan masing-masing adalah 19.33% dan 16.14%. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 20. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kab. Muna Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014-2015

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.76	39.55	36.77
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	20.62	20.53	19.33
a.	Tanaman Pangan	5.77	6.15	5.71
b.	Tanaman Hortikultura	3.34	3.06	2.88
c.	Tanaman Perkebunan	5.77	5.68	5.36
d.	Peternakan	5.39	5.30	5.07
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	0.35	0.33	0.31
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.48	1.40	1.30
3	Perikanan	16.66	17.63	16.14
B	Pertambangan dan Penggalian	10.10	10.22	11.14
1	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10.10	10.22	11.14
C.	Industri Pengolahan	4.04	3.99	3.77
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	2.34	2.33	2.18
3	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.05	0.05	0.05
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.03	0.03	0.03

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.01	0.01	0.00
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.00	0.00	0.00
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	-	-
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0.19	0.19	0.19
	Industri Logam Dasar	-	-	-
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.35	0.34	0.32
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan	0.48	0.47	0.44
15	Industri Furnitur	0.59	0.56	0.54
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.02	0.02	0.02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.04
1	Ketenagalistrikan	0.04	0.04	0.03
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.02
F	Konstruksi	16.00	15.86	18.31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.32	10.05	9.95
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0.09	0.09	0.09
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	10.22	9.96	9.87
H	Transportasi dan Pergudangan	1.61	1.55	1.57
1	Angkutan Rel	-	-	-
2	Angkutan Darat	1.36	1.31	1.33
3	Angkutan Laut	0.20	0.19	0.19
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.05	0.05	0.05
5	Angkutan Udara	-	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0.01	0.01	0.01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.15	0.15	0.16
1	Penyediaan Akomodasi	0.00	0.00	0.00
2	Penyediaan Makan Minum	0.15	0.15	0.16
J	Informasi dan Komunikasi	1.50	1.41	1.39

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.72	0.72	0.71
1	Jasa Perantara Keuangan	0.51	0.50	0.50
2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	-	-
3	Jasa Keuangan Lainnya	0.21	0.22	0.21
4	Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
L	Real Estat	2.25	2.12	2.01
M,N	Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.94	5.78	5.75
P	Jasa Pendidikan	5.50	5.47	5.39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.22	1.21	1.20
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.80	1.83	1.80
	Total	100.00	100.00	100.00

c) Distribusi PDRB Per Bidang Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku

Kontribusi Sub Lapangan Usaha Pertanian dan Peternakan terhadap Lapangan Usaha Pertanian, Kehutana, dan Perikanan adalah sebesar 51.02%, sedangkan Sub lapangan usaha perikanan sebesar 45.65%. Pada sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kontribusi PDRB Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Peternakan relative sama yakni sekitar 13-16%. Secara rinci, Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Per Bidang Lapangan Usaha, 2014-2015 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 21. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kab. Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Per Bidang Lapangan Usaha, 2014-2015

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100	100	100
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	51.35	50.70	51.02
a.	Tanaman Pangan	15.64	16.60	16.79
b.	Tanaman Hortikultura	7.28	6.40	6.36
c.	Tanaman Perkebunan	14.20	14.02	13.86
d.	Peternakan	13.42	12.93	13.29
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	0.81	0.75	0.71
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	3.54	3.29	3.33
3	Perikanan	45.10	46.02	45.65

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
B	Pertambangan dan Penggalian	100	100	100
1	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	100	100	100
C.	Industri Pengolahan	100	100	100
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	57.86	59.62	59.76
3	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.24	1.22	1.19
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.70	0.66	0.67
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.13	0.13	0.14
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.01	0.01	0.01
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	-	-
10	Industri Barang Galian bukan Logam	4.65	4.75	5.05
11	Industri Logam Dasar	-	-	-
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	8.57	8.39	8.09
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan	11.73	11.20	10.73
15	Industri Furnitur	14.66	13.51	13.88
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.45	0.50	0.49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	100	100	100
1	Ketenagalistrikan	98.09	97.81	97.61
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	1.91	2.17	2.39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100	100	100
F	Konstruksi	100	100	100
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100	100	100
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0.95	0.88	0.85
2	Perdagangan Besar dan Eceran,	99.05	99.12	99.15

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
	Bukan Mobil dan Sepeda Motor			
H	Transportasi dan Pergudangan	100	100	100
1	Angkutan Rel	-	-	-
2	Angkutan Darat	84.15	84.11	84.34
3	Angkutan Laut	12.29	12.50	12.32
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3.15	2.99	2.94
5	Angkutan Udara	-	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0.40	0.41	0.40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100	100	100
1	Penyediaan Akomodasi	1.37	1.34	1.23
2	Penyediaan Makan Minum	98.63	98.66	98.77
J	Informasi dan Komunikasi	100	100	100
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100	100	100
1	Jasa Perantara Keuangan	72.94	72.72	73.21
2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	-	-
3	Jasa Keuangan Lainnya	27.06	27.28	26.79
4	Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
L	Real Estat	100	100	100
M,N	Jasa Perusahaan	100	100	100
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100	100	100
P	Jasa Pendidikan	100	100	100
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100	100	100
R,S,T,U	Jasa lainnya	100	100	100

4) PDRB Perkapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. Pada tahun 2013 PDRB perkapita Kabupaten Muna Barat sebesar Rp. 18,42 Juta, Pada tahun 2014 sebesar Rp. 20,23 Juta, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 22.6 Juta per kapita per tahun. Pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2014 sebesar 9.83% dan padat tahun 2015 meningkat 11,78%.

Tabel II. 22. PDRB Per Kapita menurut Lapangan Usaha (Ribu Rp), 2013–2015

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,403.7	8,209.8	8,534.0
B	Pertambangan dan Penggalian	1,815.1	2,039.5	2,567.4

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
C.	Industri Pengolahan	707.5	779.7	817,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.2	5.2	5.3
1	Ketenagalistrikan			
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es			
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.1	5.5	5.2
F	Konstruksi	2,950.3	3,248.9	4,226.0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,806.5	1,963.5	2,168.8
H	Transportasi dan Pergudangan	271.4	282.9	308.0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.5	30.3	35.8
J	Informasi dan Komunikasi	234.1	233.6	243.7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	136.8	151.4	166.9
L	Real Estat	404.0	406.2	425.2
M,N	Jasa Perusahaan	3.7	3.8	4.3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,149.0	1,236.2	1,312.5
P	Jasa Pendidikan	969.4	1,060.4	1,163.3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219.4	235.1	259.3
R,S,T,U	Jasa lainnya	307.3	335.5	366.7
	PDRB PERKAPITA	18,417.0	20,227.2	22,609.8

5) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Angka garis kemiskinan Kabupaten Muna Barat tahun 2014 sebesar Rp.253.795 per kapita per bulan, meningkat menjadi Rp.269.838 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 6,32 persen pada tahun 2015. Artinya bahwa penduduk dengan pendapatan perkapita antara Rp.253795 dan Rp.269.838 yang tidak termasuk kategori miskin pada tahun 2014 menjadi kategori miskin pada tahun 2015. Dengan demikian persentase penduduk miskin pada tahun 2015 menjadi lebih meningkat. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin diperkirakan 11 ribu jiwa atau 14,46 persen, sedangkan di tahun 2015 jumlah penduduk miskin menjadi 11,8 ribu jiwa atau 15,45 persen.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah (tahun)), serta pengeluaran per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dibagi menjadi 4 kategori yakni :

- Kategori Rendah = $IPM < 60$;
- Kategori Sedang = $60 < IPM < 70$,
- Kategori tinggi = $70 < IPM < 80$; dan
- kategori Sangat Tinggi = $IPM > 80$.

Tabel. II.23. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2013-2015 di Kabupaten Muna Barat

No	Uraian	Tahun			Sultra
		2014	2015	2016	2015
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,76	69,76	69,76	70,39
	Rata-Rata Lama Sekolah / RLS (Tahun)	6,22	6,23	6,23	8,18
2	Harapan Lama Sekolah / HLS (tahun)	11,59	11,82	12,10	13,07
3	Tingkat Daya Beli/ Pengeluaran per kapita (Rp. 1000)	7.666	7.742	7.824	8.697
	IPM	61,92	62,29	62,57	68,75

Sumber : BPS dan Bappeda Muna Barat , 2016

Secara umum posisi pembangunan manusia Muna Barat masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 adalah 62,57 atau berada pada urutan ke-14 dari 17 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun demikian, capaian IPM Kabupaten Muna Barat berada pada kategori yang sama dengan IPM Sulawesi Tenggara yakni berada pada Kategori Sedang.

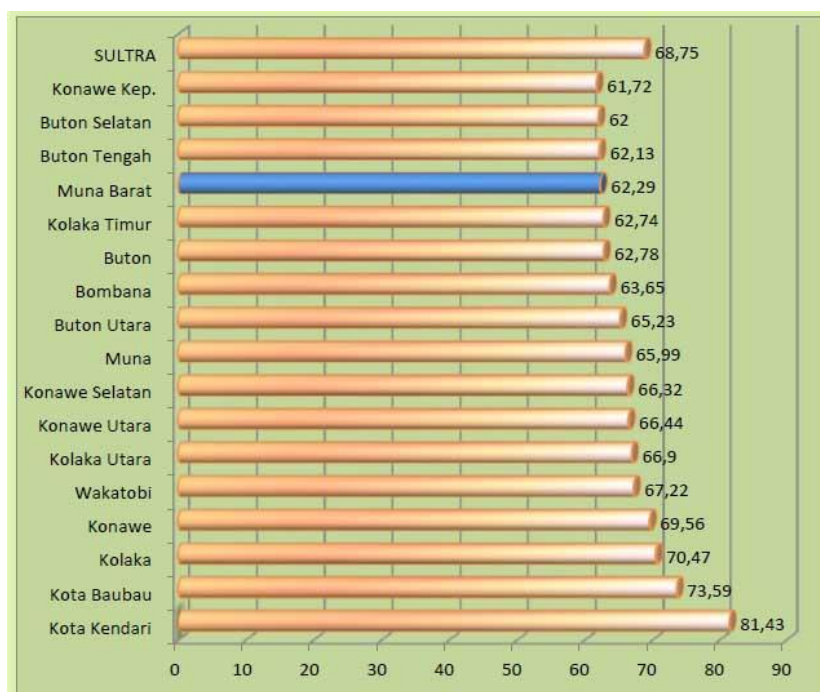
Pembangunan manusia bidang pengeluaran dan pendidikan di Muna Barat menunjukkan hasil yang mulai membaik. Namun untuk bidang kesehatan, pembangunan Muna Barat mengalami stagnasi sehingga membutuhkan program percepatan pembangunan. Capaian pembangunan manusia bidang kesehatan yang diukur dari angka

harapan hidup (AHH). Angka harapan hidup di Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2015 sebesar 70,39 tahun lebih tinggi dibanding Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Muna Barat sebesar 69,76. Untuk dapat mencapai Angka harapan hidup (AHH) yang bisa mendekati AHH Sulawesi Tenggara, program dibidang kesehatan harus semakin ditingkatkan pada tahun mendatang.

Capaian pembangunan manusia bidang pendidikan yang diukur dari harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) . Harapan Lama Sekolah Sulawesi Tenggara tahun 2015 sebesar 13,07 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,18 tahun. Sedangkan untuk Kabupaten Muna Barat Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2015 sebesar 11,62 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 6,23 tahun. Dari kedua indikator pendidikan tersebut (HLS dan RLS) capaian Kabupaten Muna Barat masih relatif jauh tertinggal dibanding dengan capaian indikator pendidikan Sulawesi Tenggara. Dengan demikian diharapkan upaya-upaya peningkatan capaian indikator pendidikan tersebut harus lebih ditingkatkan melalui berbagai program yang lebih baik dengan dukungan pendanaan yang lebih memadai.

Capaian pembangunan manusia bidang pengeluaran yang diukur dari pengeluaran perkapita (PPP) di Sulawesi Tenggara sebesar 8.697 ribu rupiah pada tahun 2015, sedangkan Kabupaten Muna Barat sebesar 7.063 ribu rupiah. Dari 17 kabupaten/kota se Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat menempati urutan ke-12 dalam hal capaian kemampuan daya beli berada di atas Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan .

Perbandingan IPM Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten/ Kota Lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 terlihat pada gambar II. 2.



Gambar II. 2.

Perbandingan IPM antar Kab/Kota Se Sulawesi Tenggara Tahun 2015

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2015

Berdasarkan gambaran perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Muna Barat, ada minimal 3 (tiga) hal yang perlu dicermati dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara yakni:

- (1) Capaian pembangunan manusia dari indikator besaran pengeluaran perkapita (PPP) Muna Barat lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Kecepatan pembangunan manusia bidang kelayakan hidup di Muna Barat lebih rendah dibanding Sultra.
- (3) Pencapaian indeks kelayakan hidup di Muna Barat cenderung lebih rendah dibanding Sultra.

2) Angka partisipasi kasar dan Angka partisipasi Murni.

Perkembangan Angka partisipasi kasar (APK) dan Angka partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Muna Barat masih sangat rendah. Pada tahun 2016 APK pada tingkat SD telah mencapai 110.8% dan jenjang pendidikan SMP sebanyak 98.38%. Walaupun demikian, Angka Partisipasi Murni masih cukup rendah dimana APK jenjang SD sebesar 92.5% dan APM SMP sebesar 85.4%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak usia SD dan SMP yang tidak mengikuti pendidikan tingkat SD dan SMP masih cukup tinggi.

3) Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 kelahiran di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 adalah sebesar 993.4 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 994.3. Angka kematian bayi (AKB) dan Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 24. Angka kematian bayi (AKB) dan Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Bayi Lahir	AKB (per 1000 kelahiran)	AKHB (per 1000 kelahiran)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)x1000	(6)= 1000-(5)
1	2015	10	1514	6,60	993,4
2	2016	8	1418	5,64	994,3

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

4) Angka usia harapan hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Usia harapan Hidup di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 relatif stabil yakni sebesar 69.76.

5) Angka Balita Gizi Buruk

Angka balita gizi buruk di Kabupaten Muna Barat berfluktuatif dimana pada tahun 2013 angka gizi buruk per 1000 balita adalah 2.3, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 0.64 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.05. Angka Balita Gizi Buruk di Kabupaten Muna Barat selama Tahun 2013-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 25. Angka Balita Gizi Buruk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Balita	Jumlah Balita Gizi Buruk	Angka Balita gizi buruk per 1000 balita
1	2013	4773	11	2.30
2	2014	5937	7	1.18
3	2015	6255	4	0.64
4	2016	6688	7	1.05

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

6) Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 adalah sebesar 94.93% atau angka pengangguran sebesar 5.07%. Ditinjau dari jenis kelamin, tingkat pengangguran tertinggi pada kaum perempuan yakni sebesar 6.20%, sedangkan jenis kelamin laki-laki sebesar 3.96%. Rasio Penduduk Yang Bekerja dan Angka Pengangguran di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 26. Rasio Penduduk Yang Bekerja dan Angka Pengangguran di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015

No	Uraian	Tahun		
		Lak--Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk yang bekerja	66.351	56.870	123.191
2	Angkatan Kerja	69.088	60.680	129.768
3 = (1)/(2)	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	96.04	93.72	94.93
4	Angka Pengangguran (%)	3.96	6.28	5.07

Sumber : BPS, 2016

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

1) Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk

Jumlah grup Kesenian per 10.000 penduduk (JKK) di Kabupaten Muna Barat tahun 2014-2016 relatif sama yakni 1.45. atau sebanyak 11 Grup Kesenian. Kegiatan kesenian di Kabupaten Muna Barat belum didukung dengan ketersediaan. Perkembangan Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2015 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 27. Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2015

No	Tahun	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Penduduk	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk
1	2014	11	76,061	1.45
2	2015	11	77,084	1.43

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

2) Klub/ Organisasi Olahraga dan Sarana Olahraga

Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu lumbung atlet-atlet olahraga berprestai di Sulawesi tenggara khususnya olahraga Karate, Sepak Takraw, dan Atletik. Perkembangan olahraga di Kabupaten Muna Barat belum didukung oleh Gedung/ Lapangan Olahraga yang representatif.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Isu utama peningkatkan kualitas pelayanan umum adalah efisiensi dan akurasi pelayanan birokrasi yang cepat, murah, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang pemerintahan. Hal ini merupakan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk merealisasikan peningkatan kualitas pelayanan publik dimaksud.

Urusan wajib pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

2.3.1 Fokus Urusan Wajib pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Kondisi pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Muna Barat dapat dilihat dari 6 aspek yakni aspek pelayanan pendidikan dasar, aspek pendidikan PAUD, Aspek Fasilitas Pendidikan, Aspek Kelululusan, Aspek Angka Putus Sekolah, Aspek Angka , Melanjutkan pendidikan, dan Aspek kualifikasi guru.

a) Aspek pelayanan pendidikan dasar

(i) Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 adalah 95.95 sedangkan pada jenjang SMP/MTs adalah 65.67. Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 adalah 84.97. Analisis Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 28 Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Sekolah			Jumlah penduduk Kelompok Umur			Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 pddk usia sekolah		
		SD/MI	SMP/MTs	Total	SD/MI (7-12 Tahun)	SMP/MTs (13-15 Tahun)	Total	SD/MI	SMP/MTs	Total
1	2015	95	35	130	9413	3649	13062	100.92	95.92	99.53
2	2016	95	37	132	9901	5634	15535	95.95	65.67	84.97

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

(ii) Rasio guru per 1.000 murid

Rasio guru per 1.000 murid jenjang SD/MI di Kabupaten Muna Barat tahun 2015 adalah 38.54 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 41.48. Sementara Rasio guru per 1.000 murid jenjang SMP/MTs di Kabupaten Muna Barat tahun 2015 adalah 67.41 dan pada tahun 2016 menurun menjadi 46.73. Selanjutnya Rasio guru per 1.000 murid jenjang SD dan SMP/MTs di Kabupaten Muna Barat tahun 2015 adalah 45.94 dan pada tahun 2016 menjadi 43.24. Penurunan rasio guru pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun diakibatkan oleh peningkatan jumlah murid tidak sebanding dengan peningkatan jumlah guru setiap tahunnya. Analisa Rasio guru per 1.000 murid di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 29. Rasio guru per 10.000 murid di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah Guru			Jumlah Murid			Rasio guru per 1.000 murid		
		SD/MI	SMP/MTs	Total	SD/MI (7-12 Tahun)	SMP/MTs (13-15 Tahun)	Total	SD/MI	SMP/MTs	Total
1	2015	402	242	644	10,430	3,590	14,019	38.54	67.41	45.94
2	2016	455	259	714	10,970	5,543	16,513	41.48	46.73	43.24

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

b) Aspek Fasilitas Pendidikan Dasar

(i) Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan Baik dan Sedang

Kualitas bangunan gedung SD/MI di kabupaten Muna Barat masih sangat minim hal ini terlihat dari Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik dan sedang pada tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 27.39% dan 41.42%. namun demikian, peningkatan/perbaikan kualitas bangunan gedung SD selama tahun 2016 sangat signifikan. Peningkatan cakupan kualitas pelayanan pendidikan SD/MI dengan kondisi Baik dan Sedang diharapkan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100%. Analisis kondisi bangunan SD/MI di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 30. Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan Baik dan Sedang di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

NO	Tahun	Jumlah Bangunan Sekolah SD/ MI					Persentase Sekolah kondisi baik dan Sedang
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total	
1	2015	23	20	87	27	157	27.39
2	2016	75	65	73	125	338	41.42

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

- (ii) Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Seperti pada kondisi bangunan gesung sekolah SD/MI, kualitas bangunan gedung SMP/MTS di Kabupaten Muna Barat juga masih sangat minim. Hal ini terlihat dari persentase Sekolah SMP/MTS yang memiliki kondisi bangunan baik dan sedang pada tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 24.05% dan 29.90%. Peningkatan cakupan kualitas pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan gedung yang Baik dan Sedang diharapkan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100%. Analisis kondisi Sekolah pendidikan SMP/MTs di Kab. Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 31. Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik dan Sedang di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

NO	Tahun	Jumlah Bangunan Sekolah					Persentase Gedung SMP/MTS kondisi baik dan Sedang
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total	
1	2015	9	10	41	19	79	24.05
2	2016	39	22	75	68	204	29.90

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

c) Aspek Pendidikan Anak Usia Dini

Salah satu indikator pelayanan pendidikan terkait dengan Aspek Pendidikan Anak Usia Dini adalah Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (APM-PAUD).

d) Aspek Angka Putus Sekolah (APS)

- (i) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Jumlah siswa SD/ MI tahun 2016 yang mengalami Putus Sekolah sebanyak 4 orang dari 11.778 Jumlah murid SD/ MI. Dengan demikian, angka putus sekolah (APS) SD/MI

di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 adalah 0.03% (Dinas Pendidikan, 2017).

(ii) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Jumlah siswa SMP/ MTs tahun 2016 yang mengalami Putus Sekolah sebanyak 6 orang dari 5.067 Jumlah murid SMP/ MTs di Kabupaten Muna Barat. Dengan demikian, angka putus sekolah (APS) SMP/MTs di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 adalah 0.11% (Dinas Pendidikan, 2017).

e) Aspek Kelulusan dan Aspek Angka Melanjutkan pendidikan

(i) Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Jumlah siswa SD/Mi Kelas 6 di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 sebanyak 1.870 siswa, sementara yang lulus dalam tahun yang sama adalah sebanyak 1.866 siswa. Dengan demikian Angka Kelulusan (AL) SD/MI di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 adalah 99.78% (Dinas Pendidikan, 2017)

(ii) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka Kelulusan (AL) siswa SMP/MTs di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 dan tahun 2016 relatif sama yakni masing-masing adalah 99.60% dan 99.62%. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 32. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah Siswa SMP/MTs Lulus Sekolah	Jumlah Siswa SMP/MTs Kelas 9	AL-SMP/MTs
1	2015	1596	1598	99,60
2	2016	1582	1588	99,62

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

(iii) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Jumlah lulusan siswa SD/MI tahun ajaran 2015/2016 adalah sebanyak 1866 siswa dan jumlah siswa baru tingkat I jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran 2016/2017 adalah sebanyak 1866 siswa. Dengan demikian, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 adalah sebanyak 100% (Pendidikan, 2017).

(iv) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah lulusan siswa SMP/MTs tahun ajaran 2015/2016 adalah sebanyak 1582 siswa dan jumlah siswa baru tingkat I jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran 2016/2017 adalah sebanyak 1446 siswa. Dengan demikian, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 adalah sebanyak 91.4 % (Dinas Pendidikan, 2017).

f) Aspek Kualifikasi Guru

- (i) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SD/ MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah Guru SD/MI tahun ajaran 2016 adalah sebanyak 455 guru dan jumlah guru SD/MI yang berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 236 guru. Dengan demikian, Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan SD/ MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 adalah sebanyak 51.86% (Dinas Pendidikan, 2017)

- (ii) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMP/ MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah Guru SMP/MTs tahun ajaran 2016 adalah sebanyak 259 guru dan jumlah guru SMP/MTs yang berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 233 guru. Dengan demikian, Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 adalah sebanyak 89.96% (Dinas Pendidikan, 2017)

2) Urusan Kesehatan

- a) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 dan tahun 2016 relatif sama yakni masing-masing adalah 0.972 dan 0.959 %. Perkembangan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 33. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah Sarana Kesehatan				Jumlah Penduduk	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk
		Puskesmas	Poliklinik	Pustu	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)x 1000
1	2015	15	-	59	74	76,061	0,972
2	2016	15	-	59	74	77,084	0,959

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

- b) Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Muna Barat sebanyak 1 unit yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk melayani penduduk

Muna Barat Tahun 2016 sebanyak 77.084 jiwa. Dengan demikian, Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 adalah 0.012. Perkembangan Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 34. Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)x1000
1	2015	1	76,061	0,013
2	2016	1	77,084	0,012

Sumber: RSUD, 2017

c) Rasio dokter per 1000 penduduk

Jumlah Dokter di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebanyak 7 Dokter dan Tahun 2017 sebanyak 8 Dokter dari 15 Puskesmas yang ada, Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan 1 Puskesmas 1 dokter masih dibutuhkan 7 orang Dokter. Rasio dokter per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebanyak 0.091 dan pada tahun 2017 menjadi 0.102. Perkembangan rasio dokter per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2015-2017 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 35. Rasio Dokter per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Dokter	Jumlah Penduduk	Rasio Dokter per 1000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)x1000
1	2015	7	76,061	0.092
2	2016	7	77,084	0.091
3	2017	8	78,626	0.102

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

d) Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk dihitung dengan rumus:

Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebanyak 166 orang dan Tahun 2017 sebanyak 198 orang. Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 sebanyak 2.18 dan pada tahun 2017 menjadi 2.57. Perkembangan rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 36. Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)x1000
1	2015	166	76,061	2,18
2	2016	198	77,084	2,57

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

e) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2015 sebanyak 39.78% dan pada tahun 2016 sebanyak 36.62%. Perkembangan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 37. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan defenitif	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2015	548	218	39,78%
2	2016	527	193	36,62%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

f) Cakupan pertolongan persalinan.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Muna Barat tahun 2015 sebanyak 78.97% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 80.51%. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 38. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2015	1745	1378	78,97
2	2016	1729	1392	80,51

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

h) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Jumlah Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 adalah sebanyak 74 Desa dari 86 Desa/ Kelurahan. Dengan demikian, Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 adalah 86%. Hal ini meningkat dibandingkan dengan Cakupan Desa/ Kelurahan UCI tahun 2015 yakni sebesar 84.9%. Perkembangan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 39. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Seluruh Desa/ Kel.	Jumlah Desa/ Kelurahan UCI	Cakupan Desa/kelurahan UCI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2015	86	73	84,9%
2	2016	86	74	86%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

i) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Kasus balita gizi buruk yang ditemukan tahun 2015 sebanyak 1 balita dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 7 balita. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan selama tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebanyak 100%. Perkembangan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.40. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan	Jumlah balita gizi buruk mendapat Perawatam	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
2	2015	1	1	100%
3	2016	7	7	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

j) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 sebanhak 44.44% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 13.59%. Perkembangan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.41 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
2	2015	162	72	44,44%
3	2016	309	42	13,59%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

k) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah penderita DBD yang ditemukan dan ditangani di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 adalah sebanyak 19 Kasus. Dengan demikian, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2016 di Kabupaten Muna barat adalah 100% (Dinas Kesehatan, 2017).

l) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Jumlah masyarakat Miskin Kabupaten Muna Barat tahun 2015 sebanyak 39.140 jiwa. Jumlah pasien masyarakat miskin tahun 2015 dan tahun 2016 diperkirakan sebanyak 2,539 jiwa dan 1,703 jiwa. Sementara jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 pada tahun 2015 sebanyak 1322 pasien dan pada tahun 2016 sebanyak 1312 pasien. Dengan demikian Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2015 dan tahun 2016 secara berturut-turut

adalah 51.86% dan 77.05%. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 42. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah seluruh pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2015	2,539	1322	51,86%
2	2016	1,703	1312	77,05%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

m) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2015 sebanyak 79.88% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 80.10%. Perkembangan Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.43. Cakupan kunjungan bayi Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan kunjungan bayi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
2	2015	1655	1322	79,88%
3	2016	1638	1312	80,10%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

n) Cakupan puskesmas

Jumlah Puskesmas di kabupaten Muna Barat sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 sebanyak 15 Puskesmas yang tersebar pada 11 Kecamatan. Dengan demikian, cakupan puskesmas terhadap wilayah kecamatan di kabupaten Muna Barat adalah 136.36 % (Dinas Kesehatan, 2017).

o) Cakupan puskesmas pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Muna Barat sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 sebanyak 59 Puskesmas yang tersebar

pada 86 Desa/ Kelurahan. Dengan demikian, cakupan puskesmas terhadap wilayah Desa/ Kelurahan di kabupaten Muna Barat adalah 65.11 % (Dinas Kesehatan, 2017).

p) Persentase Posyandu kondisi bangunan baik dan sedang

Jumlah posyandu di Kabupaten Muna Barat adalah sebanyak 117 unit. Persentase Posyandu Kondisi Bangunan Baik dan Sedang pada tahun 2015 sebesar 64.10% dan pada tahun 2016 menjadi 65.81%. Perkembangan persentase Posyandu kondisi bangunan baik dan sedang di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.44. Persentase Posyandu Kondisi Bangunan Baik dan Sedang di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

NO	Tahun	Jumlah Bangunan Posyandu					Persentase Posyandu Kondisi Bangunan Baik dan Sedang
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total	
1	2015	4	71	41	1	117	64.10
2	2016	4	73	39	1	117	65.81

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

q) Persentase Puskesmas kondisi bangunan baik dan sedang

Jumlah bangunan puskesmas di Kabupaten Muna Barat adalah sebanyak 15 unit. Persentase puskesmas dengan kondisi bangunan baik dan sedang pada tahun 2015 sebesar 53.3% dan pada tahun 2016 menjadi 60.0%. Perkembangan persentase puskesmas kondisi bangunan baik dan sedang di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.45. Persentase Puskesmas Kondisi Bangunan Baik di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

NO	Tahun	Jumlah Bangunan Puskesmas					Persentase Puskesmas Kondisi Bangunan Baik
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total	
1	2015	8	-	5	2	15	53,3%
2	2016	9	-	5	1	15	60,0%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

r) Persentase Pustu kondisi bangunan baik dan Sedang

Jumlah bangunan Pustu di Kabupaten Muna Barat adalah sebanyak 61 unit. Persentase pustu dengan kondisi bangunan baik dan sedang pada tahun 2015 sebesar 37.7% dan pada tahun 2016 menjadi 34.4%. Perkembangan persentase pustu Kondisi bangunan baik dan

sedang di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 46. Persentase Pustu Kondisi Bangunan Baik di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

NO	Tahun	Jumlah Bangunan Pustu					Persentase Pustu Kondisi Bangunan Baik
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total	
2	2015	21	2	16	22	61	37.7
3	2016	21	-	18	22	61	34.4

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

3) Urusan Pekerjaan Umum

- a) Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan Sedang

Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 adalah 517.58 km atau meningkat 4.67% dibanding dengan panjang Jalan Kabupaten tahun 2015. Berdasarkan tingkat kerusakan permukaan jalan, kondisi jalan yang baik dan sedang di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 meningkat secara signifikan dibanding tahun 2015. Pada tahun 2016 proporsi jalan dalam kondisi baik telah mencapai 34.55% dan tahun 2015 yang hanya mencakup 21.37. Perkembangan kondisi jalan kabupaten selama tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.47. Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

NO	Tahun	Panjang Kondisi Jalan Kabupaten					Proporsi panjang jalan Kabupaten kondisi baik
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	$(8) = \frac{(3)+(4)}{(7)} \times 100$
1	2014						
2	2015	105.7			388.81	494.58	21.37
3	2016	160.48	18.33	-	338.77	517.58	34.55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

- b) Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Berdasarkan kecepatan kendaraan, kondisi jalan yang baik atau kecepatan kendaraan diatas 40 km/jam di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 adalah 47.64%, yang meningkat secara dibanding tahun 2015 yakni sebesar 37.09%. Perkembangan

kondisi jalan kabupaten berdasarkan kecepatan kendaraan selama tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.48. Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Panjang seluruh jalan kabupaten	Panjang jalan kabupaten alam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2015	494.58	183.46	37.09
2	2016	517.58	246.56	47.64

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

- c) Persentase Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air

Fasilitas penunjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Muna Barat khususnya drainase jalan sampai tahun 2016 belum tersedia. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Muna Barat. Pembangunan Drainase menjadi sangat prioritas untuk mengurangi dampak terjadinya banjir.

- d) Kondisi Saluran Irigasi

Saluran irigasi di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 sepanjang 22.63 KM dengan area persawahan yang dilayani seluas 784 ha. Kondisi saluran irigasi di Kabupaten Muna Barat tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 49. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

NO	Tahun	Panjang Saluran Irigasi Kabupaten (km)					Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)/(7) x100
1	2015	12.00	1.7	1.48	1.4	16.58	72.38
2	2016	17.00	1.83	2.5	1.3	22.63	75.12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

4) **Urusan Perumahan**

a) **Persentase Rumah tangga pengguna air bersih**

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebanyak 54.46%. Minimnya rumah tangga pengguna air bersih disebabkan oleh minimnya ketersediaan sarana dan prasarana jaringan air bersih dan belum adanya pengelolah/ perusahaan daerah Air minum (PDAM). Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 50. Persentase Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah seluruh rumah tangga	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2014	19.560	9.055	46.29
2	2015	20.214	11.302	55.91
3	2016	24.320	13.245	54.46

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2017

b) **Persentase Rumah tangga ber-sanitasi**

Jumlah rumah bersanitasi di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebanyak 32.66%. Rumah tangga tidak bersanitasi umumnya ditemukan pada keluarga berpenghasilan rendah/ miskin.. Perkembangan rumah tangga bersanitasi di kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 51. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah seluruh rumah tangga	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2014	19.560	6493	33.20
2	2015	20.214	7832	38.75
3	2016	24.320	7943	32.66

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2017

c) Lingkungan Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebanyak 27.60%. Masih tingginya lingkungan permukiman kumuh disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana permukiman yang memadai. Kondisi Lingkungan Permukiman Kumuh di kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 52. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Luas Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2014	3621	902	24.91
2	2015	3917	1053	26.88
3	2016	4282	1182	27.60

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2017

5) Urusan Perhubungan

a) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah Sarana dan prasarana transportasi Darat, Laut, dan Udara di Kabupaten Muna Barat tahun 2017 meliputi 2 unit terminal mobil penumpang, 1 unit Pelabuhan pengumpul (Ferry), 3 unit Pelabuhan rakyat, dan 1 Unit Bandara Udara (Dinas Perhubungan, 2017).

b) Rasio Angkutan darat terhadap Penumpang angkutan Darat

Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 sebanyak 135 unit, meningkat signifikan dibanding dengan tahun 2015 yang hanya sebanyak 39 unit. Rasio Angkutan darat terhadap Penumpang angkutan Darat pada tahun 2016 adalah 5.31% dan pada tahun 2015 sebesar 3.37%. Perkembangan rasio angkutan darat terhadap Penumpang angkutan darat di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 53. Rasio Angkutan darat terhadap Penumpang angkutan Darat di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	rata-rata harian penumpang angkutan darat	Jumlah angkutan darat	Rasio Angkutan darat terhadap Penumpang angkutan Darat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2014	1948	60	3.08
2	2015	2256	76	3.37
3	2016	2540	135	5.31

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017

c) Tingkat Kepemilikan KIR angkutan umum

Jumlah angkutan umum di Kabupaten Muna Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah Mobil angkutan umum tahun 2016 adalah sebanyak 41 unit. Tingkat Kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebanyak 75.6% dan tahun 2015 sebanyak 69.2%. Perkembangan tingkat kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 54. Tingkat kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah angkutan umum	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR	Tingkat Kepemilikan KIR angkutan umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2014	34	25	73,5
2	2015	39	27	69,2
3	2016	41	31	75,6

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017

d) Persentase Pemasangan Rambu-rambu Jalan

Berdasarkan investigasi daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Muna Barat tahun 2016, diperoleh bahwa rambu lalu lintas yang dibutuhkan untuk memberi perintah peringatan dan larangan kepada pengguna kendaraan adalah sebanyak 539 unit. Rambu lalu lintas yang ada di kabupaten Muna Barat tahun 2016 yakni sebanyak 33 unit. Dengan demikian, persentase pemasangan rambu-rambu jalan hingga tahun 2016 baru mencapai 6.12%. (Dinas Perhubungan, 2017).

6) Urusan Lingkungan Hidup

a) Persentase penanganan sampah

Sistem persampahan di Kabupaten Muna Barat belum dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Persentase volume sampah yang ditangani pada tahun 2016 sekitar 10.42%. Perkembangan persentase penanganan sampah di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 55. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Volume produksi sampah	Volume sampah yang ditangani	Persentase penanganan sampah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2014	3561	401	11,26
2	2015	3573	413	11,56
3	2016	4029	420	10,42

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

7) Urusan Pertanahan

a) Cakupan luas lahan bersertifikat per 1000 penduduk

Cakupan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Muna barat Tahun 2016 adalah 32.97 sertifikat per 1000 jumlah penduduk mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yakni 28.55 sertifikat per 1000 penduduk. Perkembangan cakupan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 56. Cakupan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	Jumlah Penduduk	Persentase luas lahan bersertifikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)x1000
1	2014	2198	76,061	28.90
2	2015	2201	77,084	28.55
3	2016	2592	78,626	32.97

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2017

b) Persentase penduduk yang memiliki lahan

Jumlah Penduduk yang memiliki lahan di Kabupaten Muna barat Tahun 2016 adalah 33.45% yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yakni 29.88%. Perkembangan jumlah penduduk yang memiliki lahan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 57. Persentase penduduk yang memiliki lahan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang memiliki lahan	Jumlah Penduduk	Persentase luas lahan bersertifikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)x100
1	2014	20.215	76,061	26.58
2	2015	23.034	77,084	29.88
3	2016	26.303	78,626	33.45

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2017

8) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Keberadaan/ Ketersediaan Database kependudukan skala Kabupaten dan Penerapan KTP-el Nasional berbasis NIK.

Keberadaan/ Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten telah ada sejak tahun 2015. Sementara itu, Penerapan KTP-el Nasional berbasis NIK di Kabupaten Muna Barat belum sepenuhnya diterapkan akibat server pelayanan KTP-el masih bergabung pada Kabupaten Muna (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017)

b) Rasio penduduk berKTP-el per satuan penduduk

Sesuai dengan data kependudukan skala kabupaten tahun 2016, rasio penduduk Muna Barat yang wajib KTP dan memiliki KTP-el sekitar 39.03%. Jumlah penduduk Kabupaten Muna barat usia >17 tahun dan wajib ber KTP-el tahun 2016 adalah sebanyak 43.273 jiwa dan yang telah memiliki KTP-el sebanyak 16.889 jiwa (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017).

Untuk mengoptimalkan tingkat kepemilikan KTP-el oleh masyarakat Muna Barat maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana pengelolaan KTP-el serta adanya langkah-langkah inovatif berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima (system jempot bola).

c) Rasio bayi berakte kelahiran,

Jumlah seluruh bayi yang lahir hidup di kabupaten Muna Barat tahun 2016 sebanyak 1418 jiwa dan yang memiliki akta kelahiran sebanyak 1173 bayi atau 82.72%. Sementara jumlah anak dibawah usia 17 tahun di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 sebanyak 29790 dan yang memiliki akte kelahiran sebanyak 53% (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017)

d) Tingkat Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Jumlah total Akte Kelahiran yang dimiliki oleh masyarakat Muna Barat sampai tahun 2016 adalah sebanyak 23.333 Akte Kelahiran dari 78.360 penduduk Kabupaten Barat. Dengan demikian, tingkat kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 adalah 297.

9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Tingkat Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta

Jumlah Pekerja Perempuan di sektor swasta dan sektor pemerintah pada tahun 2015 sebanyak 840 orang, dimana jumlah pekerja di lembaga pemerintah sebanyak 601 orang dan di lembaga swasta sebanyak 239 orang. Dengan demikian, pada tahun 2015 tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 72% dan di lembaga swasta sebanyak 38% (DP3KB, 2017)

b) Rasio Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT)

Pada tahun 2016 jumlah kasus KDRT sebanyak 12 kasus atau mengalami penurunan sebesar 3 kasus (20%) dibanding kasus KDRT tahun 2015 yakni 15 Kasus. Rasio KDRT di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 adalah 0.02%. Perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 58. Rasio Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Seluruh rumah tangga	Jumlah KDRT	Rasio KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	$\frac{(5) = (4)}{(3) \times 100}$
1	2014	19.138	2	0,01
2	2015	20.257	15	0,07
3	2016	40.307	12	0,02

Sumber: DP3KB, 2017

- c) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Selama 3 tahun terakhir, jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersifat fluktuatif. Tingkat penyelesaian atas pengaduan kasus kekerasan tersebut adalah sebesar 100%. Perkembangan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 59. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah pengaduan kekerasan yang terselesaikan	Persentase Penyelesaian pengaduan tindakan kekerasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3) x 100
1	2014	3	3	100%
2	2015	23	23	100%
3	2016	14	12	100%

Sumber: DP3KB, 2017

10) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a) Rata-rata jumlah anak per keluarga

Jumlah anak di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 sebanyak 15.663 orang dan jumlah keluarga sebanyak 21.335 keluarga. Dengan demikian, rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 0.73 orang. Kondisi jumlah rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2015 dan 2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 60. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Seluruh Keluarga	Jumlah Seluruh Anak	Rata-rata jumlah anak per keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)
1	2015	20.527	15.770	0,77
2	2016	21.335	15.563	0,73

Sumber: DP3KB, 2017

- b) Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB)

Perkembangan pembangunan Keluarga Berencana di kabupaten Muna Barat selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari rasio akseptor Keluarga Berencana

di kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebesar 77.5% dan mengalami peningkatan di banding dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 61%. Perkembangan Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.61. Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah seluruh pasangan usia subur	Jumlah Akseptop KB	Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3) x 100
1	2014	13.354	8.153	61
2	2015	13.169	8.215	62,4
3	2016	13.267	10.228	77,5

Sumber: DP3KB, 2017

c) Cakupan peserta KB aktif,

Keberhasilan Perkembangan pembangunan Keluarga Berencana di Kabupaten Muna Barat selama 3 tahun terakhir juga ditunjukkan dengan cakupan peserta KB Aktif. Hal ini terlihat dari Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 sebesar 68.37% dan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 61%. Perkembangan Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.62. Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah seluruh pasangan usia subur	Jumlah peserta program KB aktif	Cakupan peserta KB aktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3) x 100
1	2015	13.169	8.010	61
2	2016	13.267	9.058	68,27

Sumber: DP3KB, 2017

d) Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Berdasarkan Data Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I Tahun 2014, Jumlah keluarga prasejahter dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Muna Barat sebesar 6.924 dan 6.586 keluarga secara berturut-turut. Sedangkan jumlah keluarga sejahtera sebanyak 7.017 jiwa. Dengan demikian, persentase

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I di kabupaten Muna barat adalah 65.8% (DP3KB, 2017).

11) Urusan Sosial

a) Jumlah Sarana sosial

Sarana sosial yang ada di Kabupaten Muna Barat meliputi panti asuhan dan Panti rehabilitasi. Jumlah Panti Asuhan di Kabupaten Muna Barat sampai tahun 2016 sebanyak 5 unit dan Panti rehabilitasi sebanyak 1 unit (Dinas Sosial, 2017).

b) Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sosial,

Pada tahun 2016, Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Muna Barat adalah sebanyak 2795 jiwa dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 2295 orang. Dengan demikian, persentase PMKS yang memperoleh bantuan social di kabupaten Muna barat tahun 2016 adalah sebanyak 82.11% (Dinas Sosial, 2017).

12) Urusan Ketenagakerjaan

a) Angka partisipasi angkatan kerja

Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 adalah sebanyak 129.768 jiwa dan jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas adalah sebanyak 123.191 jiwa. Dengan demikian, angka partisipasi angkatan kerja di kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 adalah 94.93% (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 2017).

13) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM

Peningkatan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2014-2016 adalah sebesar 10.93%, sementara peningkatan Jumlah BPR/LKM sebesar 26.54%. Perkembangan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 63. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM	Jumlah BPR/LKM aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2014	3544	10
2	2015	3998	13
3	2016	4360	16
Pertumbuhan (%)		10.93	26.54

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2017

b) Persentase koperasi aktif

Peran koperasi sebagai soko guru ekonomi memegang sangat penting dalam perekonomian masyarakat Muna Barat. Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Muna Barat selama 3 tahun terakhir adalah 26.38% per tahun, sementara pertumbuhan koperasi aktif rata-rata 31.60%. Persentase koperasi aktif tahun 2016 adalah 88.72% sementara tahun 2014 adalah 82.14%. Perkembangan koperasi di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 64. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Seluruh Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase koperasi aktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2014	84	69	82,14
2	2015	116	101	87,07
3	2016	133	118	88,72
Pertumbuhan (%)		26.38	31.60	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2017

c) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Disamping Koperasi, UMK (Usaha Mikro dan Kecil) di Muna Barat juga memegang peran penting dalam perekonomian masyarakat Muna Barat. Perkembangan jumlah UMK di Kabupaten Muna Barat selama 3 tahun terakhir adalah 10.75% per tahun, sementara pertumbuhan Usaha Menengah rata-rata 81.32% per tahun. Persentase Usaha Mikro dan Kecil selama 3 taun terakhir sekitar 99% dari jumlah usaha yang ada di Kabupaten Muna Barat. Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 65. Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Usaha				Persentase Usaha Mikro dan Kecil
		Mikro	Kecil	Menengah	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = $\frac{\{(3)+(4)\}}{(6)} \times 100$
1	2014	3210	327	7	3544	99,80
2	2015	3580	405	13	3998	99,67
3	2016	3825	512	23	4360	99,47
Growth (%)		10.75		81.32		

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2017

14) Urusan Kebudayaan

- a) Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya serta Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Upaya pelestarian dan pengembangan budaya daerah ditengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat perlu dilakukan antara lain melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong daya tarik masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal daerah. Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat akan perkembangan dan kelestarian budaya daerah. Selama tahun 2015 dan 2016 jumlah penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah yang dilaksanakan baik dalam daerah maupun partisipasi pemda Muna Barat dalam festival budaya tingkat Provinsi dan Nasional sebanyak 3 kali per tahun. Penyelenggaraan kegiatan Seni dan Budaya juga didukung oleh sarana dan prasarana penyelenggaraan even Seni dan Budaya sebanyak 3 Unit (DISparbud, 2017)

- b) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah Situs yang dilestarikan di kabupaten Muna Barat baru 1 (satu) situs dari 12 situs yang ada. Keberadaan situs-situs tersebut merupakan asset daerah yang sangat berharga. Untuk itu, Pemerintah kabupaten Muna Barat berupaya untuk meningkatkan cakupan pelestarian situs-situs yang ada setiap tahunnya (Disparbud,, 2017)

15) Urusan Ketentraman dan Ketertiban

- a) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Jumlah tenaga Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 sebanyak 152 personil, sementara jumlah penduduk Kabupaten muna barat tahun 2016 adalah 78.004 jiwa. Dengan demikian, rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk Muna Barat tahun 2016 adalah 19,49 (Satuan Polisi Pamong Praja, 2017)

- b) Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk
 Jumlah tenaga Linmas di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 sebanyak 238 personil, sementara jumlah penduduk Kabupaten muna barat tahun 2016 adalah 78.004 jiwa. Dengan demikian, rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk Muna Barat tahun 2016 adalah 30,51 (Satuan Polisi Pamong Praja, 2017)
- c) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
 Peningkatan ketertiban dan keamanan daerah di Kabupaten Muna Barat dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui Sistem Keamanan Lingkungan. Semua desa/ kelurahan di Kabupaten Muna Barat memiliki Pos Siskamling. Dengan demikian, Rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan pada tahun 2016 adalah 100%.
- d) Cakupan patroli petugas Satpol PP
 Cakupan patroli petugas Satpol PP ditentukan dengan Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam. Jumlah patrol petugas satpol PP pada tahun 2016 adalah sebanyak 120 kali atau meningkat sebanyak 25%. Peningkatan patroli petugas satpol pp dilakukan dalam upaya menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah. Cakupan patroli petugas Satpol PP di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 68. Cakupan patroli petugas Satpol PP Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam
(1)	(2)	(3)
1	2014	24
2	2015	96
3	2016	120

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

16) Urusan Ketahanan Pangan

- a) Keberadaan Regulasi ketahanan pangan ditentukan dengan ada/tidak ada peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda dan/atau perkada.

Tabel II. 69. Keberadaan Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Keberadaan Perda Ketahanan pangan (Ada/ Tidak)	Keberadaan Perkada Ketahanan pangan (Ada/ Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2014	Tidak	Tidak
2	2015	Tidak	Tidak
3	2016	Tidak	Tidak

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2017

b) Rata-rata Ketersediaan pangan utama

Rata-rata ketersediaan pangan utama di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 dan 2016 menggambarkan nilai yang sangat baik yaitu 99%, Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muna Barat berada pada posisi yang aman dalam mendukung ketersediaan pangan bagi penduduknya, serta dapat menunjang program ketahanan pangan nasional. Perkembangan Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 70. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah ketersediaan pangan utama (kg)	Jumlah Penduduk	Rata-rata Ketersediaan pangan utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)x1000
1	2015	7.631.316	77.084	99
2	2016	7.909.001	79.889	99

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2017

17) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat menunjukkan ratio 1 yang berarti bahwa jumlah Lembaga Pemberdayaan masyarakat sebanding dengan jumlah kelompok yang menjadi binaan, atau pada setiap 1 LPM memiliki 1 kelompok binaan, kondisi ini masih dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah kelompok binaan LPM (DPMPD, 2017)

b) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Salah satu indikator keaktifan PKK di Kabupaten Muna Barat adalah dengan melihat jumlah kelompok binaannya. Data Tahun

2014 hingga tahun 2016 menunjukkan jumlah PKK sebanyak 86 unit dan jumlah kemompok binaan sebanyak 172 kelompok atau rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 2 kelompok, hal ini berarti bahwa setiap 1 PKK memiliki 2 kelompok binaan dan tidak memiliki penambahan dalam kurun waktu 3 tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian agar dapat lebih ditingkatkan (DPMPD, 2017)

c) Persentase LSM yang aktif

Persentase LSM yang aktif di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014 dan 2015 cukup baik karena berada diatas nilai 50%, terlihat bahwa tahun 2014 sebanyak 73% dan tahun 2015 sebanyak 88%. Perkembangan LSM yang aktif di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 71. Persentase LSM yang aktif di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah LSM	Jumlah LSM Aktif	Persentase LSM yang aktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1	2014	11	8	5
2	2015	17	15	6

Sumber: Badan Kesbangpol, 2017

d) Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi

Selama Tahun 2014 – 2016 di kabupaten Muna Barat belum terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi, hal ini perlu pembinaan yang lebih aktif agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di Kabupaten Muna Barat bisa memiliki peran yang baik dalam dalam mendukung pengembangan kehidupan masyarakat di Kabupaten Muna Barat (DPMPD, 2017).

e) Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif

Keaktifan kader PKK di Kabupaten Muna Barat sejak Tahun 2014 hingga tahun 2016 sangat baik, Hal ini terlihat bahwa seluruh lembaga PKK yang berjumlah 86 ditingkat desa/ kelurahan memilikiperan aktif dalam melaksanakan program dan kegiatan PKK di Kabupaten Muna Barat (DPMPD, 2017)

f) Persentase Posyandu Aktif

Keaktifan posyandu di Kabupaten Muna Barat menunjukkan nilai yang sangat baik. Data tahun 2015 hingga 2016 memperlihatkan bahwa seluruh posyandu yang berjumlah 117 secara keseluruhan aktif melaksanakan program dan kegiatan

pelayanan pada balita yang ada di Kabupaten Muna Barat (Dinas Kesehatan, 2017)

- g) Rasio Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat yang terdapat di Kabupaten Muna Barat sudah didukung dengan swadaya masyarakat, berdasarkan data tahun 2014 – 2016 ratio swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat menunjukkan perkembangan yang sangat baik yaitu 40% pada tahun 2014 dan 2015 selanjutnya terjadi peningkatan 80% pada tahun 2016, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berperan secara sukarela pada program pemberdayaan masyarakat sangat baik (DPMPD, 2017).

18) Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) Rasio jaringan komunikasi terhadap stasioner

Pelayanan jaringan komunikasi di Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh PT. Telkomsel. Kualitas jaringan komunikasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Muna Barat. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna telepon genggam (HP) yang tersebar pada seluruh desa/ kelurahan, Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak penyedia layanan komunikasi untuk membangun dan menggenkakan cakupan layanan Komunikasi di Kabupaten Muna Barat.

- b) Jumlah ragam surat kabar nasional/lokal

Semua Surat Kabar Lokal Sulawesi Tenggara dan beberapa Surat Kabar Nasional telah dapat diakses langsung oleh sebagian besar masyarakat baik dalam bentuk Koran maupun sevara digital melalui media on line.

- c) Keberadaan Web site milik pemerintah daerah

Keberadaan Web site milik pemerintah daerah belum optimal akibat kesulitan untuk diakses dan minimnya konten informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang disajikan. Keberadaan Web site milik pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta media promosi pembangunan daerah.

2.3.2 Fokus urusan layanan pilihan.

1) Urusan Pertanian

- a) Kontribusi Produksi kelompok petani

Berdasarkan data tahun 2016, jumlah produksi padi/bahan pangan utama di Kabupaten Muna Barat adalah 2.910 Ton. Keseluruhan produksi tersebut berasal dari kelompok tani. Hal ini berarti bahwa seluruh (100%) produksi padi/bahan pangan utama

lokal dihasilkan oleh kelompok tani (Dinas Pertanian dan Pangan, 2017).

- b) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Luas area tanaman padi/ bahan pangan utama local lainnya di kabupaten Muna Barat tahun 2016 tercatat sebanyak 1.170 Ha, dengan hasil produksi sebesar 3.223,5 Ton. Hal ini menunjukkan bahwa Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 adalah sebesar 3.6 Ton/ ha (Dinas Pertanian dan Pangan, 2017).

2) Urusan pariwisata

- a) Persentase Kunjungan Wisata Mancanegara

Kunjungan wisata di Kabupaten Muna Barat masih didominasi (99%) oleh wisatawan Domestik, sementara persentase kunjungan wisatawan mancanegara masih kecil yakni 0.24% pada tahun 2016. Perkembangan Kunjungan Wisata Mancanegara di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 72. Persentase Kunjungan Wisata Mancanegara di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Kunjungan Wisata Domestik	Kunjungan Wisata Mancanegara	Jumlah Seluruh Kunjungan Wisata	Persentase Kunjungan Wisata Mancanegara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)x 100
1	2014	11.500	11	11.511	0,15
2	2015	13.228	17	13.240	0,17
3	2016	15.325	27	15.352	0,24

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

3) Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) Tingkat Produksi perikanan

Tingkat produksi perikanan di Kabupaten Muna Barat sangat baik yakni telah mencapai minimal 95% pada tahun 2015 dan 2016. Jumlah produksi ikan yang dihasilkan oleh mesyarakat nelayan sesuai dengan target produksi ikan yang direncanakan. Tingginya tingkat produksi perikanan Muna Barat didukung oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penangkapan ikan. Perkembangan Tingkat Produksi Perikanan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 73. Tingkat Produksi Perikanan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Target Produksi Ikan Daerah (Kg)	Jumlah Produksi Ikan (Kg)	Tingkat Produksi Perikanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 100
1	2015	9.300.000	12.596.900	135,45%
2	2016	9.500.000	9.160.300	96,42%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2017

- b) Jumlah Produksi perikanan ditentukan berdasarkan Jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Produksi perikanan di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2015 adalah 21.716 Ton yang meliputi produksi perikanan tangkap sebanyak 16.830 Ton dan produksi perikanan air tawar sebanyak 4.886 ton. (BPS, 2016). Produksi perikanan di kabupaten Muna Barat tahun 2016, mengalami peningkatan sekitar 7% dibanding dengan tahun sebelumnya. Produksi perikanan di Kabupaten Muna barat tahun 2016 antara lain sebagai berikut: Produksi Kepiting rajungan sebanyak 1.888 ton, Produksi Ikan Air Tawar sebanyak 70,50 ton, Produksi udang vaname sebanyak 638,90 Ton, Produksi ikan bandeng sebanyak 140,00 Ton, Produksi udang windu sebanyak 51,90 Ton, dan Produksi rumput laut sebanyak 72,00 (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2017)

- c) Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Muna Barat sangat tinggi yakni mencapai sekitar 95%. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 sebanyak 95.56% dan pada tahun sebelumnya adalah 93.33%. Perkembangan Tingkat Konsumsi ikan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2015 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 74. Tingkat Konsumsi ikan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Target Konsumsi Ikan Daerah (Kg)	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	Tingkat Konsumsi ikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 100
1	2015	3.363.345	3.139.122	93,33%
2	2016	3.363.345	3.213.863	95,56%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2017

4) Urusan Perdagangan

a) Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal

Jumlah Kelompok pedang dari Tahun 2015 dan tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah kelompok pedagang sebanyak 1.426 kelompok dan menjadi 1.532 kelompok pada tahun 2016. Sementara itu, jumlah pedagang yang mendapatkan bantuan dari Pemda Kabupaten Muna Barat juga mengalami peningkatan sebanyak 9,47 % pada tahun 2015 menjadi 16,32% pada tahun 2016. Perkembangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 75. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal	Jml kelompok pedagang/ usaha informal yg mendapatkan bantuan	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)x 100
1	2015	1426	135	9,47%
2	2016	1532	250	16,32%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

b) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi PDRB perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Muna Barat menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016, dimana tahun 2015 menunjukkan nilai 34,51% dan tahun 2016 menunjukkan nilai 43,28%, hal ini berarti bahwa sektor perdagangan berkembang cukup baik yang juga menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Kabupaten Muna Barat mengalami perputaran yang baik dari tahun 2015 ke tahun 2016. Perkembangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 76. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	Jumlah PDRB (Rp. Juta)	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)x 100
1	2015	24.500	70.991	34,51%
2	2016	70.991	164.024	43,28%

Sumber: BPS, 2017

5) Urusan Perindustrian

a) Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB

Sektor perindustrian memberikan kontribusi yang cukup baik pada PDRB Kabupaten Muna Barat. Pada Tahun 2016 kontribusi sektor perindustri terhadap PDRB Kabupaten Muna Barat adalah 37,4%, dengan jumlah PDRB Perindustrian sebesar Rp.63.502,8 juta sedangkan jumlah PDRB kabupaten Muna Barat dari seluruh sektor penyumbang PDRB adalah Rp.169.142,7 Juta (BPS, 2017)

2.3.3 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan Umum

1) Urusan Perencanaan Pembangunan

a) Keberadaan RPJPD, RPJMD yang ditetapkan dengan Perda dan RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

Perda RKPD Kabupaten Muna Barat sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 telah ada, sesuai dengan mulai terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat. Namun Perda RPJP dan Perda RPJMD belum ada sebab Bupati Definitif baru terpilih pada tahun 2017. Untuk itu, dalam tahun 2017 baru dilakukan penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD Kabupaten Muna Barat.

2) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta jumlah kegiatan pembinaan politik daerah meningkat dari tahun 2015 sebanyak 11 kegiatan menjadi 17 kegiatan pada tahun 2016, (Badan Kesbangpol Kab. Muna Barat, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah Muna Barat terhadap keberadaan LSM, Ormas dan OKP cukup baik.

3) Urusan Penujang Pemerintahan Umum

a) Persentase sarana prasarana perkantoran Pemerintahan Daerah yang baik

Saat ini keberadaan bangunan gedung kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat belum dibangun pada lokasi yang direncanakan, dan masih menggunakan bangunan gedung aset SKPD Pemerintahan Kecamatan. Alokasi anggaran pembangunan diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar wilayah dan peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Muna Barat.

b) Persentase sarana prasarana perkantoran Pemerintahan Desa yang baik

Pada tahun 2016, Jumlah bangunan kantor desa dengan kondisi baik sebanyak 24 unit atau 29%. Sementara yang memiliki kondisi sedang adalah sebanyak 32 unit dan yang memiliki kondisi rusak adalah sebanyak 25 Unit. Perkembangan jumlah bangunan kantor yang berkondisi baik dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan akibat adanya kepatuhan pemda Muna Barat menyediakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 10% dari Dana Perimbangan Non DAK (DPMPD Muna Barat , 2017)

- c) Keberadaan Sistem informasi Pelayanan Perijinan, Sistem Informasi Manajemen Pemda. dan pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Sampai dengan tahun 2016, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang terintegrasi dengan Badan kepegawaian Nasional (BKN) telah diimplementasikan. Sementara Sistem Informasi manajemen Pemerintahan Daerah yang telah diaplikasikan adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA). Namun system informasi ini belum terkoensi secara terintegrasi dengan SKPD. Untuk Sistem Informasi pelayanan Perizinan belum tersedia. Dalam upaya lebih mengefektifkan pelayanan publik maka keberadaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan akan terus dikembangkan khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat. Selanjutnya, Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Muna Barat sejak tahun 2014 belum pernah dilaksanakan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

1) Urusan Pariwisata

- a) Jumlah Restoran/ Rumah Makan dan Penginapan/ Hotel

Kabupaten Muna Barat memiliki destinasi obyek wisata yang cukup menarik yang meliputi wisata alam dan wisata budaya. Dalam upaya mengembangkan daya tarik obyek wisata unggulan daerah maka perlu didukung fasilitas pendukung pariwisata antara lain sarana dan sarana transportasi serta keberadaan Rumah Makan/ Restoran dan Penginapan/ Hotel. Saat ini di kabupaten Muna Barat memiliki 37 rumah makan/ restoran dan belum memiliki Penginapan/ Hotel. Untuk meningkatkan kualitas rumah makan dan keberadaan hotel, Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan memberikan kemudahan pemberian izin untuk pembangunan rumah makan dan Hotel yang representatif. Perkembangan Jumlah Restoran dan Hoel di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 77. Jumlah Restoran dan Rumah Makan Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Rumah makan/ Restoran	Jumlah Penginapan/ Hotel
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2014	19	0
2	2015	29	0
3	2016	37	0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Muna Barat, 2017

2) Urusan Penunjang Pemerintahan Umum

a) Jenis dan jumlah bank dan cabang

Sejak berdirinya daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat tahun 2014, keberadaan jasa perbankan di Kabupaten Muna Barat sangat dibutuhkan. Jumlah Bank di Kabupaten Muna Barat tahun 2016 sebanyak 3 unit yang terdiri dari 2 unit Bank rakyat Indonesia (BRI) dan 1 unit Bank Pembangunan daerah (BPD) Sultra.

3) Bidang Energi Listrik

a) Persentase Rumah Tangga (RT) pengguna Listrik

Persentase Rumah Tangga (RT) pengguna Listrik di kabupaten Muna Barat tahun 2016 adalah sebanyak 45.36%, sedangkan pada tahun 2015 adalah sebanyak 44,59%. Rata-rata peningkatan pelayanan listrik meningkat 11.59% pertahun. Dalam upaya menangani permasalahan minimnya cakupan rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Muna Barat, Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Muna Barat telah melakukan koordinasi dengan pihak PLN Pusat untuk penambahan kapasitas PLN ranting Raha. Selain itu, Pemerintah Daerah terus berupaya menyediakan listrik tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat maupun untuk penerangan jalan. Perkembangan Pengguna Listrik di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.78. Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna energy Listrik di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah RT	Jumlah RT Terlayani Listrik	Persentase Rumah Tangga (RT) pengguna Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 100
1	2014	19560	8942	45.72
2	2015	20214	9013	44.59
3	2016	24320	11031	45.36

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2017

2.4.2. fokus iklim berinvestasi

1) Urusan Ketertiban dan Keamanan

a) Angka kriminalitas per 10.000 penduduk

Kondisi ketertiban dan keamanan di kabupaten Muna barat sangat mendukung adanya iklim berinvestasi yang kondusif. Hal ini didukung oleh angka kriminalitas di Kabupaten Muna Barat sangat rendah selama 3 tahun terakhir yakni 0.63 kasus per 10.000 penduduk. Angka kriminalitas di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 79. Angka kriminalitas di Kab. Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah tindak kriminal yang terjadi	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 10.000
1	2014	76.061	2	0.26
2	2015	77.084	2	0.26
3	2016	79.889	5	0.63

Sumber: 1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Muna Barat, 2017

b) Persentase Jumlah Demo yang diamankan dan ditertibkan

Penyelenggaraan pemerintahan seringkali diperhadapkan dengan ketidakpuasan sebagian elemen/ kelompok masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk pergerakan massa/ demo. Demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat selama ini masih berada dalam suasana wajar dan kondusif. Kecenderrungan jumlah demo yang terjadi di Kabupaten Muna Barat slema tahun 2014-2016 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muna Barat semakin kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan Jumlah Demo yang diamankan dan ditertibkan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II. 80. Persentase Jumlah Demo yang diamankan dan ditertibkan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Demo	Jumlah Demo yang diamankan dan ditertibkan	Persentase Jumlah Demo yang diamankan dan ditertibkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 100%
1	2014	5	5	100
2	2015	7	7	100
3	2016	10	10	100

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

3). Urusan Penanaman Modal

Dalam upaya menjamin kondisi iklim investasi di Kabupaten Muna Barat yang kondusif, dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan. Realisasi Lama Perizinan sesuai target SOP pada tahun 2016 adalah sebesar 93%.

2.4.3. fokus sumber daya manusia.

1) Urusan Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2015, Jumlah penduduk kabupaten Muna Barat sebanyak 77.084 jiwa dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64) adalah sebanyak 44.983 jiwa dan usia tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun) sebanyak 32.101 jiwa (BPS, 2016). Dengan demikian, rasio ketergantungan penduduk atau perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif adalah 71.36%.

2) Urusan Pendidikan

Siswa-siswi asal Muna Barat memiliki prestasi dan sangat diperhitungkan di tingkat provinsi Sulawesi tenggara baik di bidang olahraga maupun prestasi pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan siswa asal Muna Barat yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di Tingkat Nasional baik di bidang olahraga maupun bidang pendidikan. Untuk mengembangkan prestasi siswa, pemerintah daerah perlu terus menyediakan insentif / beasiswa khususnya bagi siwa/siwi keluarga miskin berprestasi dan beasiswa pendidikan S1 bagi alumni SMA Muna Barat yang berprestasi.

3) Urusan Pemuda dan Urusan Olahraga

Di Bidang Kepemudaan dan Olaharaga, Muna Barat merupakan adalah lumbung atlet olahraga Karate di Sulawesi Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan prestasi Muna barat sebagai Juara umum Kejurda Lemkari tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017. Disamping itu, atlet-atlet olahraga karate Muna Barat telah menoreh prestasi di tingkat Nasional.

4) Urusan Penunjang Pemerintahan Umum

Prestasi pemuda dan pemudi asal Muna barat di bidang keagamaan khususnya pada ajang lomba STQ/ MTQ pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara belum menunjukkan prestasi yang tinggi. Namun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat selama tahun 2014-2016 mulai meningkatkan pembinaan keagamaan dalam rangka meningkatkan daya saing pemuda dan pemudi asal Muna Barat untuk berprestasi baik ditingkat provinsi maupun pada tingkat regional/ Nasional.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan pemerintah 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan menggunakan penganggaran secara terpadu yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat peraturan perundang-undangan.

Analisis Pengelolaan Keuangan daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang merupakan kegiatan pada tahap perencanaan sebagaimana telah diatur pada undang-undang tahun 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimaksudkan untuk untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang pemerintahan umum. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan pada realisasi kinerja keuangan daerah masa lalu dan mempertimbangkan kondisi potensi pengembangan pembangunan daerah dan nasional dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2014-2017

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah, meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. penerimaan daerah;
4. pengeluaran daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang SP2N bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah yang memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Artinya bahwa penyusunan RPJM harus memuat kebijakan keuangan daerah yang dituangkan pada pelaksanaan keuangan daerah dapat diketahui pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Muna Barat tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2014-2016 telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pengelolaan keuangan

daerah yang telah dilaksanakan dengan baik diharapkan mampu mendorong perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam pelaksanaannya, sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah Kabupaten Muna Barat meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Muna Barat merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka APBD dalam satu tahun anggaran meliputi :

- hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, hal yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan maupun Sumber Pendapatan Daerah Lainnya akan mendukung pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD telah dilaksanakan melalui berbagai langkah strategi. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah terus diupayakan. Pajak Perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam melakukan intensifikasi pendapatan antara lain :

- Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan PAD.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait di tingkat pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- Mengevaluasi regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Muna Barat selama kurun waktu 2015 – 2017 dan proyeksi pertumbuhan disajikan pada tabel berikut ini.

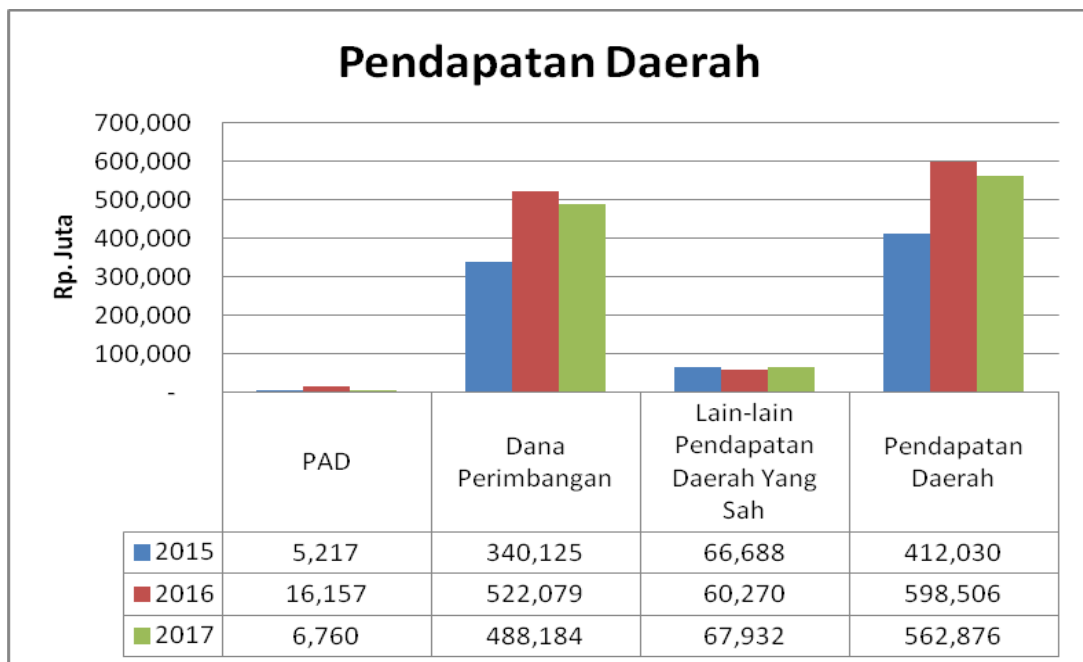
Tabel III.1. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2017 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat

No	Uraian	2015	2016	APBD 2017	Rata-rata Pertumbu- han (%)	Proyeksi Pertumbu- han (%)
		(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)		
1	PENDAPATAN	412,029,751	598,505,504	562,875,593	16.88	15.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5,217,401	16,156,781	6,760,314	13.83	15.00
1.1.1	Pajak daerah	535,805	1,157,452	1,118,944	44.51	15.00
1.1.2	Retribusi daerah	119,414	501,095	1,135,000	208.30	15.00
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2,154,812	2,012,272	1,999,000	(3.68)	15.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	2,407,370	12,485,962	2,507,370	2.06	10.00
		-	-	-		
1.2	Dana Perimbangan	340,124,680	522,078,649	488,183,620	19.80	10.00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	6,537,484	9,912,761	10,672,101	7.66	10.00
1.2.2	Dana alokasi umum	217,533,016	356,155,873	378,289,586	6.21	10.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	116,054,180	156,010,015	99,221,933	(7.54)	10.00
		-	-	-		
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	66,687,671	60,270,163	67,931,660	12.71	15.00
1.3.1	Hibah	3,000,000	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	255	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	3,763,140	6,360,097	3,488,147	(3.72)	10.00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	54,499,107	50,454,977	64,443,513	27.72	15.00

1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	5,425,168	3,455,000	-	-	-
1.3.6	Pendapatan lainnya	-	89	-	-	-

Sumber : BPKAPD Kab. Muna Barat, 2017

Pendapatan Daerah Kabupaten Muna barat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terus mengalami kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16.88 %. Pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan 13.83 %. Peningkatan pendapatan asli daerah dikarenakan adanya peningkatan pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah Dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 19.80 %. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami pertumbuhan sebesar 12.71 % . Pendapatan daerah untuk tahun 2018-2022 diproyeksikan mengalami pertumbuhan optimis rata-rata sebesar 15%.



Gambar III.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 - 2017

(b) Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja diklasifikasikan ke dalam:

1. Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibahsecara Umum hibah dapat diberikan kepada Lembaga/ Organisasi kemasyarakatan apabila telah terpenuhi kebutuhan urusan wajib dan pilihan, yang tidak boleh diberikan secara terus menerus (maksimal 2 tahun sekali). Lembaga/ Organisasi kemasyarakatan dimaksud memiliki legalitas hokum minimal 3 tahun sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 12 tahun 2012. Hibah yang diperbolehkan secara terus menerus hanya dapat diberikan kepada KONI, Pramuka, dan PMI. Hal ini didasarkan pada UU No. 3 Tahu 2005 tentang KONI, Undang-Undang No. 59 Tahun 1958 tentang PMI, dan UU No. 12 Tahun 2010 tentang Pramuka;
 - e. Belanja Bantuan Sosial;
 - f. Belanja Bagi Hasil.
 - g. Belanja Bantuan Keuangan;
 - h. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung, yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

Selama kurun waktu tahun 2014 sampai 2016, kebijakan pengelolaan belanja difokuskan dengan mendorong peningkatan Belanja Modal yang sifatnya produktif, dan mengefisienkan belanja aparatur dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan pelayanan aparatur. Priorotas belanja daerah diarahkan untuk :

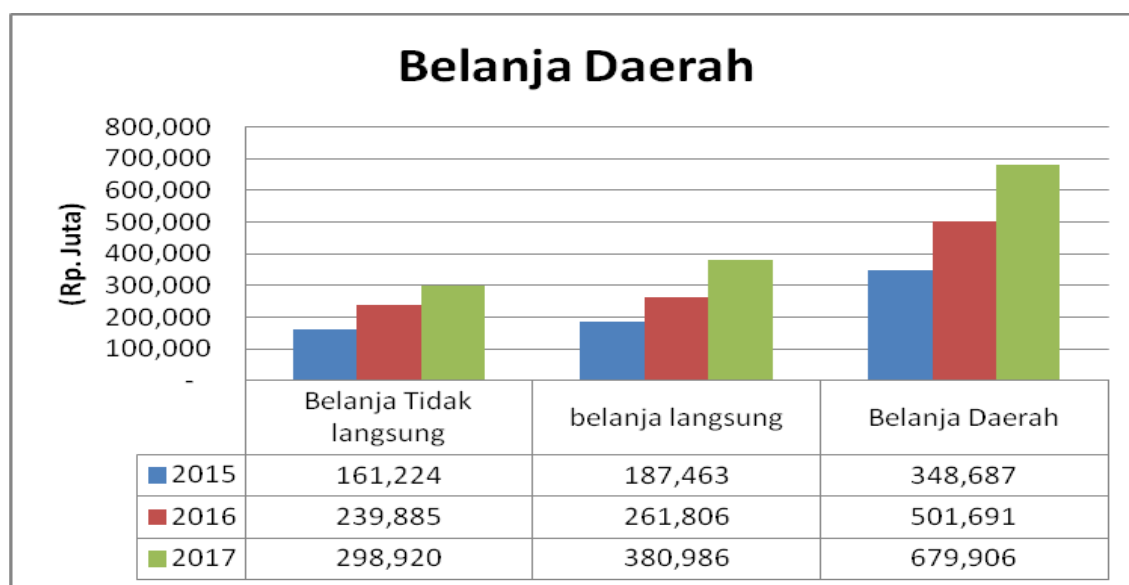
- Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah khususnya Peningkatan Akses wilayah-wilayah potensial melalui Pembangunan Jalan dan jembatan, dan Penerangan Jalan.
- Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong peningkatan Disiplin ASN.
- Peningkatan Produksi dan Nilai tambah hasil pertanian dan Perikanan.

Kinerja pengelolaan belanja daerah Kabupaten Muna Barat dari tahun 2015–2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2017 dan Proyeksi Pendapatan Daerah

NO	Uraian	Real 2015	Real 2016	APBD 2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	161,224	239,885	298,920	24.61	12.00
1	Belanja Pegawai	128,843	149,485	184,597	23.49	10.00
2	Belanja Hibah	720	30,474	9,665	(68.28)	-
3	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	130	-	10.00
4	Belanja Bantuan keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa	31,660	59,734	103,340	73.00	15.00
5	Belanja Bantuan Keuangan Pada Partai Politik	-	193	253	31.31	-
6	Belanja Tidak Terduga	-	-	935		10.00
B	Belanja LANGSUNG	187,463	261,806	380,986	45.52	15.00
1	Belanja Pegawai	8,951	12,501	18,192		
2	Belanja Barang dan Jasa	61,741	86,226	125,478		
3	Belanja Modal	116,771	163,079	237,316		
C	BELANJA DAERAH	348,687	501,691	679,906	35.52	15.00

Sumber: BPKAPD Kab. Muna Barat, 2017



Gambar III.2. Rata Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 s/d Tahun 2017

(c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2015 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.3. Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015	2016	APBD 2017	Rata-rata Pertum- buan (%)	Proyeksi Pertum- buan (%)
		(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)		
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,250	60,136	-	2572	5.00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	2,250	60,136	-	2572	10.00
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,500	-	2,000	-10.56	50
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,500	-	2,000	15.47	50
2	Pembayaran Pokok Utang	1,000	-	-	-100.0	-
C	PEMBIAYAAN NETTO (Surplus/ (Devisit))	(250)	60,136	(2,000)		

Sumber : BPKAPD Kab. Muna Barat, 2017

3.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas di Kabupaten Muna Barat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel . III.4. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kab. Muna Barat 2015-2016

No	Uraian	Jumlah (Rp. Juta)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	
1	ASET				
1.1	ASET LANCAR				
1	Kas di Kas Daerah	1,501.91	53,334.89	101,479.77	90.27
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	678.28	98.53	(85.47)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	803.58	2,934.93	2,210.93	(24.67)
4	Kas di Bendahara FKTP	-	375.06	377.41	0.63
5	Kas di BLUD	-	-	-	-
6	Kas Lainnya	-	113.12	150.17	32.75
7	Setara Kas	-	10,000.00	60,000.00	500.00
8	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-
9	Piutang Pendapatan	-	418.20	2,538.42	506.99
10	Piutang Lainnya	-	-	-	-
11	Penyisihan Piutang	-	(2.00)	(37.05)	1,755.65
12	Beban Dibayar Dimuka	-	5.00	-	-
13	Persediaan	-	1,244.95	2,624.09	110.78
	JUMLAH ASET LANCAR	2,305.49	69,102.42	169,442.27	145.20
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-
2	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-
3	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-
4	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-
5	Dana Bergulir	-	-	-	-
6	Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-
7	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-
8	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-
9	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-
10	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	1,500.00	1,500.00	-
11	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	-	1,500.00	1,500.00	-
		-	-	-	-

No	Uraian	Jumlah (Rp. Juta)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	1,500.00	1,500.00	-
1.3	ASET TETAP	-	-	-	-
1	Tanah	-	-	424.80	-
2	Peralatan dan Mesin	3,426.21	20,783.38	29,806.05	43.41
3	Gedung dan Bangunan	428.20	6,113.38	16,980.16	177.75
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	183,832.25	310,324.94	68.81
5	Aset Tetap Lainnya	14.70	664.05	1,828.77	175.40
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	32,318.65	-
7	Akumulasi Penyusutan	-	(2,883.80)	(25,567.67)	-
		-	-	-	-
JUMLAH ASET TETAP		3,869.11	208,509.26	366,115.70	75.59
1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	-
1	Dana Cadangan	-	-	-	-
		-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN		-	-	-	-
1.5	ASET LAINNYA	-	-	-	-
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
3	Aset Tidak Berwujud	-	-	48.00	-
4	Aset Lain-lain	-	-	1,773.06	-
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-	1,821.06	-
JUMLAH ASET		6,174.61	279,111.68	538,879.03	93.07
2	KEWAJIBAN	-	-	-	-
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55.02	5,892.54	10,369.96	75.98
2	Utang Bunga	-	-	-	-
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-
5	Utang Beban	-	1,188.93	0.47	(99.96)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	48,742.26	15,364.97	(68.48)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		55.02	55,823.73	25,735.41	(53.90)
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-
1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-	-	-

No	Uraian	Jumlah (Rp. Juta)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	
	JUMLAH KEWAJIBAN	55.02	55,823.73	25,735.41	(53.90)
		-	-	-	-
3.	EKUITAS	-	-	-	-
3.1	EKUITAS DANA	-	-	-	-
3.1.1	EKUITAS DANA LANCAR	-	-	-	-
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	2,250.47	-	-	-
2	Cadangan Untuk Piutang	-	-	-	-
3	Cadangan Untuk Persediaan	-	-	-	-
4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-
5	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	2,250.47	-	-	-
		-	-	-	-
3.1.2	EKUITAS DANA INVESTASI	-	-	-	-
1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
2	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	3,869.11	-	-	-
3	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	-	-	-	-
4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	3,869.11	-	-	-
		-	-	-	-
3.1.3	EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-
1	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-
		-	-	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	6,119.58	-	-	-
		-	-	-	-
	EKUITAS	6,119.58	-	-	-
		-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12,239.17	223,287.95	513,143.62	129.81

Sumber : BPKAPD Kab. Muna Barat, 2017

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014-2016

Gambaran Kebijakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2017 dibagi dalam 2 (dua) bagian yakni terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

(a) Proporsi Belanja Aparatur

Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah Kabupaten Muna Barat tahun 2015 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel III.5. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Muna Barat Tahun 2015-2017

No	Tahun	Total Belanja Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase	Pertumbuhan Belanja Aparatur
		(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(%)	(%)
1	2015	169,243	351,187	48.19	-
2	2016	209,740	501,691	41.81	23.93
3	2017	319,074	681,906	46.79	52.13
Rata-Rata tahun 2015-2017					38.03

(b) Proporsi Belanja Pendidikan

Sesuai dengan amanah Pasal 31 ayat 4 amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selama 2 (dua) Tahun terakhir yakni tahun 2016 dan tahun 2017, alokasi dana pendidikan di Kabupaten Muna Barat telah mencapai 20%.

Tabel III.6. Proporsi Belanja Pendidikan tahun 2015-2017

No	Uraian	Total Pagu Anggaran (Rp. Juta)		
		2015	2016	2017
1	Belanja Pendidikan	1,408	100,345	135,981
2	Total Belanja Daerah	348,687	501,691	679,906
3	Proporsi Belanja Pendidikan	0.40	20.00	20.00

(c) Proporsi Belanja Kesehatan

Ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji; (3) Besar anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan ketentuan ini, alokasi belanja di bidang kesehatan sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan yakni tercapainya derajat kesehatan yang terus membaik. Proporsi alokasi dana pada bidang Kesehatan di Kabupaten Muna Barat telah mencapai 10% pada tahun 2017.

Tabel III.7. Proporsi Belanja Kesehatan Tahun 2015-2017

No	Uraian	Total Pagu Anggaran		
		(Rp. Juta)		
		2015	2016	2017
1	Belanja Langsung Urusan Kesehatan	3,091	13,176	38,266
2	Total Belanja Langsung Daerah	187,463	261,806	380,986
3	Proporsi Belanja Kesehatan (%)	1.65	5.03	10.04

Sumber : BPKAPD Kab. Muna Barat, 2017

(d) Proporsi Belanja Modal

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat telah menetapkan peraturan pedoman penyusunan APBD setiap tahun dan menghimbau kepada pemerintah daerah (pemda) agar persentasi belanja modal ditetapkan minimal sebesar 30 persen. Proporsi belanja Modal APBD Kabupaten Muna Barat telah memenuhi himbauan Pemerintah Pusata, dimana sejak tahun 2015 proporsi belanja Modal telah mencapai lebih dari 30%

Tabel III.8. Proporsi Belanja Modal tahun 2015-2017

No	Uraian	Total Pagu Anggaran		
		(Rp. Juta)		
		2015	2016	2017
1	Belanja Modal	116,771	163,079	237,316
2	Total Belanja Daerah	348,687	501,691	679,906
3	Proporsi Belanja Modal (%)	33.49	32.51	34.90

(e) Proporsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 sampai dengan 75 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Alokasi Dana Desa (ADD) dihitung sebesar 10% dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4). Pengalokasian ADD sebesar 10% telah direalisasikan pada APBD Kabupaten Muna barat tahun 2017.

Tabel III.9. Proporsi Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2017

No	Uraian	Total Pagu Anggaran		
		(Rp. Milyar)		
		2015	2016	2017
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	7,999	9,279	38,896
2	Dana Perimbangan Non DAK	224,070	366,069	388,962
3	Proporsi ADD terhadap Dana Perimbangan Non DAK	3.57	2.53	10.00

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat selama tahun 2014-2016 ditujukan pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.10. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Muna Barat Tahun 2014-2016

NO	Uraian	2015	2016	2017
		(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	412,030	598,506	562,876
2	Belanja Daerah	348,687	501,691	679,906
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,500	-	2,000
4= (1-(2+3))	Surplus/ (Defisit) riil	60,843	96,814	(119,030)

Tabel III. 11. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Muna Barat

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100.00	100.00	100.00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber : BPKAPD Kab. Muna Barat, 2017

Tabel III.12. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Muna Barat

No.	Uraian	2014		2015		2016	
		Rp. Juta	% dari SiLPA	Rp. Juta	% dari SiLPA	Rp. Juta	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	2,250	100	60,136	100	119,030	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAPD Kab. Muna Barat, 2017

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Untuk menentukan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat 5 (lima) tahun ke depan perlu dihitung perkiraan

kemampuan anggaran berdasarkan anggaran tahun sebelumnya dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan terjadi.

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang wajib dianggarkan serta merupakan prioritas utama, harus ada pada setiap perencanaan penganggaran. Beberapa belanja periodik yang wajib dan mengikat serta pengeluaran periodik prioritas utama di Kabupaten Muna Barat tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel III.13. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Muna Barat

No	Uraian	2015 (Rp.juta)	2016 (Rp.juta)	2017 (Rp.juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	160,287	210,115	295,925	40.13
1	Belanja Gaji dan Tunjangan, Sertifikasi, dan Premis Asuransi	128,183	148,908	184,101	23.63
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD	420	504	504	-
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Dana Desa	22,491	50,455	64,444	27.72
5	Alokasi Dana Desa	7,999	9,279	38,896	319.21
6	Bantuan Keuangan Kepada Desa (Block Grand APBD Prov)	1,170	-	-	-
7	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Hibah kepada Penyelenggara dan Pengamanan Pemilu (KPU, Panwaslu, Polri, dan TNI)	-	-	3,800	-
	Hibah kepada KONI	-	-	900	-
	Hibah kepada Pramuka	-	-	500	-
8	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	-	936	1,615	72.56
9	Belanja bagi hasil	-	-	-	-
10	Biaya Pemungutan/ Insentif Pajak/ Retribusi	24	33	130	293.75
11	Belanja Tidak Terduga	-	-	935	0
B	Belanja Langsung	11,709	17,634	29,429	66.89
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru, tenaga medis., dan Non PNS	1,788	3,496	7,255	107.50
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
3	Belanja pelayanan Administrasi Pemerintahan (jasa kantor, atk, pejak/ kendaraan, perawatan kantor dan kendaraan, dll)	9,705	13,905	21,930	57.71

No	Uraian	2015 (Rp.juta)	2016 (Rp.juta)	2017 (Rp.juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	Penunjang Operasional KDH/WKDH	125	125	135	8.00
5	Penunjang Operasional DPRD	91	107	110	2.55
C	Pembiayaan Pengeluaran	2,500.00	-	2,000.00	(10.56)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0
2	Pembayaran pokok utang	1,000	-	-	0
3	Penyertaan Modal	1,500	-	2,000	15.47
	TOTAL (A+B+C)	174,497	227,749	327,254	36.65

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Untuk memperkirakan kemampuan anggaran 5 (lima) tahun kedepan, metode sederhana yang dipergunakan adalah metode regresi linear ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Dalam estimasi/ perkiraan kemampuan anggaran dikenal 2 (dua) pendekatan yakni perkiraan pesimis dan perkiraan optimis. Proyeksi pendapatan daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah ini dilakukan berdasarkan pendekatan pesimis dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan pembangunan daerah dan nasional.

a. Proyeksi Pendapatan Tahun 2017-2022

Berdasarkan pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2014-2016 dan memperhatikan asumsi-asumsi perkembangan kondisi Muna Barat 5 (lima) tahun ke depan, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2017 – 2022 secara rinci ditunjukkan pada tabel III.14 dan Tabel III.15.

Tabel III. 14. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 menurut rincian obyek pendapatan

No	Uraian	APBDP 2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
1	PENDAPATAN	565,334	589,262	663,506	729,524	803,360	885,987
1.1	Pendapatan Asli Daerah	24,356	30,518	34,723	39,121	44,118	49,805
1.1.1	Pajak daerah	3,298	4,299	4,943	5,683	6,534	7,512
	BPKAPD						
	Pajak Restoran	-	5	5	5	5	5

No	Uraian	APBD 2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
	Pajak Reklame	6	5	5	5	5	5
	Pajak Penerangan Jalan	527	597	687	790	908	1,045
	Pajak Pengambilan bahan Mineral	2,105	2,995	3,444	3,961	4,555	5,238
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan	660	697	802	922	1,061	1,220
1.1.2	Retribusi daerah	302	1,080	1,625	1,873	2,159	2,489
	RSUD	36	50	58	66	76	87
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	36	50	58	66	76	87
	DPU dan PR	209	755	1,230	1,418	1,634	1,884
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	204	750	1,200	1,380	1,587	1,825
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6	5	30	38	47	59
	Dinas Perhubungan	3	5	10	13	16	20
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3	5	10	13	16	20
	Dinas LH	54	50	58	66	76	87
	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	54	50	58	66	76	87
	BKPMMD dan PTSP	-	-	-	-	-	-
	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	-	-	-	-	-	-
	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pertanian	-	200	230	265	304	350
	Retribusi Tempat pelelangan Ternak	-	200	230	265	304	350
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	20	40	46	53	61
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	-	20	40	46	53	61
	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	1	-	-	-	-	-
	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	APBD 2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2,521	2,522	2,878	3,302	3,809	4,420
	Dinas Kesehatan	1,999	1,999	2,199	2,419	2,661	2,927
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1,899	1,899	2,089	2,298	2,528	2,780
	Dana Non Kapitasi	100	100	110	121	133	146
	BPKAPD	522	523	680	883	1,149	1,493
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	522	523	680	883	1,149	1,493
114	Lain-lain PAD yang sah	18,234	22,617	25,277	28,263	31,616	35,384
	BPKAPD	3,590	7,972	9,168	10,543	12,124	13,943
	Penerimaan Jasa Giro	3,590	5,263	6,053	6,961	8,005	9,206
	Penerimaan Bunga Deposito	-	2,709	3,115	3,582	4,119	4,737
	Pendapatan Dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Dana Bos	14,645	14,645	16,109	17,720	19,492	21,441
	Pendapatan Dana Bos SD	9,445	9,445	10,389	11,428	12,571	13,828
	Pendapatan Dana Bos SMP	5,200	5,200	5,720	6,292	6,921	7,613
1.2	Dana Perimbangan	473,046	489,109	543,946	605,183	673,600	750,075
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	9,961	11,038	12,007	13,081	14,273	15,598
	Bagi Hasil Pajak	5,650	6,554	6,981	7,438	7,930	8,458
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4,304	4,577	4,806	5,046	5,299	5,564
	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1,346	1,977	2,175	2,392	2,631	2,894
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4,311	4,484	5,027	5,643	6,343	7,140
	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	22	24	27	29	32	35
	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	-	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	APBD 2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
	Bagi Hasil Dari luran Eksplorasi dan luran Eksplotasi (Royalti)	2,796	3,517	3,869	4,255	4,681	5,149
	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1,493	943	1,132	1,358	1,630	1,955
1.2.2	Dana alokasi umum	353,873	356,863	392,549	431,804	474,984	522,483
	Dana alokasi umum	353,873	356,863	392,549	431,804	474,984	522,483
1.2.3	Dana alokasi khusus	109,211	121,208	139,390	160,298	184,343	211,994
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67,626	73,955	85,048	97,805	112,476	129,348
	DAK Bidang Pendidikan	11,896	11,876	13,657	15,706	18,062	20,771
	- DAK SD	-	4,221	4,854	5,582	6,420	7,383
	- DAK SMP	-	7,111	8,178	9,404	10,815	12,437
	- DAK SKB	-	544	626	719	827	951
	DAK Bidang Kesehatan dan KB	9,514	14,763	16,977	19,524	22,453	25,821
	- DAK Kesehatan Dasar	-	6,138	7,059	8,118	9,335	10,735
	- DAK Kesehatan Rujukan	-	5,184	5,962	6,856	7,884	9,067
	- DAK Kesehatan Kefarmasian	-	2,376	2,732	3,142	3,614	4,156
	- DAK Keluarga Berencana	-	1,065	1,225	1,408	1,620	1,863
	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	21,545	18,576	21,362	24,567	28,252	32,490
	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3,324	451	519	596	686	789
	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	3,315	-	-	-	-	-
	- DAK Sanitasi Reguler	-	804	925	1,063	1,223	1,406
	- DAK Sanitasi Penugasan	-	2,656	3,054	3,513	4,039	4,645
	DAK Irigasi (Penugasan)	-	4,971	5,717	6,574	7,560	8,694
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1,186	1,515	1,742	2,004	2,304	2,650
	DAK Bidang Pertanian	4,100	3,183	3,660	4,210	4,841	5,567
	DAK Bidang Perdagangan	1,306	5,056	5,814	6,687	7,690	8,843
	DAK Bidang Pariwisata *	1,450	2,000	2,300	2,645	3,042	3,498
	DAK Bidang Transportasi (Afirmasi)	-	8,104	9,320	10,718	12,325	14,174
	DAK Fisik Penyesuaian DAK 2016	9,990	-	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	41,586	47,253	54,341	62,492	71,866	82,646

No	Uraian	APBDP 2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
(DAK) Non-Fisik							
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	1,615	1,972	2,267	2,607	2,999	3,448
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	27,611	26,983	31,031	35,685	41,038	47,194
	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	336	297	342	393	452	519
	Tunjangan Khusus Guru PNSD	1,739	559	643	739	850	977
	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9,680	16,766	19,281	22,173	25,499	29,324
	Bantuan Operasional Kesehatan		14,030	16,135	18,555	21,339	24,539
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana		2,736	3,146	3,618	4,161	4,785
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	604	677	778	895	1,029	1,183
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	67,932	69,635	84,837	85,221	85,643	86,107
1.3.1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	3,488	3,488	3,837	4,221	4,643	5,107
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	3,488	3,488	3,837	4,221	4,643	5,107
	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	507	507	557	613	674	742
	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	914	914	1,006	1,107	1,217	1,339
	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,055	2,055	2,260	2,486	2,735	3,009
	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	12	12	13	14	16	18
1.3.2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	64,444	66,147	81,000	81,000	81,000	81,000
	Dana Desa	64,444	66,147	81,000	81,000	81,000	81,000

Tabel III. 15. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 menurut Jenis Pendapatan

NO	Uraian	APBDP 2017	Proyeksi				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	PENDAPATAN DAERAH	565,334	589,262	663,506	729,524	803,360	885,987
A	Pendapatan Asli Daerah	24,356	30,518	34,723	39,121	44,118	49,805
1	Pajak Daerah	3,298	4,299	4,943	5,683	6,534	7,512
2	Retribusi Daerah	302	1,080	1,625	1,873	2,159	2,489
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,521	2,522	2,878	3,302	3,809	4,420
4	Lain-Lain PAD	18,234	22,617	25,277	28,263	31,616	35,384
B	Dana Perimbangan	473,046	489,109	543,946	605,183	673,600	750,075
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	9,961	11,038	12,007	13,081	14,273	15,598
2	DAU	353,873	356,863	392,549	431,804	474,984	522,483
3	DAK	109,211	121,208	139,390	160,298	184,343	211,994
C	Lain-Lain PAD yang Sah	67,932	69,635	84,837	85,221	85,643	86,107
1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	3,488	3,488	3,837	4,221	4,643	5,107
2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	64,444	66,147	81,000	81,000	81,000	81,000

Pendapatan daerah sesuai dengan APBD tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 565,33 Milyar dan pada tahun 2022 diestimasi akan meningkat menjadi Rp. 885,99 Milyar - dengan asumsi-asumsi :

- 1) Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan oleh:
 - Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi;
 - Peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang berimplikasi pada kemampuan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 - Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBBP2 dan BPHTB.
- 2) Terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, sepanjang tidak ada perubahan kebijakan keuangan yang mendasar dari pemerintah pusat, dengan uraian sebagai berikut :
 - DAU cenderung meningkat setiap tahun seiring kebijakan kenaikan gaji pegawai dan pengaruh inflasi tahunan;
 - DAK cenderung meningkat setiap tahun;
 - Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.

- 3) Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit.
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun, sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Proyeksi Belanja Tahun 2017-2022

Untuk menentukan pagu belanja indikatif maka harus dibuat proyeksi atas belanja daerah yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11, pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan proyeksi belanja daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) melakukan analisis pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang sifatnya wajib dan mengikat
- 2) melakukan proyeksi berdasarkan pertumbuhan belanja wajib dan mengikat dengan memperhatikan kebijakan fiskal nasional dan kondisi perkembangan .kebutuhan pembangunan daerah
- 3) melakukan analisis kapasitas rill anggaran pembangunan daerah selama tahun 2017-2022 untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Proyeksi Belanja Daerah Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 ditunjukkan pada tabel III.16.

Tabel III. 16. Proyeksi Belanja Daerah Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017 (Rp.juta)	Pertum- buhan (%)	2018	2019	2020	2021	2022
A	Belanja Tidak Langsung	293,735		331,324	363,897	396,487	433,388	500,158
1	Gaji /Tunjangan, Sertifikasi, dan Premis Asuransi	183,963	7.50	187,642	201,715	216,844	233,107	250,590
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD	504	-	504	504	504	504	504
3	Belanja Bunga	-	-	19,000	19,000	15,200	11,400	7,600
4	Dana Desa	64,444	15.00	74,110	85,227	98,011	112,712	129,619
5	Alokasi Dana Desa	38,896	15.00	44,731	51,440	59,156	68,030	78,234
6	Bagi Hasil kepada Pemdes	130	15.00	3,052	3,396	3,782	4,212	4,693
7	Belanja Hibah	-						
	Hibah kepada Penyelenggara dan Pengaman Pilkada	3,800	-	-	-	-	-	25,000
	Hibah BOP PAUD (DAK)	1,615	15.00	1,857	2,136	2,457	2,825	3,249
	Hibah Partai Politik	253	10.00	278	306	337	370	407

8	Insentif Pajak/ Retribusi	130	15.00	150	172	198	227	262
B	Belanja Langsung	29,429	20	231,651	34,096	36,793	39,773	43,073
1	Belanja Adm. Umum (BAU)	21,930	5.00	23,026	24,178	25,386	26,656	27,989
2	Belanja BOP/ Modal	7,500	15.00	208,625	9,918	11,406	13,117	15,085
C	Jumlah Belanja	323,164		562,975	397,992	433,280	473,160	543,231

Proyeksi belanja daerah yang sifatnya wajib dan mengikat pada tahun 2017 sebesar Rp 323,16 Milyar. Pada tahun 2018 perkiraan belanja wajib dan mengikat direncanakan menjadi Rp. 562,96 Milyar atau mengalami peningkatan sebesar 74,21%. Peningkatan ini diakibatkan oleh adanya rencana pinjaman daerah dalam rangka percepatan dan pemantapan infrastruktur dasar di Kabupaten Muna Barat. Sementara pada tahun 2022 belanja wajib dan mengikat diperkirakan sebesar Rp.543.23 atau mengalami peningkatan sebesar 68% dibanding tahun 2017, yang disebabkan oleh adanya rencana pembayaran bunga dan pokok utang serta penyediaan biaya penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Muna Barat.

c. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2017-2022

Perkiraan Penerimaan Pembiayaan daerah kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan rencana penerimaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah. Pengelolaan Belanja Daerah khususnya terkait dengan penyerapan belanja diharapkan akan mengalami perbaikan kinerja dari tahun ke tahun sehingga Sisa Lebih perhitungan direncanakan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Dari sisi pembiayaan pengeluaran, direncanakan adanya tambahan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan investasi dan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. serta pembayaran pokok utang/ pinjaman daerah. Gambaran proyeksi pembiayaan daerah 2017-2022 ditunjukkan pada tabel III. 17.

Tabel III. 17. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kab. Muna Barat Tahun 2017-2022

NO	PEMBIAYAAN DAERAH	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	119,030	230,000	24,000	19,200	15,400	12,300
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	200,000	-	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH						
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000	2,000	2,000	42,000	42,000	42,000
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	40,000	40,000	40,000
C	PEMBIAYAAN NETTO (Surplus/ (Devisit))	117,030	228,000	22,000	(22,800)	(26,600)	(29,700)

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya selama periode RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022. sebagaimana ditunjukkan pada tabel III.18. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung di luar belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib, mengikat dan prioritas utama seperti pada tabel III.19, serta rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tabel III.20.

Tabel III. 18. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Muna Barat

No.	Uraian	APBDP 2017 (Rp. Juta)	Proyeksi (Rp. Juta)				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pendapatan	565,334	589,262	663,506	729,524	803,360	885,987
2	Pinjaman Daerah	-	200,000	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	119,030	30,000	24,000	19,200	15,400	12,300
Jml 1	Total penerimaan	684,364	819,262	687,506	748,724	818,760	898,287
	Dikurangi:						
4	Belanja yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	323,164	584,505	427,683	455,274	486,304	546,197
5	Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat	-	-	-	40,000	40,000	40,000
Jml 2	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	323,164	584,505	427,683	495,274	526,304	586,197
Jml1- Jml2	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	361,200	234,757	259,823	253,450	292,456	312,090

Tabel III. 19. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muna Barat

No	Uraian	Proyeksi (Rp. Juta)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Kapasitas Keuangan Daerah	684,364	819,262	687,506	748,724	818,760	898,287
B	Prioritas Belanja dan Pembiayaan	684,364	819,262	687,506	748,725	818,760	898,287
1	Prioritas I (Wajib dan Mengikat)	323,164	584,505	427,683	495,274	526,304	586,197
1.1	Belanja Tidak Langsung	293,735	352,854	393,588	418,482	446,531	503,124
1.2	Belanja Langsung	29,429	231,651	34,096	36,793	39,773	43,073
1.3	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	40,000	40,000	40,000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	361,200	234,757	259,823	253,450	292,456	312,090

No	Uraian	Proyeksi (Rp.Juta)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Rencana alokasi pengeluaran Prioritas II	354,016	230,257	246,822	242,450	279,397	297,034
2.1	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH	165,820	83,890	95,130	80,870	99,260	91,260
	- Pembangunan Jalan, Drainase dan Perumahan	136,250	60,000	70,000	55,000	65,000	55,000
	- Pengadaan Lampu Jalan	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	- Jaringan Air Minum	1,100	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	- Pengadaan Obat dan Peningk. Layanan Kesehatan	4,850	4,850	4,850	4,850	5,000	5,000
	- Peningk. Produksi dan Nilai tambah hasil Pertanian/ Perikanan	9,400	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	- Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Usaha Mikro dan Kecil	2,630	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
	- Pembangunan Gedung kantor dan Penataan Kawasan Pemerintahan	5,000	-	-	-	5,000	5,000
	- Pakaian Seragam Sekolah	-	5,000	5,000	5,000	8,000	8,000
	Pemberiaan Penghargaan bagi Siswa SD dan SMP keluarga Miskin yang Berprestasi	-	300	300	300	300	300
	Pemberiaan Beasiswa Pendidikan S1 bagi Siswa SMA/SMK Berprestasi	-	240	480	720	960	960
	- Pembangunan Destinasi Wisata dan LH	3,590	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	- Insentif Pemuda/ Pemudi Berprestasi	-	500	1,500	2,000	2,000	4,000
2.2	Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah	72,026	83,454	87,247	100,224	115,137	142,274
	Pengelolaan DAK	67,626	73,955	85,048	97,805	112,476	129,348
	Pengelolaan Dana Kapitasi/ Non Kapitasi	4,400	1,999	2,199	2,419	2,661	2,927
	Penyelenggaraan Porda	-	7,500	-	-	-	10,000
2.3	Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya	111,902	59,913	61,445	58,356	62,000	61,500
	Peningkatan Sarana Pelayanan Perkantoran	22,400	10,000	10,000	6,000	6,000	5,500
	Peningkatan Operasional/ kualitas Layanan SKPD	89,502	49,913	51,445	52,356	56,000	56,000
	Penanganan Konflik Pertanahan	4,268	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000
3	Rencana alokasi pengeluaran Prioritas III	7,185	4,500	13,000	11,000	13,059	15,056
3.1	Belanja Tidak Langsung	5,185	2,500	11,000	11,000	13,059	15,056
	Tambahan Penghasilan Pegawai	-	-	8,000	8,000	10,000	12,000
	Bantuan Hibah :						
	- Hibah pada KONI, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan/ keagamaan	4,250	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Belanja Tidak Terduga	935	1,000	1,500	1,500	1,559	1,556
3.2	Pembiayaan Pengeluaran	2,000	2,000	2,000	-	-	-
	Penyertaan Modal Pada BPD	2,000	2,000	2,000	-	-	-
4	Surplus Anggaran Riil/ Berimbang	0	0	0	0	0	0

Tabel III. 20. Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022

No	Uraian	APBDP 2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Prioritas I	323.2	47.2	584.5	71.3	427.7	62.2	495.3	66.1	526.3	64.3	586.2	65.3
2	Prioritas II	354.0	51.7	230.3	28.1	246.8	35.9	242.5	32.4	279.4	34.1	297.0	33.1
3	Prioritas III	7.2	1.0	4.5	0.5	13.0	1.9	11.0	1.5	13.1	1.6	15.1	1.7
Jumlah		684.4	100	819.3	100	687.5	100	748.7	100	818.8	100	898.3	100

Proporsi rencana alokasi anggaran untuk prioritas I paling besar disusul prioritas II dan III. Hal ini disebabkan karena beban kegiatan prioritas I yakni belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan penghasilan wajib lainnya yang diperuntukan untuk PNS, DPRD dan KdH/WaKdH) serta belanja langsung dan pembiayaan pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat merupakan beban paling besar dalam APBD Kabupaten Muna Barat, dimana pada tahun 2017 hanya sekitar 47.2% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 65.3%.

Secara umum kerangka pendanaan pembangunan daerah kabupaten Muna barat selama tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 21. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022

NO	Uraian	APBDP 2017	Proyeksi (Rp. Juta)				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	PENDAPATAN DAERAH	565,334	589,262	663,506	729,524	803,360	885,987
A	Pendapatan Asli Daerah	24,356	30,518	34,723	39,121	44,118	49,805
1	Pajak Daerah	3,298	4,299	4,943	5,683	6,534	7,512
2	Retribusi Daerah	302	1,080	1,625	1,873	2,159	2,489
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,521	2,522	2,878	3,302	3,809	4,420
4	Lain-Lain PAD	18,234	22,617	25,277	28,263	31,616	35,384
B	Dana Perimbangan	473,046	489,109	543,946	605,183	673,600	750,075
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	9,961	11,038	12,007	13,081	14,273	15,598
2	DAU	353,873	356,863	392,549	431,804	474,984	522,483
3	DAK	109,211	121,208	139,390	160,298	184,343	211,994
C	Lain-Lain PAD yang Sah	67,932	69,635	84,837	85,221	85,643	86,107
1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	3,488	3,488	3,837	4,221	4,643	5,107
2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	64,444	66,147	81,000	81,000	81,000	81,000

NO	Uraian	APBDP 2017	Proyeksi (Rp. Juta)				
			2018	2019	2020	2021	2022
II	BELANJA DAERAH	682,365	817,262	685,506	708,725	778,760	858,287
A	Belanja Tidak Langsung	298,920	355,354	404,588	429,482	459,590	518,180
1	Belanja Wajib dan Mengikat (Prioritas I)	293,735	352,854	393,588	418,482	446,531	503,124
2	Belanja Prioritas III	5,185	2,500	11,000	11,000	13,059	15,056
B	Belanja Langsung	383,445	461,908	280,918	279,243	319,170	340,108
1	Belanja Prioritas I	29,429	231,651	34,096	36,793	39,773	43,073
2	Belanja Prioritas II	354,016	230,257	246,822	242,450	279,397	297,034
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(117,031)	(228,000)	(22,000)	20,800	24,600	27,700
III	PEMBIAYAAN DAERAH						
1	Penerimaan Pembiayaan	119,030	230,000	24,000	19,200	15,400	12,300
2	Pengeluaran Pembiayaan (Prioritas I)	-	-	-	40,000	40,000	40,000
3	Pengeluaran Pembiayaan (Prioritas III)	2,000	2,000	2,000	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO (SURPLUS/ (DEFISIT))	117,031	228,000	22,000	(20,800)	(24,600)	(27,700)

Berdasarkan kerangka pendanaan tersebut dapat dilaksanakan berbagai program dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan untuk mencapai target indikator pembangunan Kabupaten Muna Barat selama lima tahun ke depan. Mengingat besarnya permasalahan dan keterbatasan APBD Kabupaten Muna Barat maka diperlukan dukungan sumber dana lainnya baik dari APBN, APBD Provinsi, CSR/PKBL, lembaga donor maupun swadaya masyarakat.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis Isu-isu strategis berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan (*sustainability*) pembangunan. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang menurut urusan bidang pemerintahan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis. Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk mewujudkan masa depan lebih baik bagi Kabupaten Muna Barat dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat terwujud.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai/ diharapkan. Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan tantangan/ ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap Identifikasi Masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kondisi pembangunan di wilayah Muna Barat sebelum menjadi Daerah Otonomi Baru memiliki tingkat kesenjangan pembangunan yang lebih tertinggal dibanding dengan pembangunan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara, sementara tingkat kehidupan masyarakat Kabupaten Muna Barat relatif stagnan. Berbagai permasalahan pokok yang ada di awal periode pemerintahan DOB Muna Barat mulai perlahan diselesaikan dengan meletakkan dasar pondasi Pembangunan yang kuat, melalui penataan ruang dan pengembangan wilayah yang diprioritaskan pada pembukaan akses daerah-daerah potensial, pembukaan akses rencana pusat-pusat kegiatan publik, dan pengembangan akses keluar masuk wilayah Kabupaten Muna Barat dengan wilayah Kabupaten lainnya.

Hasil pembangunan di awal Pemerintahan Kabupaten Muna Barat dalam kurun waktu tahun 2014-2016 sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Defenitif, membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya perkembangan pembangunan yang signifikan khususnya pada bidang infrastruktur Jalan. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan pembangunan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Muna Barat yang lebih baik lagi. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Muna Barat, diantaranya adalah:

- 1) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar wilayah (Transportasi, listrik, dan air bersih,) baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap daya dukung untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Muna Barat.
- 2) Cakupan daerah rawan bencana banjir cukup luas yang berdampak besar terhadap kerugian masyarakat dan kerusakan infrastruktur jalan.
- 3) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 4) Masih relative tingginya Angka kemiskinan
- 5) Daya saing produk unggulan Kabupaten Muna Barat secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas, kualitas, nilai tambah maupun skala ekonomi produk unggulan tersebut.
- 6) Terbatasnya akses masyarakat ke sumber permodalan, penguasaan iptek dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti jaringan pengairan dan jaringan jalan pada sentra-sentra produksi.
- 7) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kinerja birokrasi dan budaya kerja/etos kerja.
- 8) Belum tersedianya Prasarana Pemerintahan Daerah yang representatif dalam upaya menunjang pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Rumusan Permasalahan-permasalahan mendasar Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tersebut, dijabarkan secara rinci menurut urusan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagai berikut.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Usuran Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar meliputi 6 (enam) urusan yakni Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial.

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan urusan pendidikan adalah:

- Belum optimalnya Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan;
- Belum maksimalnya Pendidikan Anak Usia Dini
- Masih banyaknya ruang belajar pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan pendidikan SLTP/ sederajat yang memiliki kondisi tidak memadai;
- minimnya fasilitas perpustakaan dan buku pelajaran.
- minimnya fasilitas laboratorium dan ruang latihan kerja.
- Kurangnya animo masyarakat untuk mengikuti program pendidikan luar sekolah melalui keaksaraan fungsional, Paket A, Paket B dan Paket C;
- kurangnya jangkauan program luar sekolah pada kelompok sasaran; dan
- masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas pendidikan;
- Rasio guru dengan jumlah kelas belum sebanding dan masih banyaknya guru yang mengajar belum sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya;
- Distribusi guru yang belum merata dan minimnya jumlah tenaga pengajar pada daerah-daerah kepulauan.
- Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan belum mencukupi

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan urusan Kesehatan adalah:

- Belum optimalnya Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- Minimnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan. Belum optimalnya Pelayanan kesehatan yang bermutu diakibatkan oleh kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan baik ditingkat Kabupaten, kecamatan maupun di desa. Kenyataannya pembangunan sarana dan prasarana jumlahnya masih sangat minim demikian pula pada aspek mutu pelayanan masih dalam standar dan masih jauh yang diharapkan.
- Kurangnya Tenaga Kesehatan. Kelemahan pembangunan kesehatan ditinjau dari segi pelayanan kesehatan adalah jumlah tenaga kesehatan yang amat kurang serta penyebarannya tidak merata. Hal ini terlihat pada sebahagian sarana pelayanan ditingkat kecamatan serta sebahagian pusat pelayanan di desa yang belum digunakan sebagai pelayanan kesehatan karena kekurangan tenaga. Disamping itu pendidikan tenaga kesehatan masih sangat minim sehingga mutu pelayanan belum optimal.
- Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas yang terbatas. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu belum sebanding dengan kebutuhan yang ada. Hal ini bila tidak diantisipasi akan menyebabkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dipuskesmas akan semakin kurang.

- Rendahnya Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan kesehatan masyarakat ditandai dengan sebagian masyarakat belum mendukung pola hidup bersih dan sehat. Masih rendahnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan kemauan dalam hal upaya untuk menolong dirinya sendiri pada penanganan masalah-masalah kesehatan yang mana hal ini didorong juga dengan masih tingginya angka kemiskinan.
- Angka kesakitan, angka kematian kasar (CDR), angka kematian bayi (IMR), angka kematian Balita, dan angka kematian Ibu Hamil (MMR) masih cukup tinggi.
- Sumber Daya Kesehatan pada umumnya belum memadai. Tenaga kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas masih terasa kurang. Biaya operasional khususnya untuk keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi belum mencukupi kebutuhan dan sarana transportasi di daerah terpencil masih tersasa sulit.
- Dalam upaya pelayanan dan rujukan kesehatan antara lain terlihat cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak masih rendah. Hal ini sebagai akibat kesulitan-kesulitan operasional dalam masalah jarak jangkauan serta peran serta masyarakat yang masih kurang dalam pemanfaatan Puskesmas. Pembinaan Posyandu oleh Puskesmas masih terasa kurang sehingga posyandu masih menghadapi tantangan dan hambatan baik dari teknik upaya kesehatan, maupun klesetariannya. Penampilan Rumah Sakit masih kurang akibat mutu pelayanan yang belum memadai serta manajemen yang lemah.
- Dalam penataan sistem informasi manajemen kesehatan masih mengalami kesulitan karena belum ada keterpaduan konsep di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Keterlambatan laporan yang diterima masih sering terjadi sehingga mengakibatkan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu. Kesulitan lain yang dialami dan menciptakan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen adalah banyaknya sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku, sehingga amat sulit untuk merumuskan informasi yang menyeluruh, utuh, akurat dan tepat waktu.
- Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular belum optimal.
- Cakupan Jaminan Kesehatan belum maksimal.

c. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Walaupun Kabupaten Muna Barat merupakan Kabupaten Baru namun telah dilakukan upaya-upaya yang maksimal dalam rangka penyediaan infrastruktur wilayah. Pemerintah Kabupaten Muna Barat masih diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan pembangunan bidang pekerjaan umum, yang sifatnya sangat penting dan mendesak untuk segera ditangani. Permasalahan,

hambatan, dan tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan pembangunan antara lain adalah:

- Belum optimalnya Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang;
- Sistem jaringan jalan yang ada belum dapat memberikan interkoneksi antara pusat kawasan pusat-pusat pertumbuhan di dalam Kabupaten Muna Barat.
- Kondisi fisik jalan baik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten memiliki tingkat kerusakan yang cukup tinggi,
- Minimnya prasarana transportasi (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi) pada daerah-daerah potensial;
- Tingkat kerusakan/ kebocoran jaringan irigasi cukup tinggi sehingga produksi dan produktifitas lahan persawahan belum optimal;
- Jaringan Pelayanan air bersih PDAM di wilayah Kabupaten belum ada
- Minimnya sarana air bersih pada daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Belum tersedianya rencana induk pengembangan Jaringan Air Bersih, yang secara integrasi melayani masyarakat.
- Keterlambatan penyusunan dokumen teknis perencanaan jalan sehingga menyebabkan terlambatnya kegiatan fisik pembangunan/pemeliharaan jalan
- Belum adanya Perda RTRW sebagai acuan acuan dalam perencanaan pembangunan khususnta terkait dengan pemanfaatan rencana ruang;
- Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan ruang dan tata bangunan, khususnya pengawasan pembangunan perumahan pada daerah-daerah manfaat milik jalan dan daerah sepadan sungai;
- Lemahnya Sistem pengawasan penggunaan ruang, yang berakibat pada alih fungsi lahan yang berlangsung sangat cepat, terutama pengalihan dari hutan menjadi wilayah pertanian/ perkebunan dan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman.

d. Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Permasalahan utama pembangunan yang terkait Perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah:

- Belum optimalnya Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- Relatif tingginya rumah tidak layak huni
- Minimnya Rumah Tangga Bersantasi
- Belum optimalnya penyediaan fasilitas umum perumahan dan kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase, air bersih, MCK, pengolahan sampah, dan sarana sosial/ rumah ibadah)

e. Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Permasalahan utama pembangunan yang terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat adalah:

- Belum optimalnya Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat.
- Belum optimalnya pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah.
- Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat;
- Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
- Adanya potensi kerawanan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat baik berupa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

f. Urusan Sosial.

Permasalahan pokok pembangunan sosial adalah

- Belum optimalnya Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesejahteraan Sosial.
- Masih rendahnya pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih belum optimal. PMKS meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, lanjut usia tindak kekerasan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang cacat bukan kusta, tuna susila, eks narapidana, pekerja migrant bermasalah dan korban NAPZA.

4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi 18 urusan yakni Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Pertanahan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan informatika; Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM); 1. Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, dan Urusan Kearsipan.

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan terkait dengan ketenagakerjaan adalah:

- Belum adanya Balai Latihan Kerja sebagai wadah untuk meningkatkan skill/ keterampilan para pencari kerja yang produktif.
- kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung seluruh pencari kerja;
- Pencari tenaga kerja belum kompetitif, sehingga perlu di fasilitasi pendidikan ketrampilan sesuai standarisasi pasar tenaga kerja.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- Kurangnya edukasi perempuan
- Penanganan Kasus kekerasan perempuan dan anak masih kurang tegas
- Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- Adanya pekerja anak khususnya di sektor informal.

c. Urusan Pangan

Pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan pangan akan semakin banyak. Ketersediaan ketahanan pangan juga erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya alam dan ancaman perubahan iklim dan pemanasan global. Permasalahan-permasalahan pembangunan terkait dengan ketahanan pangan adalah :

- Luas lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi lahan, sebaliknya masih cukup luas lahan persawahan maupun lahan kering belum dimanfaatkan.
- Ketergantungan bahan pangan dari luar daerah yang masih besar;
- Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
- Belum optimalnya gerakan keanekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal, sehingga sebagian besar masyarakat masih tergantung pada konsumsi beras, sementara kapasitas produksi beras masih belum memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat
- Belum terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman;
- Masih terdapatnya daerah rawan pangan;
- Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;

- Rendahnya partisipasi kelembagaan Ketahanan pangan.
- Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dalam mendukung daya tahan pangan di masyarakat;
- Turunnya harga bahan pangan di bawah standar pada saat panen raya;
- Semakin maraknya alih fungsi lahan dari lahan pangan ke sub sektor lainnya;
- Belum optimalnya peran penyuluh dalam membina petani;
- Pelaksanaan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) belum berjalan secara optimal (teratur, tertib dan berkelanjutan);
- Minimnya sarana prasarana penyuluhan dan ketahanan pangan;
- ketidakpastian dalam menentukan musim tanam, dan minimnya produksi dan produktivitas hasil pertanian akibat perubahan iklim dan pemasaran global.
- Pembangunan sektor pertanian lebih terfokus pada aspek on farm, padahal pembangunan ketahanan pangan bersifat lintas sektoral yang menghendaki pengembangan system dan usaha agribisnis yang berkelanjutan berdaya saing, berkerakyataan, dan terdekosentralisir.

d. Urusan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dengan pembagian urusan pada 9 (Sembilan) sub bidang pertanahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Izin Lokasi:

- 1). a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
- b. Kompilasi bahan koordinasi.
- c. Pelaksanaan rapat koordinasi.
- d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.
- e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.
- h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.

2). Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- a. Penetapan lokasi.
- b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan penyuluhan.
- d. Pelaksanaan inventarisasi.

- e. Pembentukan Tim Penilai Tanah
 - f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.
 - g. Pelaksanaan musyawarah.
 - h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
 - i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
 - j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
 - k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
 - b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.
 - c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
 - d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
 - e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
 4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - a. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.
 - b. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
 5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - a. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia.
 - b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
 - c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
 - d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.
 - e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
 - f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
 6. Penetapan Tanah Ulayat
 - a. Pembentukan panitia peneliti.
 - b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
 - c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
 - d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
 - e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten.
 - f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
 - a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.
 - b. Penetapan bidangbidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
 - c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
 - d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
 - e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
8. Izin Membuka Tanah
 - a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.
 - b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
 - c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.
 - d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten
 - a. Pembentukan tim koordinasi tingkat Kabupaten.
 - b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
 - 2) Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.
 - c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan criteria teknis dari instansi terkait.
 - d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 - e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
 - f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 - g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 - h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati.
 - i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.

- j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

Permasalahan-permasalahan pokok pembangunan terkait dengan pengelolaan pertanahan di Kabupaten Muna Barat adalah:

- Belum optimalnya pelayanan pemberian izin lokasi
- Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan rencana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Adanya Potensi munculnya Sengketa Tanah Garapan
- Belum optimalnya proses penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
- Belum terbentuknya panitia pertimbangan *landreform* dalam rangka penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*.
- Ketersediaan Peta Penetapan Tanah Ulayat belum ada.
- Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah masih lemah
- Belum tersedianya dokumen rencana letak kegiatan penggunaan tanah.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam menjadi salah satu modal Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat. Agar pembangunan bisa berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan menghadapi berbagai kendala, yaitu adanya kerentanan bencana alam, keterbatasan dan deplesi sumber daya alam, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam aktivitas pembangunan, belum adanya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, adanya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melebihi upaya perbaikannya. Permasalahan-permasalahan pokok pembangunan terkait dengan upaya kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Muna Barat adalah:

- Ancaman Bencana Banjir baik yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim dan pemanasan global maupun adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian/ non pertanian;
- Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai baik dari sisi peran pemerintah, kelembagaan pengelolaan DAS di tingkat desa, maupun Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- Belum optimalnya manajemen/ pengelolaan persampahan.
- Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

f. Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah:

- Belum optimalnya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- Minimnya sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Relatif masih rendahnya tingkat kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan-Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah:

- Masih rendahnya kualitas sumberdaya Masyarakat Desa
- Rendahnya produktivitas masyarakat Desa
- Masih rendahnya tingkat partisipasi/ kepedualian masyarakat Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa.
- Transparansi pengelolaan APBDesa masih kurang.
- Tingkat kemandirian masyarakat masih rendah yang berakibat pada ketidakberdayaan masyarakat perdesaan baik dari sisi ekonomi maupun non ekonomi.
- Belum optimalnya kinerja kelembagaan pemerintahan desa

h. Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Permasalahan-Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana adalah:

- Belum optimalnya pembinaan pelayanan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas
- Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- Belum optimalnya pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pelayanan pencegahan HIV/ AIDS dan NAPZA
- Belum optimalnya pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
- Belum optimalnya pembinaan kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas yang mandiri
- Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
- Ketersediaan Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga yang up to date sangat terbatas.

i. Urusan Perhubungan;

Permasalahan-permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan perhubungan, adalah :

- Pusat-Pusat pelayanan lokal (PPL) yang memiliki peran strategis sebagai pintu keluar masuk antar pulau di Kabupaten Muna Barat dengan Kabupaten sekitarnya belum ditunjang dengan prasarana pelabuhan/ dermaga dan angkutan pelayaran yang memadai sehingga mobilitas orang, barang, dan jasa antar Kabupaten Muna Barat dengan Kabupaten sekitarnya menjadi tidak aman, tidak nyaman, dan tidak ekonomis.

- Belum optimalnya Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk, barang dan jasa;
- Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
- Belum tersedianya Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kabupaten Muna Barat sebagai acuan pembangunan transportasi yang terintegrasi di Kabupaten Muna Barat.
- Minimnya fasilitas keselamatan lalulintas.
- Minimnya pengawasan terhadap keselamatan angkutan penyeberangan, khususnya menjelang waktu-waktu puncak pergerakan orang dan barang (Libur Sekolah dan Lebaran).

j. Urusan Komunikasi dan informatika

Pembangunan Komunikasi dan informatika bertujuan untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi dalam upaya mendorong nilai tambah dan daya saing seluruh bidang pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terkait dengan Komunikasi dan Informatika adalah:

- Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, yang meliputi: informasi pasar hasil pertanian, perikanan, UMKM; informasi bahan pelajaran untuk pengembangan Pendidikan; dan termasuk akses Media Cetak terhadap informasi perkembangan pembangunan daerah.
- Terbatasnya sarana dan prasarana telekomunikasi dan penyiaran.
- Belum adanya Sistem Informasi Pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov) dalam rangka mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM)

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah :

- Minimnya Jumlah koperasi aktif sehingga peranan Koperasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan.
- Kurangnya SDM koperasi sesuai dengan standar keahlian teknis,;
- belum tersedianya kebijakan yang mendukung bagi perkembangan dan keberlanjutan UMKM;
- Masih kurangnya kualitas SDM dan daya saing pemasaran (promosi) produk UMKM, baik pada bidang sandang, pangan, kerajinan, dan jasa;
- Masih rendahnya ketersediaan dan aksesibilitas UMKMK terhadap permodalan lembaga keuangan/pembiayaan mikro;
- Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya;

- Rendahnya inovasi usaha masyarakat sehingga daya saing koperasi dan UMKM di pasaran kurang menarik.
- Masih rendahnya aplikasi IPTEKS dalam sistem produksi UMKMP sehingga kurang mendukung daya saingnya;
- Masih kurangnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Penanaman Modal adalah:

- Pencapaian investasi masih belum optimal;
- Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk menunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung kegiatan investasi di daerah masih terbatas;
- Sistem keamanan termasuk premanisme yang menjamin investor yang masih bermasalah;
- Belum adanya informasi kebutuhan investasi;
- Mekanisme monev perijinan belum optimal.
- Keterbatasan dan kekurangan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA;
- Belum optimalnya promosi potensi Investasi dan sumber daya wilayah

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pembangunan terkait dengan Kepemudaan dan Olah Raga adalah:

- Rendahnya rasio gedung olahraga,
- Minimnya pembinaan kepemudaan dan olah raga;
- Tingginya tingkat pengangguran terbuka;
- Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan
- Belum optimalnya peran kelembagaan/ organisasi kepemudaan;

n. Urusan Statistik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dengan pembagian urusan Statistik antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.
- Pemberian dukungan penyelenggaraan statistic dasar skala kabupaten
- Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten
- Pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat:
- Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi
- Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten

- Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten. Permasalahan utama pembangunan terkait dengan urusan statistik adalah minimnya ketersediaan data statistik untuk pemenuhan kebutuhan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang *up to date*.
- o. Urusan Persandian**
Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terkait dengan urusan Persandian adalah:
- Minimnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian bidang persandian.
 - Minimnya Peralatan Sandi (Palsan)
 - Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Sandi (Sissan)
- p. Urusan Kebudayaan;**
Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terkait dengan pengembangan dan pelestarian Budaya Daerah adalah:
- Belum sepenuhnya terimplementasikannya nilai-nilai Budaya Muna dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan pemerintahan;
 - Pengelolaan dan pengembangan berbagai produk seni budaya masih terbatas;
 - Belum adanya regulasi pendukung pengembangan dan revitalisasi Budaya Muna.
 - Pelestarian nilai luhur, seni, dan bahasa Muna semakin tergerus oleh arus globalisasi. Semakin banyak anak yang kurang lancar Bahasa Muna, akibat orang tua lebih sering mengajarkan bahasa Indonesia.
- q. Urusan Perpustakaan;**
Permasalahan pembangunan terkait dengan Perpustakaan adalah Belum optimalnya Pengelolaan/manajemen Perpustakaan dan layanan perpustakaan daerah.
- r. Urusan Kearsipan.**
Permasalahan pembangunan terkait dengan Kearsipan adalah Jumlah arsip dalam wujud digitalisasi/aplikasi teknologi informasi masih sangat sedikit dan belum optimal.

4.1.3. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi 7 urusan yakni Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Energi Sumber Daya dan Mineral, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian, dan Urusan Transmigrasi.

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah :

- Masih banyaknya pendaratan ikan secara liar;
- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya
- Rendahnya kualitas air dan saluran irigasi tambak yang tersedia sehingga memicu timbulnya hama penyakit;
- Pertambahan rakyat belum berfungsi secara optimal;
- Belum optimalnya pemanfaatan Balai Benih Ikan;
- Relatif tingginya illegal fishing;
- Belum berfungsi maksimalnya pelaksanaan program agrominabahari;
- Hasil-hasil perikanan belum dikelola secara optimal;
- Minimnya pelaksanaan pengawasan kelautan
- Kelembagaan kelompok nelayan belum optimal.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan Pariwisata adalah :

- Minimnya infrastruktur dasar (seperti jalan, moda angkutan, air bersih, listrik) dan wahana Obyek-obyek Wisata.
- Belum adanya kelembagaan pengelola objek-obyek wisata unggulan.
- Belum optimalnya pelaksanaan promosi Wisata Daerah, sehingga jumlah wisatawan domestic dan Manca Negara masih sangat minim.

c. Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan urusan pertanian adalah:

- Minimnya infrastruktur Pertanian
- Belum optimalnya produksi, produktifitas, dan mutu produk serta pemasaran dari berbagai macam produk pertanian baik Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan;
- Sistem pengairan tanaman pangan yang belum optimal;
- Masih tingginya serangan dan gangguan hama dan penyakit;
- Rendahnya pengetahuan petani dalam manajemen pengelolaan usaha-usaha produk pertanian sehingga nilai jual produk pertanian masih rendah.
- Pengelolaan pertanian yang masih tradisional/ penerapan teknologi pertanian masih minim menyebabkan produktivitas usaha-usaha pertanian masih rendah berakibat pendapatan petani juga rendah.
- Kebutuhan telur yang semakin meningkat yang tidak sebanding produksi telur.
- Kebutuhan bibit ternak yang meningkat yang tidak sebanding ketersediaan bibit ternak.

- Terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknik Dinas;
- Tingkat keterampilan petani masih tergolong rendah;
- Minimnya kemampuan Keuangan dalam membiayai pembangunan Pertanian;
- Rendahnya penanganan pasca panen, pengelolaan hasil dan pemasaran produk pertanian;
- Kelembagaan tani/ternak belum optimal;
- Kurangnya daya tarik bagi dunia Usaha Investor menanamkan modalnya pada sektor pertanian
- Produk pertanian kurang bersaing di pasar internasional;
- Minimnya Kepemilikan lahan petani.

d. Urusan Energi Sumber Daya dan Mineral

berdasarkan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, urusan energy Sumber Daya dan Mineral sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, namun oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait ESDM hanya pada pemanfaatan energi terbarukan, dalam hal ini bisa pada pemanfaatan langsung energi panas bumi, energy matahari, energi angin, maupun energy gelombang laut. Pemanfaatan energi terbarukan yang dimanfaatkan selama ini adalah penggunaan energi matahari.

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :

- Tingkat elektrifikasi masih cukup rendah
- Tidak adanya pemeliharaan terhadap Intalasi Listrik Tenaga Surya yang digunakan oleh masyarakat

e. Urusan Perdagangan;

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Perdagangan adalah:

- Masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman;
- Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan;
- Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha UMK;
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan;
- Sistem distribusi barang belum efektif dan efisien;

f. Urusan Perindustrian;

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Industri adalah:

- Belum optimalnya pertumbuhan jumlah usaha;
- Rendahnya daya saing industri lokal;
- Lemahnya struktur industri;
- Kurangnya akses permodalan;

- Kurang luasnya jaringan pemasaran;
- Kualitas kuantitas kontinuitas hasil industri belum stabil.

g. Urusan Transmigrasi.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan desa dan pengembangan kawasan, serta memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya. Dengan demikian, pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penempatan transmigran, baik transmigran lokal penduduk setempat, maupun penduduk dari daerah lain. Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah. Permasalahan Pembangunan yang terkait dengan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah:

- Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
- Minimnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar Kawasan Transmigrasi
- Minimnya fasilitas Umum Permukiman Kawasan Transmigrasi
- Minimnya Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi
- Minimnya Akses Permodalan untuk pengembangan Ekonomi Warga Transmigrasi
- Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (lintas sektor, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) dalam sinergi program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

4.1.4. Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/ Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Pemerintahan Kabupaten meliputi : Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Perencanaan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

- Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal
- Akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja masih lemah;
- Minimnya Sumber daya Aparatur yang memiliki kompetensi Bidang Perencanaan Pembangunan

- Potensi pengembangan Pembangunan Sosial Budaya Daerah belum sepenuhnya dipetakan
- Potensi pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah belum sepenuhnya dipetakan
- Potensi pengembangan Pembangunan Sumber Daya Alam belum sepenuhnya dipetakan
- Potensi pengembangan Infrastruktur Wilayah belum sepenuhnya dipetakan
- Belum efektifnya Pelaksanaan koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

b. Keuangan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Waktu Penetapan Perda APBD dan perubahannya belum sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan.
- Belum terintegrasinya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
- Belum optimalnya Penatausahaan Aset daerah
- Belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi belanja daerah
- Belum adanya Publikasi informasi keuangan daerah secara elektronik

c. Kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan adalah:

- Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.
- Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.
- Masih kurangnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan.
- Kebutuhan Formasi CPND belum dikoordinasikan secara baik dengan SKPD.
- Belum Adanya Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin belajar.
- Mekanisme Penetapan Kenaikan Pangkat sampai dengan Golongan III/d belum dilakukan secara otomatis.
- Sistem remunerasi penghasilan pegawai berbasis kinerja belum terimplementasikan;
- Belum adanya Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Latihan yang representatif

- Minimnya Aparatur yang memiliki Kopetensi sebagai Widyaswara
- Belum adanya Sertikasi untuk Penyelenggaraan Diklat
- Belum adanya Pemetaan Kebutuhan Diklat PNS

d. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah:

- Belum ada pejabat fungsional khusus sesuai bidang keahliannya untuk mendukung kegiatan Litbang;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil Litbang sebagai rekomendasi kebijakan Pembangunan Daerah;
- Minimnya Aparatur yang memiliki kopetensi untuk mendukung Tupoksi Litbang
- Minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Litbang.
- Belum diimplementasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

e. Penanggulangan Bencana

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Penanggulangan Bencana adalah:

- Belum adanya Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi pencegahan bencana.
- Belum adanya Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana.
- Belum adanya Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran
- Minimnya sarana dan prasarana Penanganan Tanggap Darurat Bencana
- Belum tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran

f. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah:

- Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
- Pemahaman politik masyarakat yang rendah dan tidak merata sehingga muncul potensi terjadinya konflik/pergesekan yang di akibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan;
- Masyarakat Kabupaten Muna Barat yang heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik Nasional yang terjadi sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban;

g. Urusan Administrasi Umum.

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Urusan Administrasi Umum adalah:

- Belum optimalnya Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.
- Belum optimalnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- Belum adanya Rencana Kerjasama antar daerah
- Adanya Potensi Konflik antar Desa/ Kelurahan/ Kecamatan
- Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum optimal
- Belum optimalnya pengembangan sistem inovasi daerah
- Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi.
- Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud monitoring evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat belum optimal.
- Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat;
- birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah relatif masih rendah;
- Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
- Penegakan supremasi hukum masih lemah;
- Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- Kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal;
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
- Masih kurangnya fungsi pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat termasuk legislatif, sehingga fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum efektif
- Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan akibat Kondisi Prasarana Pemerintahan yang belum representatif;
- Belum optimalnya Pengawasan, Pembinaan, dan Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan;

4.2. Isu Strategis

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.
- Kriteria lain dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/dinamika daerah.

4.2.1. Analisis Lingkungan Eksternal

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Sumber lain bagi informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

a. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

Perubahan Iklim (*Climate Change*) dan Pemanasan Global (*Global Warming*) merupakan ancaman yang sangat manakutkan bagi keberlangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya di bumi. Berbagai dampak yang ditimbulkan antara lain : Mencairnya es di kutub utara yang menyebabkan meningkatkan muka air laut dan berakibat pada banjir rob dan berkurangnya luas sebagian wilayah kepulauan; munculnya iklim ekstrem yang menyebabkan

meningkatnya kecepatan dan gelombang laut, musim kering yang berpanjangan, dan musim hujan yang tidak menentu; dan munculnya berbagai penyakit menular yang sulit untuk diobati. Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan Iklim (*Climate Change*) dan Pemanasan Global (*Global Warming*) tersebut juga telah mempengaruhi produksi pangan dunia.

b. Sustainable Development Goals (SDGs)

Kesepakatan global Sustainable Development Goals (SDGs) dan perubahan iklim menantang pemerintah Kabupaten Muna Barat menyusun perencanaan daerah tahun 2017-2022 memprioritaskan:

- Mengakhiri Kemiskinan;
- mengupayakan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan, kesehatan, pangan dan gizi) dan kesejahteraannya (pekerjaan, pendapatan);
- menjaga keberlanjutan lingkungan hidup;
- mengatur tata kelola pemerintahan yang baik;
- kondisi masyarakat stabil dan kolaboratif.

c. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Tantangan dari pemberlakuan MEA pada tahun 2015 adalah kesiapan pemerintah Kabupaten Muna Barat mempersiapkan mental dan ketrampilan hidup penduduk Kabupaten Muna barat menghadapi MEA; yaitu:

- memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri;
- mengupayakan standarisasi dan sertifikasi ketrampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja;
- meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.

d. Telaahan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat adalah: (1) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (2) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (3) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (4) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel.

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat adalah pengalokasian PAD dan Dana Perimbangan

non DAK sebesar 10% kepada Desa. Dalam upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengalokasian ADD sebesar 10% tersebut maka perlu dirumuskan Peraturan Kepala Daerah tentang Penggunaan ADD dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Daerah dan Kebijakan Pembangunan Desa.

3) Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sesuai dengan amanah Pasal 31 ayat 4 amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji; (3) Besar anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan ketentuan ini, alokasi belanja di bidang kesehatan sesuatu yang mutlak dipenuhi (mandatory spending). Penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan yakni tercapainya derajat kesehatan yang terus membaik.

e. Universal Access

Akses universal (Universal acces) 100-0-100 merupakan program nasional bidang keciptakarya untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan dengan mencapai akses pelayanan air bersih hingga 100 %, pengurangan kawasan kumuh hingga 0% dan peningkatan pelayanan akses sanitasi hingga 100%. Sasaran yang ingin dicapai program 100-0-100 yaitu:

- Terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
- Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, menuju Kota Tanpa Kumuh yang didukung dengan tata bangunan dan lingkungan yang berkualitas, layak huni, produktif dan berjati diri.
- Terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar

4.2.2. Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan dan analisis lingkungan eksternal yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, maka Isu krusial pembangunan Muna Barat tahun 2017-2022 diarahkan pada pembangunan Pusat-pusat pertumbuhan Wilayah yang terinterkoneksi dalam satu sistem pembangunan daerah yang didukung dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang produktif untuk mencapai daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai religius. Isu-isu strategis pembangunan Muna Barat tahun 2017-2022 dijabarkan sebagai berikut

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam rangka Penataan Wilayah

Isu yang sangat menarik dan hangat didiskusikan baik di kalangan masyarakat maupun media sosial terkait dengan pembangunan Kabupaten Muna Barat adalah gerakan pembukaan akses prasarana transportasi jalan secara masif yang diinisiasi oleh pj. Bupati Muna Barat yang saat ini menjabat sebagai Bupati Muna Barat Defenitif. Pembangunan jalan bukan merupakan **tujuan akhir** dari pembangunan sektor Pekerjaan Umum, namun merupakan **tujuan antara** untuk mewujudkan pengembangan wilayah dan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif serta menata pusat-pusat layanan kegiatan pelayanan Publik di Kabupaten Muna Barat. Walaupun demikian, Pemenuhan Kualitas infrastruktur Jalan di belum optimal.

Infrastruktur jalan merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah.

Pada tahun 2016, panjang jalan yang sudah terbangun adalah sepanjang Km atau sebesar ... % dari panjang jalan dalam rancangan RTRW kabupaten Muna Barat. Sementara Panjang jalan kabupaten yang ada dengan kondisi baik dan sedang yaitu baru mencapai %. Oleh karena itu, dalam periode 5 (lima) tahun mendatang, perlu adanya pembangunan jalan baru yang dibarengi dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

Pada jalan-jalan Kabupaten yang berada pada area dengan klasifikasi tanah dasar sebagai tanah lempung atau tanah ekspansif, maka teknologi penanganan jalannya haruslah lebih spesifik, misal dengan perkuatan atau stabilisasi tanah dasar. Membangun jalan dengan mengesampingkan kakuatan tanah dasar akan berdampak pada biaya tinggi pembangunan jalan.

Disamping itu, drainase jalan memiliki peran sangat penting dalam mendukung ketahanan struktur permukaan jalan terhadap pengaruh air hujan yang menggenangi permukaan jalan. Pada jalan beraspal yang tergenangi oleh air akan cepat mengalami kerusakan.

Hal ini disebabkan karena air yang meresap dalam campuran permukaan jalan beraspal mengakibatkan lemahnya ikatan antara aspal dan agregat (adhesi) dan ikatan antara partikel aspal (kohesi).

Selanjutnya terkait dengan kewenangan, maka perlu ada review Keputusan Bupati tentang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Sedangkan untuk jalan yang menjadi kewenangan desa, Pemerintah Kabupaten akan memberikan pendampingan teknis terkait standar pembangunan jalan.

2. Peningkatan Akses Keluar dan Masuk Wilayah Kabupaten Muna Barat.

Untuk mendukung interkoneksi wilayah kabupaten Muna Barat sebagai daerah kepulauan dengan Wilayah Kabupaten lainnya di Wilayah Sulawesi Tenggara yang meliputi Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Kendari maupun wilayah Kabupaten lainnya di luar wilayah Sulawesi Tenggara, maka peran transportasi darat/ penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara sebagai pintu keluar dan masuk wilayah Kabupaten Muna Barat merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk segera dibangun khususnya Pembangunan Dermaga Ferry Latawe, Dermaga Ferry Pajala Pengembangan/ Peningkatan Dermaga Ferry Tondasi, dan pengembangan/ peningkatan Bandar Udara Sugimanuru. Pelabuhan Pembangunan Pelabuhan Latawe akan lebih mempercepat mobilitas Orang, barang dan jasa antara Kabupaten Muna Barat dengan wilayah Kota Kendari; Kabupaten Konawe dan Torobulu. Begitu pula dengan Pelabuhan Pajala akan mempercepat mobilitas barang, orang dan jasa antara Kabupaten Muna Barat dengan wilayah kasipute, kabaena, dan mawasangka. Sedangkan pelabuhan/ Demaga Fery Tondasi diharapkan akan mempercepat mobilitas barang antar Kabupaten Muna Barat dengan wilayah Kabupaten Bulukumba dan Kota Makassar. Sementara Pengembangan Bandara Udara Sugimanuru diharapkan dapat meningkatkan mobilitas orang dan jasa dari Kabupaten Muna Barat ke Kota-kota lainnya di Indonesia.

Pembangunan akses Keluar dan Masuk wilayah Kabupaten Muna Barat juga ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat serta daya saing Kabupaten Muna Barat.

3. Pengendalian Banjir secara terpadu

Dampak dari penasan global juga dialami oleh masyarakat Muna Barat, yakni salah satunya adalah adanya bencana banjir pada musim hujan. Hal ini diperparah dengan kondisi topografi wilayah Kabupaten Muna Barat yang merupakan wilayah dataran rendah. Selain itu, bencana banjir juga diakibatkan oleh tata kelola penggunaan lahan yang tidak sesuai dan merusak fungsi DAS. Mengingat daerah aliran sungai (DAS) sudah tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah maka, yang perlu ditekankan Pemda yaitu pada manajemen pengelolaan lahan yang baik.

Bencana banjir yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Muna Barat telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Muna Barat, antara lain berupa Kegagalan panen bagi petani dan rusaknya konstruksi jalan. Penanganan Banjir harus dilakukan secara terpadu, dari hulu ke hilir dan melibatkan seluruh *stakeholder/* pemangku kepentingan. Senergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat dalam penanganan banjir sangat dibutuhkan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu, pembangunan embung/situ, pembangunan kanal, restorasi sungai, dan termasuk pembangun tambak air tawar merupakan beberapa upaya dalam penanganan banjir. Namun untuk lebih mengarahkan penanganan banjir di Kabupaten Muna Barat perlu dilakukan kajian atau studi pengendalian/penanganan banjir secara detail. Rekomendasi dari studi ini diharapkan akan menjadi rujukan jangka panjang bagi Pemerintah Muna Barat dalam penanganan masalah banjir.

4. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Dasar Wilayah Pulau-Pulau Kecil

Sebaran Pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna Barat meliputi 15 pulau yang berpenghuni tetap, 5 pulau yang berpenghuni tidak tetap dan 16 pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau kecil tersebut memiliki potensi sebagai wilayah Pemukiman, Wilayah Budidaya Perikanan, dan sebagai Obyek Wisata. Keberadaan Infrastruktur Dasar Wilayah dan aksesibilitas wilayah kepulauan tersebut sangat tertinggal dibanding dengan daerah lainnya di Kabupaten Muna Barat. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Pulau-Pulau Kecil tersebut maka keberadaan Infrastruktur Dasar Wilayah yang meliputi Air Bersih, Listrik, jalan dan pelabuhan rakyat dan aksesibilitas khususnya angkutan penyeberangan umum yang memadai menjadi suatu Kebutuhan yang sangat prioritas.

5. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pemberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Isu kemiskinan merupakan Isu yang tidak hanya menjadi isu strategis di Kabupaten Muna Barat melainkan hampir diseluruh daerah di Indonesia menghadapi isu strategis yang sama. Bahkan pada level nasional pun isu Kemiskinan menjadi isu strategis dan terus menjadi perhatian pemerintah selama satu dekade lebih belakangan ini. Kemiskinan di Kabupaten Muna Barat hingga saat ini masih belum ditangani secara optimal. Meskipun pada tahun 2016, angka kemiskinan di Kabupaten Muna Barat mengalami penurunan, tetapi angka kemiskinan Kabupaten Muna Barat masih menempati peringkat ke 14 dari Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tenggara.

Penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Untuk itu, dalam merumuskan program pembangunan 2017-2022 pada semua sektor harus benar-benar difokuskan kepada produktifitas Rumah Tangga miskin yang berbasis pada Data Kemiskinan by name by adress. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk mendorong pengembangan usaha Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM pada aspek produksi, aspek pengolahan, dan aspek pemasaran.

Sejalan dengan isu kemiskinan, isu pemberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS yang terdiri dari anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, lanjut usia tindak kekerasan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang cacat bukan kusta, tuna susila, eks narapidana, pekerja migrant bermasalah dan korban NAPZA.

Disisi ketenagakerjaan, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016 sebanyak %. Tantangan pengurangan jumlah pengangguran akan dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan keahlian/ keterampilan tenaga kerja produktif. Sumber daya manusia atau tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing memiliki kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan serta sikap perilaku yang baik. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pendidikan non formal dalam rangka membekali angkatan kerja dengan keahlian di bidangnya guna menekan angka pengangguran terbuka di masa mendatang. Dalam upaya menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) terkait dengan kompetensi SDM tenaga kerja, maka perlu untuk mensinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja siap mandiri dan siap bekerja sesuai dengan ketrampilan serta penyediaan akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja usia produktif..

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Karakteristik perumahan di Kabupaten Muna Barat umumnya terbangun secara alamiah dan berkembang mengikuti sepanjang sisi luar jalan yang tidak teratur dengan baik, kondisi sanitasi (jamban dan drainase) yang belum baik, jalan lingkungan yang belum optimal, dan fasilitas air bersih yang belum optimal. Karakteristik perumahan lainnya yang ada di Kabupaten Muna Barat, tidak membentuk deliniasi blok penuh namun hanya pada spot-spot tertentu. Pada umumnya (sekitar %) rumah yang ada di Kabupaten Muna Barat masih dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni.

Sumber Air minum/ air bersih masyarakat Kabupaten Muna Barat berasal dari mata air. Sumber Mata Air yang ada memiliki potensi akan tercemar oleh bakteri e-coli. Meskipun secara akses

persentase penduduk yang mendapatkan layanan air minum sudah cukup tinggi yaitu mencapai %, namun kualitas air minumannya belum sepenuhnya memenuhi standar kesehatan.

Dalam rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka pemerintah Kabupaten Muna Barat akan bersinergis dengan program nasional bidang keciptakaryaan, khususnya terkait dengan *Akses Universal (Universal Acces) 100-0-100*. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya permukiman berkelanjutan dengan mencapai akses pelayanan air bersih hingga 100 %, pengurangan kawasan kumuh hingga 0% dan peningkatan pelayanan akses sanitasi hingga 100%.

7. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun atau Wajar Dikdas sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan dasar warganya telah dicanangkan sejak tahun 2008 melalui Peraturan Pemerintah no 47 Tahun 2008. Namun pada kenyataannya, sampai dengan tahun 2016 partisipasi sekolah sampai jenjang pendidikan setingkat SMP di Kabupaten Muna Barat masih relatif rendah. Hal ini, artinya masih ada sebagian anak- anak usia sekolah yang belum memperoleh hak atas pendidikan dasar.

Beberapa penyebab rendahnya partisipasi sekolah adalah : Pertama dari segi layanan, masih ada kesenjangan antar kecamatan dalam penyediaan sekolah tingkat SMP. Kedua, dengan kondisi geografis di Muna Barat, ada beberapa desa khususnya desa pesisir, dan Pulau-Pulau kecil, dimana anak-anaknya kesulitan untuk mengakses sekolah SMP karena faktor ekonomi orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, sebaran guru yang kurang merata dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selain meningkatkan pemerataan mutu pendidikan formal, upaya lain untuk meningkatkan partisipasi sekolah adalah dengan mengembalikan kembali anak-anak putus sekolah melalui pendidikan non formal, penyediaan pakaian seragam lengkap untuk semua siswa SD dan SMP, pemberian penghargaan siswa berprestasi pada semua sekolah SD dan SMP, serta pemberian beasiswa Pendidikan S1 diutamakan pada bidang Keguruan dan Kesehatan bagi tamatan SMA/ SMK yang berprestasi dari keluarga berpenghasilan rendah.

Rata- rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Muna Barat yang rendah menjadi isu prioritas yang harus segera ditangani meskipun upaya untuk meningkatkan rata- rata usia sekolah tidak bisa secara instan dilakukan tapi merupakan upaya bertahap jangka panjang. Rendahnya rata- rata lama sekolah ini juga signifikan dengan angka rata- rata melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum bisa mencapai 100%. Isu penting dalam meningkatkan rata- rata melek huruf adalah bagaimana mengupayakan agar masyarakat yang telah difasilitasi pembelajaran baca tulis tidak lagi menjadi buta huruf.

Pada Pendidikan Usia Dini, meskipun di masing-masing desa telah ada yang menyelenggarakan PAUD namun mutu tenaga pendidiknya masih rendah. Pendidik PAUD yang ada di desa kebanyakan hanya lulusan SMA yang tidak memiliki kompetensi pendidik. Selain itu karena pendidikan PAUD tidak memiliki dana BOS yang memadai maka biaya operasional dibebankan kepada orang tua yang tentunya bagi sebagian besar orang tua dirasakan memberatkan. Mereka membiarkan anaknya tidak bersekolah sampai usianya cukup untuk masuk SD. Pendidikan PAUD masih perlu diperluas cakupannya untuk membantu kualitas pendidikan usia dini. Kualitas tenaga pendidik dengan kulaifikasi yang tersertifikasi perlu dioptimalkan substansi impelemntasinya supaya benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan anak didik.

Tantangan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan capaian target indeks pendidikan di Kabupaten Muna Barat, adalah upaya meningkatkan akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Alokasi Anggaran Pendidikan minimal 20% difokuskan pada upaya mengurangi ketimpangan kualitas sekolah antar klaster dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, dan memberlakukan standar manajemen yang sama.

8. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

Kesehatan sebagai salah satu hak dasar merupakan investasi berharga bagi seseorang dan sebuah bangsa untuk pembangunan. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin warga negaranya mendapatkan akses yang sama dalam pelayanan kesehatan dengan salah satu upayanya melalui sistem jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin. Semenjak diberlakukannya program JKN yang dikelola BPJS oleh pemerintah, maka peran kuratif dari Puskesmas semakin besar dan terasa. Pelayanan kesehatan melalui JKN belum sepenuhnya mencakupi masyarakat miskin di Kabupaten Muna Barat, sehingga untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin perlu didukung dengan Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yang artinya Puskesmas terdistribusi lebih besar dibandingkan dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lebih tinggi. Hal ini menjadikan peran puskesmas sangat krusial yaitu sebagai kontak pertama kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar. Dengan peran yang lebih besar ini tentu jumlah masyarakat yang berkunjung ke puskesmas akan lebih besar, mau tidak mau tentu puskesmas harus berbenah diri, mulai dari kualitas pelayanan, kualitas SDM, kualitas sarana dan prasarana.

Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan semakin meluasnya cakupan jaminan kesehatan adalah pengalokasian Anggaran Kesehatan minimal 10% dengan sasaran pada peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat dasar maupun rujukan dengan meningkatkan integritas seluruh sub sistem yang ada, memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, mobilisasi sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Hal ini diupayakan untuk peningkatan kesanggupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi puskesmas yang berada di wilayah pulau-pulau Kecil.

Lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan Rumah sakit. Isu Kesehatan, yang krusial adalah (1) Pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), (2) pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Demam Berdarah, Tb Paru dan HIV/AIDS), (3) peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu; (4) mengotimalkan pelayanan RSUD.

Meskipun jaminan kesehatan sudah semakin meluas cakupannya, masyarakat perlu diberikan edukasi melalui penanganan kesehatan secara promotif dan preventif. Pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri untuk mendeteksi faktor resiko penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral.

9. Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Nilai Tambah Pertanian dalam arti Luas.

Kabupaten Muna Barat memiliki potensial yang sangat besar sebagai daerah pemasok hasil-hasil pertanian bagi daerah-daerah kabupaten sekitarnya, khususnya ternak, tanaman pangan dan hortikultura. Perubahan iklim dan pemanasan global menjadi tantangan bagi pembangunan pertanian di seluruh dunia, termasuk pertanian di Kabupaten Muna Barat, karena berdampak negatif pada

Produksi dan Produktifitas Pertanian. Hal ini kontradiktif dengan kecenderungan peningkatan kebutuhan masyarakat akan hasil-hasil pertanian, khususnya terkait dengan kebutuhan pangan akibat dari peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Dalam upaya memenuhi kebutuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM maka beberapa upaya yang harus menjadi perhatian dalam upaya peningkatan produksi dan produktifitas pertanian di Kabupaten Muna Barat adalah :

- 1) Perlunya modernisasi alat mekanisasi pertanian;
- 2) Penggunaan bibit unggul bersertifikasi;
- 3) Perlunya sarana dan prasarana pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu serta pengendalian penyakit ternak;
- 4) Peningkatan perbaikan jaringan irigasi dan ketersediaan cadangan air serta pompanisasi;
- 5) Peningkatan produksi melalui peningkatan mutu intensifikasi, perbaikan mutu lahan, pemupukan berimbang dan peningkatan indek pertanaman IP serta perluasan areal penanaman;
- 6) Penanganan pasca panen penggunaan teknologi/ alat mekanisasi pasca panen;
- 7) Perlunya pengembangan kapasitas alat tangkap bagi nelayan dan pengembangan perikanan budidaya;
- 8) Peningkatan keterampilan sumber daya manusia pengelola usaha pertanian/ perikanan.
- 9) Pengembangan Peternakan terpadu Pola Kawasan.
- 10) Pengembangan Usaha Ayam Petelur

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan Petani, nelayan, dan pelaku UMKM maka Pengembangan produksi dan produktifitas Pertanian harus didukung dengan adanya Industri Pengolahan hasil-hasil pertanian dan jaminan akses pasar. Hal ini dimaksudkan agar Petani, Nelayan, dan UMKM memiliki nilai tambah dan daya saing usaha.

10. Pengembangan Sarana Sosial dan Ekonomi Wilayah

Berdasarkan Rancangan RTRW Kabupaten Muna Barat, Struktur Ruang dibagi menjadi (1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pemerintahan berada di laworo; (2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Wapae, Wamelai, Tondasi, dan Konawe; dan (3) Pusat Pelayanan Lokal (PPL) meliputi Kasimpa Jaya, Pajala, Barangka, Lahaji, Tiworo dan Lailangga. Dalam upaya pemerintah daerah menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing di Kabupaten Muna Barat maka Pengembangan/ Pembangunan sarana Sosial dan ekonomi yang meliputi Sarana Pemerintahan Pendidikan, Kesehatan, Rumah Ibadah, dan sarana perdagangan (Pasar) diarahkan pada pusat-pusat pengembangan berdasarkan struktur ruang wilayah.

11. Penciptaan Iklim investasi yang berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran serta upaya percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan peran dunia usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Muna Barat dalam rangka pembukaan lapangan kerja baru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif adalah

- 1) Perlunya perbaikan administrasi publik terutama yang berkaitan dengan investasi misalnya lama waktu pengurusan, biaya, konsistensi, insentif dan disinsentif;
- 2) Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan struktur dan kualitas pendidikan, pelatihan dan workshop;
- 3) Menghapuskan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah;
- 4) Menyusun aturan yang dilengkapi SOP dan CoC yang jelas dan konsisten pada semua bidang pengurusan; dan
- 5) Peningkatan dan perbaikan kapasitas dan kualitas serta ketersediaan infrastruktur terutama yang menuju akses kawasan industri dan sumber bahan baku.

12. Optimalisasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan di Kabupaten Muna Barat, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlu ditetapkan minimal 20%. Keberadaan Ruang terbuka Hijau (RTH) milik publik dan ramah anak merupakan suatu tuntutan kebutuhan yang sangat penting. Keberadaan Ruang terbuka hijau (RTH) milik publik dan ramah anak relatif belum tersedia. Untuk mengoptimalkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Muna Barat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan regulasi RTH.

13. Optimalisasi Pengelolaan Persampahan

Pelayanan Persampahan di Ibukota Muna Barat relatif belum tersedia. Laworo, sebagai Ibukota Kabupaten Muna Barat merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki potensi sebagai wilayah pengembangan permukiman, wilayah pusat pemerintahan, dan pusat pelayanan jasa-jasa. Sebagai pusat Kegiatan permukiman, pemerintahan dan pelayanan jasa-jasa, Ibukota Kabupaten akan menghadapi permasalahan pengelolaan persampahan. Untuk menjawab tantangan persampahan, Pemerintah Daerah harus menyiapkan Master Plan Pengelolaan Persampahan dan Penetapan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

14. Optimalisasi Pelayanan Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemadam kebakaran merupakan suatu keharusan yang harus disediakan oleh Pemerintah daerah dalam rangka mengurangi kerugian atau resiko dampak bencana kebakaran. Saat

ini, sistem pelayanan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Muna Barat belum tersedia. Untuk mengoptimalkan pelayanan Pemadam kebakaran, maka upaya yang mendesak dilakukan oleh pemerintah Daerah adalah Penyediaan Mobil Pemadam Kebakaran, pembangunan Hidran Pemadam kebakaran, penyediaan fasilitas pelengkap petugas pemadam kebakaran, dan peningkatan kompetensi petugas pemadam kebakaran.

15. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Kualitas Layanan Publik sangat tergantung pada Aspek Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Aspek kompetensi dan profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah, dan Aspek Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Pelayanan publik di Kabupaten Muna Barat belum optimal disebabkan karena umumnya Bangunan Gedung Kantor belum tersedia, jumlah dan kualitas Aparat masih belum sesuai dengan kebutuhan, dan aspek tata kelola Pemerintahan Daerah belum optimal. Aspek tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai *good government* dan mengedepankan *clean governance* di semua aspek. Aspek tata Kelola Pemerintah daerah terkait dengan Penegakan Disiplin ASN, Penerapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik, Inovasi-inovasi Pelayanan Publik, dan Transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan menuntut penggunaan teknologi informasi baik pada level pemerintahan maupun masyarakat. Pada level pemerintahan sendiri penguasaan teknologi yang paling menuntut adalah teknologi E-Government. Hal ini menjadi penting karena konsep transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan tercermin dari publikasi data pemerintah daerah. Dimana konsep transparansi dan keterbukaan tersebut akan menjadi lebih efektif jika dipublikasikan melalui internet (situs resmi daerah).

16. Peningkatan Daya Saing Kepemudaan

Sarana prasarana dasar penunjang aktivitas kepemudaan di Kabupaten Muna Barat dapat dikatakan sangat minim. Hal ini tercermin dari penyediaan sarana olahraga dan kegiatan kepemudaan yang belum optimal. Walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, namun putra putri Muna Barat, khususnya para atlet olahraga dan qori/ qoriah, telah banyak menorehkan prestasi cemerlang baik di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional. Dalam upaya menggenjot daya saing pemuda Muna barat, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah menyiapkan Sarana dan Prasarana yang memadai dan didukung dengan pelaksanaan pembinaan olahraga dan kegiatan kepemudaan lainnya secara berkesinambungan.

17. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Muna Barat terdiri dari Wisata Sejarah, Wisata Budaya, dan Wisata Alam. Dalam upaya meningkatkan daya saing destinasi Pariwisata, hal-hal yang

harus diperhatikan antara lain ketersediaan fasilitas pariwisata, seperti akses jalan dan sarana transportasi, air bersih, listrik, komunikasi, tempat parkir, tempat-tempat peristirahatan, ruang ganti/ WC, restoran/ warung makan, penyelenggaraan even pariwisata yang terkalendar, promosi, penginapan dan sebagainya.

Objek wisata juga seharusnya dilakukan perawatan secara holistik, dengan mempertimbangkan kelestarian alam melalui intervensi fisik dan juga mempertimbangkan sosial masyarakat. Untuk itu, perlunya dibentuk unit pengelolaan objek-objek wisata, sehingga pengelolaan objek wisata dapat menjadi optimal;

18. Pengembangan dan pelestarian Budaya Daerah

Nilai-nilai Budaya Muna belum sepenuhnya terimplementasikannya dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan pemerintahan di Kabupaten Muna Barat. Dalam upaya pengembangan dan pelestarian budaya daerah, beberapa tantangan yang harus diperhatikan dalam pembangunan budaya daerah antara lain adalah Perlu adanya regulasi yang mendukung pengembangan dan revitalisasi Budaya Muna; Perlu adanya Pengelolaan dan pengembangan berbagai produk seni budaya; perlu diimplementasikan menggunakan Bahasa Muna dalam kehidupan sehari-hari.

19. Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak.

Permasalahan besar yang dihadapi dalam pembangunan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yaitu masih terdapatnya kesenjangan gender di berbagai bidang. Hal ini tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, termasuk meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan oleh: (i) terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya; (ii) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (iii) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.

Lebih jauh lagi melihat akar permasalahan kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi adalah masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender, yang disebabkan oleh: (i) belum optimalnya pengintegrasian perspektif gender ke dalam penyusunan kebijakan, yang mengakibatkan masih banyaknya kebijakan yang belum merespon perspektif gender; (ii) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, yang ditandai dengan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia, termasuk kemampuan dalam memberikan bantuan teknis pelaksanaan PUG, minimnya ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan penggunaannya dalam siklus pembangunan; dan (iii) masih rendahnya pemahaman tentang konsep dan isu gender,

nilai-nilai kesetaraan gender, dan manfaat PUG dalam pembangunan, baik di pusat maupun di daerah.

Kesetaraan gender merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan nasional harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta memberikan penguasaan/kontrol terhadap sumberdaya pembangunan. Dengan demikian, PUG dalam pembangunan merupakan strategi yang digunakan untuk mengintegrasikan isu-isu gender yang disebabkan oleh kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta dalam berpartisipasi dan dalam penguasaan sumberdaya pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.

20. Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Muna Barat memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. LPM, PKK, RW, dan Karang Taruna sebagai institusi lembaga kemasyarakatan belum berperan optimal dalam pemberdayaan masyarakat serta dalam penyelenggaraan pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat akan sangat ditentukan oleh keluarga sebagai unit sosial terkecil pembentuk institusi masyarakat, ketahanan keluarga menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat serta upaya mereduksi permasalahan sosial.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah mengalokasikan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar 10% dari Dana Perimbangan di luar Dana Alokasi Khusus sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa. Untuk mengefektifkan pengelolaan ADD dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan sinkronisasi kebijakan pembangunan Desa dan pembangunan Daerah maka pengelolaan ADD perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan misi merupakan gambaran ke depan Kabupaten Muna Barat pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode Tahun 2017-2022. Gambaran tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merujuk **Rancangan RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025** (Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Tahap I) dan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 dan Rancangan RTRW Kabupaten Muna Barat 2017-2037.

5.1. Visi

Tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan dan cita-cita bernegara tersebut dan mempertimbangkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama awal Periode Pemerintahan DOB Kabupaten Muna Barat tahun 2014-2016, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2017 - 2022 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA,
DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI
OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS”**

Visi Pembangunan Kabupaten Muna Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Muna Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi di atas mengandung beberapa pokok kata kunci yakni SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF, BERDAYA SAING, DAN RELIGIUS. Adapun penjelasan pokok-pokok visi ditujukan pada tabel V.1.

Tabel V.1. Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi
1	SEJAHTERA	Merefleksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah Muna Barat yang berkeadilan ditopang oleh pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada agropolitan dan minapolitan.
2	DEMOKRATIS	Penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terefleksikan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, tata kelola keuangan daerah

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi
		dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), dan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, bernegara yang harmonis dan toleran.
3	PRODUKTIF	Merefleksikan pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
4	BERDAYA SAING	<ul style="list-style-type: none"> • Merefleksikan keberadaan infrastruktur Wilayah yang memadai dan berkualitas dalam mendukung Penataan dan daya saing pengembangan Wilayah khususnya pada pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pembangunan Desa, dan Pulau-Pulau Kecil; • Merefleksikan pengelolaan Pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta Pelestarian/ pengembangan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal
5	RELIGIUS	Merefleksikan masyarakat Kabupaten Muna Barat memiliki jati diri sebagai insan yang berbudaya, Berkarakter, Berbudi Pekerti Luhur, dan berakhlak mulia dalam menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama yang harmonis dan toleran.

5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi pembangunan Muna Barat dalam upaya mewujudkan Muna Barat yang bersih, berdaya saing, bermartabat, dan sejahtera untuk semua adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur
- 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas
- 3) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan
- 4) Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

Adapun penjabaran unsur visi RPJMD Kabupaten Muna Barat 2017-2022 ke dalam misi ditunjukkan pada Tabel V. 4

Tabel V. 4. Penerjemahan Unsur Visi Ke Dalam Misi RPJMD Kabupaten Muna Barat 2017-2022

Unsur Visi	Pelaksanaan dalam Misi
DEMOKRATIF	Dilaksanakan dalam misi (5): Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Efektif, Partisipatif, Transparan dan Bermartabat..
PRODUKTIF	Dilaksanakan dalam misi (1): khususnya pada Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Kreatif, Sehat, Produktif, dan Inovatif;
SEJAHTERA	Dilaksanakan dalam Misi (3) : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Agropolitan Dan Minapolitan Melalui Optimalisasi Sentra-Sentra Produksi Pertanian Dan Perikanan Dalam Arti Luas
BERDAYA SAING	Dilaksanakan dalam Misi (2) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Wilayah Yang Memadai dan Berkualitas dan Misi (4): Mengembangkan Potensi Wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal.
DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS	Dilaksanakan dalam misi (1): khususnya pada Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur

Misi Pertama, "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur". menekankan pada pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi dan berakhlak mulia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Aspek-aspek yang menentukan kunci keberhasilan misi ini adalah:

- (1) Pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Pendidikan PAUD, SD/MI, dan SMP/ Sederajat secara merata dan berkeadilan, dengan mendorong: Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan, peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan, pengembangan pendidikan non formal, dan Pembinaan prestasi dan kreatifitas Siswa dan Guru.
- (2) Pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Kesehatan Dasar dan Layanan Kesehatan Rujukan, dengan mendorong: Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan, Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga Kesehatan, dan pengembangan tata kelolah dan standar operasional prosedur layanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing.
- (3) Pengembangan Prestasi dan budaya olahraga, dengan mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga, meningkatkan pembinaan olahraga, serta memberikan penghargaan bagi atlit yang berprestasi di tingkat provinsi dan Nasional/ Internasional.
- (4) Peningkatan peran serta dan kreatifitas kepemudaan dalam pembangunan

- (5) Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja untuk memenuhi pangsa pasar tenaga kerja dalam Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), dengan mendorong pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja serta pembangunan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.
- (6) Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar.
- (7) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (8) Peningkatan ketahanan keluarga Berencana dan keluarga sejahtera.
- (9) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pada seluruh sektor pembangunan.

Misi Kedua, "Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas", menekankan pada pembangunan Infrastruktur dalam rangka peningkatan akses pelayanan publik, Penataan wilayah sesuai RTRW, dan peningkatan akses pintu keluar masuk wilayah Kabupaten Muna Barat. Aspek-aspek yang menentukan kunci keberhasilan misi ini adalah:

- (1) Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam rangka menjamin adanya interkoneksi antara Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah,
- (2) Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam rangka mendorong produktifitas pemanfaatan lahan pada daerah-daerah yang memiliki potensial pengembangan ekonomi lokal
- (3) Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam rangka menata kawasan pusat-pusat kegiatan publik
- (4) Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan Rakyat dalam rangka meningkatkan akses pelayanan daerah-daerah terisolir, daerah-daerah pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (5) Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan/ Dermaga Latawe, Pajala, dan Tondasi sebagai Pintu Keluar Masuk antar Pulau dalam mendukung mobilitas Barang dan Jasa.
- (6) Mendorong Pengembangan Bandara Udara Sugimanuru.
- (7) Pembangunan Drainase dalam rangka mengurangi resiko bencana banjir terhadap kerusakan jalan dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- (8) Pembangunan Sarana Penerangan Jalan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keselamatan lalulintas.
- (9) Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Irigasi
- (10) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (11) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
- (12) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan mendorong Peran BUMD/ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (13) Pengendalian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Misi Ketiga, "Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan", menekankan pada peningkatan produksi, produktifitas, dan nilai tambah ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan sektor-sektor berbasis agropolitan dan Minapolitan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah. Aspek-aspek yang menentukan kunci keberhasilan misi ini adalah:

- (1) Peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah kemampuan pengelolaan Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan dengan mendorong Inovasi dan Investasi.
- (2) Peningkatan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- (3) Peningkatan Peran Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak terdepan dalam mendorong Kesejahteraan Petani.
- (4) Pengembangan Produk Unggulan Daerah, dengan menerapkan konsep *one district one product* (ODOP) dan *one village one product* (OVOP) sebagai basis pengembangan potensi lokal
- (5) Mengembangkan industri Pengolahan dalam peningkatan nilai tambah komoditi sektor-sektor unggulan daerah.
- (6) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong peran Koperasi dan UMKM dalam membangun Ekonomi Lokal.
- (7) Peningkatan Akses Pasar Komoditi unggulan daerah, dengan mendorong kegiatan perdagangan antar daerah.
- (8) Penciptaan Iklim Investasi yang berkelanjutan

Misi Keempat, "Mengembangkan Potensi Wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal", menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup. Aspek-aspek yang menentukan kunci keberhasilan misi ini adalah:

- (1) Pengembangan/ Pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan
- (2) Pengembangan/ Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang berkelanjutan
- (3) Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi Kelima, " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat", menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Government and Clean Governance*. Aspek-aspek yang menentukan kunci keberhasilan misi ini adalah:

- (1) Penyelenggaraan Birokrasi Modern yang berorientasi pada Pelayanan Publik yang mengedepankan Akuntabilitas, Kualitas, Inovasi, dan Kooperatif (AKuIKo), yang ditunjang dengan Aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalisme, sistem prosedur dan tata kerja yang Inovatif (Kemudahan akses, cepat, bermutu, dan memuaskan), dan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang nyaman dan representatif.
- (2) Penegakan Disiplin Aparatur yang diikuti dengan Pemberian Insentif/ Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan secara partisipatif.
- (4) Tata kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan.
- (5) Peningkatan Kinerja APIP (aparatur pengawas internal pemerintah) dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- (6) Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan menghormati keberagaman agama dan suku.

- (7) Penciptaan Kondisi Ketentraman dan Ketertiban masyarakat melalui prakarsa dan kemitraan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat.

Kelima misi RPJMD Kabupaten Muna Barat tersebut apabila diselaraskan dengan Agenda RPJMN Tahun 2015-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.3 Keselarasan Agenda Nawacita (9 Agenda Prioritas RPJMN) dan RPJMD Kabupaten Muna Barat

9 Agenda Prioritas RPJMN 2014-2019	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat 2017-2022
Agenda 1: Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Dituangkan ke dalam misi (5): "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya terkait dengan tujuan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat".
Agenda 2: Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Diterjemahkan ke dalam misi (5) : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat".
Agenda 3: Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan	Dituangkan ke dalam misi (2): "Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas"
Agenda 4: Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Diterjemahkan ke dalam misi (5): "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat" khususnya pada tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Agenda 5: Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Dituangkan ke dalam misi (1): "Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur."
Agenda 6: Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Dituangkan ke dalam misi (3): "Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan"; dan Misi (4): "Mengembangkan Potensi

9 Agenda Prioritas RPJMN 2014-2019	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat 2017-2022
Agenda 7: Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.	Wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal”
Agenda 8: Akan melakukan revolusi karakter bangsa	Dituangkan ke dalam misi (5) “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat” khususnya terkait dengan tujuan Meningkatkan semangat persatuan, kesatuan dan toleransi dalam Kehidupan Berbanga, dan Bernegara
Agenda 9: Akan memperteguh Kebhinekaandan memperkuat restorasi sosial	

Disamping adanya keselarasan antara agenda pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, keselarasan kebijakan pembangunan jangka menengah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan sinkronisasi. Misi Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ditetapkan dalam Perda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 adalah (1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, (2) Pembangunan Ekonomi, (3) Revitalisasi Pemerintahan Daerah, (4) Memantapkan Pembangunan Kebudayaan Daerah, dan (5) Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis.

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta iman dan taqwa. Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk membangun perekonomian masyarakat secara nyata melalui usaha-usaha pragmatis dengan mendorong pembangunan sektor riil dan meningkatkan nilai tambah berdasarkan potensi yang berada di sekitarnya. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Pembangunan Kebudayaan; dimaksudkan untuk memperkokoh identitas dan jati diri, mengembangkan rasa perasatuan dan kesatuan, sumber inspirasi pembangunan serta mendorong sektor pariwisata yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya potensi budaya setempat. Selanjutnya, Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis; dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur wilayah secara terpadu, mengembangkan infrastruktur perekonomian yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan simpul-simpul perekonomian serta pembangunan infrastruktur kawasan strategis untuk mendukung peningkatan nilai tambah sumberdaya alam. Keterkaitan dan keselarasan antara Misi RPJMD Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 dengan dengan Misi RPJMD Provinsi Sulaewesi Tenggara Tahun 2013-2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sultra 2013-2018 dan Misi RPJMD Kabupaten Muna Barat 2017-2022

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat 2017-2022
Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia,	Dituangkan ke dalam misi (1): "Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur."
Misi 2: Pembangunan Ekonomi,	Dituangkan ke dalam misi (3): "Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan";
Misi 3: Revitalisasi Pemerintahan Daerah,	Dituangkan ke dalam misi (5): "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya terkait dengan tujuan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat".
Misi 4: Memantapkan Pembangunan ebudaya Daerah	Misi (4): "Mengembangkan Potensi Wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal".
Misi 5: Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis.	Dituangkan ke dalam misi (2): "Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas"

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Muna Barat selama kurun waktu 2017-2022. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Tabel V.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Muna Barat

Visi: Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius"			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur	1. Meningkatkan layanan dan pemenuhan hak-hak dasar Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan Sosial	1. Terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Pendidikan yang berkualitas

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			2. Terpenuhi hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Kesehatan yang berkualitas
			3. Terpenuhi hak-hak dasar masyarakat terhadap layanan Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar
			4. Meningkatnya pelayanan upaya pengurangan resiko bencana
		2. Meningkatkan Minat baca Masyarakat melalui Penyediaan layanan Perpustakaan	5. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Kecerdasan Penggunaan Media Elektronik
		3. Meningkatkan Prestasi Atlit Olahraga dan budaya berolahraga	6. Meningkatnya Budaya Olahraga dan prestasi Olahraga
		4. Meningkatkan kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan	7. Meningkatnya Motivasi dan Peran Kepemudaan dalam mendorong daya saing pembangunan daerah
		5. Meningkatkan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	8. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	9. Meningkatnya swadaya/partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan
		7. Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10. Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Kualitas Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Keluarga

No	Misi	Tujuan	Sasaran
		8. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dalam menghadapi Persaingan Pasar Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi Asia	11. Meningkatnya Kompetensi Keahlian dan keterampilan Tenaga Kerja
			12. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
			13. Meningkatnya akses Kesempatan Kerja dan Peluang Kerja
II	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Wilayah Yang Memadai dan Berkualitas	9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah	14. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah dalam mendukung Pengembangan Wilayah dan pemerataan Pembangunan
			15. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempatb Tumbuh
			16. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			17. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan ketenagalistikan dan Bahan Bakar Minyak
			18. Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Rencana Tata Ruang yg berkelanjutan
			19. Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Persampahan yang berkelanjutan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
III	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Agropolitan Dan Minapolitan	10. Meningkatkan Produksi dan produktivitas kemampuan pengelolaan Ekonomi Kerakyatan berbasis Agropolitan dan Minapolitan	20. Meningkatnya kapasitas produksi dan produktifitas sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dalam upaya mendorong kesejahteraan petani dan kedaulatan serta ketahanan pangan daerah
			21. Meningkatnya Produksi dan produktivitas kemampuan pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan
			22. Meningkatnya Nilai Tambah kemampuan pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan
		11. Meningkatkan Akses Pasar Produk Ekonomi Lokal	23. Meningkatnya Kemampuan Pasar menyerap Produk Sektor-Sektor Unggulan Daerah dengan Harga yang kompetitif
			24. Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan barang Penting
			25. Meningkatnya kemudahan akses terhadap Input Produksi dan Barang Kebutuhan Pokok
			26. Meningkatkan Standardisasi dan perlindungan Konsumen

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			27. Meningkatnya kualitas pelayanan Peizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		12. Meningkatkan Peran Koperasi dan UMKM dalam membangun Ekonomi Lokal,	28. Meningkatnya Pelaku UMKM dalam membangun perekonomian lokal
			29. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi untuk menopang perekonomian lokal
		13. Mengembangkan Peran industri dalam peningkatan nilai tambah komoditi sektor-sektor unggulan dan Jasa	30. Meningkatnya Peran Industri Sektor Unggulan Daerah dalam pengembangan ekonomi Lokal
			31. Meningkatnya kualitas pelayanan Peizinan Usaha Industri
			32. Meningkatkan Keterpaduan Sistem Informasi Industri Nasional
		14. Meningkatkan Iklim Investasi yang berkelanjutan	33. Meningkatnya peran Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dalam pengembangan ekonomi lokal
			34. Meningkatnya kualitas pelayanan dan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan
IV	Mengembangkan Potensi Wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya sesuai dengan kearifan lokal	15. Memantapkan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	35. Terwujudnya pengelolaan Pariwisata berkelanjutan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			36. Meningkatnya ragam ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan hak kekayaan Intelektual
		16. Mengembangkan pelestarian dan pengelolaan Budaya Daerah	37. Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah
		17. Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	38. Terwujudnya pengelolaan LH secara berkelanjutan
V	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	18. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	39. Meningkatnya tingkat kepuasan Pelayanan Publik
		19. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	40. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			41. Meningkatnya Kinerja Aparat pengawas internal pemerintah (APIP)
		20. Meningkatkan semangat persatuan, kesatuan dan toleransi dalam Kehidupan Berbangsa, dan Bernegara	42. Meningkatnya nilai demokrasi dan Persatuan berbangsa dan Bernegara
		21. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	43. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berbasis prakarsa dan Kemitraan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi dengan 23 Tujuan, dan 42 Sasaran maka untuk lebih terarahnya fokus pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Pembangunan daerah.

6.1. Strategi Umum

Dalam upaya mencapai Visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD 2017-2022 dan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah serta kemampuan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Muna Barat, maka ditetapkan 6 (enam) Strategi Umum sebagai berikut:

1. Meletakkan dasar-dasar pondasi pembangunan daerah yang kokoh untuk keberlanjutan pembangunan daerah jangka panjang yang lebih efisiensi dan efektif dalam upaya meningkatkan produktifitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna Barat.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan adaptif, sebagai perwujudan konsep “negara hadir” dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan memenuhi aspirasi masyarakat.
3. Mendorong pelaksanaan demokrasi, kesetaraan, serta perluasan akses dan kapasitas bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat dan perannya dalam pembangunan. Apabila masyarakat meningkat kapasitasnya, masyarakat bisa mejadi potensi pembangunan, bukan menjadi beban.
4. Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), *pro poor*, dan *pro growth*.
5. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan mengembangkan Konsep “*Compact City*” dalam mendorong pembangunan kawasan berbasis Agropolitan dan Minapolitan. Kawasan ini akan mendekatkan layanan sosial ekonomi masyarakat sehingga pembangunan akan menjadi efektif dan efisien, dan mengurangi biaya masyarakat.
6. Membangun sinergi dan kemitraaan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya untuk percepatan pencapaian target pembangunan daerah

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Muna Barat 2017-2022, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Muna Barat 2017-2022 ditunjukkan pada Tabel VI.1 sebagai berikut.

Tabel VI. 1. Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Muna Barat

Visi :			
Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius”			
Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur			
1. Meningkatkan layanan dan pemenuhan hak-hak dasar Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan Sosial	1. Terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Pendidikan yang berkualitas	1. Percepatan Pemenuhan layanan dasar pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan	1. Meningkatkan pengelolaan layanan pendidikan Anak Usia Dini
			2. Meningkatkan Akses dan Kualitas layanan pendidikan Dasar dengan menyediakan Pakaian Seragam Lengkap Siswa SD dan SMP serta ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai
			3. Melestarikan dan mendorong pengembangan bahasa dan sastra daerah pada lembaga pendidikan
			4. Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Non Formal bagi penduduk usia dewasa
		2. Peningkatkan mutu layanan pendidikan dan Tenaga	1. Meningkatkan standar Kompetensi dan profesionalime Tenaga

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Kependidikan	Kependidikan
			2. Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan
		3. Peningkatan prestasi dan kreatifitas Siswa dan tenaga Pendidik yang memiliki daya saing di tingkat provinsi/ Regional, dan Nasional	1. Mengembangkan prestasi dan kreatifitas siswa dan tenaga Pendidik
	2. Terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Kesehatan yang berkualitas	4. Optimalisasi Pemenuhan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	1. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pengelolaan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat
			2. Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak
			3. Meningkatkan kesehatan anak balita
			4. Meningkatkan Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
			5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat miskin
			6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan puskesmas untuk Semua
			7. Meningkatkan cakupan sarana publik yang sehat

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			8. Meningkatkan Ketersediaan Obat dan bahan Perbekalan kesehatan
			9. Meningkatkan Pengawasan peredaran Obat dan Makanan.
			10. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Bangunan Gedung Pelayanan Kesehatan dan Banngunan Gedung Pendukung Layanan Kesehatan Lainnya
			11. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
			12. Meningkatkan penanganan balita Gizi buruk
			13. Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan
			14. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu tenaga kesehatan
			15. Mengembangkan Mangemen Pelayanan Kesehatan yang bermutu
		5. Pemenuhan layanan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) yang berkualitas	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan rujukan

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		sesuai SOP	
			2. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			3. Meningkatkan Ketersediaan Obat dan bahan Perbekalan kesehatan
			4. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Bangunan Gedung RSUD dan Sarana prasarana pendukung lainnya
			5. Meningkatkan Tata Kelola Layanan Rumah Sakit yang berkualitas
	3. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terhadap layanan Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	6. Pemenuhan layanan dasar sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas
			2. Meningkatkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial atas hak-hak dasar bagi fakir miskin
			3. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga kesejahteraan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial dan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Membangun sistem penopang bagi penyelenggaraan layanan untuk PMKS dan Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan sosial kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Secara terintegrasi
	4. Meningkatnya pelayanan upaya pengurangan resiko bencana	7. Peningkatan kemampuan adaptasi dan upaya mitigasi bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Alam
			2. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana Kebakaran
			3. Meningkatkan upaya mitigasi dan Tanggap Darut bencana
2. Meningkatkan Minat baca Masyarakat melalui Penyediaan layanan Perpustakaan	5. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Kecerdasan Penggunaan Media Elektronik	8. Peningkatan Minat Baca masyarakat dan Cerdas menggunakan Media Elektronik	1. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan daerah
			2. Megembangkan Layanan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan budaya baca dan cerdas bermedia
3. Meningkatkan Prestasi Atlit Olahraga dan budaya berolahraga	6. Meningkatnya Budaya Olahraga dan prestasi Olahraga	9. Peningkatan Motivasi budaya olahraga dan Atlit berprestasi di tingkat provinsi, regional, dan Nasional	1. Meningkatkan Pembinaan Olahraga Masyarakat dan Olahraga Berprestasi

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Meningkatkan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga mulai dari Tingkat Desa sampai Tingkat Kabupaten dengan mendorong Partisipasi Pihak Ketiga
			3. Meningkatkan kualitas sarana dan Prasarana Olahraga sesuai Standar Nasional
4. Meningkatkan kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan	7. Meningkatnya Motivasi dan Peran Kepemudaan dalam mendorong daya saing pembangunan daerah	10. Peningkatan Kreatifitas, Semangat dan Peran Kepemudaan dalam mendorong daya saing pembangunan daerah	1. Menumbuhkan Kreatifitas, Semangat dan Peran Serta Komunitas Kepemudaan dalam pembangunan
			2. Memberikan Penghargaan/ Beasiswa kepada Pemuda dan pemuda Asal Kabupaten Muna Barat yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional/ Internasional pada bidang Pendidikan, Seni Budaya, Olahraga, dan Kegiatan Keagamaan
5. Meningkatkan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	8. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Meningkatkan penguatan Peran Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		12. Peningkatan Upaya Pemenuhan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Meningkatkan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, serta penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan
			2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
		13. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan hak anak	1. Meningkatkan Kualitas Keluarga , mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, dan penyediaan layanan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan hak anak
		14. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan khusus Anak	1. mengoptimalkan kelembagaan PHA dan Perlindungan khusus Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha serta mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak
		15. Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Data dan Informasi Gender dan Anak

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
6. Memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	9. Meningkatkan swadaya/partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan	16. Peningkatan swadaya/partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan	1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
			2. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa, lembaga adat desa, dan lembaga adat tingkat daerah
7. Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10. Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Kualitas Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Keluarga	17. Peningkatan pengendalian penduduk	1. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
		18. Optimalisasi pengendalian pelayanan KB dan keluarga Sejahtera	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses layanan KB dan ketahanan serta Kesejahteraan Keluarga
8. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dalam menghadapi Persaingan Pasar Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi Asia	11. Meningkatnya Kompetensi Keahlian dan keterampilan Tenaga Kerja	19. Peningkatan Kualitas tenaga kerja	1. Mendorong/ Meningkatkan kapasitas tenaga kerja baik melalui pendidikan tinggi maupun melalui Pengembangan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha
	12. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	20. Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja	1. Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	13. Meningkatkan akses Kesempatan Kerja dan Peluang Kerja	21. Peningkatan akses Kesempatan Kerja dan Peluang Kerja	1. Memperluas akses informasi dan peluang kerja
Misi 2. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Wilayah Yang Memadai dan Berkualitas			
9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah	14. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah dalam mendukung Pengembangan Wilayah dan pemerataan Pembangunan	22. Optimasiasi sistem transportasi yang efisien dalam rangka meningkatkan interkoneksi dan aksesibilitas serta akselerasi pengembangan wilayah	1. Mengembangkan Prasarana dan Fasilitas Penunjang Transportasi Darat/ Penyeberangan, Transportasi Laut, dan Transportasi Udara
			2. Meningkatkan Pengendalian, pengawasan dan pelayanan Transportasi Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberanga
			3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan pada wilayah-wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Akses Keluar Masuk Wilayah
			4. Meningkatkan Keselamatan lalulintas
			5. Meningkatkan Kelayakan Penggunaan Kendaraan Bermotor melalui Pengujian

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Berkala Kendaraan Bermotor
			6. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan darat, laut, dan penyeberangan
			7. Meningkatkan kelayakan penggunaan Sarana Perhubungan Laut
			8. Mengembangkan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
		23. Peningkatan Prasarana Transportasi Darat (Jalan dan jembatan) dalam rangka interkoneksi antara Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Penataan Kawasan	1. Membangun, Meningkatkan kapasitas/ Daya dukung, dan memelihara Jalan dan Jembatan yang berkualitas pada ruas jalan Kabupaten
		24. Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dalam rangka Pemerataan Pembangunan khususnya pada wilayah yang kurang berkembang dan Pulau-Pulau Kecil	1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam rangka Pemerataan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		25. Peningkatan Penggulangan Banjir dan Pengamanan Abrasi Pantai akibat arus gelombang laut	1. Meningkatkan Penanggulangan Banjir dan Pengamanan Kawasan Pantai terhadap abrasi akibat arus gelombang laut
			2. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah
		26. Peningkatan ketersediaan Air Irigasi yang cukup dan kontinyu untuk mendukung produksi dan produktifitas pertanian	1. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Kabupaten (Kurang dari 1000 Ha)
		27. Peningkatan ketersediaan Sarana Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Mendorong peran BUMD dalam pengelolaan Air Bersih dan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan
		28. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur	1. Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	15. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempatb Tumbuh	29. Peningkatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat tumbuh	1. Mengoptimalkan Perencanaan dan pembangunan Infrastruktur kawasan Minapolitan dan Agropolitan
			2. Mengoptimalkan Perencanaan dan meningkatkan pembangunan Infrastruktur kawasan Transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
		30. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Jasa Konstruksi	1. Meningkatkan Manajemen penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	16. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31. Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Layak Huni dan Lingkungan yang sehat dan teratur	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat dn lingkungan yang sehat dan tetatur
			2. Meningkatkan pengelolaan Sistem Kawasan Permukiman dan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU)
		32. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemakaman	1. Mengembangkan dan Menata Areal Pemakaman seta menyediakan Sarana Mobilitas Pelayanan Jenazah
	17. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ketenagalistikan dan Bahan Bakar Minyak	33. Optimalisasi Pemanfaatan energi ketengalistrikan dan bahan bakar minyak	1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ketenagalistrikan dan bahan Bakar Minyak

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	18. Meningkatkan Optimalisasi Pemanfaatan Rencana Tata Ruang yg berkelanjutan	34. Penerapan perencanaan dan kebijakan tata ruang yang partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan	1. menerapkan pembangunan Infrastruktur wilayah, pengembangan pemukiman, dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang yang berwawasan lingkungan
			2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan menyelenggarakan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan
	19. Meningkatkan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan yang berkelanjutan	35. Peningkatan Kinerja Sistem dan Pengelolaan persampahan yang berkelanjutan	1.Meningkatkan Kinerja Sistem dan Pengelolaan persampahan yang berkelanjutan
Misi 3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Agropolitan Dan Minapolitan			

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
10. Meningkatkan Produksi dan produktivitas kemampuan pengelolaan Ekonomi Kerakyatan berbasis Agropolitan dan Minapolitan	20. Meningkatkan kapasitas produksi dan produktifitas sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dalam upaya mendorong kesejahteraan petani dan kedaulatan serta ketahanan pangan daerah	36. Optimalisasi Penyelelenggaran pangan berdasarkan Kedaulatan dan kemandirian Pangan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar dan prasarana produksi, lahan, air pertanian serta prasarana pendukung dalam jumlah yang cukup, dekat dengan kawasan pertanian, dan biaya pelayanan terjangkau
			2. Meningkatkan kemampuan Penyuluh, Petani, Organisasi Petani, dan Pola hubungan Pemerintah
			3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
			4. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk Peternakan
			5. Mengembangkan Penerapan Teknologi Pengolahan Pasca Panen
		37. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	1. Meningkatkan pengelolaan cadangan pangan daerah
		38. Optimalisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatkan pencegahan dan penanganan kerawanan pangan daerah
		39. Peningkatan Keamanan Pangan	1. Meningkatkan keamanan distribusi pangan segar

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		40. Optimalisasi Perizinan Usaha Pertanian	1. Mengoptimalkan Perizinan Usaha Pertanian
	21. Meningkatnya Produksi dan produktivitas kemampuan pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan	41. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta pemberdayaan petani ikan	1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap
			2. Meningkatkan sarana dan Prasarana perikanan tangkap
			3. Meningkatkan produksi dan produktifitas Budidaya perikanan dan Budidaya Perikanan Air Payau/ Tambak dan Air Tawar
			4. Meningkatkan Kesadaran dan Menegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
	22. Meningkatnya Nilai Tambah kemampuan pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan	42. Peningkatan Daya Saing Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1. Meningkatkan Daya Saing Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
11. Meningkatkan Akses Pasar Produk Ekonomi Lokal	23. Meningkatnya Kemampuan Pasar menyerap Produk Sektor-Sektor Unggulan Daerah dengan Harga yang kompetitif	43. Peningkatan Akses Pasar Produk Sektor-Sektor Unggulan Daerah	1. Meningkatkan Penyelenggaraan promosi perdagangan melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	24. Meningkatkan Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan barang Penting	44. Peningkatan Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan barang Penting	1. Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang produksi dan komoditas pokok
	25. Meningkatkan kemudahan akses terhadap Input Produksi dan Barang Kebutuhan Pokok	45. Peningkatan kemudahan akses terhadap input produksi dan barang pokok	1. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan
	26. Meningkatkan Standardisasi dan perlindungan Konsumen	46. Peningkatan Standardisasi dan perlindungan Konsumen	1. Meningkatkan pelaksanaan Meteorologi Legal berupa Tera, Tera ulang, dan pengawasan
	27. Meningkatkan kualitas pelayanan Peizinan dan Pendaftaran Perusahaan	47. Peningkatan kualitas pelayanan Peizinan dan Pendaftaran Perusahaan	2. Meningkatkan cakupan Pelayanan Peizinan dan Pendaftaran Perusahaan Perdagangan
12. Meningkatkan Peran Koperasi dan UMKM dalam membangun Ekonomi Lokal,	28. Meningkatkan Pelaku UMKM dalam membangun perekonomian lokal	48. Peningkatan daya saing Pelaku UMKM dalam membangun perekonomian lokal	1. Meningkatkan Kompetensi Wirausaha pelaku UMKM
	29. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi untuk menopang perekonomian lokal	49. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dalam Pembangunan Ekonomi lokal	1. Meningkatkan Kelembagaan Koperasi Sehat dan Mandiri
13. Mengembangkan Peran industri dalam peningkatan nilai tambah komoditi sektor-sektor unggulan dan Jasa	30. Meningkatkan Peran Industri Sektor Unggulan Daerah dalam pengembangan ekonomi Lokal	50. Peningkatan kualitas produk Industri Sektor Unggulan daerah	1. Meningkatkan Pengembangan Sentra-Sentra Industri berbasis Komoditi Unggulan Daerah

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2 Mengembangkan dan memberdayakan pelaku Industri Kecil dan menengah (kelompok pengrajin)
	31. Meningkatkan kualitas pelayanan Peizinan Usaha Industri	51. Peningkatan kualitas pelayanan Peizinan Usaha Industri	1. Meningkatkan cakupan Pelayanan Peizinan Usaha Industri Kecil dan Menengah
	32. Meningkatkan Keterpaduan Sistem Informasi Industri Nasional	52. Peningkatan Keterpaduan Sistem Informasi Industri Nasional	1. Meningkatkan penyampaian laporan Informasi Industri untuk IUI Kecil dan Izin Perluasannya, IUI menengah dan Izin perluasannya, dan IUKI dan IPKI
14. Meningkatkan Iklim Investasi yang berkelanjutan	33. Meningkatkan peran Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dalam pengembangan ekonomi lokal	53. Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan investasi	1. Menciptakan iklim usaha bagi UKM yang kondusif.
		54. Peningkatan sistem pendukung usaha bagi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro	1. Meningkatkan Kemudahan, Perlindungan dan Kepastian Berusaha
			2. Pemutahiran Data Pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro
	34. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan	55. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha/ Investasi Satu Atap	1. Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perizinan Satu Atap

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Meningkatkan Informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Promosi Peluang Investasi
			3. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Perijinan
Misi 4. Mengembangkan Potensi Wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya sesuai dengan kearifan lokal			
15. Memantapkan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	35. Terwujudnya pengelolaan Pariwisata berkelanjutan	56. Peningkatan kualitas pengelolaan Pariwisata berdasarkan prinsip berkelanjutan	1. Melaksanakan promosi wisata pada tingkat regional dan nasional untuk memperkenalkan/ memasarkan obyek wisata.
			2. Meningkatkan Pengelolaan Daya tarik Destinasi Pariwisata Daerah
	36. Meningkatnya ragam ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan hak kekayaan Intelektual	57. Pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif	1. Meningkatkan penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah
16. Mengembangkan pelestarian dan pengelolaan Budaya Daerah	37. Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah	58. Peningkatan pengelolaan kebudayaan Daerah	1. Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal/ tradisi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Meningkatkan apresiasi/ kreatifitas karya budaya dan pengelolaan warisan budaya
			3. Meningkatkan dan melestarikan budaya gotong royong
17. Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	38. Terwujudnya pengelolaan LH secara berkelanjutan	59. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam berdasarkan prinsip berkelanjutan	1. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup
			2. Meningkatkan Pengelolaan persampahan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip 3 R (reduce, recicle, reuse)
			2. Meningkatkan Pengamanan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			3. Meningkatkan keanekaragaman hayati (Kehati)
			4. Meningkatkan pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup
			5. Meningkatkan Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan secara lestari Hutan Taman Raya

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			6. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH berkelanjutan
			7. Meningkatkan Akses Informasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.
		60. Optimalisasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1. Mengembangkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat			
18. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	39. Meningkatnya tingkat kepuasan Pelayanan Publik	61. Peningkatan Kinerja Birokrasi Modern dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Optimalisasi dan efektifitas Pelayanan Perkantoran sesuai Standar Operasional dan Prosedur
			2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai tuntutan kebutuhan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
			3. Meningkatkan pelayanan Administrasi kepegawaian secara otomatis

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Menegakan Displin ASN
			5. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionlisme sumber daya aparatur daerah
			6. Meningkatkan Akuntabilitas Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan
			7. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pengelolaan Perekonomian Daerah serta membentuk layanan Badan Usaha Milik Daerah
			8. Mengoptimalkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan, Monitoring, dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			9. Optimalisasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah
			10. Mengembangkan sistem pengelolaan, perlindungan, dan penyelamatan Arsip Daerah

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		62. Peningkatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	1. Mengembangkan sistem penopang pemerintahan dan birokrasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk penguatan reformasi birokrasi
			2. Meningkatkan kerjasama Media Cetak dan elektronik untuk penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
			3. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur dalam penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		63. Peningkatan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatkan Kinerja dan kemitraan Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan
			2. Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
			3. Meningkatkan Efektifitas Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Aparatur
			4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kahumasan dan keprotokoleran Pemerintah Daerah

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5. Meningkatkan publikasi informasi Kinerja Legislatif
		64. Peningkatan Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Seluruh Masyarakat	1. Memperluas akses dan prosedur pelayanan adminduk dan capil
			2. Mendayagunakan data basis kependudukan untuk mendukung layanan publik
		65. Penguatan kepastian hukum terhadap hak-hak tanah Milik Masyarakat dan Pemerintah	1. Meningkatkan Penataan administrasi pertanahan terhadap lahan-lahan aset Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber daya pembangunan
		66. Peningkatan Kapasitas Manajemen pemerintahan desa	1. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Kelembagaan pemerintahan desa
19. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	40. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	67. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang terukur dengan opini BPK atas tata kelola Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian
		68. Peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah	1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah)

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		69. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam perencanaan dan pengendalian/ evaluasi pembangunan tahunan dan jangka menengah
			2. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan daerah secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender.
			3. Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map/ Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Ekonomi</i>
			4. Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map/ Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya</i>
			5. Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map/ Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA</i>
			6. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Tim Work Aparat Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		70. Peningkatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dalam mendukung Kualitas Perencanaan pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan lainnya	1. Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pembangunan Daerah
			2. Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara terpadu dengan melakukan updating secara berkala
			3. Mengembangkan kerjasama dengan BPS untuk penggandaan buku statistik dasar dalam mendukung ketersediaan data perencanaan pembangunan
			4. Mengembangkan statistik sektoral untuk mendorong ketersediaan data sektor yang akurat dan terkini
		71. Peningkatan Efektifitas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang berorientasi pada Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan	1. Meningkatkan efektifitas rekomendasi hasil-kajian/ Studi Penelitian untuk percepatan pembangunan Daerah dan pengembangan Wilayah

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Daerah	
		72. Peningkatan Publikasi Data Publikasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian/ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Web-Site Pemda	1. Mengoptimalkan Data Publikasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian/ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Web-Site Pemda
	41. Meningkatnya Kinerja Aparat pengawas internal pemerintah (APIP)	73. Peningkatan Kinerja aparat pengawas internal pemerintah (APIP)	1. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
20. Meningkatkan semangat persatuan, kesatuan dan toleransi dalam Kehidupan Berbangsa, dan Bernegara	42. Meningkatnya nilai demokrasi dan Persatuan berbangsa dan Bernegara	74. Peningkatan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat	1. Mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi
		75. Peningkatan Kesadaran menegakan Hukum dan Peraturan Daerah	1. Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		76. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang harmonis yang dilandasi oleh nilai-nilai toleransi beragama	1. Menumbuhkan nilai-nilai persatuan antar suku dalam kehidupan harmoni dan penghormatan berbangsa dan bernegara
			2. Menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama, harmoni dan penghormatan berbangsa dan bernegara
			3. Mengoptimalkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Kominda, dan Forum-forum kewaspadaan dini masyarakat terhadap keamanan Nasional dari gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri
			4. Mengoptimalkan peletarian Sejarah dan Budaya Daerah dengan mendorong pemberdayaan Ekonomi masyarakat berbasis sejarah dan budaya daerah
21. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	43. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berbasis prakarsa dan Kemitraan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat	77. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban dengan mengembangkan kemitraan berbasis kearifan lokal	1. Meningkatkan Kemitraan Pemerintah, Aparat Pengamanan, dan Masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		78. Peningkatan perlindungan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Meningkatkan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dan Koordinasi dengan Aparat Intelegen dalam Pencegahan Tindak Kejahatan/ Kriminal serta Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap pencegahan tindak kriminal
			2. Mengoptimalkan patroli petugas Satpol PP dan pengawalan pejabat daerah dalam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
			3. Peningkatan Pencegahan dan pemberantasan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras, Narkoba, Judi Dll

Untuk menyelaraskan sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka dalam pelaksanaan RPJMD 2017-2022 ditetapkan tema pembangunan per tahun, sebagai berikut:

1. Tema Pembangunan Tahun 2017 :
 - Pembangunan Infrastruktur Wilayah dalam Penataan Pembangunan Wilayah dengan mendorong **Penegakan Disiplin Aparatur** untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Tema Pembangunan Tahun 2018.
 - Pembangunan Infrastruktur Wilayah dalam Penataan Pembangunan Wilayah dengan **mendorong Reformasi Birokrasi Modern** yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Tema Pembangunan Tahun 2019:
 - Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur Wilayah dalam mendukung Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah dengan **mendorong pelayanan publik yang prima** untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Tema Pembangunan Tahun 2020 :

- Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur Wilayah dalam mendukung Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah dengan **meningkatkan pelayanan publik yang prima** untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Tema Pembangunan Tahun 2021 :
- Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur Wilayah Perkotaan dan Perdesaaan dengan **meningkatkan pelayanan publik yang prima** untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Tema Pembangunan Tahun 2022 (Tahun Transisi):
- Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan **memantapkan pelayanan publik yang prima** untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan Kesejahteraan Masyarakat.

6.3. Arah Pengembangan Wilayah

Untuk menjabarkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai misi tujuan dan sasaran, perlu dilakukan pendekatan spasial atau kewilayahan. Proses ini bertujuan agar perencanaan pembangunan juga bermakna spasial atau tidak melupakan konteks kewilayahan.

6.3.1. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Muna Barat

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Guna mengoptimalkan pengembangan, memudahkan pengelolaan, meningkatkan fungsi pelayanan, mengurangi kesenjangan, serta untuk menentukan kawasan-kawasan yang akan dilakukan pengembangan, maka di Kabupaten Muna Barat dilakukan pembagian wilayah dalam unit-unit kawasan fungsional yang lebih kecil.

Unit kawasan fungsional yang lebih kecil tersebut dikenal sebagai Sistem Perwilayahan (Regionalisasi Wilayah). Pertimbangan dalam Penetapan Sistem Perwilayahan di Kabupaten Muna Barat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan fungsi (homogenitas) dan dominasi kegiatan wilayah, dimana pengelompokan kegiatan-kegiatan wilayah tersebut dalam satu satuan wilayah akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan segala kegiatan yang terjadi.
- b. Batasan kemampuan jangkauan pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial ekonomi skala Wilayah.
- c. Adanya batas wilayah administrasi.
- d. Kekompakan wilayah terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan, sehingga tercapai efisiensi .
- e. Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan integrasi antara wilayah pengembangan (efisiensi sistem pergerakan).

- f. Memantapkan peran Regionalisasi Wilayah dengan meningkatkan sarana prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya (efisiensi pelayanan sarana umum).
- g. Kemudahan dalam pengelolaan masing-masing wilayah fungsional.

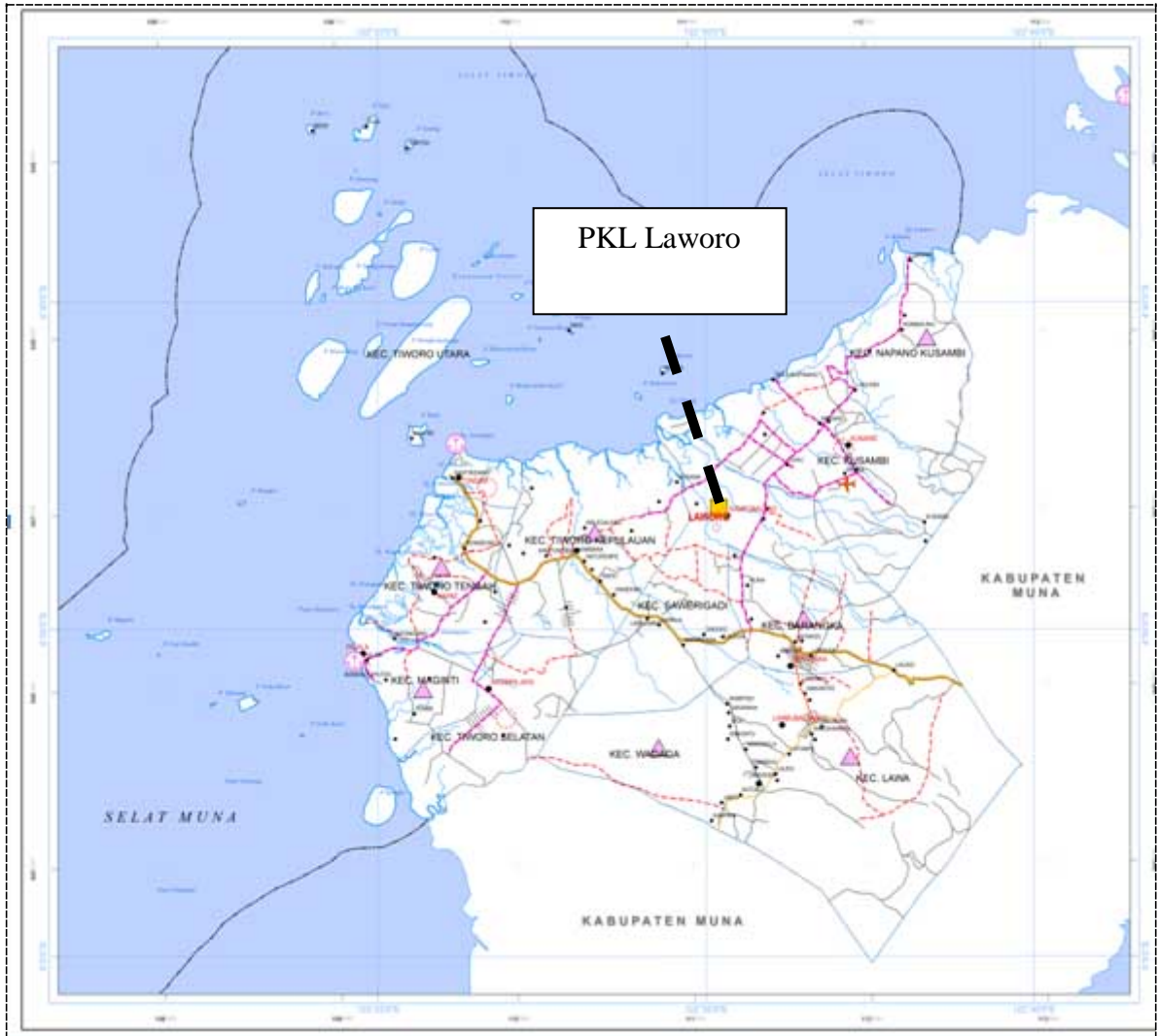


Diagram VI.1
Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Muna Barat

Pada setiap Regionalisasi Wilayah dialokasikan pusat-pusat pertumbuhan dengan pengarahannya, yang diharapkan pusat-pusat pertumbuhan ini mampu memicu pertumbuhan kawasan hinterlannya.

6.3.2. Pembagian Sistem Perwilayahan

1. Struktur Ruang

Berdasarkan analisis sementara pengembangan struktur ruang Kabupaten Muna Barat sesuai dengan Rancangan RTRW Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2037, Pusat pengembangan sistem wilayah di Kabupaten Muna Barat terdiri dari 1 (satu) Pusat kegiatan lokal

(PKL) dan 4 (empat) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Skala Kecamatan atau beberapa Kecamatan, dan 6 (enam) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Skala Kecamatan atau beberapa Kecamatan. Struktur Ruang Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut:

(i) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) **Laworo**

Laworo yang secara administrasi berada di kecamatan Sawerigadi, Barangka, Kusambi, dan Tiworo Kepulauan, merupakan Ibukota Kabupaten Muna Barat dan memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Skala Kabupaten . Pengembangan Kota Laworo diarahkan sebagai Pusat pelayanan antar wilayah, Pusat pemerintahan, Pusat perdagangan regional dan intraregional, Pusat pendidikan dan prasarana sosial lainnya, dan Konsentrasi pengembangan permukiman.

(ii) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan merupakan Kota Hirarki Kedua setelah PKL Laworo. Arah pengembangan PPK meliputi 4 Pusat Pengembangan yakni:

- PPK Wapae Kecamatan Tiworo Tengah dengan arahan pengembangan sebagai Konsentrasi permukiman, Pengembangan kegiatan industri, dan Kawasan Pertanian
- PPK Wamelai, Kecamatan Lawa dengan arahan pengembangan sebagai Konsentrasi permukiman, Pusat kegiatan perhubungan, dan Kawasan pariwisata
- PPK Tondasi, Kecamatan Tiworo Selatan dengan arahan pengembangan sebagai Pusat kegiatan perhubungan, Budidaya perikanan tangkap, Kawasan pariwisata, Kawasan pengembangan minapolitan, dan dan Kawasan pelestarian ekosistem perairan laut
- PPK Konawe, Kecamatan Kusambi dengan arahan pengembangan sebagai Pusat kegiatan perhubungan, Konsentrasi permukiman, dan Kawasan pertanian

(iii) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan Kota dengan hirarki di bawah PPK. PPL di Kabupaten Muna Barat meliputi 6 Pusat Pengembangan yakni: Kasimpa Jaya di Kecamatan Tiworo Selatan, . Pajala di Kecamatan Maginti, Barangka di Kecamatan Barangka, Lahaji di Kecamatan Napano Kusambi, Tiworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan, dan Lailangga di Kecamatan Wadaga. Pengembangan PPL diarahkan untuk kegiatan:

- Peningkatan aksesibilitas ke wilayah PPK dan Ibukota Kabupaten (PKL).
- Peningkatan aksesibilitas dalam antar desa/kelurahan dalam kecamatan melalui pengembangan jaringan jalan.
- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi desa/kelurahan dalam wilayah administrasi kecamatan

tertentu pada sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan.

- Peningkatan prasarana komunikasi antar sentra produksi dalam desa/kelurahan yang masih dalam wilayah kecamatan tertentu

(iv) Kawasan **Strategis Kabupaten (KSK)**

Dalam mendukung terciptanya struktur ruang Kabupaten Muna Barat dan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan hidup, maka ditetapkan kawasan-kawasan strategis Kabupaten (KSK) sebagai berikut:

- **Kawasan Minapolitan**, yang dikembangkan di beberapa kecamatan, Kecamatan Tiworo Utara dengan Tondasi sebagai pusat utama dan kecamatan lainnya sebagai pendukung kawasan Minapolitan. Kawasan minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah. Dengan konsep minapolitan, maka dengan produk unggulan yang dimiliki akan mendorong berkembangnya kegiatan usaha mulai dari hulu hingga hilir. Dengan demikian selain bisa menampung banyak tenaga kerja juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Selanjutnya kawasan minapolitan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi di Kabupaten Muna Barat.
- **Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)**, direncanakan dikembangkan di Kecamatan Tiworo Tengah, Tiworo Selatan, dan Kecamatan Sawerigadi. Sasaran dari pembangunan Kota Terpadu Mandiri antara lain : (1) Peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa, dan perdagangan; (2) Peningkatan produktivitas; (3) Pendapatan asli daerah; (4) Peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; (5) Perluasan kesempatan kerja; dan (6) Peningkatan jaringan infrastruktur.
- **Kawasan Kota Laworo**, merupakan kawasan perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan dan perkantoran di Kabupaten Muna Barat, yang berada di kecamatan Sawerigadi, Barangka, Kusambi, dan Tiworo Kepulauan.
- **Kawasan Agropolitan**, yakni kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan yang meliputi Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Wadaga dan Kecamatan Tiworo Tengah. Kawasan agropolitan ini diharapkan menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang, serta mampu memacu berkembangnya sistem usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.
- **Kawasan Budaya/Sejarah Benteng Tiworo** di Kecamatan Tiworo Kepulauan.

2. Pola Ruang

Secara umum Pola ruang terbagi dalam 2 Kawasan yakni Kawasan Lindung dan kawasan Budidaya. Kawasan Lindung di kabupaten Muna Barat terdiri dari:

- Kawasan Hutan Lindung kurang lebih 6.741,68 Ha
- Kawasan Perlindungan Setempat yang meliputi Kawasan Sempadan Pantai kurang lebih 262,43 Ha, Kawasan Sempadan Sungai kurang lebih 1.892,85 ha, Kawasan Sekitar Mata Air dengan radiusn 200 m yang berada pada kawasan hutan,
- Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang meliputi Kawasan Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang berada di Benteng Tiworo dan masjid tua Kec. Tikep dan festival perkelahian kuda Kec. Lawa,
- Kawasan Rawan Bencana Alam yang meliputi Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Banjir
- Kawasan Lindung Geologi

Sedangkan Kawasan Budidya meliputi Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Peternakan, Kawasan Peruntukan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan pariwisata, Kawasan Peruntukan Permukiman, dan Kawasan Peruntukan Lainnya.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi meliputi Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Adapun sebaran Kawasan Hutan Produksi di kabupaten Muna Barat adalah:

- Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada di Kecamatan Wadaga (kurang lebih 4.136,724 Ha), Kecamatan Barangka (kurang lebih 1.855,869 Ha), Kecamatan Kusambi (kurang lebih 3.382,124 Ha), Kecamatan Lawa (kurang lebih 1.871,116 Ha), Kecamatan Napano Kusambi (kurang lebih 3.451,704 Ha), dan Kecamatan Sawerigadi (kurang lebih 1.733,259 Ha), sehingga jumlah kawasan hutan produksi tetap seluas \pm 16.430,795 hektar.
- Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi memiliki luas kurang lebih 4.786,299 Ha yang tersebar pada Kecamatan Sawerigadi (kurang lebih 586,184 Ha), Kecamatan Tiworo Selatan (kurang lebih 760,770 Ha), Kecamatan Wadaga seluas (kurang lebih 3.393,830 Ha), dan Kecamatan Lawa seluas (kurang lebih 45,551 Ha)

Kawasan Peruntukan Pertanian yang teridentifikasi tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 43.449,880 Ha, yang meliputi:

- Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah seluas kurang lebih 5.277,67 Ha meliputi Kecamatan Maginti, Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Tiworo Tengah, dan Kecamatan Wadaga.
- Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering yang tersebar pada seluruh wilayah kabupaten Muna Barat berupa kebun campuran, tegalan, padang rumput, ilalang dan semak belukar seluas kurang lebih 8.367,936 Ha.
- Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura tersebar pada seluruh wilayah kabupaten Muna Barat dengan jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan meliputi Tanaman sayuran, Tanaman bawang merah, Tanaman cabe, Tanaman buah-buahan (Jeruk medan/lemon cina, jeruk bali dan jeruk purut, Tanaman mangga, Tanaman rambutan, Tanaman semangka, Tanaman langsung, Tanaman pepaya, pisang, nenas, nangka, kedondong, jambu biji dan jambu air, durian, Lengken, Sawo), Tanaman obat - obatan (Bio Farmaka), dan Tanaman hias.

Kawasan Peruntukan Peternakan tersebar pada seluruh Kecamatan, dengan potensi penyembangan budidaya ternak yang meliputi ternak Sapi, Kerbau, Kuda , Kambing , Babi , Ayam buras, Ayam ras pedaging, Ayam ras petelur , dan Itik .

Kawasan Peruntukan Perkebunan direncanakan seluas 29.804,278 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditi jambu mete, kelapa, kopi, kakao, lada , dan perkebunan tanaman Lainnya (Pala, Aren, Kemiri, Asam dan Kapuk.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan Kabupaten Muna Barat seluas 1.805,95 Ha meliputi Kawasan perikanan tangkap yang tersebar pada seluruh perairan Muna Barat dan Budidaya perikanan. Untuk kawasan budidaya perikanan, potensi pengembangan kawasan terdiri dari Kawasan Budidaya perikanan laut, Kawasan Budidaya Air Payau, dan Kawasan Budidaya Air Tawar.

Kawasan Budidaya perikanan laut meliputi:

- Kawasan budidaya Komoditas rumput laut berada di Kec. Tiworo Utara, Kec. Maginti, Kec. Tiworo Kepulauan, Kec. Tiworo Tengah, Kec. Kusambi, dan Kec. Napano Kusambi dengan jumlah produksi 3.303,04 ton tahun 2014
- Kawasan budidaya Komoditas ikan kerapu berada di Kec. Tiworo Kepulauan, Kec. Tiworo Utara, Kec. Maginti, dan Kec. Kusambi.
- Kawasan budidaya Komoditas Lobster berada di Kec. Tiworo Kepulauan, Kec. Maginti, dan Kec. Kusambi
- Kawasan budidaya Komoditas lainnya (mutiara, abalon, rajungan, dan kima)

Kawasan Budidaya perikanan air payau/tambak meliputi:

- Kawasan budidaya Komoditas udang vaname berada di Kec. Tiworo Kepulauan, Kec. Tiworo Utara, Kec. Tiworo Tengah, Kec.

Tiworo Selatan, Kec. Maginti, Kec. Kusambi, dan Kec. Napano Kusambi.

- Kawasan budidaya Komoditas ikan bandeng berada di Kec. Tiworo Kepulauan, Kec. Tiworo Utara, Kec. Tiworo Tengah, Kec. Tiworo Selatan, Kec. Maginti, Kec. Kusambi, dan Kec. Napano Kusambi .
- Kawasan budidaya Komoditas Air Payau lainnya (udang windu, kepiting bakau, rumput laut (*Gratchilaria SP*), ikan baronang, dan ikan kerapu lumpur)

Sedangkan Kawasan Budidaya perikanan air tawar/kolam berada di Kec. Lawa, Kec. Tiworo Kepulauan, Kec. Tiworo Tengah, dan Kec. Tiworo Selatan terdiri atas komoditas budidaya ikan nila, ikan mas, ikan gurame, ikan lele, ikan patin, dan ikan gabus.

Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Muna Barat memiliki potensi untuk dikembangkan diantaranya adalah

- Kawasan Pertambangan Mineral bukan logam terdiri atas batu gamping berada di Kec. Lawa dan dolomit berada di Kec. Lawa dan Sawerigadi
- Kawasan Pertambangan Pasir kuarsa berada di Kec. Maginti, Tiworo Tengah, Tiworo Kepulauan (Desa Wanseriwu dan Santiri)
- Kawasan Pertambangan Batu gunung tersebar di seluruh kecamatan
- Kawasan Pertambangan Tanah liat berada di Kec. Napano Kusambi dan Kusambi

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Muna Barat meliputi:

- Kawasan Industri besar, diarahkan di Kawasan Minapolitan yang berada di Kecamatan Tiworo Utara dan kawasan industri di Latawe Kecamatan Napano Kusambi yang keduanya berbasis sektor perikanan.
- Kawasan Industri menengah, direncanakan berada di Kecamatan Tiworo Selatan dengan basis sektor pertanian dan perkebunan, industri pengolahan hasil perikanan yakni pengolahan rumput laut, industri pengolahan ikan di Kecamatan Tiworo Utara dan Maginti, industri pengolahan kepiting di Kecamatan Tiworo Utara,
- Kawasan Industri kecil, tersebar di beberapa kecamatan yaitu kawasan industri pengolahan hasil perkebunan yakni pengolahan gula aren di Kec. Tiworo Selatan, Lawa, Sawerigadi dan Tiworo Tengah, industri pengolahan hasil hutan yakni industri pengolahan kayu jati di Kec. Kusambi, dan industri penggergajian kayu di Kec. Kusambi

Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Muna Barat di kelompokkan menjadi dua objek wisata yakni Kawasan wisata budaya dan Kawasan wisata alam. Kawasan wisata budaya meliputi kawasan Wisata Benteng Tiworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan dan Kawasan wisata *Pogeraha Adhara* (atraksi Perkelahian Kuda) Desa Lathugo kecamatan Lawa. Sementara Kawasan wisata Alam

meliputi Kecamatan Tiworo Utara yaitu Wisata pulau-pulau kecil Terluar di Pulau Indo, Pulau Wansaringan, Pulau Ransaweta, Pulau Lumuna Besar, Pulau Belanbelan Besar, dan Pulau Belanbelan Kecil di Selat Tiworo.

Kawasan Peruntukan Permukiman di Kabupaten Muna Barat dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana. Kawasan tersebut juga memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Luas Kawasan permukiman di Kabupaten Muna Barat yang tersebar pada seluruh kecamatan kurang lebih seluas 5.482,67 Ha .

Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Muna Barat seluas 263,36 Ha yang merupakan kawasan perkantoran yang terdapat di Kecamatan Sawerigadi.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan daerah kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022, ditetapkan 9 (sembilan) agenda pokok pembangunan daerah yang meliputi:

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar wilayah yang difokuskan pada:
 - Peningkatan Interkoneksi antar Daerah Kabupaten Muna Barat dengan Daerah Kabupaten lainnya baik melalui Transportasi Darat, Transportasi Laut/ Penyeberangan, maupun Transportasi Udara.
 - Membuka Akses Transportasi pada kawasan-kawasan potensial dan produktif termasuk daerah-daerah dan Pulau-Pulau Kecil yang teripencil,
 - Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendalian Banjir dan Abrasi Pantai.
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada:
 - penguatan Sumber Daya Aparatur yang disiplin, profesional, memiliki kompetensi dan berintegritas sebagai abdi masyarakat,
 - pengembangan struktur pemerintahan yang ramping dan kaya fungsi,
 - pembangunan Kawasan Perkantoran serta pengembangan sarana dan prasarana aparatur, dan
 - Penerapan Insentif dan Punishment terhadap capaian kinerja Aparatur.
 - implementasi e-govenment melalui sistem pelayanan on line
 - Peningkatan Transparansi Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Publikasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan hasil Evaluasi pelaksanaan Pembangunan daerah melalui Publikasi secara elektronik.
 - Pengembangan Layanan Perizinan Usaha dan Layanan Kependudukan dan Akte Catatan Sipil dengan sistem Jemput Bola.
 - Penyediaan Layanan Pengantaran Jenazah.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, Sehat, terampil, kuat, berprestasi, bermartabat, dan religus melalui :
 - Peningkatan layanan pendidikan dan pengembangan pendidikan karakter bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan memberikan dukungan terhadap penyediaan pakaian seragam SD dan SMP, pemberian hadiah/ penghargaan kepada siswa SD dan SMP berprestasi, serta memberikan beasiswa pendidikan S1 kepada 3 orang siswa miskin berprestasi setiap tahun untuk setiap lulusan SMA/SMK Muna Barat.
 - Peningkatan Kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan melalui pelayanan RSUD dan pelayanan Puskesmas dan jaringannya.
 - Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan Keterampilan dan Keahlian Kerja yang didukung dengan Sarana dan Prarana Balai Latihan Kerja yang memadai.

- Mengolahrakan Masyarakat dan memasyarakatkan olahraga
 - Pengembangan dan pelestarian budaya daerah
 - Pengembangan dan pembinaan keagamaan
 - Meningkatkan jumlah pelaksanaan kompetisi olahraga dan seni budaya dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten.
 - Peningkatan Pembinaan kepemudaan dan pemberian insentif bagi Pemuda-pemudi asal Muna Barat yang memiliki prestasi dibidang Pendidikan, Olahraga, dan Keagamaan di tingkat Provinsi, Regional/Nasional, dan Internasional.
5. Mengembangkan Pembangunan Pertanian dan Perikanan sebagai sektor basis perekonomian daerah yang didukung dengan Pembangunan/ Pengembangan Kawasan Minapolitan, Agropolitan, dan Kota Terpadu mandiri (KTM), Pengembangan Kawasan Industri, Pengembangan Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Akses Pemasaran serta Penyediaan Jaminan Harga bagi Petani dan Nelayan.
 6. Mengembangkan Destinasi Wisata Strategis Daerah dan Ruang Terbuka Hijau yang ramah anak.
 7. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran, serta peningkatan kualitas kehidupan, peran perempuan dan kesetaraan gender.
 8. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah yang berbasis pada Bahan Pangan Organik.
 9. Menjadikan Kabupaten Muna Barat sebagai salah satu tujuan Investasi Utama di Provinsi Sulawesi Tenggara.

7.2. Kebijakan Umum dan Program

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Muna Barat merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan dalam upaya merealisasikan misi dan mewujudkan visi. Sebagai penjabaran dari poin-poin visi, misi, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka kebijakan umum ini merupakan serangkaian upaya untuk mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang lebih baik. Visi kabupaten Muna Barat dijabarkan kedalam 5 poin Misi, 21 poin Tujuan, 46 poin Sasaran, 86 poin Strategi. Selanjutnya 86 poin strategi, masing-masing dijabarkan ke dalam beberapa kebijakan Umum dan Program.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan langkah operasional ke dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam Tabel VII.1

BAB VII.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Muna Barat

No	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		PROGRAM	BIDANG URUSAN	INSTANSI PENANG-GUNG JAWAB
					(6)	(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1. Terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Pendidikan yang berkualitas	1. Percepatan Pemenuhan layanan dasar pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan	1. Meningkatkan pengelolaan layanan pendidikan Anak Usia Dini	Persen Lembaga PAUD yang terakreditasi	75	100	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	27	39			
			2. Meningkatkan Akses dan Kualitas layanan pendidikan Dasar dengan menyediakan Pakaian Seragam Lengkap Siswa SD dan SMP serta ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai	Angka Partisipasi Murni			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				a. APK SD/MI	93.82	97.85			
				b. APK SMP/MTs	86	97.85			
				Persentase Keberadaan Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP	-	100			
				Persentase Bangunan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik dan Sedang'	41	65			
				Persentase Bangunan Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik	19	61			

			3. Melestarikan dan mendorong pengembangan bahasa dan sastra daerah pada lembaga pendidikan	Persentase Sekolah yang menerapkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang penuturnya dalam daerah			Program Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				a. SD/ MI	100	100			
				b. SMP/ MTs	100	100			
			4. Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Non Formal bagi penduduk usia dewasa	Persentase lembaga pendidikan Nonformal (PKBM/ Kursus) yang aktif	100	100	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Angka melek huruf penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun (%)	96,67	98			
		2. Peningkatkan mutu layanan pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1. Meningkatkan standar Kompetensi dan profesionalisme Tenaga Kependidikan	Peringkat Tertinggi Nilai Ujian Nasional Tingkat Provinsi Sultra	7	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan yang berijazah S1/D4					
				a. SD/ MI	51.86	70			
				b. SMP/ MTs	89.96	100			
			2. Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang sudah terakreditasi			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				a. SD sederajat	30	65			
				b. SMP sederajat	25	85			
		3. Peningkatan prestasi dan kreatifitas Siswa dan tenaga Pendidik yang memiliki daya saing di tingkat provinsi/ Regional, dan Nasional	1. Mengembangkan prestasi dan kreatifitas siswa dan tenaga Pendidik	Jumlah medali yang diperoleh peserta didik dan Tenaga pendidik pada kejuaraan/lomba tingkat regional dan nasional.	2	100	Program Pengembangan Prestasi dan Kreatifitas Siswa dan Tenaga Pendidik	Pendidikan	Dinas Pendidikan

				Jumlah Siswa siswi SD SMP Keluarga Miskin Berprestasi yang mendapatkan Penghargaan / hadiah	0	2250			
				Jumlah Siswa siswi Tamatan SMA Muna Barat Berprestasi Keluarga Miskin yang mendapatkan Beasiswa Pendidikan S1	0	120			
2	2. Terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Kesehatan yang berkualitas	4. Optimalisasi Pemenuhan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	1. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pengelolaan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pesentase Masyarakat Miskin peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Jamkesda mendapat pelayanan kesehatan gratis	100	100	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase Unit Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	30	5			
				Persentase pasien Rujukan yang mendapat pelayanan	100	100	Program pelayanan Kesehatan Dasar	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80	92	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang melakukan Layanan Kesehatan Masyarakat secara gratis	100	100	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			2. Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,50	96,00	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	38,00	73,00			

			3. Meningkatkan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan bayi	85	100	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			4. Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	Persentase puskesmas yang terakreditasi	65	100	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat miskin	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan gratis	100	100	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan puskesmas untuk Semua	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat sehat dengan konsep pendekatan keluarga dan perawatan kesehatan masyarakat	100	100	Program Bantuan Operasional Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			7. Meningkatkan cakupan sarana publik yang sehat	Persentase tempat-tempat umum yang bebas dari pencemaran lingkungan	100	100	Program Higiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			8. Meningkatkan Ketersediaan Obat dan bahan Perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat - obatan dan BMHP di seluruh unit pelayanan kesehatan	100	100	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			9. Meningkatkan Pengawasan peredaran Obat dan Makanan.	Persentase Toko Obat, toko Alat Kesehatan dan optikal yang mendapatkan izin operasi	100	100	Program Pengawasan Obat dan Makanan.		Dinas Kesehatan

			10. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Bangunan Gedung Pelayanan Kesehatan dan Banngunan Gedung Pendukung Layanan Kesehatan Lainnya	Persentase Puskesmas kondisi bangunan baik	60	90	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			11. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86	98	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	13,59	100			
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100			
			12. Meningkatkan penanganan balita Gizi buruk	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Kesehatan Kerja, dan Olahraga	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			13. Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan	persentase ketersediaan bahan media promosi sadar hidup sehat di seluruh unit pelayanan kesehatan	100	100	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase Lingkungan Permukiman yang mendapatkan layanan survei jentik dan pelaksanaan abatesasi	100	100	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase sumber air minum yang sehat	85	100			

			14. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu tenaga kesehatan	Rasio Dokter per 1000 penduduk	0,102	0,202	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	2,57	3,57			
			15. Mengembangkan Mangemen Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Tingkat Kabupaten	1	6	Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Administrasi Kesehatan dengan baik	75	100			
		5. Pemenuhan layanan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) yang berkualitas sesuai SOP	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kesehatan	RSUD
				Persentase pasien yang mendapatkan perlindungan dan jaminan pelayanan RSUD	100	100	Program Perlindungan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	RSUD
			2. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit global disease yang terdeteksi	100	100	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	RSUD
			3. Meningkatkan Ketersediaan Obat dan bahan Perbekalan kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan bahan Perbekalan kesehatan	100	100	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	RSUD
			4. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Bangunan Gedung RSUD dan Sarana prasarana pendukung lainnya	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Standar kebutuhan pelayanan RSUD	50	95	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Kesehatan	RSUD

			5. Meningkatkan Tata Kelola Layanan Rumah Sakit yang berkualitas	Keberadaan Akreditasi RSUD	Tdk	Ada	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan RSUD	Kesehatan	RSUD
				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD	60	85			
				Keberadaan sistem manajemen informasi (SIM) RS yang terlaksana dengan baik dan sistem pencatatan dan pelaporan (SP2RS) yang tepat waktu	70	100	Program Peningkatan Sistem Informasi dan Pelaporan Rumah Sakit	Kesehatan	RSUD
				Keberadaan promosi pelayanan kesehatan rumah sakit	Ada	Ada	Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Kesehatan	RSUD
3	3. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terhadap layanan Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	6. Pemenuhan layanan dasar sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan, pendidikan, Bina Keterampilan, dan bantuan sosial	5	20	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Sosial	Dinas Sosial
				Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	65	80			
			2. Meningkatkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial atas hak-hak dasar bagi fakir miskin	Persentase Anak-anak terlantar yang dipelihara	75,5	82,5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
				Persentase bantuan kebutuhan dasar Bagi Korban Bencana Sosial dan darurat bencana	100	100			
				Persentase Kelompok Usaha Masyarakat Miskin yang mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna	40	70	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMPD

				Persentase Panti Sosial yang terakreditasi	-	100	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
				Persentase Sarana sosial (panti asuhan dan panti rehabilitasi) kondisi baik	65	100			
			3. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga kesejahteraan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial dan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Aktif	55	72,5	Program Pemberdayaan Sosial	SOSIAL	Dinas Sosial
				Keberadaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Tidak Ada	ada			
				Persentase lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan	60	90	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Urusan Administrasi Umum	Setda
				Persentase sarana sosial keagamaan pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang direhabilitasi	40	85			
				Jumlah kegiatan STQ/MTQ yang diikuti/ diselenggarakan	2	12	Program Kesejahteraan Rakyat	Urusan Administrasi Umum	Setda
				Persentase Panti Sosial yang terakreditasi	0	70			
			4. Membangun sistem penopang bagi penyelenggaraan layanan untuk PMKS dan Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan sosial kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Secara terintegrasi	Persentase PKMS yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	5	60	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Sosial	Dinas Sosial

				Persentase Warga KAT yang mendapat Bimbingan dan Keterampilan Berusaha	70	95			
4	4. Meningkatnya pelayanan upaya pengurangan resiko bencana	7. Peningkatan kemampuan adaptasi dan upaya mitigasi bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Alam	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana Alam	40	80	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Administrasi Umum	BPBD
				Persentase Desa yang memiliki kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana	0	71,43			
			2. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana Kebakaran	Persentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60	100	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	Administrasi Umum	BPBD
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	40	70			
				Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana Kebakaran	30	100			
			3. Meningkatkan upaya mitigasi dan Tanggap Darut bencana	Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	40	65	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Administrasi Umum	BPBD
				Tingkat respon kejadian bencana	80	100	Program Tanggap Darurat dan Logistik	Administrasi Umum	BPBD
				Persentase personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten	0	50			
				Keberadaan Satgas Reaksi Cepat Tanggap Darurat Daerah	Belum Ada	Ada			

5	5. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Kecerdasan Penggunaan Media Elektronik	8. Peningkatan Minat Baca masyarakat dan Cerdas menggunakan Media Elektronik	1. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan daerah	Keberadaan Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah Kabupaten	Belum Ada	Ada	Program penyediaan/ Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan daerah	Perpustakaan	Sekretariat Daerah
				Cakupan perpustakaan Desa	2,3809524	29,76190476			
				Persentase Peningkatan kunjungan perpustakaan	0	10			
			2. Megembangkan Layanan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan budaya baca dan cerdas bermedia	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0	10	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Perpustakaan	Sekretariat Daerah
6	6. Meningkatnya Budaya Olahraga dan prestasi Olahraga	9. Peningkatan Motivasi budaya olahraga dan Atlit berprestasi di tingkat provinsi, regional, dan Nasional	1. Meningkatkan Pembinaan Olahraga Masyarakat dan Olahraga Berprestasi	Keberadaan Pembinaan Olahraga jenjang SD/ SMP dan Olahraga Prestasi	Ada	Ada	Program Peningkatan Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga .	Pemuda dan Olahraga	Dispora
				Persentase Organisasi olahraga tingkat daerah yang mendapat pembinaan	40	100			
				Ragam olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	2	2			
			2. Meningkatkan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga mulai dari Tingkat Desa sampai Tingkat Kabupaten dengan mendorong Partisipasi Pihak Ketiga	Persentase Cabang Olahraga yang menyelenggarakan Kompetisi Tingkat Kabupaten	40	80	Program Peningkatan Kompetisi/ Kejuaraan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Dispora
				Jumlah kegiatan kompetisi olahraga Pendidikan tingkat Kabupaten	2	12			

				Keberadaan Kalender Kompetisi Olahraga	0	Ada			
			3. Meningkatkan kualitas sarana dan Prasarana Olahraga sesuai Standar Nasional	Rasio Gedung/ Lapangan olahraga per 1.000 penduduk	1,15	1,76	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pemuda dan Olahraga	Dispora
7	7. Meningkatnya Motivasi dan Peran Kepemudaan dalam mendorong daya saing pembangunan daerah	10. Peningkatan Kreatifitas, Semangat dan Peran Kepemudaan dalam mendorong daya saing pembangunan daerah	1. Menumbuhkan Kreatifitas, Semangat dan Peran Serta Komunitas Kepemudaan dalam pembangunan	Keberadaan keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	Belum Ada	Ada	Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Kepemudaan	Pemuda dan Olahraga	Dispora
				Persentase organisasi pemuda yang aktif	45	70			
				Persentase organisasi kepramukaan yang mendapat layanan pembinaan	100	100			
				Keberadaan keikutsertaan pemuda Desa/ Kel dalam penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	Program Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Administrasi Umum	Kecamatan
			2. Memberikan Penghargaan/ Beasiswa kepada Pemuda dan pemuda Asal Kabupaten Muna Barat yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional/ Internasional pada bidang Pendidikan, Seni Budaya, Olahraga, dan Kegiatan Keagamaan	Keberadaan Penghargaan / hadiah bagi Pemuda Berprestasi ditingkat Provinsi/ Regional dan Nasional	Belum Ada	Ada	Program Peningkatan Motivasi Kepemudaan	Pemuda dan Olahraga	Dispora

				Keberadaan Penghargaan / Beasiswa bagi Siswa Pendidikan S1 yang diutamakan pada bidang Kesehatan dan Pendidikan bagi tamatan SMA/ SMK	Belum Ada	Ada			
8	8. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Meningkatkan penguatan Peran Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender	1. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	93,72	95,25	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3KB
				Persentase kelompok binaan PKK aktif	70	100	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DPMPD
				2. Persentase rekomendasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUD) pada lembaga Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti	35	80,00	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3KB
				3. Keberadaan Kelembagaan layanan pemberdayaan perempuan, dan Anak yang aktif	Tidak Ada	Ada			
		12. Peningkatan Upaya Pemenuhan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Meningkatkan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, serta penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Rasio Penurunan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT)	20	100	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3KB
				Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	40	95			

			2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	72	60,00	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3KB
				Tingkat Partisipasi perempuan di lembaga Swasta	28	40,00			
		13. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan hak anak	1. Meningkatkan Kualitas Keluarga , mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, dan penyediaan layanan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan hak anak	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif fan mendapat pembinaan	65	85	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3KB
		14. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan khusus Anak	1. mengoptimalkan kelembagaan PHA dan Perlindungan khusus Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha serta mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak	Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan perlindungan anak	2	12	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3KB
				Persentase rekomendasi lembaga Perlindungan Khusus Anak yang ditindaklanjuti	45	70			
		15. Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Data dan Informasi Gender dan Anak	Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak yang up to date	Tidak Ada	Ada	Program Pengadaan Data Terpilah Menurut Tema dan Jenis Kelamin	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3KB

				Persentase Pertugas pencatatan dan pelaporan data/Informasi yang memiliki kompetensi	30	80	Program Kelembagaan Data dan Informasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3KB
9	9. Meningkatnya swadaya/partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan	16. Peningkatan swadaya/partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan	1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Urusan Administrasi umum	Kecamatan
			2. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa, lembaga adat desa, dan lembaga adat tingkat daerah	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Berprestasi	0	18,52	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DPMPD
				Persentase Posyandu kondisi bangunan baik	30	90,00			
				Posyandu aktif	100	100,00			
				Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	40	57,50			
				Persentase keberadaan Lembaga Adat Desa	0	100,00			
				Keberadaan Lembaga Adat Kabupaten	Belum Ada	ada			
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapat pembinaan	35	95,00			
10	10. Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Kualitas Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Keluarga	17. Peningkatan pengendalian penduduk	1. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Keberadaan kebijakan pengendalian penduduk Kabupaten yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah provinsi	Tdk Ada	Ada	Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3KB

		18. Optimalisasi pengendalian pelayanan KB dan keluarga Sejahtera	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses layanan KB dan ketahanan serta Kesejahteraan Keluarga	Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB),	77,50	87,5	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3KB
				Rata-rata jumlah anak per keluarga,	72,90	72,9			
				Cakupan peserta KB aktif	68,27	77,5			
				Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	65,80	75,5			
				Persentase Program KKBPK dan PKB/PLKB yang terlaksana	80,00	100	Program Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga (ADPIN)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3KB
				Jumlah Kampung KB yang Aktif	-	20			
11	11. Meningkatnya Kopetensi Keahlian dan keterampilan Tenaga Kerja	19. Peningkatan Kualitas tenaga kerja	1. Mendorong/ Meningkatkan kapasitas tenaga kerja baik melalui pendidikan tinggi maupun melalui Pengembangan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha	Jumlah pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	1	26	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Ketenagakerjaan	Dinas Nakertrans
				Keberadaan Balai Latihan Kerja Daerah	Tdk ada	ada			
12	12. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	20. Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja	1. Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja	Persentase sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan	80	90	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Dinas Nakertrans
				Persentase perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan perlindungan tenaga Kerja (K3)	60	100			
13	13. Meningkatnya akses Kesempatan Kerja dan Peluang Kerja	21. Peningkatan akses Kesempatan Kerja dan Peluang Kerja	1. Memperluas akses informasi dan peluang kerja	Rasio Penduduk yang bekerja	94,93	96,43	Program Peningkatan kesempatan kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Nakertrans

14	14. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah dalam mendukung Pengembangan Wilayah dan pemerataan Pembangunan	22. Optimalisasi sistem transportasi yang efisien dalam rangka meningkatkan interkoneksi dan aksesibilitas serta akselerasi pengembangan wilayah	1. Mengembangkan Prasarana dan Fasilitas Penunjang Transportasi Darat/ Penyeberangan, Transportasi Laut, dan Transportasi Udara	Jumlah Pelabuhan Pengumpul (Ferry) yang terbangun	1	3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Persentase kesediaan Dokumen Perencanaan dan kelayakan pembangunan Pelabuhan Pengumpul/ Ferry	50	100			
				Jumlah terminal Bandar Udara yang terbangun	0	1			
				Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun	0	1			
				Keberadaan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan lokal	Belum Ada	Ada			
			2. Meningkatkan Pengendalian, pengawasan dan pelayanan Transportasi Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberanga	Keberadaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Belum Ada	Ada	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Keberadaan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan Perdesaan	Belum Ada	Ada			
				Keberadaan penetapan tarif angkutan orang dan penyeberangan kelas ekonomi	Belum Ada	Ada			
			3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan pada wilayah-wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Akses Keluar Masuk Wilayah	Persentase Pelabuhan Rakyat dalam kondisi baik dan Sedang	70	95	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan

			4. Meningkatkan Keselamatan lalulintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas	20	50	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Persentase ketersediaan Rambu dan Marka jalan	20	85			
				Keberadaan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten	Tidak Ada	Ada			
			5. Meningkatkan Kelayakan Penggunaan Kendaraan Bermotor melalui Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang melakukan KIR	15	100	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			6. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan darat, laut, dan penyeberangan	Persentase Penerbitan Izin usaha / kegiatan penyelenggaraan Angkutan darat, laut, dan penyeberangan	75	90	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			7. Meningkatkan kelayakan penggunaan Sarana Perhubungan Laut	Persentase Sarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	75	87,5	Program Pemeliharaan Sarana Perhubungan Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			8. Mengembangkan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Persentase Penyelenggara Komunikasi yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100	100	Program Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Postel	Komunikasi dan Informasi	DKISP

		23. Peningkatan Prasarana Transportasi Darat (Jalan dan jembatan) dalam rangka interkoneksi antara Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Penataan Kawasan	1. Membangun, Meningkatkan kapasitas/ Daya dukung, dan memelihara Jalan dan Jembatan yang berkualitas pada ruas jalan Kabupaten	Capaian akses daerah-daerah potensial dan pusat-pusat pengembangan wilayah yang terkoneksi	55	88	Program Pembangunan / Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
				Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	35	75			
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Kebinamargaan	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
				Persentase bangunan Pintu Gerbang/ Tugu / Monumen/ Bundaran Jalan	70	80	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
				Persentase Ketersediaan Data/ Informasi Infrastruktur yang up to date	80	90	Program Pembangunan sistem informasi/data Infrastruktur	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
		24. Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dalam rangka Pemerataan Pembangunan khususnya pada wilayah yang kurang berkembang dan Pulau-Pulau Kecil	1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam rangka Pemerataan Pembangunan	Persentase Panjang Jalan dalam Kawasan Pedesaan dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	45	91,76	Program pembangunan infrastruktur pedesaan.	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
		25. Peningkatan Pengurangan Banjir dan Pengamanan Abrasi Pantai akibat arus gelombang laut	1. Meningkatkan Penanggulangan Banjir dan Pengamanan Kawasan Pantai terhadap abrasi akibat arus gelombang laut	Persentase panjang turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan Daerah	40	81,15	Program pembangunan turap/talud/bronjong.	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
				Persentase panjang pantai rawan abrasi air laut yang mendapat kekuatan	30	55,00			

			2. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah	Persentase Panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	0	70	Program pembangunan/ Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong.	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
				Persentase Keterseiaan Deuker Jalan sesuai kebutuhan	35	67	Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Deuker Jalan	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
		26. Peningkatan ketersediaan Air Irigasi yang cukup dan kontinyu untuk mendukung produksi dan produktifitas pertanian	1. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Kabupaten (Kurang dari 1000 Ha)	Persentase luas jaringan irigasi yang terpelihara dan direhabilitasi	70	87,5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
		27. Peningkatan ketersediaan Sarana Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Mendorong peran BUMD dalam pengelolaan Air Bersih dan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan	Cakupa sistem pengelolaan Air Minum (SPAM) terhadap wilayah Desa	63	90	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
				Persentase Desa/ Kel. yang memiliki Sarana Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat	35	69,5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pekerjaan Umum	DPU dan PR
		28. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur	1. Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur	Persentase Ketersediaan Alat Berat sesuai standar kebutuhan	20	60	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pekerjaan Umum	DPU dan PR

15	15. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempatb Tumbuh	29. Peningkatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat tumbuh	1. Mengoptimalkan Perencanaan dan pembangunan Infrastruktur kawasan Minapolitan dan Agropolitan	Persentase Keberadaan Master Plan tematik pengembangan Wilayah Strategis	20	80	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.	Urusan Perencanaan	Bappeda
							Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Urusan Perencanaan	Bappeda
			2. Mengoptimalkan Perencanaan dan meningkatkan pembangunan Infrastruktur kawasan Transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Keberadaan Dokumen Desain Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Belum Ada	Ada	Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Urusan Transmigrasi	Dinas Nakertrans
				Persentase keberadaan sarana dan prasarana pengembangan kawasan transmigrasi/ KTM	70	85	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Urusan Transmigrasi	Dinas Nakertrans
				Persentase Warga Transmigrasi yang mendapat pembinaan	68,5	75	Program Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Urusan Transmigrasi	Dinas Nakertrans
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor yang ditindaklanjuti	80	80			
		30. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Jasa Konstruksi	1. Meningkatkan Manajemen penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Kontruksi yang menerapkan prinsip: Tertib usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	60	80	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum	DPU dan PR

16	16. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31. Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Layak Huni dan Lingkungan yang sehat dan teratur	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat dn lingkungan yang sehat dan teratur	Persentase rumah Tidak layak Huni / korban bencana/ relokasi program pemerintah yang dibangun/ direhabilitasi	10	70	Program pengembangan perumahan.	Perumahan dan kawasan Permukiman	DPKPP
				Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	20	45			
				Persentase Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman	0	100			
			2. Meningkatkan pengelolaan Sistem Kawasan Permukiman dan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU)	Persentase Kawasan Lingkungan Permukiman (<10 Ha) yang didukung oleh fasilitas Umum yang memadai (Air bersih, sanitas, dan Drainase)	20	50	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan dan kawasan Permukiman	DPKPP
				Persentase rumah tangga bersanitasi	40	65			
				Persentase Penduduk berakses air minum	35	60			
		32. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemakaman	1. Mengembangkan dan Menata Areal Pemakaman seta menyediakan Sarana Mobilitas Pelayanan Jenazah	Persentase pemakaman umum yang tertata	60	85	Program pengelolaan areal pemakaman dan pelayanan Pengantaran Jenazah	Perumahan dan kawasan Permukiman	DPKPP
				Cakupan layanan Pengantaran Jenazah	0	60			
17	17. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan ketenagalistikan dan Bahan Bakar Minyak	33. Optimalisasi Pemanfaatan energi ketengalistrikan dan bahan bakar minyak	1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ketenagalistrikan dan bahan Bakar Minyak	Persentase Rasio Elektrifikasi	47	80	Program Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kelistrikan dan Bahan Bakar Minyak	Urusan Administrasi Umum	Setda
				Persentase Peningkatan Konsumsi BBM	10	10			

18	18. Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Rencana Tata Ruang yg berkelanjutan	34. Penerapan perencanaan dan kebijakan tata ruang yang partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan	1. menerapkan pembangunan Infrastruktur wilayah, pengembangan pemukiman, dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase RDTRK, RTRK, dan RTBL yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan jangka menengah	0	80	Program Perencanaan Tata Ruang.	Penataan Ruang	DPU dan PR
			2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan menyelenggarakan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	10	70	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.	Penataan Ruang	DPU dan PR
19	19. Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Persampahan yang berkelanjutan	35. Peningkatan Kinerja Sistem dan Pengelolaan persampahan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan Kinerja Sistem dan Pengelolaan persampahan yang berkelanjutan	Persentase/ cakupan daerah Penanganan Sampah	0	5,81	Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
				Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Belum Ada	Ada			
20	20. Meningkatnya kapasitas produksi dan produktifitas sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dalam upaya mendorong kesejahteraan petani dan kedaulatan serta ketahanan pangan daerah	36. Optimalisasi Penyelenggaraan pangan berdasarkan Kedaulatan dan kemandirian Pangan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar dan prasarana produksi, lahan, air pertanian serta prasarana pendukung dalam jumlah yang cukup, dekat dengan kawasan pertanian, dan biaya pelayanan terjangkau	Rasio Lahan Pertanian yang memiliki akses jalan usaha tani	60	85	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
				Cakupan Luas Areal Pertanian yang terairi saluran Irigasi	20	45			

				Persentase lahan Kering/ Kritis yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian	30	60			
				Persentase Kepemilikan lahan pertanian masyarakat yang bersertifikat	70	95			
				Keberadaan Ketersediaan Data Statistik Pertanian yang up to date	Ada	Ada	Proram Peningkatan Data dan Informasi Pembangunan Pertanian	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
				Luas Areal Pertanian yang terairi saluran Irigasi	90	100	Program Kedaulatan Pangan	Urusan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				Jumlah Desa Mandiri Benih	3	8			
				Jumlah Desa Pertanian Organik	2	12			
				Persentase Peningkatan Produksi Padi	6	13,5			
				Persentase Peningkatan Produksi Jagung	10	18			
				Persentase Peningkatan Produksi Kacang	8	16			
			2. Meningkatkan kemampuan Penyuluh, Petani, Organisasi Petani, dan Pola hubungan Pemerintah	Cakupan bina kelompok petani	90	100	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase Penyuluh yang memiliki Kopetensi	80	100	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan	Urusan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase Ketersediaan Sarana Penyuluhan	80	100			
				Persentase pelaku agribisnis yang mendapat pembinaan	70	100	Program Peningkatan kesejahteraan petani.	Urusan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan

				Jumlah Petani/Gapoktan berprestasi yang mendapatkan penguatan kapasitas SDM	90	100			
			3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Kedele/ Pajale)	4,50	12,50	Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan.	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
			4. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Ayam Potong	5	7,5	Program Peningkatan produksi hasil Pertanian	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase Peningkatan Produksi Telur	5	7,5			
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	15	20	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
				Kontribusi peternakan terhadap PDRB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	26,01	32,5			
				Pertumbuhan populasi ternak Sapi (%)	5	10			
				Persentase Benih/ Bibit ternak bermutu	70	87,50	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase Hiajuan Pakan ternak dan Pakan bermutu	82,5	96,50			
				Persentase Hewan Ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan	65	91,50			
				Keberadaan Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	Ada	Ada			

			5. Mengembangkan Penerapan Teknologi Pengolahan Pasca Panen	Ragam Teknologi pengolahan Produksi Pertanian/ Perkebunan	2	6	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		37. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	1. Meningkatkan pengelolaan cadangan pangan daerah	Persentase desa mandiri pangan	23,26	27,91	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Urusan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase desa berstatus swasembada	17,44	19,77			
				Skor Pola Pangan Harapan	68,25	95,00			
		38. Optimalisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatkan pencegahan dan penanganan kerawanan pangan daerah	Persentase Desa Rawan Pangan yang dilangani	60	100	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Urusan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		39. Peningkatan Keamanan Pangan	1. Meningkatkan keamanan distribusi pangan segar	Persentase Distribusi Pangan Segar yang aman	90	100	Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Urusan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		40. Optimalisasi Perizinan Usaha Pertanian	1. Mengoptimalkan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	30	100	Program Peningkatan Perizinan Usaha Pertanian	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
21	21. Meningkatnya Produksi dan produktivitas kemampuan pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan	41. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta pemberdayaan petani ikan	1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Persentase Peningkatan produksi perikanan Tangkap	15	15	Program Pengembangan perikanan Tangkap.	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
				Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan	75	90			
			2. Meningkatkan sarana dan Prasarana perikanan tangkap	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	70	95	Program Pengembangan Pengelolaan TPI	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP

				Jumlah UPR yang terbentuk (Unit pembenihan Rakyat)	0	5	Program Pengembangan Pembenihan ikan	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
			3. Meningkatkan produksi dan produktifitas Budidaya perikanan dan Budidaya Perikanan Air Payau/ Tambak dan Air Tawar	Persentase Peningkatan Produksi budidaya perikanan	10	15	Program Pengembangan budidaya perikanan.	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
				Persentase Area Pertambakan yang memiliki Saluran Pengairan yang memadai	80	87	Program Pengembangan Kawasan Budidaya	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
				Persentase Kelembagaan Budidaya Perikanan yang Sehat	50	75	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembudidayaan Ikan	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
			4. Meningkatkan Kesadaran dan Menegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana pengawasan Sumber Daya laut	0	95	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
				Persentase Pokmas Aktif dalam pengawasan sumber daya laut	40	95	Program Pemberdayaan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Laut		
22	22. Meningkatnya Nilai Tambah kemampuan pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan	42. Peningkatan Daya Saing Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1. Meningkatkan Daya Saing Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	Persentase Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan Teknologi Tepat Guna pengolahan hasil perikanan	20	27	Program Penguat Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase Peningkatan Proudruk Olahan hasil Perikanan	0	20	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan pengelolaan dan pemasaran Hasil perikanan.	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

				Persentase Kegiatan Usaha Perikanan yang mendapatkan Izin Usaha	70	100	Program Peningkatan Perizinan Usaha Perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Keberadaan Data/ Informasi Perikanan yang terpublikasi secara elektronik	Belum Ada	Ada	Program Pengembangan data/ Informasi Perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	23. Meningkatnya Kemampuan Pasar menyerap Produk Sektor-Sektor Unggulan Daerah dengan Harga yang kompetitif	43. Peningkatan Akses Pasar Produk Sektor-Sektor Unggulan Daerah	1. Meningkatkan Penyelenggaraan promosi perdagangan melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang yang diikuti/ dilaksanakan	0	5	Program peningkatan Promosi Dagang	Urusan Perdagangan	Dinas Perindag
				Persentase Peningkatan Prouduk Olahan hasil Perikanan	0	20	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan pengelolaan dan pemasaran Hasil perikanan.	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
				Persentase Hasil Produksi Pertanian yang memiliki akses pemasaran	80	100	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
24	24. Meningkatnya Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan barang Penting	44. Peningkatan Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan barang Penting	1. Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang produksi dan komoditas pokok	Persentase Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	100	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Urusan Perdagangan	Dinas Perindag
				Jumlah Pelaksanaan pemantauan harga dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten	0	21			

25	25. Meningkatkan kemudahan akses terhadap Input Produksi dan Barang Kebutuhan Pokok	45. Peningkatan kemudahan akses terhadap input produksi dan barang pokok	1. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar Rakyat/ tradisional kondisi baik	55	80	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Urusan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase keberadaan bangunan Pasar yang representatif pada pusat-pusat perkembangan wilayah					
				Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat yang mendapat pembinaan					
26	26. Meningkatkan Standardisasi dan perlindungan Konsumen	46. Peningkatan Standardisasi dan perlindungan Konsumen	1. Meningkatkan pelaksanaan Meteorologi Legal berupa Tera, Tera ulang, dan pengawasan	Persentase pelaku usaha yang menerapkan mutu barang sesuai standar meteorologi legal	85	100	Program Peningkatan Penerapan Standarisasi Produk dan Sertifikasi.	Urusan Perdagangan	Dinas Perindag
27	27. Meningkatkan kualitas pelayanan Peizinan dan Pendaftaran Perusahaan	47. Peningkatan kualitas pelayanan Peizinan dan Pendaftaran Perusahaan	2. Meningkatkan cakupan Pelayanan Peizinan dan Pendaftaran Perusahaan Perdagangan	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perdagangan dan Perusahaan	80	100	Program Peningkatan Pelayanan Peizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Urusan Perdagangan	Dinas Perindag
28	28. Meningkatkan Pelaku UMKM dalam membangun perekonomian lokal	48. Peningkatan daya saing Pelaku UMKM dalam membangun perekonomian lokal	1. Meningkatkan Kompetensi Wirausaha pelaku UMKM	Persentase pelaku UKM yang mendapatkan pembinaan Kewirausahaan	65	95	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Persentase UMKM sehat dan aktif	30	47,5			
				Persentase Pedagang Kaki Lima dan asongan yang mendapatkan Pembinaan dan bantuan Modal usaha/ Supras Usaha	25	80			

				Persentase kelompok usaha Ekonomi masyarakat yang dibina	20	50	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat Desa	DPMPD
29	29. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi untuk menopang perekonomian lokal	49. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dalam Pembangunan Ekonomi lokal	1. Meningkatkan Kelembagaan Koperasi Sehat dan Mandiri	Persentase koperasi Sehat	10	22,50	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Persentase Koperasi yang mendapat pembinaan, advokasi, informasi, dan edukasi perkoperasian	60	90,00			
				Persentase Koperasi yang diawasi, diperiksa, dan dinilai	100	100,00			
30	30. Meningkatnya Peran Industri Sektor Unggulan Daerah dalam pengembangan ekonomi Lokal	50. Peningkatan kualitas produk Industri Sektor Unggulan daerah	1. Meningkatkan Pengembangan Sentra-Sentra Industri berbasis Komoditi Unggulan Daerah	Keberadaan Penetapan Rencana pembangunan Industri	Belum Ada	Ada	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial.	Urusan Perindustrian	Dinass Perindag
				Jumlah Sentra-sentra Industri Pengolahan berbasis Komoditi Unggulan	0	5			
				Jumlah Industri Potensial Pengelolaan Hasil Pertanian dan Perikanan yang terbangun	0	2			
			2 Mengembangkan dan memberdayakan pelaku Industri Kecil dan menengah (kelompok pengrajin)	Persentase IKM yang mendapatkan Pembinaan	35	50	Program Pengembangan industri kecil dan menengah.	Urusan Perindustrian	Dinass Perindag
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi Kerajinan Daerah yang diikuti/ dilaksanakan	1	6			
				Keberadaan Rumah Kemasan	Tdk ada	Ada			

				Persentase Pelaku IKM yang berkompoten	45	50	Program Peningkatan kapasitas iptek dan sistem produksi.	Urusan Perindustrian	Dinass Perindag
31	31. Meningkatnya kualitas pelayanan Peizinan Usaha Industri	51. Peningkatan kualitas pelayanan Peizinan Usaha Industri	1. Meningkatkan cakupan Pelayanan Peizinan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Persentase Penerbitan IUI Kecil dan IUI menengah, IPUI Kecil dan menengah serta IUKI dan IPKI	30	100	Program Peningkatan Pelayanan Peizinan Usaha Industri	Urusan Perindustrian	Dinass Perindag
32	32. Meningkatkan Keterpaduan Sistem Informasi Industri Nasional	52. Peningkatan Keterpaduan Sistem Informasi Industri Nasional	1. Meningkatkan penyampaian laporan Informasi Industri untuk IUI Kecil dan Izin Perluasannya, IUI menengah dan Izin perluasannya, dan IUKI dan IPKI	Persentase Penyampaian Laporan Informasi Industri pada Siste Informasi Industri Nasional tepat waktu	0	100	Program Pengembangan Data dan Informasi Perindustrian	Urusan Perindustrian	Dinass Perindag
33	33. Meningkatnya peran Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dalam pengembangan ekonomi lokal	53. Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan investasi	1. Menciptakan iklim usaha bagi UKM yang kondusif.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Belum Ada	Ada	Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Persentase BPR/LKM Aktif	52,5	80			
				Persentase pelaku Usaha UMKM yang mendapat advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Izin Usaha	55	85			
				Keberadaan Data, Intensifikasi dan Ektensifikasi Perijinan yang up to date	Belum Ada	Ada	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Penanaman Modal	Dinas PM-PTSP
				Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Perijinan	2	10			
				Keberadaan Peraturan/ Regulasi Perizinan	Belum Ada	Ada			

		54. Peningkatan sistem pendukung usaha bagi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro	1. Meningkatkan Kemudahan, Perlindungan dan Kepastian Berusaha	Persentase UMKM yang mendapatkan informasi dukungan permodalan	100	100	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Persentase UMKM yang terpantau mengelola dana Pemerintah untuk pengembangan usaha	100	100			
				Persentase Usaha Mikro menjadi Skala Usaha Kecil	10	25			
			2. Pemutahiran Data Pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro	Keberadaan profile Koperasi, dan Pelaku UMKM yang up to date	0	100	Program Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Koperasi dan UMKM		Dinas Koperasi dan UKM
34	34. Meningkatnya kualitas pelayanan dan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan	55. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha/ Investasi Satu Atap	1. Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perizinan Satu Atap	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan		Dinas PM-PTSP
				Keberadaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu 1 (satu) Pintu Bidang Penanaman Modal					
			2. Meningkatkan Informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Promosi Peluang Investasi	Keberadaan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	Belum Ada	Ada	Program Peningkatan Informasi Perizinan		Dinas PM-PTSP
				Keberadaan Peta Potensi Investasi	Belum Ada	Ada			
				Jumlah PMDN dan PMA yang melakukan Investasi	1	3,00			

				Keberadaan Data, Intensifikasi dan Ektensifikasi Perijinan yang up to date	Belum Ada	Ada	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Hasil Daerah		Dinas PM-PTSP
			3. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Perijinan	Persentase Penerbitan Perizinan yang dipantau/ dievaluasi pelaksanaannya	40	100	Program Pengendalian Pengawasan Perijinan dan Retribusi		Dinas PM-PTSP
				Keberadaan Ploting kawasan Perizinan	Tdk Ada	Ada			
35	35. Terwujudnya pengelolaan Pariwisata berkelanjutan	56. Peningkatan kualitas pengelolaan Pariwisata berdasarkan prinsip berkelanjutan	1. Melaksanakan promosi wisata pada tingkat regional dan nasional untuk memperkenalkan/ memasarkan obyek wisata.	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan Domestik dan Mancanegara	5	10	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	Pariwisata	Disparbud
				Keberadaan Kalender Wisata Daerah	Tidak Ada	Ada			
			2. Meningkatkan Pengelolaan Daya tarik Destinasi Pariwisata Daerah	Persentase obyek wisata unggulan daerah yang dikelola dan dikembangkan	60	77,5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.	Pariwisata	Disparbud
				Jumlah RTBL Kawasan Strategis Parisata Daerah	0	6			
36	36. Meningkatnya ragam ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan hak kekayaan Intelektual	57. Pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif	1. Meningkatkan penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah	Jumlah Kelompok ekonomi kreatif baru	-	12	Program Sumber Daya Kreatif	Pariwisata	Disparbud
				Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina dan diberdayakan	-	100	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	Disparbud

37	37. Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah	58. Peningkatan pengelolaan kebudayaan Daerah	1. Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal/ tradisi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.	Keberadaan Buku Sejarah Budaya Muna Barat	Belum ada	ada	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Kebudayaan	Disparbud
				Keberadaan penelusuran Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Belum ada	ada			
				Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	20			
				Keberadaan Pengelolaan Museum Kabupaten	Tidak Ada	Ada			
			2. Meningkatkan apresiasi/ kreatifitas karya budaya dan pengelolaan warisan budaya	Jumlah partisipasi penyelenggaraan festival budaya tingkat regional dan Nasional	1	10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Disparbud
				Jumlah pelaksanaan even Seni Budaya Tingkat Kabupaten	2	12			
				Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	1,43	1,43			
			3. Meningkatkan dan melestarikan budaya gotong royong	Keberadaan pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Tidak ada	ada	Program Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DPMPD
38	38. Terwujudnya pengelolaan LH secara berkelanjutan	59. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam berdasarkan prinsip berkelanjutan	1. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal serta usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemda	70	95	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	Lingkungan Hidup	DLH
			2. Meningkatkan Pengelolaan persampahan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip 3 R (reduce, recicle, reuse)	Persentase Sampah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip 3 R (reduce, recicle, reuse)	60	85	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	DLH

			2. Meningkatkan Pengamanan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang diamankan dalam gudang penyimpanan sementara	0	100	Program Peningkatan Pengamanan B3 dan Limbah B3	Lingkungan Hidup	DLH
			3. Meningkatkan keanekaragaman hayati (Kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang lestasi	80	100	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup	DLH
			4. Meningkatkan pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Hutan Mangrove yang direhabilitasi	0	17,5	Program Pengembangan Lingkungan Pemukiman Nelayan	Urusan kelautan dan Perikanan	DKP
				Persentase Terumbu Karang yang direhabilitasi	0	13,5			
			5. Meningkatkan Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan secara lestari Hutan Taman Raya	Keberadaan Penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten	Belum Ada	Ada	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	DLH
				Indeks Kualitas Udara	Baik	Baik	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sumber daya Alam	Lingkungan Hidup	DLH
				Indeks Kualitas Air	Baik	Baik			
				Keberadaan Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Ada	Ada	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	DLH

			6. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH berkelanjutan	Keberadaan Pemberiaan penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat kabupaten	Belum Ada	Ada	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DLH
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	0	100			
			7. Meningkatkan Akses Informasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.	Keberadaan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah	Belum Ada	Ada	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.	Lingkungan Hidup	DLH
				Keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/ atau Program Daerah	Belum Ada	Ada			
		60. Optimalisasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1. Mengembangkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah perkotaan ber HPL/ HGB	58,25	72,5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).	Lingkungan Hidup	DLH
				Keberadaan Taman Kota yang Ramah Anak	Belun Ada	Ada			
39	39. Meningkatnya tingkat kepuasan Pelayanan Publik	61. Peningkatan Kinerja Birokrasi Modern dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Optimalisasi dan efektifitas Pelayanan Perkantoran sesuai Standar Operasional dan Prosedur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lintas Urusan	Lintas SKPD

			2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai tuntutan kebutuhan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	40	75	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lintas Urusan	Lintas SKPD
			3. Meningkatkan pelayanan Administrasi kepegawaian secara otomatis	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	85	100,00	Program Peningkatan Pelayanan Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kepegawaian	BKD dan Diklat
			4. Menegakan Displin ASN	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Lintas Urusan	Lintas SKPD
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	95	100			
			5. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme sumber daya aparatur daerah	Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis	80	90	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Lintas Urusan	Lintas SKPD
				Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai Tugas pokok dan fungsinya	55	72,00	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kepegawaian	BKD dan Diklat
				Persentase CPNS yang mengikuti Tugas Belajar mendapatkan Beasiswa	0	100,00			
				Persentase kebutuhan Diklat Struktural dan Fungsional yang diselenggarakan	0	80,00	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pendidikan dan latihan	BKD dan Diklat
			6. Meningkatkan Akuntabilitas Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi dan administrasi Pembantuan	100	100	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pemerintahan	Urusan Administrasi Umum	Setda

				Persentase belanja Barang-Jasa dan belanja Modal melalui layanann ULP	90	100	Program Peningkatan Layanan pengadaan Barang dan Jasa	Urusan Administrasi Umum	Setda
			7. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pengelolaan Perekonomian Daerah serta membentuk layanan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Bidang pengelolaan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	80	80	Program Pengembangan Koordinasi dan Pengendalian Pengelolaan Perekonomian Daerah	Urusan Administrasi Umum	Setda
				Jumlah BUMD yang terbentuk	0	2			
			8. Mengoptimalkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan, Monitoring, dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Keberadaan Penyampaian LPPD yang tepat waktu	100	100	Program Penyusunan LPPD, Pelaksanaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Urusan Administrasi Umum	Setda
				Keberadaan Laporan Monev Pelaksanaan DOB yang disampaikan tepat waktu	100	100			
				Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	4	24	Program Peningkatan Ekeftifitas Pelaksanaan Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan	Urusan Administrasi Umum	Setda
				Persentase laporan capaian kinerja (Lakip) yang disampaikan secara tepat waktu	60	100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Lintas Urusan	Lintas SKPD
			9. Optimalisasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase keberadaan Sarana dan Prasarana Persandian sesuai standar persandian daerah	0	70	Program peningkatan Pelayanan Informasi dan Persandian	Persandian	DKISP

				Keberaaan Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Belum Ada	Ada			
				Persentase SDM persandian yang memiliki kompetensi	0	90	Program peningkatan kapasitas SDM Persandian	Persandian	DKISP
			10. Mengembangkan sistem pengelolaan, perlindungan, dan penyelamatan Arsip Daerah	Persentase Pengelolaan arsip di SKPD secara baku	0	100	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.	Arsip	Sekretariat Daerah
				Keberadaan Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah daerah	0	Ada			
		62. Peningkatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	1. Mengembangkan sistem penopang pemerintahan dan birokrasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk penguatan reformasi birokrasi	Cakupan layanan komunikasi sampai ke tingkat Desa	90	100	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi dan Informasi	DKISP
				Keberadaan Web site milik pemerintah daerah dengan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Ada	Ada			
				Keberadaan layanan Internet yang terkoneksi dalam Lingkup Pemda	Belum Ada	Ada	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Urusan Administrasi Umum	Setda
			2. Meningkatkan kerjasama Media Cetak dan elektronik untuk penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Keberadaan Media Center	Ada	Ada	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	Komunikasi dan Informasi	DKISP
				Keberadaaan Dialog Interaktif melalui Radio dan televisi	Ada	Ada			

				Keberadaan Pusat Informasi layanan Masyarakat	Ada	Ada			
			3. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur dalam penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang memiliki kompetensi	75	100	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatik	Komunikasi dan Informasi	DKISP
		63. Peningkatan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatkan Kinerja dan kemitraan Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat	Persentase pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100	100	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala Daerah	Urusan Administrasi Umum	Setwan
				Persentase penetapan perda program legislasi daerah	70	85	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.	Urusan Administrasi Umum	Setwan
				Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	75	90	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Urusan Administrasi Umum	Sekretariat DPRD
			2. Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Keberadaan SOP	Ada	Ada	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	Urusan Administrasi Umum	Setda
				Persentase tindak lanjut Aparat Pengawasan dan TPTGR	100	100	Program Peningkatan Kepastian Hukum	Urusan Administrasi Umum	Setda
				Persentase Peningkatan produk hukum daerah	10	10			
				Persentase Aparat dan tokoh masyarakat desa yang mendapatkan penyuluhan Hukum	10	70			

			3. Meningkatkan Efektifitas Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Aparatur	Persentase produk hukum yang terkait dengan kelembagaan	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Urusan Administrasi Umum	Setda
				Keberadaan LAKIP Pemda Muna	Ada	Ada			
				Persentase SKPD yang menerapkan pelayanan sesuai SOP	0	60			
				Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang terpublikasi dalam Pelaksanaan HUT Kabupaten Muna Barat	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Urusan Administrasi Umum	Kecamatan
				Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan Desa yang terpublikasi	Tidak ada	Ada	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	DPMPD
			4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kahumasan dan keprotokoleran Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kehumasan	Urusan Administrasi Umum	Setda
				Keberadaan Publikasi Informasi kegiatan pemda	Ada	Ada			
			5. Meningkatkan publikasi informasi Kinerja Legislatif	Keberadaan Informasi Kegiatan DPRD yang terpublikasi	Tidak Ada	Ada	Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah	Urusan Administrasi Umum	Setwan

		64. Peningkatan Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Seluruh Masyarakat	1. Memperluas akses dan prosedur pelayanan adminduk dan capil	Penerapan KTP-el Nasional berbasis NIK	Belum Ada	Ada	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Dukcapil
				Rasio Penduduk yang telah menikah ber KK	95	100			
				Kepemilikan KTP-el	39,89	100			
				Rasio bayi berakte kelahiran	52,66	100			
				Tingkat Kepemilikan akta kelahiran	19,78	100			
				Cakupan penerbitan Identitas Anak	0	100			
				Cakupan penerbitan akta kematian	74	100			
			2. Mendayagunakan data basis kependudukan untuk mendukung layanan publik	Keberadaan Profile kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Program Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Dukcapil
		65. Penguatan kepastian hukum terhadap hak - hak tanah Milik Masyarakat dan Pemerintah	1. Meningkatkan Penataan administrasi pertanahan terhadap lahan-lahan aset Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber daya pembangunan	Persentase penduduk yang memiliki lahan	80	85	Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	Pertanahan	DPKPP
				Persentase Penyelesaian izin lokasi	100	100			
				Persentase luas lahan bersertifikat	78	90			
				Keberadaan Penetapan tanah ulayat	Belum Ada	Ada			
				Keberadaan Inventarasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Belum Ada	Ada			
				Persentase Penerbitan Izin membuka Tanah	0	100			

				Persentase Penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	0	100	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan.	Pertanahan	DPKPP/ Setda
				Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang tersertifikasi	10	85			
				Persentase Lahan masyarakat untuk kepentingan publik yang diganti rugi	0	100			
		66. Peningkatan Kapasitas Managemen pemerintahan desa	1. Meningkatkan Kapasitas Managemen Kelembagaan pemerintahan desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan Tertib Administrasi	75	100	Program Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DPMPD
40	40. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	67. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang terukur dengan opini BPK atas tata kelola Keuangan Wajar Tanpa Pengecualiaan	Cakupan SKPD dalam pengelolaan keuangan Daerah yang berstatus Baik	80	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Urusan Keuangan	BPPKAD
				Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	100	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Urusan Administasi Umum	Setda
				Keberadaan Perda APBD dan Perubahannya ditetapkan tepat waktu	100	100	Program Perencanaan Anggaran Daerah	Urusan Keuangan	BPPKAD
				Cakupan SKPD dalam pengelolaan keuangan Daerah yang Baik	80	100	Program Penataan Pengelolaan Aset Daerah	Urusan Keuangan	BPPKAD
				Keberadaan Rencana Kerja Pengadaan Aset Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Belum Ada	Ada			

				Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Perbendaharaan	100	100	Program Pengelolaan Perbendaharaan	Urusan Keuangan	BPPKAD
							Program Kegiatan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Keuangan	BPPKAD
				Keberadaan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK tepat waktu	100	100	Program Penata Usahaan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah	Urusan Keuangan	BPPKAD
		68. Peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah	1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah)	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15	15	Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Urusan Keuangan	BPPKAD
				Persentase Capaian PAD terhadap Potensi PAD	55	90			
				Persentase realiasi penerimaan terhadap Potensi Obyek PBB dan BPHTB	95	95	Program Pengelolaan dan Penuntasan Adminstrasi PBB dan BPHTB	Urusan Keuangan	BPPKAD
		69. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam perencanaan dan pengendalian/ evaluasi pembangunan tahunan dan jangka menengah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampaikan tepat waktu	100	100	1. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Lintas Urusan	Lintas SKPD
				Persentase Keberadaan dokumen perencanaan dan evaluasi SKPD,	100	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi	Penanaman Modal	DPM dan PTSP

			2. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan daerah secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender.	Keberadaan Perkada RKPD, MoU KUA/ PPAS dan perubahannya	Ada	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Perencanaan	Bappeda
				Keberadaan Laporan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Ada	Ada			
				Keberadaan perda RPJPD Kab. Muna Barat	Belum Ada	Ada			
				Keberadaan Perda RPJMD kab. Muna Barat	Belum Ada	Ada			
			3. Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map/</i> Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase Keberadaan Masterplan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah	40	85	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Urusan Perencanaan	Bappeda
				Persentase rekomendasi Kelembagaan/ Pokja Pembangunan Ekonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100	100			
				Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Ekonomi Daerah	100	100			
			4. Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map/</i> Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Persentase Keberadaan Masterplan Bidang Pengembangan Sosial Budaya	Tdk Ada	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Urusan Perencanaan	Bappeda
				Persentase rekomendasi Kelembagaan/ Pokja Pembangunan Sosial Budaya yang ditindaklanjuti	100	100			
				Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Sosial Budaya Daerah	100	100			

			5. Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map/</i> Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase Keberadaan dokumen Master plan dan Studi Kelayakan Pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	35	70	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Urusan Perencanaan	Bappeda
				Keberadaan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Belum Ada	Ada			
				Persentase Rekomendasi Kelembagaan/ Pokja Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA yang ditindaklanjuti	100	100			
				Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	100	100			
			6. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Tim Work Aparat Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kelembagaan/ Pokja perencanaan pembangunan daerah yang diberdayakan	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Perencanaan	Bappeda
		70. Peningkatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dalam mendukung Kualitas Perencanaan pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan lainnya	1. Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pembangunan Daerah	Keberadaan Data Pembangunan Daerah yang terpublikasi	Ada	Ada	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	Lintas Urusan	Lintas SKPD

			2. Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara terpadu dengan melakukan updating secara berkala	Keberadaan Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD)	Belum Ada	Ada	Program Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Perencanaan	Bappeda
				Keberadaan data Makro Statistik Daerah	Ada	Ada			
				Tersedianya peralatan survey dan pemetaan	Belum Ada	Ada			
				Keberadaan Data berbasis citra satelit	Belum Ada	Ada			
			3. Mengembangkan kerjasama dengan BPS untuk penggandaan buku statistik dasar dalam mendukung ketersediaan data perencanaan pembangunan	Persentase ketersediaan Data Statistik yang <i>up to date</i> untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	80	92,5	Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah	Urusan Perencanaan	Bappeda
			4. Mengembangkan statistik sektoral untuk mendorong ketersediaan data sektor yang akurat dan terkini	Cakupan Buku Statistik berbasis sektor	0	50	Program Penyediaan dan pelayanan informasi statistik	Statistik	DKISP
		71. Peningkatan Efektifitas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang berorientasi pada Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan efektifitas rekomendasi hasil-hasil Kajian/ Studi Penelitian untuk percepatan pembangunan Daerah dan pengembangan Wilayah	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan pembangunan daerah	0	100	Program pengkajian dan penelitian.	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda
				Keberadaan Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat	Belum Ada	Ada			
				Persentase Kajian dan Pengembangan Wilayah	0	70	Program pengkajian dan Pengembangan Wilayah	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda

				Persentase rekomendasi (Pokja) Pengembangan Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti	0	100			
		72. Peningkatan Publikasi Data Publikasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian/ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Web-Site Pemda	1. Mengoptimalkan Data Publikasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian/ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Web-Site Pemda	Persentase Publikasi Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	-	100	Program Optimalisasi Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Elektronik	Komunikasi dan Informasi	DKISP
41	41. Meningkatnya Kinerja Aparat pengawas internal pemerintah (APIP)	73. Peningkatan Kinerja aparat pengawas internal pemerintah (APIP)	1. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	70	100	Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengawasan	Inspektorat
				Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	55	95			
				Persentase SKPD yang menyusun LAKIP dengan Nilai minimal B	0	90			
				Keberadaan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan	Belum Ada	Ada			
42	42. Meningkatnya nilai demokrasi dan Persatuan berbangsa dan Bernegara	74. Peningkatan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat	1. Mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pilpres, Pilkada, dan Pemilu Legislatif,	75	90	Program pendidikan politik masyarakat.	Administrasi Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase LSM, Ormas dan OKP yang mendapat pembinaan	60	100			

		75. Peningkatan Kesadaran menegakan Hukum dan Peraturan Daerah	1. Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tingkat Penegakan PERDA	100	97,5	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Ketentra-man dan keter-tiban umum serta perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase peraturan daerah/ peraturan bupati yang diawasi dan dipantau	100	97,5	Program Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada	Ketentra-man dan keter-tiban umum serta perlindungan Masyarakat	
		76. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang harmonis yang dilandasi oleh nilai-nilai toleransi beragama	1. Menumbuhkan nilai nilai persatuan antar suka dalam kehidupan harmoni dan penghormatan berbangsa dan bernegara	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan peningkatan wasasan kebangsaan	60	85	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Administrasi Umum	Badan Kesbangpol
			2. Menumbuhkan nilai nilai toleransi beragama, harmoni dan penghormatan berbangsa dan bernegara	Persentase Kelompok Masyarakat/ Ormas yang mendapatkan Pembinaan Pengembangan Wawasan kebangsaan	40	90	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Administrasi Umum	Badan Kesbangpol
				Persentase Kelompok Masyarakat/ Ormas yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Bangsa	40	90	Program Pembinaan Idiologi Bangsa	Administrasi Umum	Badan Kesbangpol
				Persentase Kelompok Masyarakat/ Ormas yang mendapatkan Pembinaan Karakter Bangsa	40	90	Program Pembinaan Karakter Bangsa	Administrasi Umum	Badan Kesbangpol

			3. Mengoptimalkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Kominda, dan Forum-forum kewaspadaan dini masyarakat terhadap keamanan Nasional dari gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri	Persentase kegiatan Orang Asing, LSM, dan Ormas Lainnya yang terdeteksi mengganggu kemanaan nasional dan ditindaklanjuti	100	100	Program Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Administrasi Umum	Badan Kesbangpol
			4. Mengoptimalkan peletarian Sejarah dan Budaya Daerah dengan mendorong pemberdayaan Ekonomi masyarakat berbasis sejarah dan budaya daerah	Keberadaan Buku Sejarah Kabupaten Muna Barat	Tidak Ada	Ada	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Administrasi Umum	Badan Kesbangpol
				Persentase unsur tokoh Agama yang mengikuti pelaksanaan Forum Umat Beragama	100	100			
				Persentase Kegiatan Lembaga Adat yang dipantau	100	100			
43	43. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berbasis prakarsa dan Kemitraan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat	77. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban dengan mengembangkan kemitraan berbasis kearifan lokal	1. Meningkatkan Kemitraan Pemerintah, Aparat Pengamanan, dan Masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Desa yang memiliki Kelompok/ tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Daerah	17,4	100,0	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Administrasi Umum	Badan Kesbangpol
				Jumlah pelaksanaan Forum/ Pembinaan Pencegahan Konflik Sosial	1,0	6,0			
				Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	17,4	100,0			

				Persentase anggota Satuan LINMAS yang berkompetensi	60	85	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Ketentra-man dan keter-tiban umum serta perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		78. Peningkatan perlindungan Ketertiban masyarakat dan Pencehagan Tindak Kriminal	1. Meningkatkan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dan Koordinasi dengan Aparat Intelegen dalam Pencegahan Tindak Kejahatan/ Kriminal serta Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap pencegahan tindak kriminal	Persentase Kegiatan Pembangunan, Pemerintahan, dan kesmasyarakatan yang aman dan tertib	100	100	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Administrasi Umum	Badan Kesbangpol
				Penurunan Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	80	100			
				Persentase Jumlah demo yang tertangani sesuai SOP	100	100			
			2. Mengoptimalkan patroli petugas Satpol PP dan pengawalan pejabat daerah dalam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	70	97,5	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketentra-man dan keter-tiban umum serta perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
			3. Peningkatan Pencegahan dan pemberantasan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras, Narkoba, Judi Dll	Rata-rata Penurunan Pengguna Minuman Keras, Narkoba, Judi, dll	10	50	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).	Ketentra-man dan keter-tiban umum serta perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 berisi program-program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan SKPD dalam menjalankan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi tanggung jawab SKPD. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (*outcomes*) yang telah ditetapkan. Program-program telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan.

Pencapaian kinerja kepala daerah yang bersifat dampak (*impacts*) merupakan agregasi program yang dilaksanakan juga didukung program/kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD Provisinsi Sulawesi Tenggara, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat. Untuk penganggaran keuangan yang tercantum dalam Bab VIII ini, bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III.

Program Prioritas Pembangunan ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi daerah dirumuskan dengan indikator kinerja program yang terukur dan dapat diketahui perkembangan capaian kinerjanya sesuai tahun tahapan RPJMD. Perumusan indikator kinerja program digunakan untuk mengukur kinerja yang merupakan akumulasi atau agregasi dari indikator kinerja kegiatan dalam setiap tahun. Pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun bersifat hasil (*outcomes*) yang dicapai dengan indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) dalam rangka mencapai kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD.

Perumusan Program Pembangunan yang telah dilaksanakan dan direncanakan disertai pendanaan pembangunan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 dengan indikator yang lebih terukur. Selanjutnya untuk rencana kerja tahun 2018 sampai akhir periode RPJMD Tahun 2022 ditetapkan rencana kinerja dan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk indikator Rencana Program Prioritas yang berisi realisasi kinerja dan keuangan tahun 2017-2022 dirinci sebagaimana tabel VIII.1 berikut.

Tabel VIII.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			199.320		196.538		403.354		218.141		223.541		242.165		1.482.263			
1	1	URUSAN PENDIDIKAN			20.923		39.000		39.627		40.132		40.492		41.099		221.271			
1	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	1.853	100	1.301	100	1.301	100	1.366	100	1.366	100	1.434	100	8.620	Dinas Pendidikan
1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	35	70	3.210	75	2.330	80	1.000	85	400	90	400	95	400	95	7.740	Dinas Pendidikan
1	1	8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	60	100	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	105	100	305	Dinas Pendidikan
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	90	95		100		100		100		100		100		100		
1	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	65	70	-	75	-	80	30	85	30	90	30	95	30	95	120	Dinas Pendidikan
1	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	20										Ada	20	Dinas Pendidikan	
1	1	7	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampaikan tepat waktu	Tdk ada	Ada	107										Ada	107	Dinas Pendidikan	
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persen Lembaga PAUD yang terakreditasi	70	75	686	80	889	85	700	90	700	95	700	100	700	100	4.375	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	24	27		29,0		31,5		34,0		36,5		39,0		39		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni		13.314		31.007		31.320		31.630		31.950		32.270		171.491	Dinas Pendidikan	
			a. APM SD/Sederajat	93	93.82		95.16		96.04		97.08		97.16		97.85		97.85			
			b. APM SMP/Sedetajat	85	86		86.24		88.12		88.86		89.69		90.36		90.36			
			Persentase Bangunan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik dan Sedang'	41	45		49		53		57		61		65		65			
			Persentase Bangunan Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik	19	41		45		49		53		57		61		61		-	
			Keberadaan Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP	-	-		100		100		100		100		100		100			
1	1	17	Program Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Sekolah yang menerapkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang penuturnya dalam daerah	100	100	-	-	150		150		160	100	160		620		Dinas Pendidikan	
				#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		
				#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		
				#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		
				#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		
				#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		
1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga pendidikan Nonformal (PKBM/ Kursus) yang aktif	90	100	328	70	794	9	800	8	810	7	820	7	830		4.382	Dinas Pendidikan
			Angka melek huruf penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun (%)	94	96,67		97		97,25		97,50		97,75		98,00		98		-	
1	1	19	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peringkat Tertinggi Nilai Ujian Nasional Tingkat Provinsi Sultra	9	7	404	6	1.599	6	1.610	5	1.630	5	1.650	4	1.670		8.563	Dinas Pendidikan
			Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan yang berjasah S1/D4																	
			a. SD/ MI	51.86	51.86		51.86		53		58		62		70		70			
			b. SMP/ MTs	89.96	89.96		89.96		90		95		100		100		100			
1	1	20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang sudah terakreditasi		1.000		1.080		716		816		816		1.000		5.428	Dinas Pendidikan	
			a. SD sederajat	25	30		35		40		48		55		65		65		-	
			b. SMP sederajat	15	25		30		40		55		70		85		85		-	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	1	21	Program Pengembangan Prestasi dan Kreatifitas Siswa dan Tenaga Pendidik	Jumlah medali yang diperoleh peserta didik dan Tenaga pendidik pada kejuaraan/lomba tingkat regional dan nasional.	2	2	-	20	20	2.000	20	2.500	20	2.500	20	2.500	100	9.500	Dinas Pendidikan	
				Jumlah Siswa siswi SD SMP Keluarga Miskin Berprestasi yang mendapatkan Penghargaan / hadiah	-	-	-	450	450		450		450		450			2.250		
				Jumlah Siswa siswi Tamatan SMA Muna Barat Berprestasi Keluarga Miskin yang mendapatkan Beasiswa Pendidikan S1		-	-	24	48		72		96,00		96,00			120		
1	2		URUSAN KESEHATAN																	
1	2	1	DINAS KESEHATAN																	
1	2	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	3.262	-167	1.221,70	100	1.222	100	1.283	100	1.283	100	1.347	100	9.618	Dinas Kesehatan
1	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	20	40	221	70	113,85	75	125	80	125	85	163	90	3.500	90	4.249	Dinas Kesehatan
1	2	3	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Aparatur yang memiliki Administrasi Kepegawai yang tertata secara tertib	70	70	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Dinas Kesehatan
1	2	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	0	-	0	-	100	50	0	-	100	50	100	100	Dinas Kesehatan
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		100		
1	2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	70	70	-	73	-	75	132	78	132	80	132	83	132	83	528	Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	36	Dinas Kesehatan
1	2	7	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Keberadaan Renstra SKPD dan Perubahannya	Tidak Ada	Ada	21	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Ada	21	Dinas Kesehatan
1	2	15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Jamkesda mendapat pelayanan kesehatan gratis	100	100	5.099	100	170	100	190	100	210	100	230	100	250	100	6.149	Dinas Kesehatan
				Persentase Unit Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	30	30												5	-	
1	2	16	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80,51	93	1.238	94	2.374,6	94	2.400	95	2.420	95	2.440	96	2.460	96	13.333	Dinas Kesehatan
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	36,62	38		43		51		58		66		73		73	-	
1	2	17	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan bayi	80	85	-	90		95	114	100	114	100	114	100	100	100	442	Dinas Kesehatan
																		-	-	
1	2	18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	Persentase puskesmas yang terakreditasi	100	65	428	80	1.886,3	100	154	100	154	100	154	100	154	100	2.930	Dinas Kesehatan
1	2	19	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.	Cakupan Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan gratis	100	100	-	100	4.999	100	5.050	100	5.100	100	5.150	100	5.200	100	25.499	Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	6	Program Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat sehat dengan konsep pendekatan keluarga dan perawatan kesehatan masyarakat	100	100	7.871	100	8.888,6	100	8.980	100	9.070	100	9.160	100	9.250	100	53.219	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*	Persentase tempat-tempat umum yang bebas dari pencemaran lingkungan	100	100	5,6	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	6	Dinas Kesehatan
1	2	17	Program Pengembangan Higiene tempat-tempat Pelayanan Umum	Persentase tempat-tempat umum yang bebas dari pencemaran lingkungan	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan
1	2	18	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase keteersediaan obat - obatan dan BMHP di seluruh unit pelayanan kesehatan	100	100	2.414	100	2.497,3	100	2.520	100	2.550	100	2.580	100	2.610	100	15.171	Dinas Kesehatan
1	2	19	Program Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase Toko Obat, toko Alat Kesehatan dan optikal yang mendapatkan izin operasi	100	100	20	100	3,20	100	23	100	23	100	25	100	25	100	118	Dinas Kesehatan
1	2	20	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas kondisi bangunan baik	60	65	5.511	70	6.437,6	75	6.500	80	6.570	85	6.640	90	6.710	90	38.369	Dinas Kesehatan
1	2	20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86	88	192	90	401,69	92	410	94	410	96	410	98	410	98	2.234	Dinas Kesehatan
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	13,59	50		60		70		80		90		100		100	-	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100		100		100		100		100		100		100		-		
1	2	21	Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Kesehatan Kerja, dan Olahraga	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	27	100	72,28	100	72	100	60	100	60	100	70	100	362	Dinas Kesehatan
1	2	23	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	persentase ketersediaan bahan media promosi sadar hidup sehat di seluruh unit pelayanan kesehatan	100	100	572	100	196,85	100	359	100	359	100	359	100	359	100	2.206	Dinas Kesehatan
1	2	22	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Lingkungan Permukiman yang mendapatkan layanan survei jentik dan pelaksanaan abatesasi	100	100	17	100	6,20	100	30	100	35	100	35	100	35	100	158	Dinas Kesehatan
				Persentase sumber air minum/ pengelola Air Minum yang sehat	85	100		100		100		100		100		100		100		-
1	2	23	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Rasio Dokter per 1000 penduduk	0,102	0,102	-	0,122	-	0,142	800	0,162	810	0,182	820	0,202	830	0,202	3.260	Dinas Kesehatan
				Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	2,57	2,57		2,77		2,97		3,17		3,37		3,57		4		
1	2	24	Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Tingkat Kabupaten	1	1	75	1	91,80	1	58	1	58	1	58	1	58	6	399	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Administrasi Kesehatan dengan baik	75	85		90		95		100		100		100		100		
1	2	25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80	80	-	83	6,50	85	6,50	87	6,50	90	6,50	92	6,50	92	33	Dinas Kesehatan
1	2	26	Program pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase pasien Rujukan yang mendapat pelayanan	100	100	-	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100	241	Dinas Kesehatan
1	2	27	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melakukan Layanan Kesehatan Masyarakat secara gratis	100	100	-	100	1.680	100	1.680	100	1.680	100	1.680	100	1.680	100	8.400	Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			11.251		11.247		11.377		11.491		11.630		11.984		68.980			
1	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi dan efektifitas pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur	100	100	1.077	100	649	100	660	100	670	100	680	100	690	100	4.426	RSUD
1	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana aparatur sesuai tuntutan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi	70	73	251	75	680	77,5	690	80	700	82,5	710	85	710	85	3.741	RSUD
1	02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menegakkan disiplin ASN	100	100	30	100	70	100	70	100	70	100	77	100	77	100	394	RSUD
1	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya aparatur daerah	65	68	50	70	75	150	83	150	83	150	60	150	60	150	410	RSUD
2	02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan Dokumen LAKIP yang tepat waktu	Ada	Ada	16	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Ada	16	RSUD
1	02	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampikan tepat waktu	Tidak Ada	Ada	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	74	RSUD
1	02	28	Program Perlindungan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pasien yang mendapatkan perlindungan dan jaminan pelayanan RSUD	100	100	-	100	240	100	240	100	240	100	240	100	240	100	1.200	RSUD
1	02	29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100	100	35	100	15	100	17	100	18	100	20	100	22	100	126	RSUD
1	02	30	Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Keberadaan promosi pelayanan kesehatan rumah sakit	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	RSUD

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	31	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	1.031	100	1.762	100	1.780	100	1.800	100	1.820	100	1.840	100	10.033	RSUD
1	2	32	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan bahan Perbekalan kesehatan	100	100	854	100	300	100	300	100	300	100	330	100	330	100	2.414	RSUD
1	2	30	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Standar kebutuhan pelayanan RSUD	45	50	7.824	55	7.412,75	65	7.490	75	7.560	85	7.640	95	7.720	95	45.647	RSUD
1	2	33	Program Peningkatan Menagemen Pelayanan RSUD	Keberadaan Akreditasi RSUD	Tdk	Tdk	-	Tdk	25	Ada	28	Ada	30	Ada	33	Ada	275	Ada	391	RSUD
				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD	60	60		65		70		75		80		85		85	-	
1	2	34	Program Peningkatan Sistem Informasi dan Pelaporan Rumah Sakit	Keberadaan sistem manajemen informasi (SIM) RS yang terlaksana dengan baik dan sistem pencatatan dan pelaporan (SP2RS) yang tepat waktu	60	70	10	80	18,50	90	20	100	20	100	20	100	20	100	108	RSUD
1	3		URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				102.780		97.169		299.997		113.227		118.432		124.954		855.762	
1	3	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	770	100	1.392	100	1.410	100	1.420	100	1.430	100,00	1.440	100	7.862	DPU-PR
1	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	60	65	1.242	67	2.124	69	1.500	71	1.500	73	1.500	75	2.500	75	10.366	DPU-PR
1	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	70	100	-	100	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	120	DPU-PR
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	80	100		100		100		100		100		100		100		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB			
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta						
1	3	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	30	40	30	45	150	50	150	55	150	60	150	65	150	65	780	DPU-PR	
1	3	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	74	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Ada	74	DPU-PR	
1	3	6	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Keberadaan Desain Teknis Program Strategis	Tidak Ada	Ada	1.380	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Ada	1.380	DPU-PR	
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampaikan tepat waktu	100	100		0		0		0		0		0		Ada	-		
1	3	15	Program Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Capaian akses daerah-daerah potensial dan pusat-pusat pengembangan wilayah yang terkoneksi	55	58	80.838	60	73.626	80	277.310	83	91.180	85	95.740	88	100.530	88	719.224	DPU-PR	
				Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	35	50		55		60		65		70		75		75			
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	100	100		100		100		100		100		100		100			
1	3	16	Program Peningkatan Kapasitas Kebinarmargaan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	100	100		100	106	100	-	100	-	100	-	100	-	100	106	DPU-PR	
1	3	17	Program pembangunan infrastruktur perdesasaan.	Persentase Panjang Jalan dalam Kawasan Perdesasaan dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	45	60	-	70	-	75	-	80	-	86	-	92	-	92	-	DPU-PR	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	3	18	Program pembangunan turap/talud/bronjong.	Persentase panjang turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan Daerah	40	70	2.610	72	2.030,80	74	2.092	76	2.092	79	2.154	81	2.219	81	13.198	DPU-PR
				Persentase panjang pantai rawan abrasi air laut yang mendapat perkuatan	30	30	-	35	-	40	-	45	-	50	-	55	-	55	-	DPU-PR
1	3	19	Program pembangunan/ Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong.	Persentase Panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	-	5		30	3.045,80	40	3.997	50	4.200	60	4.410	70	4.630	70	20.283	DPU-PR
				Persentase Keterseiaan Deuker Jalan sesuai kebutuhan	35	37	-	42	797,00	47		52		57		62		67		
1	3	20	Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Deuker Jalan	Persentase Keterseiaan Deuker Jalan sesuai kebutuhan	35	37	-	42	797,00	47		52		57		62	-	67	797	DPU-PR
1	3	21	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase luas jaringan irigasi yang terpelihara dan direhabilitasi	70	75	2.700	78	5.154	80	5.410	83	5.680	85	5.960	88	6.260	88	31.164	DPU-PR
1	3	22	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Cakupa sistem pengelolaan Air Minum (SPAM) terhadap wilayah Desa	63	65	-	70	484	75	494	75	504	85	514	90	524	90	2.519	DPU-PR
1	3	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Ketersediaan Alat Berat sesuai standar kebutuhan	20	35	4.630	40	2.829,74	45	2.830	50	1.500	55	1.500	60	1.500	60	14.789	DPU-PR
1	3	24	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Kontruksi yang menerapkan prinsip: Tertib, Ujaha, Tertib	60	75	120	78	85	80	87	83	88	78	90	80	92	80	562	DPU-PR
1	3	25	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Sarana Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat	35	38	7.674	40	1.000	43	1.000	45	1.050	67	1.050	70	1.103	70	12.877	DPU-PR
1	3	26	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Persentase bangunan Pintu Gerbang/ Tugu / Monumen	70	70	250	75	2.495	80	2.620	85	2.750	0	2.805	0	2.861	80	13.781	DPU-PR

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1 3 27	Program Pembangunan sistem informasi/data Infrastruktur	Persentase Ketersediaan Data/ Informasi Infrastruktur yang up to date	80	83	-	80	-	80	-	80	-	90	-	90	-	90	-	DPU-PR
1 3 28	Program Perencanaan Tata Ruang.	Persentase RDTRK, RTRK, dan RTBL yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan jangka menengah	-	-	460	60	460	65	469	70	479	75	488	80	498	80	2.854	DPU-PR
1 3 29	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	10	12	1,6	30	593	50	599	50	605	65	611	70	617	70	3.026	DPU-PR
1 4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				30.866		8.530		12.840		12.820		12.900		15.230		93.186	
1 4 1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	417	100	1.189	100	1.200	100	1.210	100	1.220	100	1.230	100	6.466	Dinas PKPP
1 4 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	30	35	468	40	344	45	350	50	250	97	250	100	2.500	100	4.162	Dinas PKPP
1 4 4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	25	100	30	100	30	100	30	100	30	### ### #	145	Dinas PKPP
		Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	90	100	-	100		100		100		100		100		92	-	
1 4 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	60	65	5	70	-	75	20	80	20	105	20	110	20	110	85	Dinas PKPP
1 4 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	Dinas PKPP
1 4 7	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempikan tepat waktu	Tidak Ada	Ada	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ada	53	Dinas PKPP

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	4	15	Program pengembangan perumahan.	Persentase rumah Tidak layak Huni / korban bencana/ relokasi program pemerintah yang dibangun/ direhabilitasi	10	20	25.633	30	-	40	4.000	50	4.000	60	4.000	70	4.000	70	41.633	Dinas PKPP
				Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	20	20		25		30		35		40		45		45	-	
				Persentase Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman	-	-		100		100		100		100		100		100		
1	4	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Kawasan Lingkungan Permukiman (<10 Ha) yang didukung oleh fasilitas Umum yang memadai (Air bersih, sanitas, dan Drainase)	20	20	-	30	6.972	35	7.040	40	7.110	45	7.180	50	7.250	50	35.552	Dinas PKPP
				Persentase rumah tangga bersanitasi	40	40		45		50		55		60		65		65	-	
				Persentase Penduduk berakses air minum	35	35		40		45		50		55		60		60	-	
1	4	17	Program pengelolaan areal pemakaman dan pelayanan Pengantaran Jenazah	Persentase pemakaman umum yang tertata	60	60	-	65	-	70	200	75	200	80	200	85	200	85	800	Dinas PKPP
				Cakupan layanan Pengantaran Jenazah	-	-		0		30		30		50		60		60	-	
1	4	18	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian	Persentase Lahan masyarakat untuk kepentingan publik yang diganti rugi	-	80	4.268	-	-	-	-	-	-	0		0		80	4.268	Dinas PKPP
				Persentase lahan pemerintah yang bersertifikat	10	10		25		40		55		70		85		85		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	5	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.606	4.767	3.781	4.334	3.660	6.534	-	25.682								
1	5	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	1.466	100	2.574	100	2.600	100	2.600	100	2.630	100	2.630	100	14.500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	704	100	760	100	400	100	400	100	400	100	2.500	100	5.164	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	80	100	6	100	675	100	-	100	709	100	-	100	744	100	2.135	Satuan Polisi Pamong Praja
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	90	100		100		100		100		100		100		100	-	
1	5	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	60	70	100	80	261	90	261	100	100	100	100	100	100	85	922	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	100	100	21	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	21	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	7	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Tidak Ada	Ada	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	4	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	15	Program Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase peraturan daerah/ peraturan bupati yang diawasi dan dipantau	100	100	-	100	33,50	100		100		100		100		98	34	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	16	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tingkat Penegakan PERDA	100	100	55	100	-	100	60	100	65	100	70	100	100	100	350	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	5	17	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	70	73	238	78	174	83	300	88	300	93	300	98	300	98	1.611	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	17	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).	rata-rata Penurunan Pengguna Minuman Keras, Narkoba, Judi, dll	10	20	12	25	25	30	40	35	40	40	40	50	40	50	197	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	18	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase anggota Satuan LINMAS yang berkompetensi	60	60	-	65	264	70	120	75	120	80	120	85	120	85	744	Satuan Polisi Pamong Praja
1	6		URUSAN SOSIAL			3.881		4.730		4.860		4.870		4.880		7.080		30.299		
1	6	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	621	100	829	100	840	100	840	100	850	100	850	850	4.830	Dinas Sosial
1	6	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	30	32,50	449	35	329	70	300	70	300	80	300	85	2.500	85	4.177	Dinas Sosial
1	6	04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	-	100	20	100	30	100	30	100	30	100	110	Dinas Sosial
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	90	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
1	6	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	70	70	-	75	-	80	15	85	15	90	15	95	15	95	60	Dinas Sosial
1	6	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampikan tepat waktu	Ada	Ada	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Dinas Sosial
1	6	15	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan, pendidikan, Bina Keterampilan, dan bantuan sosial	5	8	205	10,0	300	12,5	205	15,0	205	17,5	205	20,0	205	20	1.323	Dinas Sosial

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	65	68		70		73		75		78		80		80				
1	6	16	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Panti Sosial yang terakreditasi	-	-	-	0	-	0	200	0	200	100	200	100	200	100	800	Dinas Sosial
				Persentase Sarana sosial (panti asuhan dan panti rehabilitasi) kondisi baik	65	65	-	80		90		90		100		100		100		
1	6	17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak-anak terlantar yang dipelihara	76	70	1.057	72,50	1.142	75,00	1.150	77,50	1.150	80,00	1.150	82,50	1.150	83	6.799	Dinas Sosial
				Persentase bantuan kebutuhan dasar Bagi Korban Bencana Sosial dan darurat bencana	100	100		100		100		100		100		100		100		
1	6	18	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Aktif	55	60	383	62,50	354	65,00	354	67,50	354	70,00	354	72,50	354	73	2.153	Dinas Sosial
				Keberadaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Tidak Ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		
1	6	19	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Persentase PKMS yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	5	8	1.105	11	1.776	13	1.776	16	1.776	58	1.776	60	1.776	60	9.985	Dinas Sosial
				Persentase Warga KAT yang mendapat Bimbingan dan Keterampilan Berusaha	70	70		75		80		85		90		95		95		
2			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			36.371		50.137		54.955		55.723		53.830		90.633		341.649		
2	1		URUSAN WAJIB TENAGA KERJA			486		1.632		4.884		4.898		2.213		4.206		18.320		
2	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	-	100	598	100	600	100	610	100	620	100	639	#REF!	3.066	Dinas Nakertrans

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	20	40	-	42,50	223	70,00	230	70,00	230	70,00	230	72,50	2.500	73	3.413	Dinas Nakertrans
2	1	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	30	100	34	100	35	100	36	100	37	100	172	Dinas Nakertrans
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	95	100	-	100		100		100		100		100		100	-	
2	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	-	20	-	30	-	35	32	35	33	50	34	50	35	50	134	Dinas Nakertrans
2	1	15	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Jumlah pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	1	1	112	1	295	2	3.500	2	3.500	10	800	10	500	26	8.707	Dinas Nakertrans
				Keberadaan Balai Latihan Kerja Daerah	Tdk ada	Tdk ada		Tdk ada		ada		ada		ada		ada		ada		
2	1	16	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase sengketa pengusaha- pekerja yang diselesaikan	80	80	83	90	81	90	83	90	85	90	88	90	91	90	510	Dinas Nakertrans
				Persentase perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan perlindungan tenaga Kerja (K3)	60	60		70		80		90		100		100		100		
2	1	17	Program Peningkatan kesempatan kerja	Rasio Penduduk yang bekerja	94,93	95	291	95,43	405	95,68	405	95,93	405	96,18	405	96,43	405	96	2.316	Dinas Nakertrans
2	2		URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																4.515	Dinas P2KBP3A;
2	2	15	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	93,72	94	130	94,25	170	94,50	170	94,75	170	95,00	170	95,25	170	95,25	980	Dinas PPKB, PPPA;

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	2	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak.	Persentase rekomendasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUD) pada lembaga Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti	35	38	70	43	-	48	80	53	85	58	90	80	80	80,00	405	Dinas P2KBP3A;
				Keberadaan Kelembagaan layanan pemberdayaan perempuan, dan Anak yang aktif	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
2	2	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio Penurunan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT)	20	25	425	60	-	70	150	80	150	90	150	100	150	100	1.025	DP3KB;
				Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	40	45		55		65		75		85		95		95,00	-	
2	2	18	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	72	72	200	68,00	185	66,00	70	64,00	75	62,00	80	60,00	85	60,00	695	DP3KB;
				Tingkat Partisipasi perempuan di lembaga Swasta	28	30		32		34		36		38		40		40,00	-	
2	2	19	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif fan mendapat pembinaan	65	65	-	65	-	70	100	75	100	80	120	85	120	85	440	DP3KB;
2	2	20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan perlindungan anak	2	2	60	2	30	2	35	2	40	2	45	2	50	12	260	DP3KB;
				Persentase rekoemndasi lembaga Perlindungan Khusus Anak yang ditindaklanjuti	45	45		50		55		60		65		70		70	-	
2	2	21	Program Pengadaan Data Terpilah Menurut Tema dan Jenis Kelamin	Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak yang up to date	Tidak Ada	Ada	50	Ada	-	Ada	50	Ada	50	Ada	50	Ada	50	Ada	250	DP3KB;

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	2	22	Program Kelembagaan Data dan Informasi	Persentase Pertugas pencatatan dan pelaporan data/Informasi yang memiliki kompetensi	30	60	340	60	-	65	30	70	30	75	30	80	30	80	460	DP3KB;
2	3		URUSAN WAJIB PANGAN				-		6.519		6.635		6.640		6.690		9.028		35.512	
2	3	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	-	100	930	100	940	100	950	100	960	100	1.008	100	4.788	Dinas Pertanian dan Pangan
2	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	45	70	-	72,50	504	75,00	300	77,50	250	80,00	250	82,50	2.500	83	3.804	Dinas Pertanian dan Pangan
2	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaiannya dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	-	100	50	100	50	100	50	100	50	100	200	Dinas Pertanian dan Pangan
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	98	100	-	100		100		100		100		100		100	-	
2	3	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	70	73	-	75	50	78	35	80	40	83	40	85	40	85	205	Dinas Pertanian dan Pangan
2	3	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase desa mandiri pangan	23,26	23,26		23,26	1.425	25,58	1.440	25,58	1.450	27,91	1.460	27,91	1.470	28	7.245	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase desa berstatus swasembada	17,44	17,44		17,44		18,60		18,60		19,77		19,77		20	-	
				Skor Pola Pangan Harapan	68,25	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95	-	
2	3	16	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang ditangani	60	60	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400	Dinas Pertanian dan Pangan
2	3	13	Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Distribusi Pangan Segar yang aman	90	90	-	100	-	100	50	100	50	100	50	100	50	100	200	Dinas Pertanian dan Pangan
2	3	17	Program Kedaulatan Pangan	Luas Areal Pertanian yang terairi saluran Irigasi	90	95	-	100	3.183	100	3.210	100	3.240	100	3.270	100	3.300	100	16.203	Dinas Pertanian dan Pangan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Jumlah Desa Mandiri Benih	3,00	3,00	-	4,00	-	5,00		5,00		7,00		8,00		8				
		Jumlah Desa Pertanian Organik	2,00	2,00		4,00		6,00		6,00		10		12		12		-		
		Persentase Peningkatan Produksi Padi	6	6		7,50		9,00		10,50		12,00		13,50		14		-		
		Persentase Peningkatan Produksi Jagung	10	10		12		14		16		18		18		18		-		
		Persentase Peningkatan Produksi Kacang	8	9		10		12		14		15		16		16		-		
2	3	18	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	90	90		100	-	100	80	100	80	100	80	100	80	100	320	Dinas Pertanian dan Pangan
2	3	19	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan	Persentase Penyuluh yang memiliki Kopetensi	80	80		100	271	100	270	100	270	100	270	100	270	100	1.351	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase Ketersediaan Sarana Penyuluhan	80	80		100		100		100		100		100		100	-	
2	3	20	Program Peningkatan kesejahteraan petani.	Persentase pelaku agribisnis yang mendapat pembinaan	70	75	-	80	156	90	160	90	160	100	160	100	160	100	796	Dinas Pertanian dan Pangan
				Jumlah Petani/Gapoktan berprestasi yang mendapatkan penguatan kapasitas SDM	90	90		100		100		100		100		100		100	-	
																			-	
2	4		URUSAN WAJIB PERTANAHAN																	
2	4	15	Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	80	80	-	81	-	82	200	83	200	84	200	85	200	85	800	Dinas PKPP
				Persentase Penyelesaian izin lokasi	100	100		100		100		100		100		100		100	-	
				Persentase luas lahan bersertifikat	78	78		80,00		82,50		85,00		87,50		90,00		90	-	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Keberadaan Penetapan tanah ulayat	Belum Ada	Belum Ada		Belum Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	-			
		Keberadaan Inventarasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Belum Ada	Belum Ada		Belum Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	-			
		Persentase Penerbitan Izin membuka Tanah	-	-		100		100		100		100		100		100	-			
2	4	16	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan.	Persentase Penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	-	80		90	1.130	100	1.200	100	1.200	95	1.200	100	1.200	100	5.930	Dinas PKPP
			Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang tersertifikasi		10	10		25		40		55		70		85		85		
			Persentase Lahan masyarakat untuk kepentingan publik yang diganti rugi		-	100		100		100		100		100		100		100		
2	5		URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP																	
						3.105		5.410		4.497		4.853		4.907		7.157		29.929		
2	5	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	647	100	925	100	925	100	930	100	930	100	1.023	100	5.380	DLH
2	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	25	30	410	32,50	2.010	35,00	400	37,50	400	80	400	85	2.500	85	6.120	DLH
2	5	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	65	100	72	100	79	100	87	100	95	100	397	DLH
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	97	100	-	100		100		100		100		100		100	-	
2	5	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	20	30	70	40	230	50	70	60	70	70	70	80	70	80	580	DLH

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	5	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD yang disampaikan tepat waktu yang disampaikan tepat waktu yang disampaikan tepat waktu	Ada	Ada	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	17	DLH	
2	5	7	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampikan tepat waktu	Ada	Ada	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	12	DLH	
2	5	15	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal serta usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemda	70	70	1.450	95	200	95	220	95	242	95	266	95	293	95	2.671	DLH
2	5	16	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip 3 R (reduce, recycle, reuse)	60	60	-	65	-	70	300	75	600	80	600	85	600	85	2.100	DLH
				Persentase/ cakupan daerah Penanganan Sampah	-	-	-	-	-	2	-	3	-	5	-	6	-	6	-	
				Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Belum Ada	Belum Ada	-	Belum Ada	-	Belum Ada	-	Belum Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	
2	5	17	Program Peningkatan Pengamanan B3 dan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang diamankan dalam gudang penyimpanan sementara	-	-	-	100	-	100	60	100	60	100	60	100	60	100	240	DLH
2	5	18	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang lestasi	80	80	-	100	-	100	350	100	350	100	350	100	350	100	1.400	DLH
2	5	19	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Keberadaan Penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten	Belum Ada	Belum Ada	-	Ada	325	Ada	730	Ada	740	Ada	750	Ada	760	Ada	3.305	DLH

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	5	20	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sumber daya Alam	Indeks Kualitas Udara	Baik	Baik	-	Baik	400	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	400	DLH
				Indeks Kualitas Air	Baik	Baik	-	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	-	
2	5	21	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Keberadaan Pemberiaan penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat kabupaten	Belum Ada	Belum Ada	Ada	-	Ada	100	Ada	100	Ada	100	Ada	100	Ada	400	DLH	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	-	-	40		60		80		100		100		100	-		
2	5	22	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Keberadaan Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Ada	Ada	25	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	25	DLH
2	5	23	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.	Keberadaan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah	Belum Ada	Ada	275	Ada	205	Ada	210	Ada	212	Ada	214	Ada	216	Ada	1.333	DLH
				Keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/ atau Program Daerah	Belum Ada	Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	-		
2	5	24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah perkotaan ber HPL/ HGB	58	60	200	62,50	1.050	65,00	1.060	67,50	1.070	70,00	1.080	72,50	1.090	73	5.550	DLH
				Keberadaan Taman Kota yang Ramah Anak	Belun Ada	Belun Ada		Belun Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
2	6		URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL				2.928		2.304		2.433		2.455		2.478		4.573		17.171	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	6	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	1.636	100	1.009	100	1.020	100	1.030	100	1.040	100	1.050	100	6.785	Dinas Dukcapil
2	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	38	40	546	70	421	75	430	80	430	85	430	90	2.500	90	4.757	Dinas Dukcapil
2	6	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100		100	50	100	53	100	55	100	58	100	61	100	276	Dinas Dukcapil
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	95	100		100		100		100		100		100		100	-	
2	6	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	45	45	-	50	-	55	50	60	50	65	50	75	53	75	203	Dinas Dukcapil
2	6	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	100	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	36	Dinas Dukcapil
2	6	7	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Ada	Ada	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	11	Dinas Dukcapil
2	6	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penerapan KTP-el Nasional berbasis NIK	Belum Ada	Ada	699	Ada	825	Ada	830	Ada	840	Ada	850	Ada	860	Ada	4.903	Dinas Dukcapil
				Rasio Penduduk yang telah menikah ber KK	95	100		100		100		100		100		100		100		
				Kepemilikan KTP-el	39,89	45		60		75		90		100		100		100		
				Rasio bayi berakte kelahiran	52,66	55		70		85		100		100		100		100		
				Tingkat Kepemilikan akta k	19,78	25		40		55		70		85		100		100		
				Cakupan penerbitan Identitas Anak	-	-		20		40		60		80		100		100		
				Cakupan penerbitan akta kematian	74	80		90		95		95		100		100		100		
2	6	16	Program Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan	Keberadaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	50	Ada	50	Ada	50	Ada	50	Ada	200	Dinas Dukcapil

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			3.557		4.736		4.630		4.575		4.625		6.925		29.047			
2	7	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	830	100	844	100	850	100	860	100	870	100	880	100	5.134	DPMD
2	7	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	35	40	375	45	311	50	310	55	310	60	310	65	2.500	65	4.116	DPMD
2	7	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	90	100	50	100	50	100	50	100	50	100	290	DPMD
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	98	100		100		100		100		100		100		100	-	
2	7	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	40	40	-	45	140	55	30	65	30	75	30	85	50	85	280	DPMD
2	7	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	22	DPMD
2	7	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Keberadaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Tahunan yang disampikan tepat waktu	Ada	Ada	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	45	DPMD
2	7	08	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	Keberadaan data dan Informasi Pembangunan Desa yang terpublikasi	-	-	-	Ada	-	Ada	50	Ada	50	Ada	50	Ada	50	Ada	200	DPMD
2	7	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata laksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan Desa yang terpublikasi	Tidak ada	-	-	Ada	50	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	50	DPMD
2	7	15	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Berprestasi	-	2	235	5	545	9	550	9	560	15	570	19	580	19	3.040	DPMPD

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Persentase Posyandu kondisi bangunan baik	30	40		50		75		75		85		90		90				
		Posyandu aktif	100	100		100		100		100		100		100		100				
		Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	40	43		45,0		47,5		50,0		52,5		55,0		57,5				
		Persentase keberadaan Lembaga Adat Desa	-	74		100		100		100		100		100		100				
		Keberadaan Lembaga Adat Kabupaten	Belum Ada	Belum Ada	-	ada		ada		ada		ada		ada		ada				
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapat pembinaan	35	35	-	45		55		65		75		85		95				
2	7	16	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Persentase kelompok binaan PKK aktif	70	75	500	80	550	85	550	90	550	95	550	100	600	100	3.300	DPMPD
2	7	17	Program Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan Tertib Administrasi	75	80	1.300	85	1.786	90	1.800	95	1.820	100	1.840	100	1.860	100	10.406	DPMPD
2	7	18	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan	Persentase Kelompok Usaha Masyarakat Miskin yang mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna	40	45	150	50	295	55	295	60	200	65	200	70	200	70	1.340	DPMPD
2	7	19	Program Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat	Keberadaan pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Tidak ada	ada	50	ada	40	ada	60	ada	60	ada	70	ada	70	ada	350	DPMPD
2	7	20	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase kelompok usaha Ekonomi masyarakat yang dibina	20	25	50	30	85	35	85	40	85	45	85	50	85	50	475	DPMPD
2	8		URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.090		5.508		5.820		6.071		6.344		8.770		35.604	
2	8	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	453	100	838,9	100	850	100	860	100	870	100	880	100	4.752	DP3KB

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	8	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	55	60	550	63	366,50	65	370	68	370	70	370	73	2.500	73	4.527	DP3KB
2	8	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	103	100	45	100	45	100	50	100	55	100	60	100	358	DP3KB
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	95	100		100		100		100		100		100		100		
2	8	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	70	73	60	75,0	40	77,5	40	80,0	40	82,5	40	85,0	40	85	260	DP3KB
2	8	7	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Keberadaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan pengendalian tahunan yang disampaikan tepat waktu	Ada	Ada	29	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Ada	29	DP3KB
2	8	8	Program Pengembangan data dan Informasi Daerah	Keberadaan Data dan Informasi yang terpublikasi	-	-	-	Ada	45	Ada	45	Ada	45	Ada	45	Ada	45	Ada	225	DP3KB
2	8	15	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB),	77,50	80	1.895	82	2.123	83	2.220	85	2.240	86	2.260	88	2.280	88	13.018	DP3KB
				Rata-rata jumlah anak per keluarga,	72,90	73		73		73		73		73		73		73		
				Cakupan peserta KB aktif	68,27	70		72		73		75		76		78		78		
				Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	65,80	68		70	-	71,0		72,5		74,0		75,5		76		
2	8	16	Program Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga (ADPIN)	Persentase Program KKBPK dan PKB/PLKB yang terlaksana	80	80	-	90	1.964	100	2.160	100	2.376	100	2.614	100	2.875	100	11.990	DP3KB
				Jumlah Kampung KB yang Aktif	-	-		4		4		4		4		4		20		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	8	17	Program Pengendalian Penduduk	Keberadaan kebijakan pengendalian penduduk Kabupaten yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah provinsi	Tdk Ada	Tdk Ada	-	Ada	85,00	Ada	90	Ada	90	Ada	90	Ada	90	Ada	445	DP3KB
2	9		URUSAN PERHUBUNGAN																	
2	9	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	960	100	789	100	800	100	810	100	820	100	830	100	5.009	Dishub
2	9	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	40	80	1.108	83	309	85	310	88	310	90	310	93	2.500	93	4.847	Dishub
2	9	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	95	100	-	100	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	120	Dishub
2	9	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	60	90	427	100	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	547	Dishub
2	9	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	22	Dishub
2	9	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Ada	Ada	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	53	Dishub
2	9	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Pengumpul (Ferry) yang terbangun	1	-	3.900	1	3.300	1	1.830	1	1.850	-	1.870	-	1.890	3	14.640	Dishub
				Persentase kesediaan Dokumen Perencanaan dan kelayakan pembangunan Pelabuhan Pengumpul/ Ferry	50	50		100		100		100		100		100		100		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
		Jumlah Terminal Bandar yang terbangun	-	-		1,00		-	-	-	-	-	-	-	-	1				
		Keberadaan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Belum Ada	Belum Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
2	9	16	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Keberadaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Belum Ada	Belum Ada	141	Belum Ada	132	Ada	132	Ada	150	Ada	150	Ada	150	Ada	855	Dishub
				Keberadaan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan Perdesaan	Belum Ada	Belum Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Keberadaan penetapan tarif angkutan orang dan penyeberangan kelas ekonomi	Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
2	9	17	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Pelabuhan Rakyat dalam kondisi baik dan Sedang	70	70	5.244	75	500	80	500	85	550	90	550	95	600	95	7.944	Dishub
2	9	18	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas	20	30	831	30	305	35	310	40	310	45	310	50	310	50	2.376	Dishub
				Persentase ketersediaan Rambu dan Marka jalan	20	60		65		70		75		80		85		85		
				Keberadaan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
2	9	19	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang melakukan KIR	15	100	26	100	40	100	15	100	20	100	20	100	20	100	141	Dishub
2	9	29	Program Pemeliharaan Sarana Perhubungan Laut	Persentase Sarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	75	75	100	78	50	80	150	83	150	85	150	88	150	88	750	Dishub

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	9	21	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan	Persentase Penerbitan Izin usaha / kegiatan penyelenggaraan Angkutan darat, laut, dan penyeberangan	75	75	-	80	-	83	10	85	10	88	10	90	10	90	40	Dishub
2	10		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI			1.762		1.480		1.629		1.669		1.684		3.944		12.168		
2	10	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	432	100	654	100	654	100	654	100	654	100	654	100	3.702	DKISP
2	10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	30	35	447	40	236	70	240	70	240	70	240	75	2.500	75	3.903	DKISP
2	10	04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku		100	-	100	-	100	60	100	65	100	65	100	65	100	255	DKISP
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	90	100		100		100		100		100		100		100		
2	10	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	70	70	5	72	5	75	15	75	15	75	30	80	30	80	100	DKISP
2	10	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	22	DKISP
2	10	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Ada	Ada	53	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Ada	53	DKISP
2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan komunikasi sampai ke tingkat Desa	90	90	398	100	260	100	260	100	260	100	260	100	260	100	1.699	DKISP

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Keberadaan Web site milik pemerintah daerah dengan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
2	10	16	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	Persentase SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang memiliki kompetensi	75	80	90	85	65	90	90	95	90	100	90	100	90	100	515	DKISP
2	10	17	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Keberadaan Media Center	Ada	Ada	250	Ada	220	Ada	220	Ada	250	Ada	250	Ada	250	Ada	1.440	DKISP
				Keberadaan Dialog Interaktif melalui Radio dan televisi	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Keberadaan Pusat Informasi layanan Masyarakat	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
2	10	18	Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Postel	Persentase Penyelenggara Komunikasi yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100	100	65	100	40	100	40	100	45	100	45	100	45	100	279	DKISP
2	10	19	Program Optimalisasi Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Elektronik	Persentase Publikasi Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	100	-	100	50	100	50	100	50	100	50	100	200	DKISP	
2	11		URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			2.925		5.040		5.255		5.295		5.440		7.640		31.595		
2	11	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	593	100	775	100	780	100	790	100	800	100	810	100	4.548	Diskop dan UKM

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	40	45	170	50	328	70	330	70	330	70	330	75	2.500	75	3.987	Diskop dan UKM
2	11	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	10	100	60	100	60	100	60	100	75	100	75	100	340	Diskop dan UKM
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	97	100	-	100		100		100		100		100		100		
2	11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	60	60	-	65	75	70	40	75	40	80	40	85	40	85	235	Diskop dan UKM
2	11	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	30	Diskop dan UKM
2	11	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Tidak Ada	Ada	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	78	Diskop dan UKM
2	11	15	Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Belum Ada	Belum Ada	200	Belum Ada	-	Ada	200	Ada	210	Ada	210	Ada	210	Ada	1.030	Diskop dan UKM
				Persentase BPR/LKM Aktif	53	55		60		65		70		75		80		80		
				Persentase pelaku Usaha UMKM yang mendapat advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Izin Usaha	55	60		65		70		75		80		85		85		
2	11	16	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Persentase pelaku UMKM yang mendapatkan pembinaan Kewirausahaan	65	70	1.005	75	1.100	80	1.100	85	1.100	90	1.200	95	1.200	95	6.705	Diskop dan UKM
				Persentase UMKM sehat dan aktif	30	35		38		40		43		45		48		48		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB			
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta						
		Persentase Pedagang Kaki Lima dan asongan yang mendapatkan Pembinaan dan bantuan Modal usaha/ Sapras Usaha	25	30	40	50	60	70	80	80											
2	11	17	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro	Persentase UMKM yang medapatkan informasi dukungan permodalan	100	100	200	100	1.503	100	1.520	100	1.540	100	1.560	100	1.580	100	7.903	Diskop dan UKM	
				Persentase UMKM yang terpantau mengelola dana Pemerintah untuk pengembangan usaha	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				Persentase Usaha Mikro menjadi Skala Usaha Kecil	10	13	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	25									
2	11	18	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi Sehat	10	10	580	12,50	1.200	15,00	1.200	17,50	1.200	20,00	1.200	22,50	1.200	22,50	6.580	Diskop dan UKM	
				Persentase Koperasi yang mendapat pembinaan, advokasi, informasi, dan edukasi perkoperasian	60	65	70	75	80	85	90	90									
				Persentase Koperasi yang diawasi, diperiksa, dan dinilai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	11	20	Program Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Koperasi dan UMKM	Keberadaan profile Koperasi, dan Pelaku UMKM yang up to date	-	100	60	100	-	100	25	100	25	100	25	100	25	100	160	Diskop dan UKM	
2	12		URUSAN PENANAMAN MODAL			1.955	1.600	1.596	1.610	1.626	3.894	12.281									
2	12	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	573	100	465	100	470	100	470	100	470	100	470	100	2.918	Dinas PM dan PTSP	
2	12	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	40	45	405	50	251	55	250	60	250	65	250	70	2.500	70	3.906	Dinas PM dan PTSP	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	12	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	95	100	15	100	14	100	20	100	20	100	20	100	20	100	109	Dinas PM dan PTSP
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	97	100		100		100		100		100		100		100		
2	12	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	60	65	30	70	61	75	30	80	30	85	30	90	30	90	211	Dinas PM dan PTSP
2	12	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	18	Ada	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	20	Dinas PM dan PTSP
2	12	07	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Keberadaan data dan Informasi Penanaman Modal yang terpublikasi	2	2	101	2	41	2	47	2	54	2	62	2	72	12	377	Dinas PM dan PTSP
2	12	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi	Persentase Keberadaan dokumen perencanaan dan evaluasi SKPD,	100	100	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10	Dinas PM dan PTSP
2	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Keberadaan Data, Intensifikasi dan Ektensifikasi Perijinan yang up to date	Belum Ada	Ada	323	Ada	-	Ada	260	Ada	265	Ada	271	Ada	276	Ada	1.395	Dinas PM dan PTSP
				Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Perijinan	2	2		-		2		2		2		2		10		
				Keberadaan Peraturan/Regulasi Perizinan	Belum Ada	Belum Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
2	12	17	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Hasil Daerah	Keberadaan Data, Intensifikasi dan Ektensifikasi Perijinan yang up to date	Belum Ada	Ada	-	Ada	255	-		-		-		-		Ada	255	Dinas PM dan PTSP
2	12	18	Program Peningkatan Informasi Perizinan	Keberadaan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	Belum Ada	Belum Ada	178	Belum Ada	215	Ada	220	Ada	220	Ada	220	Ada	220	Ada	1.273	Dinas PM dan PTSP
				Keberadaan Peta Potensi Investasi	Belum Ada	Belum Ada		Belum Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Jumlah PMDN dan PMA yang melakukan Investasi	1	1		1		2		2		3		3		3		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	12	19	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	70	70	-	80	200	85	200	90	200	95	200	100	200	100	1.000	Dinas PM dan PTSP
				Keberadaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu 1 (satu) Pintu Bidang Penanaman Modal	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
2	12	20	Program Pengendalian Pengawasan Perijinan dan Retribusi	Persentase Penerbitan Perizinan yang dipantau/ dievaluasi pelaksanaannya	40	100	302	100	96	100	98	100	101	100	103	100	106	100	807	Dinas PM dan PTSP
				Keberadaan Ploting kawasan Perizinan	Tdk Ada	Tdk Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
2	13		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
						1.264		7.360		9.088		9.110		9.142		19.142		55.105		
2	13	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	417	100	724	100	730	100	740	100	750	100	760	100	4.121	Dispora
2	13	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	417	100	244	100	250	100	250	100	250	100	2.500	100	3.911	Dispora
2	13	04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaiain Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	-	100	50	100	50	100	50	100	50	100	200	Dispora
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	97	100		100		100		100		100		100		100		
2	13	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	75	78	5	80	20	83	40	85	40	88	40	90	40	90	185	Dispora
2	13	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	22	Dispora

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	13	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan pengendalian Tahunan yang disampaikan tepat waktu	Ada	Ada	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	53	Dispora	
2	13	15	Program Peningkatan Kompetisi/ Kejuaraan Olahraga Daerah	Persentase Cabang Olahraga yang menyelenggarakan Kompetisi Tingkat Kabupaten	40	45	60	-	65	800	70	800	75	800	80	840	80	3.240	Dispora	
				Jumlah kegiatan kompetisi olahraga Pendidikan tingkat Kabupaten	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12			
				Keberadaan Kalender Kompetisi Olahraga	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
2	13	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rasio Gedung/ Lapangan olahraga per 1.000 penduduk	1,15	1,22	1,28	-	1,35	5.000	1,35	5.000	1,62	5.000	1,76	3.000	1,76	18.000	Dispora	
2	13	17	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Keberadaan Pembinaan Olahraga jenjang SD/ SMP dan Olahraga Prestasi	Ada	Ada	-	Ada	5.954	Ada	1.400	Ada	1.400	Ada	1.400	Ada	8.500	Ada	18.654	Dispora
				Persentase Organisasi olahraga tingkat daerah yang mendapat pembinaan	40	45	55	65	80	95	100	100	100	100	100	100	100			
				Ragam olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
2	13	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Kepemudaan	Keberadaan keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	Belum Ada	Ada	350	Ada	418	Ada	418	Ada	430	Ada	452	Ada	452	Ada	2.519	Dispora
				Persentase organisasi pemuda yang aktif	45	45	-	50	55	60	65	70	70	70	70	70	70			
				Persentase organisasi kepramukaan yang mendapat layanan pembinaan	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
2	13	19	Program Peningkatan Motivasi Kepemudaan	Keberadaan Penghargaan / hadiah bagi Pemuda Berprestasi ditingkat Provinsi/ Regional dan Nasional	Belum Ada	Belum Ada		Ada	-	Ada	400	Ada	400	Ada	400	Ada	3.000	Ada	4.200	Dispora
2	14		URUSAN STATISTIK				470		90		150		150		150		150		1.160	
2	14	15	Program Penyediaan dan pelayanan informasi statistik	Cakupan Buku Statistik berbasis sektor	-	-	-	10	90	20	150	30	150	40	150	50	150	50	690	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian
2	14	16	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan Data Statistik yang up to date untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	80	80	470	82,50	-	85,00	-	87,50	-	90,00	-	92,50	-	93	470	Bappeda
2	15		URUSAN PERSANDIAN				-		30		170		170		170		255		795	
2	15	15	Program peningkatan kapasitas SDM Persandian	Persentase SDM persandian yang memiliki kompetensi	-	-	-	50	30	60	20	70	20	80	20	90	20	90	110	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian
2	15	16	Program peningkatan Pelayanan Informasi dan Persandian	Persentase keberadaan Sarana dan Prasarana Persandian sesuai standar persandian daerah	-	-		30	-	60	150	60	150	60	150	70	235	70	685	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian
				Keberaaan Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Belum Ada	Belum Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
2	16		URUSAN KEBUDAYAAN				743		1.489		1.718		1.746		1.776		6.093		13.566	
3	2	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	-	100	705	100	765	100	784	100	803	100	823	100	3.881	Disparbud

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
3	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keberadaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	-	100	454	100	383	100	393	100	403	100	2.500	100	4.134	Disparbud
3	2	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Meningkatnya Disiplin Aparatur	95	100	-	100	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	120	Disparbud
3	2	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	50	55	-	60	40	65	40	65	40	75	40	80	40	80	199	Disparbud
2	16	15	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Keberadaan Buku Sejarah Budaya Muna Barat	Belum ada	ada	600	ada	-	ada	200	ada	200	ada	200	ada	2.200	ada	3.400	Disparbud
				Keberadaan penelusuran Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Belum ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		
				Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	20		20		20		20		20		20		20		20
				Keberadaan Pengelolaan Museum Kabupaten	Tidak Ada	Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Ada		Ada		
2	16	16	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah partisipasi penyelenggaraan festival budaya tingkat regional dan Nasional	1	1	143	1	290	2	300	2	300	2	300	2	500	10	1.833	Disparbud
				Jumlah pelaksanaan even Seni Budaya Tingkat Kabupaten	2	2		2		2		2		2		2		12		
				Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	1,43	1,43		1,43		1,43		1,43		1,43		1,43		1,43		
2	17		URUSAN PERPUSTAKAAN				-		-		100		100		100		100		400	
2	17	15	Program penyediaan/ Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan daerah	Keberadaan Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah Kabupaten	Belum Ada	Belum Ada	-	Ada	-	Ada	50	Ada	50	Ada	50	Ada	50	Ada	200	Sekretariat Daerah
				Cakupan perpustakaan Desa	2	2	-	6		12		12		24		30		30		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB					
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta						
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta								
		Persentase Peningkatan kunjungan perpustakaan	-	-	-	10		10		10		10		10		10							
2	17	16	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Persentase Peningkatan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	-	-	0	-	100	50	100	50	20	50	10	50	10	200	Sekretariat Daerah			
2	18		URUSAN KEARSIPAN							150		60		100		100		410					
2	18	15	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah.	Persentase Pengelolaan arsip di SKPD secara baku	-	-	-	60	-	70	150	80	60	90	100	100	100	100	410	Sekretariat Daerah			
				Keberadaan Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah daerah	-	-	-	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	-				
3			URUSAN PILIHAN								38.725		25.450		27.604		29.749		30.485		34.416		186.430
3	1		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								5.816		5.651		5.825		5.898		5.974		8.314		37.479
3	1	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	513	100	765	100	770	100	780	100	790	100	800	100	4.419	DKP			
3	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	40	45	467	50	235	55	240	60	240	65	240	68	2.500	67,50	3.922	DKP			
3	1	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaiannya dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	120	DKP			
3	1	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	60	60	-	63	68	65	40	68	40	70	40	73	40	73	228	DKP			
3	1	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	22	DKP			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
3	1	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disimpulkan tepat waktu	Ada	Ada	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	48	DKP	
3	1	15	Program Pengembangan data/ Informasi Perikanan	Keberadaan Data/ Informasi Perikanan yang terpublikasi secara elektronik	Belum Ada	Ada	767	ada	122,58	ada	120	ada	120	ada	120	ada	120	Ada	1.370	DKP
3	1	16	Program Pemberdayaan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Laut	Persentase Pokmas Aktif dalam pengawasan sumber daya laut	40	45	70	55		65	75		85		95		95	70	DKP	
3	1	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana pengawasan Sumber Daya laut	-	70	603	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95	603	DKP
3	1	18	Program Pengembangan budidaya perikanan.	Persentase Peningkatan Produksi budidaya perikanan	10	10	1.020	15	1.372	15	1.390	15	1.400	15	1.410	15	1.420	15	8.012	DKP
3	1	19	Program Pengembangan Kawasan Budidaya	Persentase Area Pertambakan yang memiliki Saluran Pengairan yang memadai	80	80	-	81	300	83	330	84	363	86	399	87	439	87	1.832	DKP
3	1	20	Program Pengembangan perikanan Tangkap.	Persentase Peningkatan produksi perikanan Tangkap	15	15	1.536	15	2.113	15	2.130	15	2.150	15	2.170	15	2.190	15	12.289	DKP
				Persentase Nelayan Kecil yang diberdayakan	75	78		80,0		82,5		85,0		87,5		90,0		90		
3	1	21	Program Peningkatan Perizinan Usaha Perikanan	Persentase Kegiatan Usaha Perikanan yang mendapatkan Izin Usaha	70	70		80	30	85	30	90	30	95	30	100	30	100	150	DKP
3	1	22	Program Pengembangan Lingkungan Pemukiman Nelayan	Persentase Hutan Mangrove yang direhabilitasi	-	5	650	7,50	-	10,00	-	12,50	-	15,00	-	17,50	-	18	650	DKP
				Persentase Terumbu Karang yang direhabilitasi	-	1		3,50		6,00		8,50		11,00		13,50		14		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
3	1	23	Program Penguat Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Persentase Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan Teknologi Tepat Guna pengolahan hasil perikanan	20	21	120	22	210	23	210	24	210	25	210	26	210	27	1.170	DKP
3	1	24	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan pengelolaan dan pemasaran Hasil perikanan.	Persentase Peningkatan Proudok Olahan hasil Perikanan	-	-	-	15	30	15	30	20	30	20	30	20	30	20	150	DKP
3	1	25	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembudidayaan Ikan	Presentase Kelembagaan Budidaya Perikanan yang Sehat	50	52	-	54	30	59	30	64	30	69	30	75	30	75	150	DKP
3	1	26	Program Pengembangan Pengelolaan TPI	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	70	70	-	75	-	80	100	85	100	90	100	95	100	95	400	DKP
3	1	27	Program Pengembangan Pembenihan ikan	Jumlah UPB yang terbentuk (Unit pembenihan Rakyat)	-	-	-	1,00	375	1	375	1	375	1	375	1	375	5	1.875	DKP
3	2		URUSAN PILIHAN PARIWISATA																	
3	2	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	728	Disparbud
3	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keberadaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	365	Disparbud
3	2	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Meningkatnya Disiplin Aparatur	95	100	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	20	Disparbud
3	2	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	50	55	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	Disparbud
3	2	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	24	Disparbud

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
3	2	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disimpulkan tepat waktu	Ada	Ada	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	22	Disparbud	
3	2	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan Domestik dan Mancanegara	5	10	449	10	217	10	230	10	242	10	254	10	266	10	1.657	Disparbud
				Keberadaan Kalender Wisata Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
3	2	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.	Persentase obyek wisata unggulan daerah yang dikelola dan dikembangkan	60	65	2.140	68	2.492	70	2.554	73	2.618	75	2.683	78	2.750	78	15.236	Disparbud
				Jumlah RTBL Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	-	1		1		1		1		1		1		6		
3	2	17	Program Sumber Daya Kreatif	Jumlah Kelompok ekonomi kreatif baru	-	2	77	2	77	2	80	2	84	2	88	2	93	12	498	Disparbud
3	2	18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina dan diberdayakan	-	80	166	85	280	90	280	95	280	100	300	100	300	100	1.606	Disparbud
3	3		URUSAN PERTANIAN				21.659		1.174		2.535		2.535		2.580		2.580		33.063	
3	3	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	808	Dinas Pertanian dan Pangan
3	3	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	45	70	1.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	1.446	Dinas Pertanian dan Pangan
3	3	04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Dinas Pertanian dan Pangan
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	98	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
3	3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	70	73	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	35	Dinas Pertanian dan Pangan
3	3	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	ada	ada	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ada	15	Dinas Pertanian dan Pangan
3	3	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian tahunan yang disampaikan tepat waktu	Ada	Ada	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	672	Dinas Pertanian dan Pangan
3	3	08	Program Peningkatan Data dan Informasi Pembangunan Pertanian	Keberadaan Ketersediaan Data Statistik Pertanian yang up to date	Ada	Ada	-	Ada	Ada	110	Ada	110	Ada	110	Ada	110	Ada	440	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	3	15	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rasio Lahan Pertanian yang memiliki akses jalan usaha tani	60	60	-	65	-	70	-	75	-	80	-	85	-	85	-	Dinas Pertanian dan Pangan
				Cakupan Luas Areal Pertanian yang terairi saluran Irigasi	20	20		25		30		35		40		45		45	-	
				Persentase lahan Kering/ Kritis yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian	30	30		35		40		45		50		55		60	-	
				Persentase Kepemilikan lahan pertanian masyarakat yang bersertifikat	70	70		75		80		85		90		95		95	-	
3	3	16	Program Peningkatan produksi Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Ayam Potong	5	5		5	315	6	-	6	-	7	-	7	-	8	315	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase Peningkatan Produksi Telur	5	5		5		6		6		7		7		8		
3	3	17	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase pelaku agribisnis yang mendapat pembinaan	70	75	909	80	-	90	-	90	-	100	-	100	-	100	909	Dinas Pertanian dan Pangan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Jumlah Petani/Gapoktan berprestasi yang mendapatkan penguatan kapasitas SDM	90	90		100		100		100		100		100		100				
3	3	18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase desa mandiri pangan	23,26	23,26	1.667	-	-	-	-	-	-	-	27,91	1.667		Dinas Pertanian dan Pangan		
				Persentase desa berstatus swasembada	17,44	17,44		17,4419		18,605		18,605		19,767		19,7674				
				Skor Pola Pangan Harapan	68,25	70		75		80		85		90		95		95,00		
3	3	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Kedele/ Pajale)	4,50	5	7.299	10,00	460	10,25	500	10,50	500	12,50	500	12,50	500	12,50	9.759	Dinas Pertanian dan Pangan
3	3	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan bina kelompok petani	90	90	327	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	327	Dinas Pertanian dan Pangan
3	3	21	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan	Persentase Hasil Produksi Pertanian yang memiliki akses pemasaran	80	80	752	85	151	90	160	95	160	100	160	100	160	100	1.543	Dinas Pertanian dan Pangan
3	3	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Benih/ Bibit ternak bermutu	70	75	396	77,50	110	80,00	125	82,50	125	85,00	150	87,50	150	87,50	1.057	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase Hijauan Pakan ternak dan Pakan bermutu	83	84		86,50		89,00		91,50		94,00		96,50		96,50		
				Persentase Hewan Ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan	65	67		71,50		76,50		81,50		86,50		91,50		91,50		
				Keberadaan Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
3	3	23	Program Kedaulatan Pangan	Luas Areal Pertanian yang terairi saluran Irigasi	90	95	4.100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	4.100	Dinas Pertanian dan Pangan
				Jumlah Desa Mandiri Benih	3	3		4		5		5		7		8		8		
				Jumlah Desa Pertanian Organik	2	2		4		6		6		10		12		12		
				Persentase Peningkatan Produksi Padi	6	6		7,5		9		10,5		12		13,5		13,5		
				Persentase Peningkatan Produksi Jagung	10	10		12		14		16		18		18		18		
				Persentase Peningkatan Produksi Kacang	8	9		10		12		14		15		16		16		
3	3	24	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	15	20	3.223	20	-	20	1.500	20	1.500	20	1.500	20	1.500	20	9.223	Dinas Pertanian dan Pangan
				Kontribusi peternakan terhadap PDRB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	26,01	27,50		28,50		29,50		30,50		31,50		32,50		32,50		
				Pertumbuhan populasi ternak Sapi (%)	5	10		10		10		10		10		10		10		
3	3	25	Program Peningkatan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	30	30	10	50	10	70	10	80	10	90	10	100	10	100	60	Dinas Pertanian dan Pangan
3	3	26	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Ragam Teknologi pengolahan Produksi Pertanian (Jenis)	2	2		4	128	6	130	6	130	6	150	6	150	6	688	Dinas Pertanian dan Pangan
3	6		URUSAN PERDAGANGAN				4.774		6.913		6.980		7.040		7.100		9.380		42.187	
3	6	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	977	100	957	100	970	100	980	100	990	100	1.000	100	5.874	Dinas Perindag
3	6	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	45	48	792	50	280	53	280	55	280	58	280	60	2.500	60	4.412	Dinas Perindag

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
3	6	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	15	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	165	Dinas Perindag
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	97	100		100		100		100		100		100				
3	6	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	70	73	80	75	20	78	20	80	20	83	20	85	20	85	180	Dinas Perindag
3	6	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	18	Dinas Perindag
3	6	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Ada	Ada	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	28	Dinas Perindag
3	6	15	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	100	50	100	240	100	240	100	240	100	240	100	240	100	1.250	Dinas Perindag
				Jumlah Pelaksanaan pemantauan harga dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten	-	1		4		4		4		4		4		21		
3	6	16	Program Peningkatan Penerapan Standarisasi Produk dan Sertifikasi.	Persentase pelaku usaha yang menerapkan mutu barang sesuai standar meteorologi legal	85	85	-	87,50	50	90,00	50	92,50	50	95,00	50	100,00	50	100	250	Dinas Perindag
3	6	17	Program peningkatan Promosi Dagang	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang yang diikuti/ dilaksanakan	-	-	-	1,00	50	1,00	50	1,00	50	1,00	50	1,00	50	5	250	Dinas Perindag

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
3	6	18	Program Peningkatan Pelayanan Peizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perdagangan dan Perusahaan	80	85	-	87,50	20	90,00	20	92,50	20	95,00	20	100,00	20	100	100	Dinas Perindag
3	6	19	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pasar Rakyat/ tradisional kondisi baik	55	55	2.814	60,0	5.266	65,0	5.320	70,0	5.370	75,0	5.420	80,0	5.470	80	29.660	Dinas Perindag
				Persentase keberadaan bangunan Pasar yang representatif pada pusat-pusat perkembangan wilayah	55	60		65		75		85		95		95		95		
				Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat yang mendapat pembinaan	35	35		40		45		50		55		60		60		
3	7		URUSAN PERINDUSTRIAN				303		455		460		1.960		1.960		710		5.848	
3	7	15	Program Pengembangan industri kecil dan menengah.	Persentase IKM yang mendapatkan Pembinaan	35	38	303	40	365	43	460	45	460	48	460	50	460	50	2.508	Dinas Perindag
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi Kerajinan Daerah yang diikuti/ dilaksanakan	1	1		1		1		1		1		1		6		
				Keberadaan Rumah Kemasan	Tdk ada	Tdk ada	-	Tdk ada	-	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
3	7	16	Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi	Persentase Pelaku IKM yang berkompoten	45	48	-	50	90	53		55		58		60		60	90	Dinas Perindag
3	7	17	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial.	Keberadaan Penetapan Rencana pembangunan Industri	Belum Ada	Belum Ada	-	Belum Ada	-	Belum Ada	-	Ada	1.500	Ada	1.500	Ada	250	Ada	3.250	Dinas Perindag
				Jumlah Sentra-sentra Industri Pengolahan berbasis Komoditi Unggulan	-	-		1		1		1		1		1		5		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Jumlah Industri Potensial Pengelolaan Hasil Pertanian dan Perikanan yang terbangun	-	-	-	-	0	1	1	1	0	2								
3	7	18	Program Peningkatan Pelayanan Peizinan Usaha Industri	Persentase Penerbitan IUI Kecil dan IUI menengah, IPUI Kecil dan menengah serta IUKI dan IPKI	30	35	-	40	10	60	10	80	10	100	10	100	10	100	50	Dinas Perindag
3	7	19	Program Pengembangan Data dan Informasi Perindustrian	Persentase Penyampaian Laporan Informasi Industri pada Sistem Informasi Industri Nasional tepat waktu	-	-	-	100	10	100	10	100	10	100	10	100	100	100	50	Dinas Perindag
3	8		URUSAN TRANSMIGRASI																	
3	8	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	478	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	478	Dinas Nakertrans
3	8	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang	20	40	577	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	577	Dinas Nakertrans
3	8	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian	90	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Nakertrans
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	95	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	8	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	60	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	Dinas Nakertrans
3	8	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	ada	ada	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ada	21	Dinas Nakertrans
3	8	06	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampikan tepat waktu	Ada	Ada	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	34	Dinas Nakertrans

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
3	8	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase keberadaan sarana dan prasarana pengembangan kawasan transmigrasi/ KTM	70	73	794	75	8.172	78	8.581	80	9.010	83	9.460	85	9.933	85	45.949	Dinas Nakertrans
3	8	16	Program Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang mendapat pembinaan	69	70	65	71	-	72	60	73	63	74	66	75	69	75	324	Dinas Nakertrans
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor yang ditindaklanjuti	80	80		80		80		80		80		80		80		
3	8	17	Program Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Keberadaan Dokumen Rencana UKL KTM Kantisa	Belum Ada	Ada	185	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	185	Dinas Nakertrans
4			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			106.579		63.357		64.779		65.314		101.943		81.476		483.448		
4	01		URUSAN ADMINISTRASI UMUM			76.217		38.517		38.828		40.031		75.632		41.875		311.100		
4	01.03		Sekretariat Daerah			37.597		21.168		21.941		22.740		43.050		23.394		169.889		
4	01.03	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	4.852	100	4.199	100	4.240	100	4.280	100	4.320	100	4.360	100	26.252	Sekretariat Daerah
4	1,1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	80	83	20.299	84	5.795	86	4.000	87	4.000	89	24.000	90	4.000	90	62.094	Sekretariat Daerah
4	1,1	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	80	100	250	100	420	100	420	100	420	100	420	100	441	100	2.371	Sekretariat Daerah
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	95	100		100		100		100		100		100		100		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	1,1	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	70	72	150	74	50	76	50	78	50	80	50	82	53	82	403	Sekretariat Daerah
4	1,1	06	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disampikan tepat waktu	Tidak Ada	Ada	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	54	Sekretariat Daerah
4	1,1	15	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Persentase produk hukum yang terkait dengan kelembagaan	100	100	225	100	216	100	301	100	300	100	300	100	300	100	1.642	Sekretariat Daerah
				Keberadaan LAKIP Pemda Muna	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Persentase SKPD yang menerapkan pelayanan sesuai SOP	-	-		20		30		40		50		60		60		
4	1,1	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100	100	3.950	100	4.213	100	4.420	100	4.640	100	4.870	100	5.110	100	27.203	Sekretariat Daerah
4	1,1	17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	Keberadaan SOP	Ada	Ada	81	Ada	81	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	162	Sekretariat Daerah
4	1,1	18	Program Peningkatan Kepastian Hukum	Presentase tindak lanjut Aparat Pengawasan dan TPTGR	100	100	1.065	100	1.100	100	1.110	100	1.120	100	1.130	100	1.140	100	6.665	Sekretariat Daerah
				Persentase Peningkatan produk hukum daerah	10	10		10		10		10		10		10		10		
				Persentase Aparat dan tokoh masyarakat desa yang mendapatkan penyuluhan Hukum	10	20		30		40		50		60		70		70		
4	1,1	19	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi dan administrasi Pembantuan	100	100	390	100	598	100	600	100	610	100	620	100	630	100	3.448	Sekretariat Daerah
4	1,1	20	Program Peningkatan Layanan pengadaan Barang dan Jasa	Persentase belanja Barang-Jasa dan belanja Modal melalui layanann ULP	90	90	-	93	302	95	300	98	300	100	300	100	300	100	1.502	Sekretariat Daerah

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	1,1	21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Keberadaan layanan Internet yang terkoneksi dalam Lingkup Pemda	Belum Ada	Ada	360	Ada	360	Ada	360	Ada	360	Ada	360	Ada	360	Ada	2.160	Sekretariat Daerah
4	1,1	22	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kehumasan	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	1.370	100	1.070	100	1.080	100	1.090	100	1.100	100	1.110	100	6.820	Sekretariat Daerah
				Keberadaan Publikasi Informasi kegiatan pemda	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
4	1,1	23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	100	100	40	100	40	-	-	-	-	-	-	-	-	100	80	Sekretariat Daerah
4	1,1	24	Program Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Perekonomian Daerah	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Bidang pengelolaan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	80	80	1.220	80	1.085	80	1.100	80	1.110	80	1.120	80	1.130	80	6.765	Sekretariat Daerah
				Jumlah BUMD yang terbentuk	-	-	-	1		1		-	-	-	-	-	-	2		
4	1,1	25	Program Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kelistrikan dan Bahan Bakar Minyak	Persentase Rasio Elektrifikasi	47	47	2.000	47	-	49	1.200	49	1.200	49	1.200	49	1.200	80	6.800	Sekretariat Daerah
				Persentase Peningkatan Konsumsi BBM	10	10		10		10		10		10		10		10		
4	1,1	26	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan	60	65	150	70	150	75	1.000	80	1.500	85	1.500	90	1.500	90	5.800	Sekretariat Daerah
				Persentase sarana sosial keagamaan pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang direhabilitasi	40	40		50		60		70		80		85		85		
4	1,1	27	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan STQ/MTQ yang diikuti/diselenggarakan	2	2	600	2	1.030	2	1.500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	12	7.630	Sekretariat Daerah
				Persentase Pantai Sosial yang terakreditasi	-	10		30		40		50		60		70		70		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	1,1	28	Program Penyusunan LPPD, Pelaksanaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Keberadaan Penyampaian LPPD yang tepat waktu	100	100	210	100	260	100	-	100	-	100	-	100	-	100	470	Sekretariat Daerah
				Keberadaan Laporan Monev Pelaksanaan DOB yang disampaikan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	4	4		4		4		4		4		4		24		
4	1,1	29	Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan	Keberadaan Penyampaian LPPD yang tepat waktu	100	100	-	100	-	100	260	100	260	100	260	100	260	100	1.040	Sekretariat Daerah
				Keberadaan Laporan Monev Pelaksanaan DOB yang disampaikan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	4	4		4		4		4		4		4		24		
4	1,1	30	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terlaksananya penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan	91	1	330	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-	100	530	Sekretariat Daerah
4	01.04		SEKRETARIAT DPRD				32.680		10.000			10.460		10.890		26.030		11.810		101.870
4	1.2.	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	4.652	100	1.764	100	1.830	100	1.850	100	1.870	100	1.890	100	13.856	Sekretariat DPRD
4	1.2.	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	40	70	11.854	70	304	70	310	70	310	70	15.000	70	310	70	28.088	Sekretariat DPRD
4	1.2.	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	95	100	265	100	55	100	60	100	60	100	60	100	60	100	560	Sekretariat DPRD
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	97	100		100		100		100		100		100		100		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	1.2.	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	60	65	238	70	83	75	80	80	80	85	80	90	80	90	641	Sekretariat DPRD
4	1.2.	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	Sekretariat DPRD
				Persentase Capaian Target Penetapan Kinerja SKPD	90	90		-	-		-	-	-	-	-	-	-			
4	1.2.	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Tidak Ada	Ada	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	15	Sekretariat DPRD
4	1.2.	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.	Persentase penetapan perda program legislasi daerah	70	73	15.184	75,0	7.744	77,5	8.130	80,0	8.540	82,5	8.970	85,0	9.420	85	57.988	Sekretariat DPRD
4	1.2.	16	Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah	Keberadaan Informasi Kegiatan DPRD yang terpublikasi	Tidak Ada	Ada	200	Ada	50	Ada	50	Ada	50	Ada	50	Ada	50	2	450	Sekretariat DPRD
4	1.2.	17	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	75	80	130	83	-	85	-	88	-	90	-	90	-	90	130	Sekretariat DPRD
4	01.05		KECAMATAN SAWERIGADI				450		600		463		491		518		527		3.049	
4	01.05	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	232	100	257	100	260	100	270	100	280	100	290	100	1.589	Kecamatan Sawerigadi
4	01.05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	47	80	185	83	50	85	53	88	55	90	58	90	448	Kecamatan Sawerigadi
4	01.05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	60	Kecamatan Sawerigadi
4	01.05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80	-	80	30	85	20	90	20	95	20	100	20	100	110	Kecamatan Sawerigadi

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	01.05	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Ada	Ada	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	4	Kecamatan Sawerigadi	
4	01.05	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	46	100	53	100	56	100	64	100	74	100	85	100	377	Kecamatan Sawerigadi
4	01.05	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Keaktifan Olahraga	100	100	81	100	45	100	47	100	50	100	52	100	55	100	330	Kecamatan Sawerigadi
4	01.05	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang terpublikasi	100	100	30	100	20	100	20	100	25	100	27	100	10	100	132	Kecamatan Sawerigadi
4	01.06		KECAMATAN BARANGKA				450		600		466		487		510		535		3.048	
4	01.06	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	210	100	214	100	220	100	220	100	220	100	220	100	1.304	Kecamatan Barangka
4	01.06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	64	80	217	83	80	85	92	88	106	90	122	90	680	Kecamatan Barangka
4	01.06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaiannya Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	9	100	9	100	9	100	10	100	10	100	10	100	57	Kecamatan Barangka
4	01.06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80	30	83	30	85	20	88	20	90	20	93	20	93	140	Kecamatan Barangka

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	01.06	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	74	100	75	100	78	100	82	100	86	100	91	100	485	Kecamatan Barangka
4	01.06	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	40	100	31	100	33	100	34	100	36	100	38	100	211	Kecamatan Barangka
4	01.06	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang terpublikasi	100	100	24	100	24	100	26	100	29	100	32	100	35	100	171	Kecamatan Barangka
4	01.07		KECAMATAN KUSAMBI				650		750		759		791		820		832		4.602	
4	01.07	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	329	100	270	100	280	100	290	100	300	100	310	100	1.779	Kecamatan Kusambi
4	01.07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	94	80	267	83	280	85	294	88	309	90	324	90	1.568	Kecamatan Kusambi
4	01.07	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	13	100	28	100	10	100	10	100	10	100	10	100	81	Kecamatan Kusambi
4	01.07	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	106	103	110	105	110	108	110	110	110	113	110	113	655	Kecamatan Kusambi
4	01.07	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	88	100	56	100	59	100	62	100	65	100	68	100	397	Kecamatan Kusambi

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB			
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta						
4	01.07	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang terpublikasi	100	100	20	100	20	100	20	100	25	100	27	100	10	100	122	Kecamatan Kusambi	
4	01.08		KECAMATAN TIWORO KEPULAUAN				850		900			1.053		933		953		974		5.662	
4	01.08	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	521	100	487	100	500	100	510	100	520	100	530	100	3.068	Kecamatan Tiworo Kepulauan	
4	01.08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	150	80	232	83	238	85	244	88	250	90	256	90	1.370	Kecamatan Tiworo Kepulauan	
4	01.08	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	30	100	150	100	10	100	10	100	10	100	210	Kecamatan Tiworo Kepulauan	
4	01.08	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80	-	83	-	85	10	88	10	90	10	93	10	93	40	Kecamatan Tiworo Kepulauan	
4	01.08	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	42	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	100	417	Kecamatan Tiworo Kepulauan	
4	01.08	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	118	100	40	100	42	100	44	100	46	100	49	100	339	Kecamatan Tiworo Kepulauan	
4	01.08	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang terpublikasi	100	100	20	100	36	100	38	100	40	100	42	100	44	100	219	Kecamatan Tiworo Kepulauan	
4	01.09		KECAMATAN LAWA				850		900			778		786		805		824		4.944	
4	01.09	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	409	100	342	100	350	100	360	100	370	100	380	100	2.211	Kecamatan Lawa	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	01.09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	184	80	258	83	100	85	100	88	100	90	100	90	842	Kecamatan Lawa
4	01.09	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	20	100	20	100	10	100	10	100	10	100	70	Kecamatan Lawa
4	01.09	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80	-	83	-	85	20	88	20	90	20	93	20	93	80	Kecamatan Lawa
4	01.09	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Keberadaan Renstra SKPD dan Perubahannya	Tidak Ada	Ada	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	6	Kecamatan Lawa
4	01.09	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	59	100	120	100	120	100	120	100	120	100	120	100	659	Kecamatan Lawa
4	01.09	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	117	100	110	100	116	100	121	100	127	100	134	100	725	Kecamatan Lawa
4	01.09	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang terpublikasi	100	100	75	100	50	100	53	100	55	100	58	100	61	100	351	Kecamatan Lawa
4	01.10		KECAMATAN TIWORO TENGAH				450		600		631		645		660		675		3.661	
4	01.10	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	286	100	285	100	290	100	300	100	310	100	320	100	1.791	Kecamatan Tiworo Tengah
4	01.10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	63	80	168	83	170	85	170	88	170	90	170	90	911	Kecamatan Tiworo Tengah
4	01.10	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	12	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	62	Kecamatan Tiworo Tengah

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	01.10	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80	-	83	-	85	20	88	20	90	20	93	20	93	80	Kecamatan Tiworo Tengah
4	01.10	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	-	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	100	275	Kecamatan Tiworo Tengah
4	01.10	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	70	100	62	100	65	100	68	100	72	100	75	100	413	Kecamatan Tiworo Tengah
4	01.10	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang	100	100	20	100	20	100	21	100	22	100	23	100	24	100	131	Kecamatan Tiworo Tengah
4	01.11		KECAMATAN TIWORO UTARA																	
4	01.11	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	211	100	211	100	220	100	220	100	220	100	220	100	1.302	Kecamatan Tiworo Utara
4	01.11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	122	80	324	83	100	85	100	88	100	90	100	90	846	Kecamatan Tiworo Utara
4	01.11	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	20	100	20	100	10	100	10	100	10	100	70	Kecamatan Tiworo Utara
4	01.11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80	-	83	-	85	20	88	20	90	20	93	20	93	80	Kecamatan Tiworo Utara
4	01.11	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	52	100	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100	177	Kecamatan Tiworo Utara
4	01.11	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	35	100	5	100	5	100	6	100	6	100	6	100	63	Kecamatan Tiworo Utara

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	01.11	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan	100	100	20	100	15	100	16	100	17	100	17	100	18	100	103	Kecamatan Tiworo Utara
4	01.12		KECAMATAN TIWORO SELATAN				450		600		458		461		464		468		2.902	
4	01.12	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	244	100	231	100	240	100	240	100	240	100	240	100	1.434	Kecamatan Tiworo Selatan
4	01.12	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	149	80	224	83	100	85	100	88	100	90	100	90	773	Kecamatan Tiworo Selatan
4	01.12	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	7	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	57	Kecamatan Tiworo Selatan
4	01.12	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80		83	50	85	20	88	20	90	20	93	20	93	130	Kecamatan Tiworo Selatan
4	01.12	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	-	100	56	100	56	100	56	100	56	100	56	100	280	Kecamatan Tiworo Selatan
4	01.12	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	51	100	10	100	12	100	13	100	15	100	17	100	118	Kecamatan Tiworo Selatan
4	01.12	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang terpublikasi	100	100	-	100	20	100	21	100	22	100	23	100	24	100	111	Kecamatan Tiworo Selatan
4	01.13		KECAMATAN MAGINTI				450		600		488		482		485		489		2.994	
4	01.13	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	228	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	1.228	Kecamatan Maginti

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	01.13	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	120	80	225	83	100	85	100	88	100	90	100	90	745	Kecamatan Maginti
4	01.13	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	16	100	-	100	20	100	10	100	10	100	10	100	66	Kecamatan Maginti
4	01.13	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80	7	83	30	85	20	88	20	90	20	93	20	93	117	Kecamatan Maginti
4	01.13	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	-	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	400	Kecamatan Maginti
4	01.13	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	60	100	30	100	32	100	33	100	35	100	36	100	226	Kecamatan Maginti
4	01.13	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang terpublikasi	100	100	20	100	35	100	37	100	39	100	41	100	43	100	213	Kecamatan Maginti
4	01.14		KECAMATAN WADAGA				450		600		468		464		470		477	2.929		
4	01.14	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	177	100	227	100	230	100	230	100	230	100	230	100	1.323	Kecamatan Wadaga
4	01.14	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	228	80	307	83	100	85	100	88	100	90	100	90	935	Kecamatan Wadaga
4	01.14	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	15	100	-	100	20	100	10	100	10	100	10	100	65	Kecamatan Wadaga
4	01.14	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80	-	83	20	85	20	88	20	90	20	93	20	93	100	Kecamatan Wadaga

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	01.14	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	-	100	25	100	50	100	55	100	61	100	67	100	257	Kecamatan Wadaga
4	01.14	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	25	100	5	100	30	100	30	100	30	100	30	100	150	Kecamatan Wadaga
4	01.09	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang terpublikasi	100	100	5	100	17	100	18	100	19	100	20	100	21	100	99	Kecamatan Wadaga
4	01.15		KECAMATAN NAPANO KUSAMBI																	
4	01.15	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	224	100	209	100	210	100	210	100	210	100	210	100	1.273	Kecamatan Napano Kusambi
4	01.15	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	141	80	268	83	100	85	100	88	100	90	100	90	808	Kecamatan Napano Kusambi
4	01.15	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	6	100	6	100	10	100	10	100	10	100	41	Kecamatan Napano Kusambi
4	01.15	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80	-	83	-	85	20	88	20	90	20	93	20	93	80	Kecamatan Napano Kusambi
4	01.15	28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kabupaten dan Kelurahan/Desa	Keberadaan Penyelenggaraan Lomba Desa	100	100	-	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	100	275	Kecamatan Napano Kusambi
4	01.15	29	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Kepemudaan	Keberadaan penyelenggaraan pembinaan PKK, STQ/MTQ dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga	100	100	65	100	23	100	24	100	25	100	26	100	28	100	191	Kecamatan Napano Kusambi

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	01.15	30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur	Keberadaan data dan Informasi Kelembagaan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang terpublikasi	100	100	20	100	40	100	42	100	44	100	46	100	49	100	241	Kecamatan Napano Kusambi
4	2		URUSAN PENGAWASAN				1.980		2.300		2.370		2.420		2.470		4.660		16.200	
4	2	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	636	100	556	100	570	100	580	100	590	100	600	100	3.532	Inspektorat
4	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	78	190	80	319	90	330	93	340	95	350	98	2.500	98	4.029	Inspektorat
4	2	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	15	100	15	100	30	100	30	100	30	100	30	100	150	Inspektorat
4	2	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	70	70	100	80	149	85	150	90	150	95	150	100	150	100	849	Inspektorat
				Persentase Aparat Pengawas yang memiliki Sertifikat Fungsional pengawasan	10	10	-	50	-	55		60		65		70		70		
4	2	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	34	Inspektorat
4	2	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Keberadaan Renstra SKPD dan Perubahannya	Tidak Ada	Ada	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	16	Inspektorat
4	2	11	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	70	75	990	80,00	1.260	85,00	1.290	90,00	1.320	95,00	1.350	100,00	1.380	100	7.590	Inspektorat
				Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	55	60		65		75		85		95		95		95		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
		Persentase SKPD yang menyusun LAKIP dengan Nilai minimal B	-	20		40		50		65		80		90		90		
		Keberadaan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan	Belum Ada	Belum Ada	-	Ada	-	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
4	3	URUSAN PERENCANAAN			9.496		4.041		4.406		4.230		4.250		6.520		32.943	
4	3	01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	700	100	922	100	930	100	940	100	950	98%	960	83	5.402	Bappeda
4	3	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20	40	670	70	270	75	250	80	250	85	250	90	2.500	90	4.190	Bappeda
4	3	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	90	100	35	100	44	100	46	100	50	100	50	100	50	100	275	Bappeda
			97	100		100		100		100		100		100		100		
4	3	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	40	50	170	60	297	70	250	80	250	90	250	100	250	100	1.467	Bappeda
4	3	15 Program Pengembangan data/ Informasi Daerah	Belum Ada	Belum Ada	848	Ada	350	Ada	350	Ada	350	Ada	350	Ada	350	Ada	2.598	Bappeda
			Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
			Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
			Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
4	3	16 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	20	50	-	60	420	65	420	70	420	75	420	80	420	80	2.100	Bappeda
4	3	17 Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar	20	50	925	60	-	65	-	70	-	75	-	80	-	80	925	Bappeda

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	3	18	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kelembagaan/ Pokja perencanaan pembangunan daerah yang diberdayakan	100	100	575	100	441	100	450	100	450	100	450	100	450	100	2.816	Bappeda
4	3	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Keberadaan Perkada RKPD, MoU KUA/ PPAS dan perubahannya	Ada	Ada	2.126	Ada	1.080	Ada	1.090	Ada	1.100	Ada	1.110	Ada	1.120	Ada	7.626	Bappeda
				Keberadaan Loporan pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan	Ada	Ada	-	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Keberadaan perda RPJPD Kab. Muna Barat	Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				Keberadaan Perda RPJMD kab. Muna Barat	Belum Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
4	3	20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase Keberadaan Masterplan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah	40	60	1.100	65	100	70	100	75	100	80	100	85	100	85	1.600	Bappeda
				Persentase rekomendasi Kelembagaan/ Pokja Pembangunan Ekonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Ekonomi Daerah	100	100		100		100		100		100		100		100		
4	3	21	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Keberadaan Masterplan Bidang Pengembangan Sosial Budaya	Tdk Ada	Tdk Ada	380	Tdk Ada	-	Ada	400	Ada	200	Ada	200	Ada	200	Ada	1.380	Bappeda

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Persentase rekomendasi Kelembagaan/ Pokja Pembangunan Sosial Budaya yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		100		100				
		Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Sosial Budaya Daerah	100	100		100		100		100		100		100		100				
4	3	22	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Persentase Keberadaan dokumen Master plan dan Studi Kelayakan Pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	35	45	1.617	50	117	55	120	60	120	65	120	70	120	70	2.214	Bappeda
			Keberadaan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Belum Ada	Belum Ada	-	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada			
			Persentase Rekomendasi Kelembagaan/ Pokja Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA yang ditindaklanjuti	100	100	-	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	100	100		100		100		100		100		100		100			
4	3	23	Program Pembangunan dan Penelitian Daerah	Persentase Rekomendasi Penelitian yang ditindaklanjuti	-	100	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	350	Bappeda
4	4		URUSAN KEUANGAN			7.915		7.700		7.765		7.515		7.595		9.725		48.214		
4	4	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	2.731	100	2.371	100	2.420	100	2.470	100	2.520	100	2.570	100	15.082	BPPKAD

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	4	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	50	53	561	55,0	817	57,5	830	60,0	500	62,5	500	65,0	2.500	65	5.707	BPPKAD
4	4	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	80	100	30	100	110	100	75	100	75	100	75	100	75	100	440	BPPKAD
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	97	100		100		100		100		100		100		100		
4	4	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	80	80	308	82,5	240	85	200	87,5	150	90	100	92,5	100	86	1.098	BPPKAD
4	4	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	21	BPPKAD
4	4	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Ada	Ada	53	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Ada	53	DPPKAD
4	4	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan SKPD dalam pengelolaan keuangan Daerah yang Baik	80	85	117	87,50	120	90,00	120	92,50	120	95,00	120	100	120	100	717	BPPKAD
4	4	28	Program Perencanaan Anggaran Daerah	Keberadaan Perda APBD dan Perubahannya ditetapkan tepat waktu	100	100	1.001	100	1.144	100	1.170	100	1.190	100	1.210	100	1.230	100	6.945	BPPKAD
4	4	29	Program Penataan Pengelolaan Aset Daerah	Cakupan SKPD dalam pengelolaan keuangan Daerah yang Baik	80	85	472	100	600	100	600	100	600	100	600	100	600	100	3.472	BPPKAD
				Keberadaan Rencana Kerja Pengadaan Aset Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Belum Ada	Belum Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
4	4	32	Program Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Perbendaharaan	100	100	648	100	733	100	750	100	770	100	790	100	810	100	4.501	BPPKAD

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	4	34	Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15	20	353	15	478	15	490	15	500	15	510	15	520	15	2.851	BPPKAD
				Persentase Capaian PAD terhadap Potensi PAD	55	55		58		68		80		85		90		90		
4	4	35	Program Pengelolaan dan Penuntasan Administrasi PBB dan BPHTB	Persentase realiasi penerimaan terhadap Potensi Obyek PBB dan BPHTB	95	95	856	95	295	95	300	95	310	95	320	95	330	95	2.411	BPPKAD
4	4	48	Program Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah	Keberadaan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK tepat waktu	100	100	765	100	792	100	810	100	830	100	850	100	870	100	4.917	BPPKAD
4	5		URUSAN KEPEGAWAIAN				3.668		3.789		4.020		4.028		4.096		6.396		25.997	
4	5	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	713	100	1.093	100	1.120	100	1.140	100	1.160	100	1.180	100	6.407	BKD dan Diklat
4	5	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	40	45	182	48	273	50	300	53	250	55	260	58	2.500	58	3.765	BKD dan Diklat
4	4	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	-	100	-	100	50	100	58	100	66	100	76	100	250	BKD dan Diklat
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	97	100		100		100		100		100		100		100		
4	5	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	65	68	306	70	-	73	100	75	100	78	100	80	100	80	706	BKD dan Diklat
4	5	15	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai Tugas pokok dan fungsinya	55	57	2.466	59,50	1.223,00	62,00	1.250	64,50	1.280	67,00	1.310	69,50	1.340	72,00	8.869	BKD dan Diklat
				Persentase CPNS yang mengikuti Tugas Belajar mendapatkan Beasiswa	-	-		100		100		100		100		100		100		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	5	16	Program Peningkatan Pelayanan Dokumen Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	85	90	-	95	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	6.000	BKD dan Diklat
4	6		URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				-		211		220	70	220		220		220		1.091	
4	6	16	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase kebutuhan Diklat Struktural dan Fungsional yang diselenggarakan	-	-	-	40	211	50	220	60	220	70	220	80	220	80	1.091	BKD dan Diklat
4	7		URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-		900		1.220		1.240		1.260		1.280		5.900	
4	7	15	Program pengkajian dan penelitian.	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan pembangunan daerah	-	100	-	100	900	100	920	100	940	100	960	100	980	100	4.700	Bappeda
				Keberadaan Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat	Belum Ada	Belum Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
4	7	16	Program pengkajian dan Pengembangan Wilayah	Persentase Kajian dan Pengembangan Wilayah	-	-	-	30,0	-	40	300	50	300	60	300	70	300	70	1.200	Bappeda
				Persentase rekomendasi (Pokja) Pengembangan Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti	-	-	-	100		100		100		100		100		100		
4	8		URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI						4.307		3.600		3.630	-	3.290		3.310		5.530	23.667
4	8	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	677	100	650	100	660	35	670	100	680	100	690	#REF!	4.027	Badan Kesbangpol

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	8	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	30	35	251	70	725	75	730	40	300	#REF!	300	#REF!	2.500	#REF!	4.806	Badan Kesbangpol
4	8	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaiannya Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	25	100	30	100	30	55	30	100	30	100	30	100	175	Badan Kesbangpol
				Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	97	100		100		100		50		100		100		100		
4	8	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	50	60	100	65	20	70	20	75	20	#REF!	20	#REF!	20	#REF!	200	Badan Kesbangpol
4	8	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	Ada	40	Badan Kesbangpol
4	8	07	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Tidak Ada	Ada	177	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Ada	177	Badan Kesbangpol
4	8	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Desa yang memiliki Kelompok/ tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Daerah	17	35	1.446	47	940	58	950	55	960	81	970	100	980	100	6.246	Badan Kesbangpol
				Jumlah pelaksanaan Forum/ Pembinaan Pencegahan Konflik Sosial	1	1		1		1		1		1		1		6		
				Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	17	23		41		52				81		100		100		
4	8	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Kegiatan Pembangunan, Pemerintahan, dan kesmasyarakatan yang aman dan tertib	100	100	312	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	2.062	Badan Kesbangpol
				Penurunan Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	80	100		100		100		100		100		100		100		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANG-GUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
		Persentase Jumlah demo yang tertangani sesuai SOP	100	100		100		100		100		100		100		100				
4	8	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat/ Ormas yang mendapatkan Pembinaan Pengembangan Wawasan kebangsaan	40	40	80	50	-	60	90	70	160	80	160	90	160	90	650	Badan Kesbangpol
4	8	18	Program Pembinaan Idiologi Bangsa	Persentase Kelompok Masyarakat/ Ormas yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Bangsa	40	40	-	50	30	60		70		80		90		90	30	Badan Kesbangpol
4	8	19	Program Pembinaan Karakter Bangsa	Persentase Kelompok Masyarakat/ Ormas yang mendapatkan Pembinaan Karakter Bangsa	40	40		50	60	60		70		80		90		90	60	Badan Kesbangpol
4	8	20	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan peningkatan wasasan kebangsaan	60	60	144	65	90	70	90	75	90	80	90	85	90	85	594	Badan Kesbangpol
4	8	21	Program pendidikan politik masyarakat.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pilpres, Pilkada, dan Pemilu Legislatif,	75	-	117	80	135	85	140	85	140	85	140	90	140	90	812	Badan Kesbangpol
				Persentase LSM, Ormas dan OKP yang mendapat pembinaan	60	65		70		75		100		100		100		100		
4	8	22	Program Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Persentase kegiatan Orang Asing, LSM, dan Ormas Lainnya yang terdeteksi mengganggu kemanaan nasional dan ditindaklanjuti	100	100	587	100	200	100	200	90	200	100	200	100	200	100	1.587	Badan Kesbangpol
4	8	23	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Keberadaan Buku Sejarah Kabupaten Muna Barat	Tidak Ada	Ada	352	Ada	370	Ada	370,00	Ada	370,00	Ada	370,00	Ada	370,00	Ada	2.202	Badan Kesbangpol

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
		Persentase unsur tokoh Agama yang mengikuti pelaksanaan Forum Umat Beragama	100	100		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Kegiatan Lembaga Adat yang dipantau	100	100		100		100		100		100		100		100			
4	9	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA																18.336,17	
4	9	01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	100	488	100	648	100	650	100	660	100	670	100	680	100	3.796	BPBD
4	9	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	40	45	650	47,5	357	50,0	360	75	360	75	360	77,5	2.500	77,5	4.587	BPBD
4	9	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase ASN yang menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai Aturan yang berlaku	90	100	10	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	160	BPBD
			Tingkat kehadiran ASN yang tepat waktu	95	100		100		100		100		100		100		100		
4	9	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	70	72,5	15	75,0	60	77,5	60	85	60	90	60	92,5	60	92,5	315	BPBD
4	9	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keberadaan LAKIP SKPD	Ada	Ada	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	35	BPBD
4	9	07 Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan tahunan yang disempatkan tepat waktu	Ada	Ada	20	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	Ada	20	BPBD

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja akhir periode RPJMD (2022)		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
4	9	15	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60	60	93	80	-	80	-	75	-	100	750	100	750	100	1.593	BPBD
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	40	40		50		60		100		70		70		70		
				Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana Kebakaran	30	30		55		60		100		100		100		100		
4	9	16	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana Alam	40	60	1.178	70	575	80	580	77,50	590	80,00	600	80	610	80	4.133	BPBD
				Persentase Desa yang memiliki kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana	-	-		23,81		35,71		100		59,52		71,43		71		
4	9	17	Program Tanggap Darurat dan Logistik	Tingkat respon kejadian bencana	80	80	63	85	253	90	260	95	260	100	260	100	260	100	1.356	BPBD
				Persentase personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten	-	-		10		20		30		40		50		50		
				Keberadaan Satgas Reaksi Cepat Tanggap Darurat Daerah	Belum Ada	Belum Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
4	9	18	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	40	40	444	45	378	50	380	55	380	60	380	65	380	65	2.341	BPBD

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan SKPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan SKPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan SKPD.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C).

Pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan merupakan indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom sesuai pembagian urusan yang dilaksanakan pemerintah daerah, yaitu: urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi.

Secara kumulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perumusan indikator kinerja utama Daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama daerah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan

rumusan indikator kinerja program SKPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama daerah dan pelayanan yang harus dilaksanakan SKPD.

Perumusan indikator kinerja utama Daerah Kabupaten Muna Barat yang bersifat dampak (*impacts*) yang merupakan indikator keberhasilan Bupati Muna Barat yang direncanakan dalam tahun 2017-2022 yang disusun berdasarkan Misi Pembangunan Daerah ditunjukkan pada tabel IX.1.

Tabel IX.1. Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022

No	FOKUS (MISI) / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kiner-ja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	62.57	64	65	66	67	68	69
2	Angka Partisipasi Murni								
	a. APM SD/Sederajat	%	93	93.82	95.00	97.50	100	100	100
	b. APM SMP/Sedetajat	%	85	86	87.00	89.50	94.50	99.50	100
3	Angka melek huruf penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun (%)	%	94	96.67	97	97.25	97.50	97.75	98.00
4	Cakupan pelayanan Kesejatan Rujukan Kelas III secara gratis	%	15	15	100	100	100	100	100
5	Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)	permil	994.3	995	995.5	996	996.5	997	997.5

No	FOKUS (MISI) / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kiner-ja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	per 1000 kelahiran								
6	Rasio Penduduk yang bekerja	%	94.93	95	95.18	95.43	95.68	96.18	96.43
7	Angka kriminalitas	per 10.000 penduduk	0.63	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
II	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas								
8	Panjang jalan yang dibangun dan dipelihara	KM	55	60	80	80	80	80	80
9	Panjang Drainase/ Kanal yang terbangun	KM	0	8	25	25	25	25	25
10	Jumlah Pelabuhan Pengumpul/ Ferry yang terbangun	Unit	0	0	1	1	1	0	0
11	Rumah tangga pengguna air bersih	%	54.46	60.00	67.50	75.00	82.70	90.40	100.00
III	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan								
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8.14	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
13	Angka Penduduk diatas Garis kemiskinan	%	84.55	86	87.5	89	90.5	92	93.5

No	FOKUS (MISI) / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kiner-ja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
14	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	6	6	7.5	7.5	10	10	10	
15	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	8	8	10	10	10	12.5	12.5	
16	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	4.5	5	7.5	7.5	7.5	10	10	
17	Peningkatan Populasi Sapi	%	10	15	15	15	15	15	15	
18	Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	%	7.5	8	10	10	10	12.5	12.5	
19	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2.5	5	7.5	7.5	7.5	10	10	
IV	Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal									
20	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	15.49	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	
21	Nilai Adipura	Indeks	-	-	65	67.5	70	72.5	75	

No	FOKUS (MISI) / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kiner-ja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
V	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.								
22	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Grade	-	Memuas-kan	Memuas-kan	Sangat Memuas-kan	Sangat Memuas-kan	Sangat Memuas-kan	Sangat Memuas-kan
23	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor	-	2800	2900	3000	3100	3200	3300
24	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Persentase Aparat yang menegakan Disiplin ASN	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 ini merupakan dokumen yang menjabarkan suatu perencanaan kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai pada masa jabatan Bupati Muna Barat Tahun 2017-2022. RPJMD dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah sesuai visi dan misi bupati terpilih yang lebih terukur dan akuntabel. RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 ini disusun dengan berpedoman pada tahapan lima tahun pertama Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025, dengan tetap memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

10.1 Pedoman Transisi

RPJMD merupakan penjabaran yang memuat visi dan misi Bupati Muna Barat Tahun 2017-2022 yang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang terukur selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Muna Barat Tahun 2022. RPJMD Tahun 2017-2022 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

Perencanaan Pembangunan untuk RKPD Tahun 2022 masa transisi berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022 ini dengan tetap mengacu kebijakan dan sasaran pokok rancangan RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025, memperhatikan Program Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2017, sampai dengan masa transisi Tahun 2022 secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh dengan tanggung jawab. Dokumen ini menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Muna Barat, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program dalam RPJMD Tahun 2017-2021 dengan sebaik-baiknya dan masa transisi tahun 2022.

2. SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022.
3. Pemerintah Kabupaten Muna Barat memiliki kewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.
4. SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Muna Barat memiliki kewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dengan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
5. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen RPJMD Tahun 2011-2016 baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi program dan wilayah prioritas baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas.
6. Konsepsi deskripsi program pembangunan daerah pada dokumen RPJMD tahun 2017-2022 ini tidak berimplikasi pada program yang dilaksanakan, akan tetapi lebih kepada perumusan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dan logika alur berfikir berfungsinya sebuah program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan sasaran pembangunan.
7. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2017-2022 dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan melakukan harmonisasi program dan kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan. Bappeda Kabupaten Muna Barat juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja yang ditetapkan pada akhir tahun RPJMD.
8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali (revisi) lebih lanjut dalam proses perubahan RPJMD dan dikonsultasikan/ dibahas bersama DPRD Kabupaten Muna Barat untuk mendapatkan persetujuan.

RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen pembangunan daerah yang harus dipedomani bersama oleh multi pihak agar konsistensi, integrasi, sinergisitas dan sinkronisasi (KISS) pembangunan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang berkesinambungan untuk meraih ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS”***

Laworo, Desember 2017
BUPATI MUNA BARAT,

LA ODE M. RAJIUN TUMADA